



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2030;

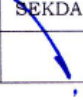
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerinthaan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
8. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.
9. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
 13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 15. Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB.
 16. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.

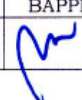
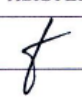
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sasaran Daerah periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 dalam Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan RAD TPB sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagia tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RAD TPB bertujuan untuk:

- a. mencapai sasaran daerah dalam Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selaras dengan sasaran TPB melalui koordinasi program dan kegiatan multi pihak baik dengan kementerian/lembaga, ormas, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha; dan
- b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, ormas, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pencapaian TPB.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 4

Sasaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat daerah/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 5

- (1) RAD TPB disusun dalam bentuk dokumen.
- (2) Sistematika dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Pencapaian Dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
 - c. BAB III : Target Dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
 - d. BAB IV : Kebijakan Dan Perkuatan Lingkungan Yang Mendukung; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (3) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

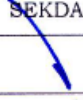
Pasal 6

Dalam pelaksanaan TPB, Gubernur membentuk Tim Koordinasi yang bertugas :

- a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Kelompok Kerja; dan
 - d. Tim Sekretariat TPB/SDGs.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Tim Koordinasi TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Sekretariat SDGs Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

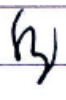
Kepala Perangkat Daerah, Ormas, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB kepada Ketua Tim Koordinasi RAD TPB/SDGs yaitu Sekretaris Daerah sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) RAD TPBB/SDGs dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

menghasilkan rekomendasi perubahan RAD TPB.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Maret 2026
GUBERNUR GORONTALO,

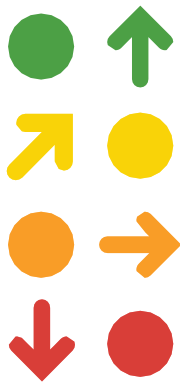


GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM



RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
Provinsi Gorontalo 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung dan melaksanakan agenda pembangunan nasional serta komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga tahun 2030.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Gorontalo 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 sebagai instrumen strategis dalam mengoperasionalkan agenda SDGs di tingkat daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan semangat gotong royong. Pelaksanaan SDGs di Gorontalo diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa meninggalkan siapa pun (*no one left behind*).

RAD SDGs Provinsi Gorontalo 2025–2029 disusun melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, serta kelompok masyarakat. Pendekatan kemitraan multipihak ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas aktor dalam mendukung pencapaian 17 Tujuan SDGs di Provinsi Gorontalo secara efektif dan berkelanjutan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap agar dokumen RAD SDGs ini dapat menjadi pedoman bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semoga upaya bersama ini menjadi ikhtiar terbaik dalam mewujudkan Gorontalo yang maju, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional dan masa depan Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

RPJMD: Implementasi SDGs di Tingkat Daerah	I-1
Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	I-4
Integrasi SDGs ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	I-4
Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pelaksana SDGs	I-5
Penguatan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan	I-5
Penguatan Data, Pemantauan, dan Evaluasi	I-5
Arah dan Harapan ke Depan	I-6
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	I-6
Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	I-7
Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	I-7

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Di manapun	II-1
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II-6
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II-18
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	II-30
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	II-36
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	II-40
2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua	II-46
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Layak untuk Semua	II-51
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	II-57
2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	II-65
2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	II-72
2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	II-79
2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	II-83
2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	II-89

2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	II-92
2.16	Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	II-96
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	II-106
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs		
3.1	Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	III-1
3.2	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-4
3.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-7
3.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-10
3.5	Tujuan 5 Kesenjangan Gender	III-12
3.6	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	III-14
3.7	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-16
3.8	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-18
3.9	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	III-22
3.10	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	III-24
3.11	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	III-27
3.12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-30
3.13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-32
3.14	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-35
3.15	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-37
3.16	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-39
3.17	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-42
BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG.		
4.1	Partisipasi NSA	IV-1
4.2	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	IV-2
BAB V PENUTUP		V

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	II-2
Grafik 2.2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	II-3
Grafik 2.3	Proporsi Penduduk/Rumah Tangga dengan Akses Pelayanan Dasar	II-4
Grafik 2.4	Proporsi status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati milik sendiri dan kontrak/sewa Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2024	II-4
Grafik 2.5	Trend PoU Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-5
Grafik 2.6	Capaian PoU Kabupaten Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-7
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima Tahun/balita Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-8
Grafik 2.8	Prevalensi Balita Stunting menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2024	II-9
Grafik 2.9	Perkembangan Angka Prevalensi Wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-10
Grafik 2.10	Prevalensi Balita Stunting dan Wasting menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2024	II-10
Grafik 2.11	Perkembangan Capaian Skor PPH Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-11
Grafik 2.12	Rata-rata Konsumsi per Jenis Pangan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024	II-12
Grafik 2.13	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023	II-12
Grafik 2.14	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo 2020-2024	II-13
Grafik 2.15	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023	II-15
Grafik 2.16	Wilayah dengan harga Beras tertinggi dan Perkembangan Harga Beras Gorontalo Kualitas Super I di Pasar Tradisional Periode April 2024	II-15
Grafik 2.17	Angka Kematian Ibu / 100.000 KH Provinsi Gorontalo Tahun 2020 - 2024	II-17
Grafik 2.18	Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Provinsi Gorontalo Tahun 2024	II-19
Grafik 2.19	Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 - 2024	II-20
Grafik 2.20	Tren Capaian Indikator Angka Kematian Balita (AKABa) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024	II-20

Grafik 2.21	Angka Kematian Bayi (AKB) 0-11 Bulan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	II-20
Grafik 2.22	Angka Kematian Neonatal (AKN) / 1000 KH Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-21
Grafik 2.23	Jumlah Penderita HIV Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2024	II-22
Grafik 2.24	Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2024	II-23
Grafik 2.25	Capaian Penemuan TB Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2024	II-23
Grafik 2.26	Proporsi Penderita TB di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-23
Grafik 2.27	Perbandingan Jumlah Kasus Positif Malaria Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-24
Grafik 2.28	Perkembangan Persentase Desa / Kelurahan dengan Pilar STBM Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-25
Grafik 2.29	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024	II-25
Grafik 2.30	Capaian Kepesertaan JKN Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2024	II-26
Grafik 2.31	Jumlah Kabupaten/kota Yang Mencapai Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2020-2024	II-26
Grafik 2.32	Kondisi Capaian Reakreditasi Puskesmas Provinsi Gorontalo Tahun 2024	II-27
Grafik 2.33	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Pada Setiap Jenjang Pendidikan	II-31
Grafik 2.34	Anak Tidak Sekolah Pada Jenjang Pendidikan	II-31
Grafik 2.35	Tingkat Partisipasi Pembelajaran Tahun 2020 – 2024	II-32
Grafik 2.36	Proporsi Remaja (Usia 15 – 24 tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	II-32
Grafik 2.37	Persentase Guru Yang memenuhi Kualifikasi Sesuai dengan Standar Nasional Menurut Jenjang dan Jenis Pendidikan	II-33
Grafik 2.38	Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Gorontalo 2020 – 2024	II-36
Grafik 2.39	Proporsi Perempuan Umur 20 – 24 Tahun Yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun	II-37
Grafik 2.40	Persentase Keterwakilan di Legislatif 2020-2024/DPRD Provinsi Gorontalo	II-37
Grafik 2.41	Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Managerial	II-38
Grafik 2.42	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	II-38
Grafik 2.43	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola secara Aman di Provinsi Gorontalo (2021-2024)	II-40
Grafik 2.44	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Minum di Provinsi Gorontalo, 2023	II-41
Grafik 2.45	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II-41
Grafik 2.46	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Gorontalo (2021-2024)	II-42
Grafik 2.47	Persentase Rumah Tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka (2021-2024)	II-42
Grafik 2.48	Indeks Kualitas Air di Provinsi Gorontalo (2021-2024)	II-43

Grafik 2.49	Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Gorontalo (2021-2024)	II-44
Grafik 2.50	Rasio Elektrifikasi	II-47
Grafik 2.51	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	II-47
Grafik 2.52	Bauran Energi Terbaru	II-48
Grafik 2.53	PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Provinsi Gorontalo	II-52
Grafik 2.54	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo	II-52
Grafik 2.55	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin 2020 - 2024	II-53
Grafik 2.56	Upah Rata - Rata Per Jam Pekerja Provinsi Gorontalo	II-53
Grafik 2.57	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo (2020-2024)	II-56
Grafik 2.58	Persentase Setengah Pengangguran Provinsi Gorontalo (%)	II-55
Grafik 2.59	Persentase Usia Muda 15-24 tahun yang sedang Tidak Sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan 2020-2024 (NEET)	II-55
Grafik 2.60	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Provinsi Gorontalo 2020-2024 (Persen)	II-55
Grafik 2.61	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-61
Grafik 2.62	Mantap Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo	II-58
Grafik 2.63	Penumpang Transportasi Laut	II-59
Grafik 2.64	Bongkar Muat Barang pada Transportasi Laut	II-59
Grafik 2.65	Penumpang Pada Transportasi Udara	II-60
Grafik 2.66	Bongkar Muat Barang Pada Transportasi Udara	II-61
Grafik 2.67	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB Per Kapita	II-67
Grafik 2.68	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	II-62
Grafik 2.69	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	II-63
Grafik 2.70	Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional Periode Maret 2020 - September 2024	II-65
Grafik 2.71	Gini Rasio Provinsi se-Sulawesi tahun 2020 - 2024	II-66
Grafik 2.72	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II-66
Grafik 2.73	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	II-67
Grafik 2.74	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Dan Status Disabilitas	II-67
Grafik 2.75	Perkembangan Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo 2021-2024	II-68
Grafik 2.76	Status IDM Provinsi Gorontalo Per Wilayah Tahun 2024	II-68
Grafik 2.77	Proporsi Penduduk Yang Hidup di bawah 50 persen dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin dan Penyandang Disabilitas	II-69
Grafik 2.78	Indeks Aspek Kebebasan	II-70
Grafik 2.79	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Provinsi Gorontalo 2021-2024	II-72
Grafik 2.80	Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Tahun 2024	II-73
Grafik 2.81	Indeks Kualitas Udara Provinsi Tahun 2021-2024	II-76
Grafik 2.82	Persentase Sisa Makanan di Provinsi Gorontalo (2023)	II-80
Grafik 2.83	Persentase Sisa Makanan di Provinsi Gorontalo (2023)	II-80
Grafik 2.84	Timbulan Sampah yang Didaur Ulang (2023 dan 2024)	II-81

Grafik 2.85	Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Tahun 2024	II-83
Grafik 2.86	Penyelarasan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Gorontalo	II-85
Grafik 2.8	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam (Desa) di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dan 2024	II-86
Grafik 2.88	Target dan Capaian Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperluas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan (2021-2025)	II-89
Grafik 2.89	Target Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperluas Kawasan Konservasi Perairan (2023 - 2026)	II-90
Grafik 2.90	Indeks Kualitas Lingkungan di Provinsi Gorontalo (2021-2024)	II-93
Grafik 2.91	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo (2020-2024)	II-94
Grafik 2.92	Tren Proporsi Rumah Tangga dengan Anak yang Mengalami Kekerasan Fisik/Psikologis 2020-2023	II-97
Grafik 2.93	Pelaporan Korban Kekerasan kepada Polisi 2020-2023	II-97
Grafik 2.94	Trend Kejahatan yang Dilaporkan per Kepolisian Resort Provinsi Gorontalo (2020-2024)	II-99
Grafik 2.95	SAKIP Skor $\geq$ B Provinsi Gorontalo 2020 - 2024	II-100
Grafik 2.96	Tren Capaian Indikator Pencatatan Kelahiran Provinsi Gorontalo	II-102
Grafik 2.97	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Provinsi Gorontalo	II-106
Grafik 2.98	Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	II-107
Grafik 2.99	Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	II-108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo	II-2
Tabel 2.2	Aspek Penyebab Stunting	II-9
Tabel 2.3	Rekapan Luas Pertanian Pangan Berkelanjutan Kab. Kota Se Provinsi Gorontalo	
Tabel 2.4	Satuan dan Lembaga Pendidikan di Setiap Jenjang	II-33
Tabel 2.5	Neraca Pendidikan Daerah 2019 - 2024	II-34
Tabel 2.6	Penerima Program PIP 2019 - 2023	II-34
Tabel 2.7	Indikator Pendidikan terkait Prioritas Provinsi	II-34
Tabel 2.8	Persentase Capaian Indikator Rapor Mutu Pendidikan 2024	II-35
Tabel 2.9	Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, Kualitas Air Laut, dan IKL Provinsi Gorontalo, 2021-2024	II-45
Tabel 2.10	Jumlah Korban Meninggal dan Hilang, Luka-Luka serta Mengungsi Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.11	Nilai Indeks Risiko Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2024	II-75
Tabel 2.12	Persentase Sampah Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota yang Terkelola Periode 2021-2024	II-76
Tabel 2.13	Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang (2023 dan 2024)	II-82
Tabel 2.14	Jumlah Korban Meninggal dan Hilang, Luka-Luka serta Mengungsi Tahun 2020-2024	II-84
Tabel 2.15	Nilai Indeks Risiko Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2024	II-85
Tabel 2.16	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2024	II-86
Tabel 2.17	Luas Kawasan Hutan per Kabupaten di Provinsi Gorontalo s/d Tahun 2023	II-94
Tabel 2.18	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2024	II-98

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
BLP3G	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo
CAT	Cekungan Air Tanah
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DDDTLH	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
DO	Drop Out
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
GRK	Gas Rumah Kaca
HLS	Harapan Lama Sekolah
HP	Hutan Produksi
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IDM	Indeks Desa Membangun
IDSD	Indeks Daya Saing Daerah
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKP	Indeks Ketahanan Pangan
IKD	Indikator Kinerja Daerah
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKK	Indikator Kinerja Kunci
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KHP	Kawasan Hutan Produksi
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
KPH	Kesatuan Pemangkuan Hutan
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KP2B	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPL	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
KSN	Kawasan Strategis Nasional
KSP	Kawasan Strategis Provinsi
NSPK	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

NTE	Nilai Transaksi Ekonomi
NTP	Nilai Tukar Petani
NTN	Nilai Tukar Nelayan
NTN-Pi	Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya
NTUP	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
P3KE	Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PSU	Prasarana, Sarana dan Utilitas
PoU	Prevalence of Undernourishment
PUK	Penduduk Usia Kerja
RPD	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
Renstra	Rencana Strategis
RIPJPID	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah
RLS	Rata - rata Lama Sekolah
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDGs	Sustainable Development Goals
Silpa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TDN	Transformasi Digital Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UEP	Usaha Ekonomi Produktif
UHC	Universal Health Coverage
UHH	Usia Harapan Hidup
YoY	Year on Year
WPP	Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

BAB I

PENDAHULUAN



Anak – anak sedang bermain di tepi laut di Marisa Kabupaten Pohuwato
photo taken by @wiwik_ismail



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Page | I-1

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari upaya nasional dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang telah menjadi komitmen global hingga tahun 2030. SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada manusia, kesejahteraan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, dengan prinsip dasar *“No One Left Behind”* atau bisa diartikan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam pembangunan. Orientasi pembangunan SDGs dimaksud, dalam konteks daerah perlu dijabarkan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga arah pembangunan daerah dapat berkontribusi terhadap target pembangunan SDGs secara berkelanjutan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program strategis kepala daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, RPJMD berfungsi sebagai instrumen utama lokalisasi SDGs di tingkat daerah. Artinya, setiap tujuan dan sasaran SDGs diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan isu strategis wilayah. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap agenda pembangunan daerah mendukung pencapaian target SDGs secara terukur, terarah, dan berkelanjutan. Keselarasan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan global.

Keselarasan pembangunan antara SDGs dan RPJMD menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses ini dikenal dengan istilah *mainstreaming* SDGs dalam perencanaan daerah, yaitu mengintegrasikan tujuan, sasaran, dan indikator SDGs ke dalam kerangka pembangunan daerah secara sistematis,

1. RPJMD: Implementasi SDGs di Tingkat Daerah

RPJMD merupakan instrumen penting dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, sekaligus menjembatani strategi nasional dalam RPJMN dengan kebutuhan dan potensi lokal. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki karakteristik unik, sehingga kebijakan dalam RPJMD harus kontekstual dan responsif terhadap tantangan lokal.

Di wilayah perkotaan, RPJMD dapat menekankan peningkatan konektivitas, transportasi publik, dan digitalisasi layanan. Sementara di wilayah pedesaan dan kepulauan, fokus diarahkan pada ketahanan pangan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi SDGs di daerah juga memerlukan dukungan pada sektor UMKM,

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Lebih dari itu, RPJMD berperan penting dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Strategi mitigasi dan adaptasi, konservasi sumber daya air, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi elemen kunci. Oleh karena itu, RPJMD bukan hanya sekedar dokumen perencanaan, tetapi juga alat transformasi menuju pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs: tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

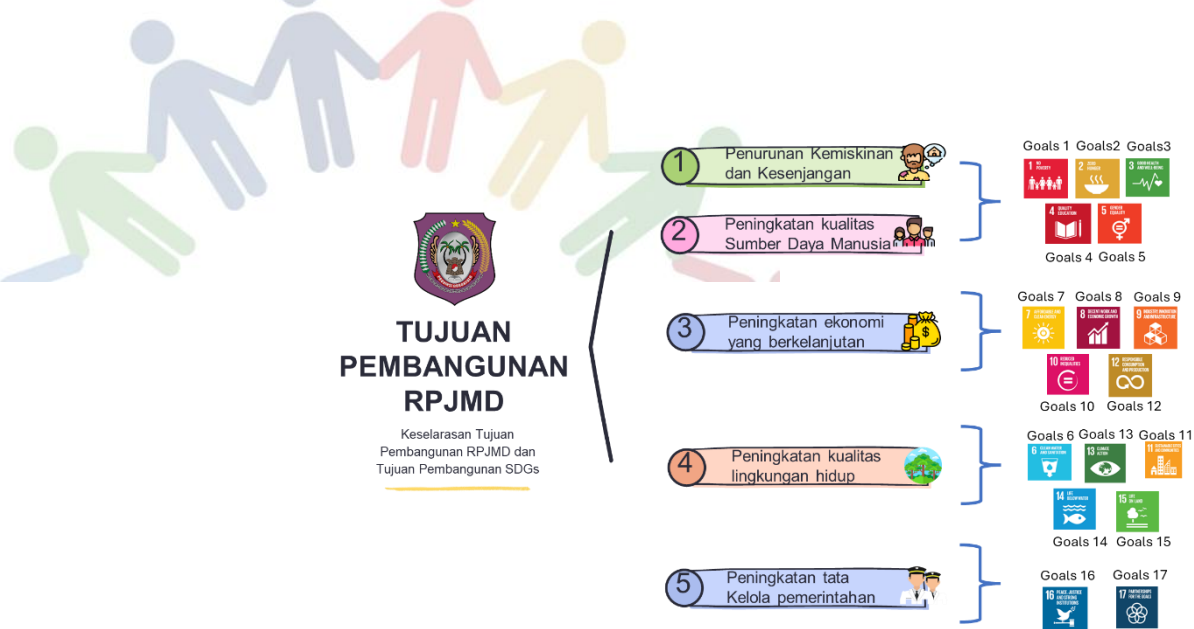


Gambar 1: Visi, Misi, Program Unggulan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

Sumber: RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029

Pembangunan di Provinsi Gorontalo diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan SDGs melalui tujuan dan sasaran pembangunan yang tercermin dalam RPJMD. Hubungan tersebut bersifat saling menguatkan, di mana tujuan SDGs menjadi acuan substantif dan normatif bagi arah pembangunan daerah sehingga dalam implementasinya, RPJMD berperan sebagai instrumen yang mengoperasionalkan dan menselaraskan tujuan-tujuan SDGs dalam konteks lokal. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui integrasi substansi, indikator, dan arah kebijakan pembangunan daerah agar mendukung pencapaian target SDGs di tingkat lokal. Proses integrasi ini dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Integrasi Kebijakan (Policy Alignment) – memastikan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan dalam RPJMD mendukung tujuan-tujuan SDGs.
2. Integrasi Indikator (Indicator Alignment) – mengaitkan indikator kinerja utama daerah dengan indikator SDGs yang relevan untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan.
3. Integrasi Implementasi (Implementation Alignment) – memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs.



Gambar 2 : Keselarasan dan Sinergi dari TPB/SDGs terhadap RPJMD

Secara substansial, keselarasan pembangunan antara **SDGs dan RPJMD Provinsi Gorontalo** dapat dijelaskan melalui lima pilar utama pembangunan berkelanjutan berikut:

1. Pilar Sosial

RPJMD Provinsi Gorontalo menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini sejalan dengan:

- **SDGs 1:** Tanpa Kemiskinan — melalui program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- **SDGs 2:** Tanpa Kelaparan — melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan gizi, dan pemberdayaan petani.
- **SDGs 3:** Kehidupan Sehat dan Sejahtera — melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan.
- **SDGs 4:** Pendidikan Berkualitas — melalui pemerataan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- **SDGs 5:** Kesetaraan Gender — melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

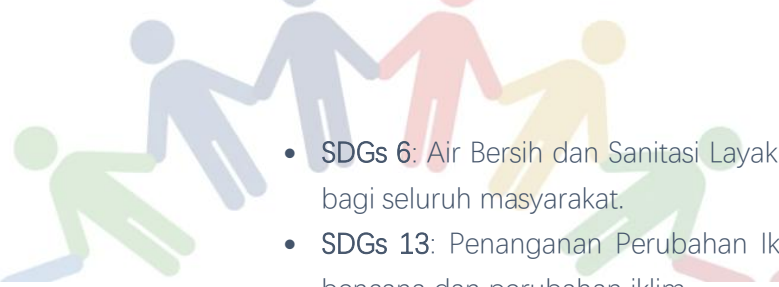
2. Pilar Ekonomi

RPJMD Provinsi Gorontalo berfokus pada peningkatan perekonomian yang berkelanjutan, selaras dengan:

- **SDGs 7:** Energi Bersih dan Terjangkau — memperluas akses energi dan mengembangkan energi terbarukan.
- **SDGs 8:** Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi — mendorong investasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.
- **SDGs 9:** Industri, Inovasi, dan Infrastruktur — meningkatkan konektivitas wilayah, digitalisasi, dan industrialisasi berbasis potensi lokal.
- **SDGs 10:** Berkurangnya Ketimpangan — memperkuat pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- **SDGs 12:** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab — mendorong efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah berkelanjutan.

3. Pilar Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan di Gorontalo menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan:



- **SDGs 6:** Air Bersih dan Sanitasi Layak — meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman bagi seluruh masyarakat.
- **SDGs 13:** Penanganan Perubahan Iklim — melalui mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
- **SDGs 14:** Ekosistem Lautan — melindungi ekosistem pesisir dan laut dari pencemaran serta eksploitasi berlebihan.
- **SDGs 15:** Ekosistem Daratan — menjaga hutan, keanekaragaman hayati, dan lahan kritis.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

RPJMD Provinsi Gorontalo mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas, selaras dengan:

- **SDGs 16:** Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh — memperkuat sistem birokrasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintahan.

5. Pilar Kemitraan

Keselarasan pembangunan juga diwujudkan melalui kolaborasi multi pihak (*multi-stakeholder partnership*) antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil, sejalan dengan:

- **SDGs 17:** Kemitraan untuk Mencapai Tujuan — memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat daerah.

2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan melaksanakan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)** sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang secara konsisten menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan daerah. Sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya yang besar, Provinsi Gorontalo menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan utama dalam pembangunan daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui integrasi prinsip dan tujuan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kebijakan sektoral, serta program dan kegiatan lintas perangkat daerah

3. Integrasi SDGs ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memastikan bahwa arah pembangunan daerah dalam **RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2030** selaras dengan 17 Tujuan SDGs. Proses integrasi dilakukan dengan:

- Mengaitkan tujuan dan sasaran SDGs dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD;
- Menetapkan indikator kinerja daerah yang mendukung capaian SDGs;
- Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dengan target SDGs;
- Memastikan prinsip *No One Left Behind* menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, setiap agenda pembangunan di Gorontalo tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan secara berimbang.



4. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pelaksana SDGs

Sebagai wujud implementasi Perpres No. 59 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membentuk **Tim Koordinasi Daerah SDGs** yang berfungsi untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi. Struktur kelembagaan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, media, serta kelompok masyarakat, dengan prinsip **kolaborasi multipihak (multi-stakeholder partnership)**.

Melalui mekanisme ini, pelaksanaan SDGs di Gorontalo dilakukan secara inklusif dan partisipatif, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Page | 1-5

5. Penguatan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan melalui:

- Penganggaran program SDGs dalam **APBD** secara terencana dan terukur;
- Mendorong kolaborasi pendanaan melalui **skema kemitraan pemerintah-swasta (Public-Private Partnership/PPP)**;
- Mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif, seperti **Corporate Social Responsibility (CSR)**, dana filantropi, dan pembiayaan hijau (*green financing*).

Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan program SDGs tanpa bergantung hanya pada anggaran pemerintah.

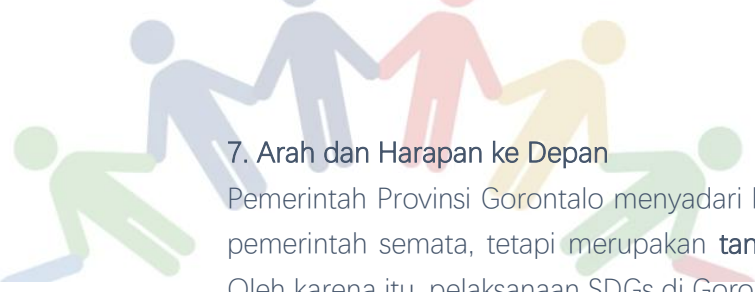
6. Penguatan Data, Pemantauan, dan Evaluasi

Salah satu pilar utama keberhasilan SDGs adalah tersedianya **data dan sistem pemantauan yang akurat dan terintegrasi**. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya memperkuat **Sistem Informasi Data SDGs Daerah**, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perangkat daerah terkait untuk memantau capaian indikator SDGs secara berkala. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam **evaluasi kinerja pembangunan daerah**, sekaligus bahan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya.

5. Komitmen terhadap Prinsip Inklusivitas dan Keberlanjutan

Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjadikan SDGs sebagai **panduan moral dan operasional pembangunan daerah** yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan gender, pemberdayaan kelompok rentan, dan pelestarian lingkungan. Prinsip inklusivitas dijalankan dengan memastikan bahwa **setiap kelompok masyarakat—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan masyarakat adat—memiliki akses yang sama terhadap hasil pembangunan**.

Selain itu, prinsip keberlanjutan diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, agar pembangunan hari ini tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.



7. Arah dan Harapan ke Depan

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa pencapaian SDGs bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan **tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan**. Oleh karena itu, pelaksanaan SDGs di Gorontalo akan terus diarahkan pada:

- Peningkatan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah;
- Penguatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan;
- Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Dengan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, serta dukungan dari seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Gorontalo bertekad menjadikan SDGs sebagai **arah pembangunan daerah menuju Gorontalo yang maju, inklusif, dan berkelanjutan untuk semua**.

8. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip pelaksanaan **Sustainable Development Goals (SDGs)** dirancang untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang holistik, inklusif, dan berkeadilan.

1. Universal

SDGs berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun berkembang, tanpa terkecuali. Tidak ada negara yang dikecualikan dari tanggung jawab untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Setiap negara menyesuaikan target SDGs dengan konteks nasional, tetapi tetap berfokus pada tujuan global, seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan. Contoh: Negara maju seperti Jepang fokus pada inovasi teknologi hijau, sementara negara berkembang seperti Indonesia menekankan pengentasan kemiskinan dan akses pendidikan.

2. Terintegrasi Antar Dimensi

SDGs mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan dirancang untuk menciptakan sinergi antar dimensi, misalnya, pembangunan infrastruktur (ekonomi) harus ramah lingkungan dan mendukung pemerataan sosial. Contoh: Program energi terbarukan tidak hanya mendukung lingkungan (SDG 13), tetapi juga menciptakan lapangan kerja (SDG 8) dan meningkatkan akses energi bagi komunitas terpencil (SDG 7).

3. Inklusif

Pelaksanaan SDGs melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok memastikan kebijakan relevan dan mencerminkan kebutuhan beragam masyarakat. Contoh: Konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan kota untuk memastikan suara kelompok marginal seperti penyandang disabilitas didengar.

4. No One Left Behind

Tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kebijakan difokuskan pada pemberdayaan kelompok marginal, pemerataan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), dan pengurangan ketimpangan.



Contoh: Program bantuan sosial untuk keluarga miskin atau penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi anak-anak di daerah terpencil.

5. Sarana Pelaksanaan SDGs

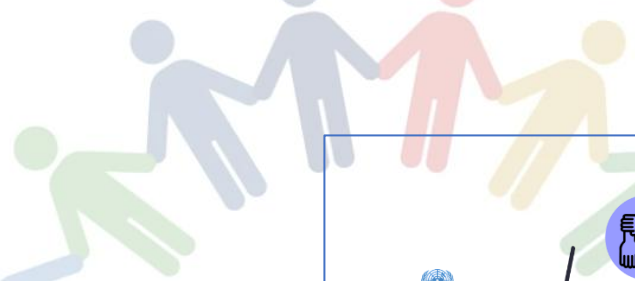
Sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*) diatur dalam **SDG 17** (Kemitraan untuk Tujuan) dan mencakup: (a) Keuangan: Mobilisasi sumber daya keuangan domestik dan internasional, termasuk pajak, bantuan pembangunan, dan investasi swasta; (b) Teknologi: Transfer teknologi, inovasi, dan digitalisasi untuk mendukung pencapaian SDGs, misalnya teknologi pertanian ramah lingkungan; (c) Kapasitas: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan institusi; (d) Perdagangan: Sistem perdagangan global yang adil untuk mendukung negara berkembang; (e) Kemitraan: Kolaborasi antar negara, sektor swasta, akademisi, filantropi, dan masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya; (f) Data dan Pemantauan: Pengumpulan data yang akurat dan sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan SDGs.

9. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025-2030 merupakan amanat Perpres 111 Tahun 2022 mengikuti periode RPJMD 2025-2029 dan akhir pelaksanaan SDGs tahun 2030. Perpres tersebut juga mengamanatkan penyusunan RAD TPB/SDGs dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah; pelaku usaha dan filantropi; akademisi dan pakar; serta organisasi kemasyarakatan dan media. Penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator Tim Koordinasi Nasional (TKN) TPB/SDGs. Secara umum untuk memastikan keterlibatan semua pihak dilakukan 4 klaster kegiatan penyusunan RAD TPB/SDGs, yaitu sidang pleno, pengisian matriks, penyusunan program dan kegiatan, serta konsultasi publik. Sidang pleno melibatkan perwakilan seluruh pihak dilakukan saat awal penyusunan dan saat konsolidasi hasil proses penyusunan.

Pengisian matriks terdiri dari pengisian matriks indikator dan target capaiannya (Matriks 1), serta pengisian matriks program dan kegiatan pendukung untuk mencapai target (Matriks 2a, 3, 4). Pengisian Matriks 1 terutama mengacu pada berbagai rencana pembangunan seperti RPJMD 2025-2029, Roadmap SDGs 2023-2030, RKPD, Renstra OPD, serta kesepakatan dan persetujuan masing-masing koordinator Sub-Kelompok Kerja (Sub-Pokja). Sementara pengisian matriks program dan kegiatan (Matriks 2a, 3, 4) dilakukan oleh masing-masing platform dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk pengisian Matriks non-pemerintah dilakukan juga berdasarkan klaster atau kelompok melalui mekanisme pengumpulan dan konsolidasi matriks melalui koordinator yang telah ditetapkan.

Matriks program dan kegiatan ini akan mendukung analisis dan perumusan kebijakan dan strategi pencapaian TPB/SDGs yang dituangkan dalam narasi RADTPB/SDGs. Guna memperkuat dan memperluas keterlibatan para pihak dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs dilakukan konsultasi publik (secara hybrid), baik pada saat konsolidasi awal maupun saat finalisasi draft RAD TPB/SDGs. Selanjutnya jika draft RAD TPB/SDGs telah disepakati bersama, maka akan dilakukan penetapan oleh Gubernur sekaligus dilakukan diseminasinya. Berbagai tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs ini dapat dilihat dalam berikut:



Gambar 3: Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs

10. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025–2030 disusun secara sistematis dalam lima bab utama dan dilengkapi lampiran yang merinci program dan strategi nonpemerintah. Secara rinci, penjelasan Bab RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang menjelaskan keterkaitan antara SDGs dan RPJMD 2025–2029, komitmen daerah terhadap SDGs, prinsip pelaksanaan, serta metodologi penyusunan dokumen.

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Menyajikan analisis kondisi pencapaian dan tantangan dari 17 Goals SDGs secara komprehensif.

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Merinci target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs melalui Matriks 1 yang menjabarkan rencana capaian per target.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

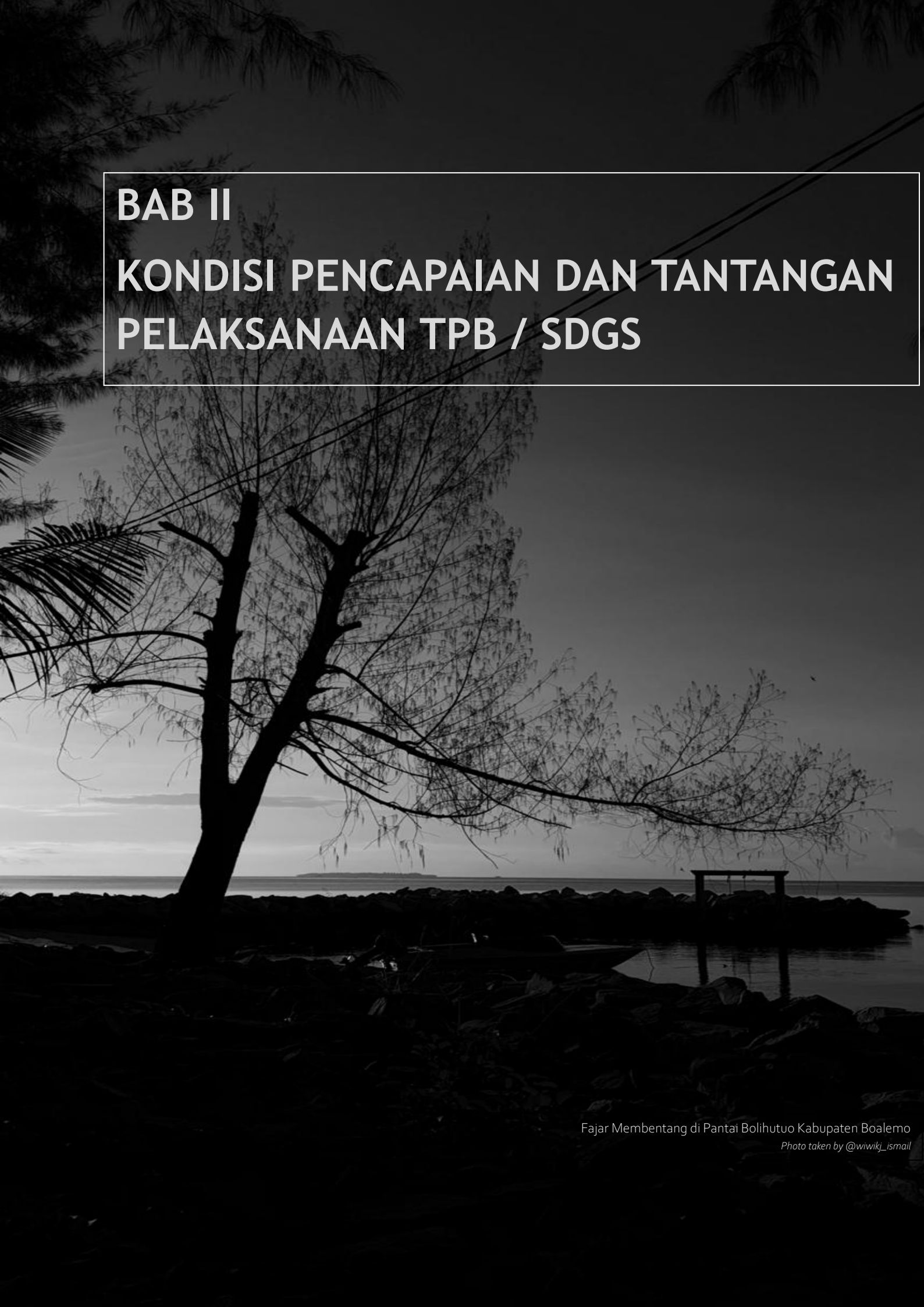
Menguraikan penguatan ekosistem pendukung, mencakup partisipasi aktor non-negara, interlinkages dan roadmap, pendanaan, peran pemda, serta kerja sama internasional.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup.

LAMPIRAN

Mencakup Matriks 2A berisi program/kegiatan pemerintah, dan Matriks 3 strategi dan rencana aksi dari pelaku non-pemerintah seperti LSM, filantropi, akademisi, dan dunia usaha. Sistematika ini memastikan bahwa RAD SDGs menjadi dokumen yang komprehensif, terintegrasi dengan perencanaan nasional, dan inklusif terhadap partisipasi multipihak.



BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB / SDGS

Fajar Membentang di Pantai Bolihutuo Kabupaten Boalemo

Photo taken by @wiwikj_ismail



BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun



Page III- 1

A. PENGANTAR

Mengapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan Penuntasan Kemiskinan sebagai Tujuan Global pertama? Sebab Kemiskinan adalah akar dari ketimpangan dan keterbelakangan, menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, air bersih, pangan dan kebutuhan dasar lainnya. menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, air bersih, dan pangan. Menempatkan Penuntasan Kemiskinan di tujuan pertama adalah bentuk komitmen global untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan.

B. Capaian

1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis Kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Perkembangan tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Pada awal periode TPB/SDGs tahun 2015, tingkat kemiskinan di Gorontalo mencapai sekitar 18,16 persen atau sekitar 206.513 ribu jiwa. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja produktif, rendahnya kapasitas ekonomi rumah tangga, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap fluktuasi harga dan iklim.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo semakin membaik selama periode 2020 hingga Maret 2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,22 persen, kemudian meningkat menjadi 15,61 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan dampak sosial-ekonomi pandemi yang masih kuat, terutama terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal yang terdampak pembatasan aktivitas ekonomi. Tahun 2022, kondisi ekonomi daerah mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan berbagai sektor, terutama perdagangan, pertanian, dan jasa. Persentase penduduk miskin mulai menurun dari 15,42 persen pada 2022 menjadi 14,57 persen pada tahun 2024, menandakan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan efektivitas berbagai program perlindungan sosial pemerintah dan Maret 2025, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo turun kembali menjadi 13,24 persen, atau menurun sekitar 2,37 poin persentase dibandingkan tahun 2021.

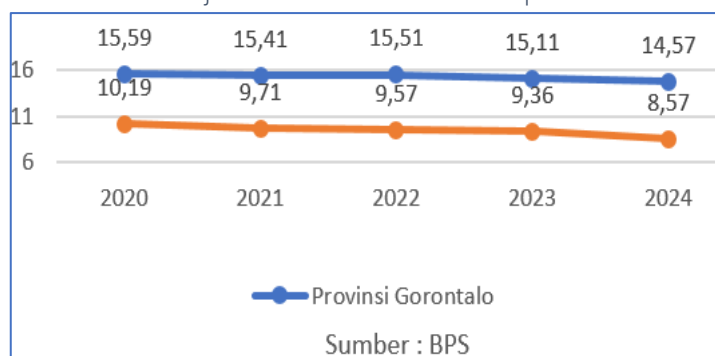
Secara total Maret 2025 terdapat 13,24 persen penduduk hidup di bawah garis Kemiskinan. Di pedesaan Angka Kemiskinan jauh lebih tinggi, mencapai 20,8 persen sementara di perkotaan hanya 4,8 persen. Kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang

memerlukan fokus kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih besar di pedesaan.

Penurunan ini mencerminkan hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperluas akses lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi lokal dan bantuan sosial yang lebih terarah kepada kelompok rentan. Secara keseluruhan, tren penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan arah perbaikan yang positif. Namun demikian, tantangan masih perlu diantisipasi, khususnya terkait ketimpangan antar wilayah, kerentanan ekonomi rumah tangga miskin, akses perempuan dan laki-laki terhadap pasar tenaga kerja serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 2.1

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur



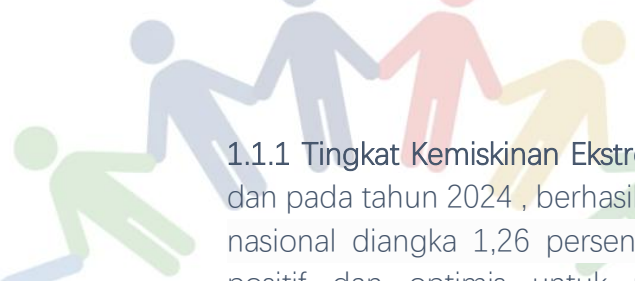
Berdasarkan data REGSOSEK (2022) yang diolah, profil Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Perempuan di Provinsi Gorontalo diangka 27.871 dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Perempuan kepala keluarga lebih banyak berada pada tingkat kesejahteraan desil 1 atau kategori sangat miskin dan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo diangka 3.258.

Tabel 2.1

Profil Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo

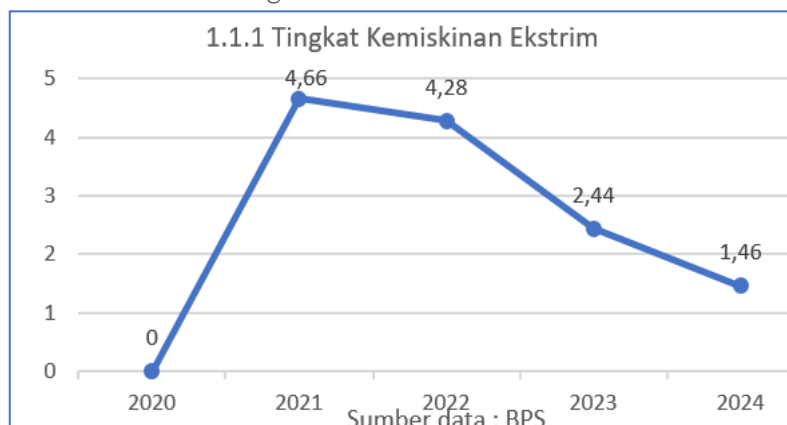
WILAYAH	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4
BOALEMO	1.139	755	1.247	316
GORONTALO	3.258	2.092	2.697	1.049
POHUWATO	1.168	1.131	624	497
BONE BOLANGO	1.337	1.702	1.098	538
GORONTALO UTARA	1.216	801	706	367
KOTA GORONTALO	1.545	1.016	690	882
PROVINSI	9.663	7.497	7.062	3.649

Sumber Data : Regsosek (diolah)



1.1.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrem menunjukkan penurunan dari tahun 2021 diangka 4,66 dan pada tahun 2024, berhasil ditekan hingga 1,46 persen, meskipun masih berada diatas nasional diangka 1,26 persen tahun 2024, provinsi Gorontalo menunjukkan kemajuan positif dan optimis untuk mencapai target *zero extreme poverty* sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Goals 1). Penurunan ini mencerminkan berbagai upaya intervensi kebijakan dan program seperti penguatan bantuan sosial yang terarah, peningkatan akses terhadap lapangan kerja produktif, serta sinergi lintas sektor dalam menurunkan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem berjalan *on the track* dan berdampak.

Grafik 2.2
Tingkat Kemiskinan Ekstrem



1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

Peningkatan proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan dasar, termasuk air minum layak dan sanitasi layak, sebagai bagian dari upaya untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya (Goal 1). Provinsi Gorontalo menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam memperluas akses tersebut selama periode 2020–2024. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak meningkat dari 94,16 persen pada tahun 2020 menjadi 96,13 persen pada tahun 2024, sedangkan akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 75,68 persen menjadi 82,99 persen pada periode yang sama. Tren positif ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Gorontalo telah memperoleh akses terhadap layanan dasar, yang menjadi pondasi penting dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi, khususnya di wilayah perdesaan. Kemajuan pada indikator 1.4.1 turut memperkuat pencapaian Target 1.4 SDGs, yaitu memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, dan teknologi yang mendukung kesejahteraan untuk menjawab tantangan disparitas wilayah dan keberlanjutan layanan di daerah terpencil. Ke depan diperlukan kebijakan integratif antara sektor perumahan, kesehatan, dan pekerjaan umum untuk memastikan pemerataan akses pelayanan dasar, sehingga seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo dapat menikmati manfaat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.



Grafik 2.3

Proporsi Penduduk/Rumah Tangga dengan Akses Pelayanan Dasar



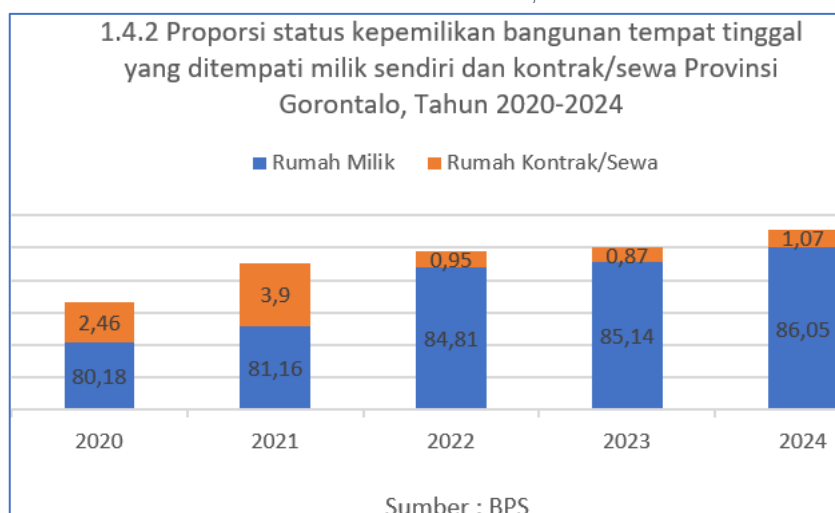
Page III- 4

1.4.2 Proporsi status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati milik sendiri dan kontrak/sewa Provinsi Gorontalo.

Menurut data BPS tahun 2020-2024 perkembangan kepemilikan rumah di Provinsi Gorontalo mengalami perbaikan di tahun 2020 kepemilikan rumah diangka 80,18 tahun 2024 mencapai 86,05 kepemilikan rumah dan 1,07 rumah sewa/kontrak. Kepemilikan rumah merupakan indikator penting dalam pencapaian Goals 1 dan Goals 11 (kota dan pemukiman yang berkelanjutan). Meskipun akses terhadap hunian layak dan kepemilikan rumah meningkat namun perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas perumahan dan pemerataan akses di seluruh wilayah provinsi.

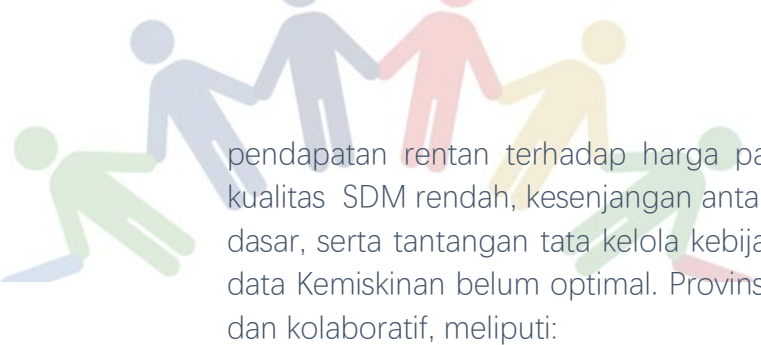
Grafik 2.4

Proporsi status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati milik sendiri dan kontrak/sewa Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2024



C. TANTANGAN

Untuk menuntaskan 1,46% penduduk miskin tantangan yang dihadapi Provinsi Gorontalo adalah tantangan ekonomi yaitu keterbatasan lapangan kerja produktif, sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor informal dan pertanian mono kultur membuat



pendapatan rentan terhadap harga pasar dan cuaca ekstrim. Tantangan sosial adalah kualitas SDM rendah, kesenjangan antar wilayah, desa dan kota, keterbatasan infrastruktur dasar, serta tantangan tata kelola kebijakan dan program lintas sektor termasuk validitas data Kemiskinan belum optimal. Provinsi Gorontalo perlu berfokus pada strategi integratif dan kolaboratif, meliputi:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan UMKM berbasis lokal.
2. Penguatan keterampilan tenaga kerja (vokasi dan inkubasi wirausaha).
3. Pemutakhiran data dan penargetan program kemiskinan yang presisi.
4. Integrasi program lintas sektor (ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur).
5. Peningkatan kapasitas fiskal dan inovasi pembiayaan (misalnya CSR, dana desa, kemitraan swasta). Serta tata kelola

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan



A. PENGANTAR

Tujuan 2 dalam TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada 2030. Indikator pada Goals 2 ini sebagai berikut : Mengakhiri kelaparan dan meningkatkan akses makanan yang cukup bagi semua orang; Mengakhiri semua bentuk malnutrisi; - Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil; Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pertanian dan penelitian; Meningkatkan ketahanan pangan dan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan mencapai Goals 2, kita dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

B. STATUS CAPAIAN(INDIKATOR TERPILIH)

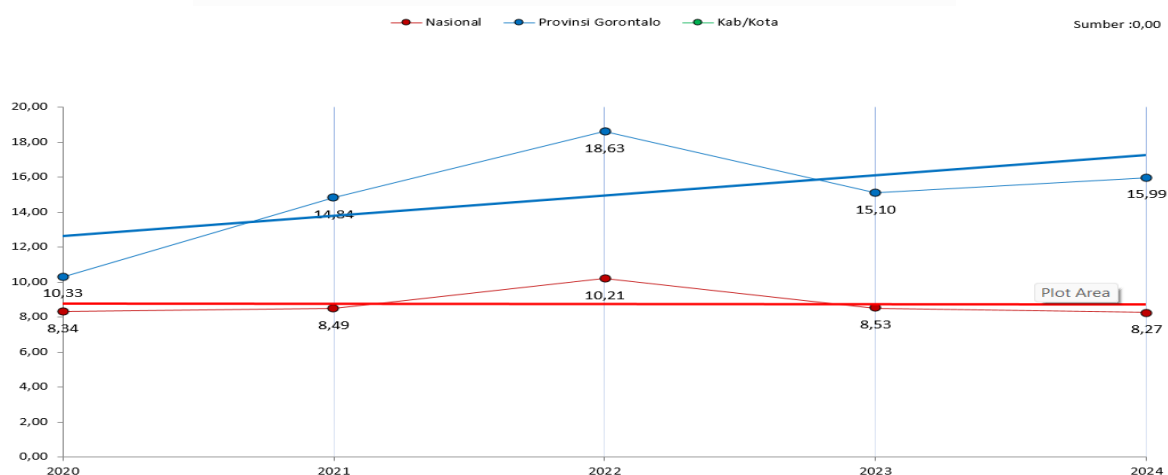
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Kondisi kurangnya konsumsi pangan kronik yang berdampak negatif pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

2.1.1 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU merupakan suatu kondisi seseorang, secara regular, mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Indikator ini dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi. Orang tidak mampu atau dalam kondisi kemiskinan biasanya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Dalam lima tahun terakhir, kondisi Prevalensi Ketidacukupan Pangan (Pou) di Provinsi Gorontalo bergerak fluktuatif. Data tahun 2022 menunjukkan PoU Provinsi Gorontalo sebesar 18,63%. Angka ini masih berada di atas angka rata-rata Nasional untuk ketidacukupan pangan yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah termasuk adanya tantangan terkait kemiskinan dan stunting.

Grafik 2.5

Trend PoU Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



Sumber : Bapanas , 2025

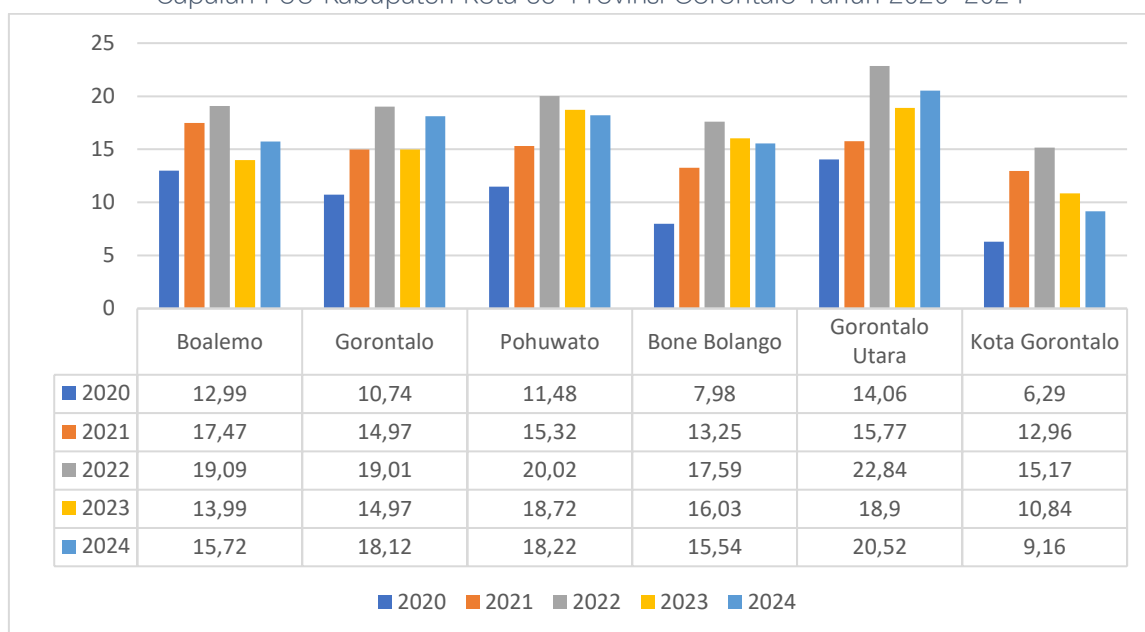


Semakin rendah angka PoU maka semakin baik ketahanan pangan. Angka PoU dapat diklasifikasikan : **Nyaris 0 kelaparan/Sangat Baik** < 2,5 (hampir semua penduduk cukup gizi); **Rendah** 2,5 – 4,9 (ketahanan pangan kuat) ; **Sedang** 5 – 9,9 (masih ada kelompok rentan); **tinggi** 10 – 19,9 (kekurangan pangan cukup luas); **Sangat Tinggi** ≥ 20 (banyak penduduk kekurangan pangan).

Angka PoU Gorontalo fluktuatif cenderung meningkat 5 tahun terakhir dari angka 10,33 di tahun 2024 menjadi 15,99 di tahun 2025. Selanjutnya kita bisa melihat kontribusi capaian PoU kabupaten kota se provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.6

Capaian PoU Kabupaten Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



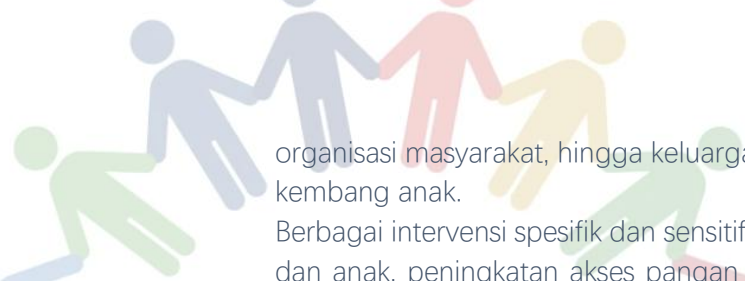
Sumber : Bapanas, 2025

PoU di Provinsi Gorontalo pada 2024 sebesar 15,99 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,10. Angka ini dapat dikategorikan tinggi artinya terdapat kekurangan pangan cukup luas . Angka ini mengindikasikan artinya bahwa tahun 2024 terdapat sekitar 15 dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat di Provinsi Gorontalo.

Capaian PoU yang paling baik adalah kota Gorontalo dengan tren angka paling rendah dari tahun ke tahun dibanding wilayah lain di Provinsi Gorontalo. di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan yang tertinggi se Provinsi Gorontalo yakni sebesar 20,52% pada 2024. Angka tersebut naik 1,62% dari tahun sebelumnya sebesar 18,90%. Ini artinya, penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara yang mengkonsumsi makanan, tetapi kebutuhan energinya kurang, tidak sampai 20,52% dari total penduduk. PoU di Kabupaten Gorontalo Utara lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Upaya percepatan penurunan stunting dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Gorontalo menunjukkan hasil yang semakin signifikan. Hal ini merupakan buah dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia usaha,



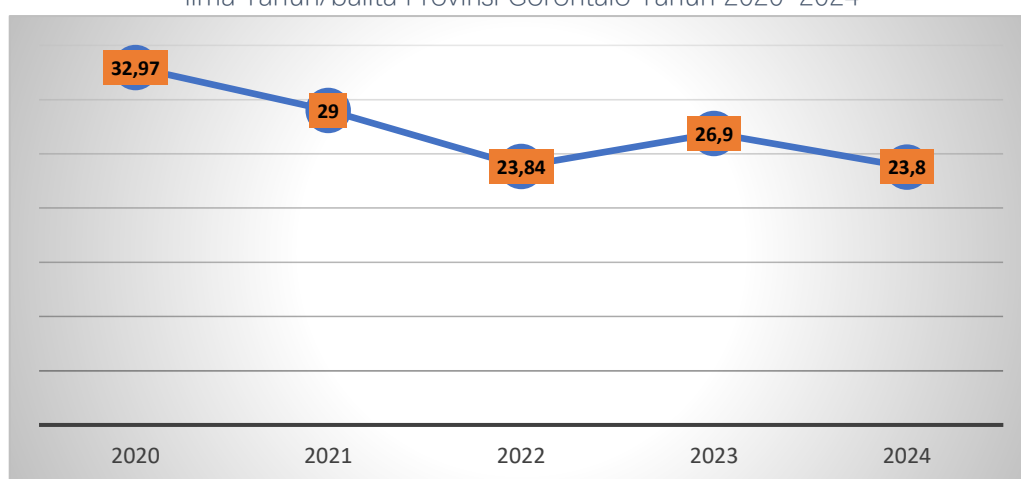
organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

Berbagai intervensi spesifik dan sensitif—seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pangan bergizi, edukasi perubahan perilaku, perbaikan sanitasi, dan penguatan sistem pendataan—telah memberikan dampak yang nyata. Program rutin seperti pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan, imunisasi, serta pendampingan keluarga berisiko stunting turut memperkuat fondasi percepatan penurunan prevalensi stunting.

Salah satu keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting provinsi Gorontalo adalah kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi dan di Tahun 2025 ini telah terbit SK Gubernur Nomor 319/28/X/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Gorontalo

Grafik 2.7

Perkembangan Angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima Tahun/balita Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



Sumber : SSGI, 2024

Hasilnya, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan status gizi, kesehatan lingkungan, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi penggunaan data melalui Sistem Informasi Pembangunan Keluarga dan aplikasi kesehatan lainnya memungkinkan intervensi dilakukan lebih tepat sasaran.

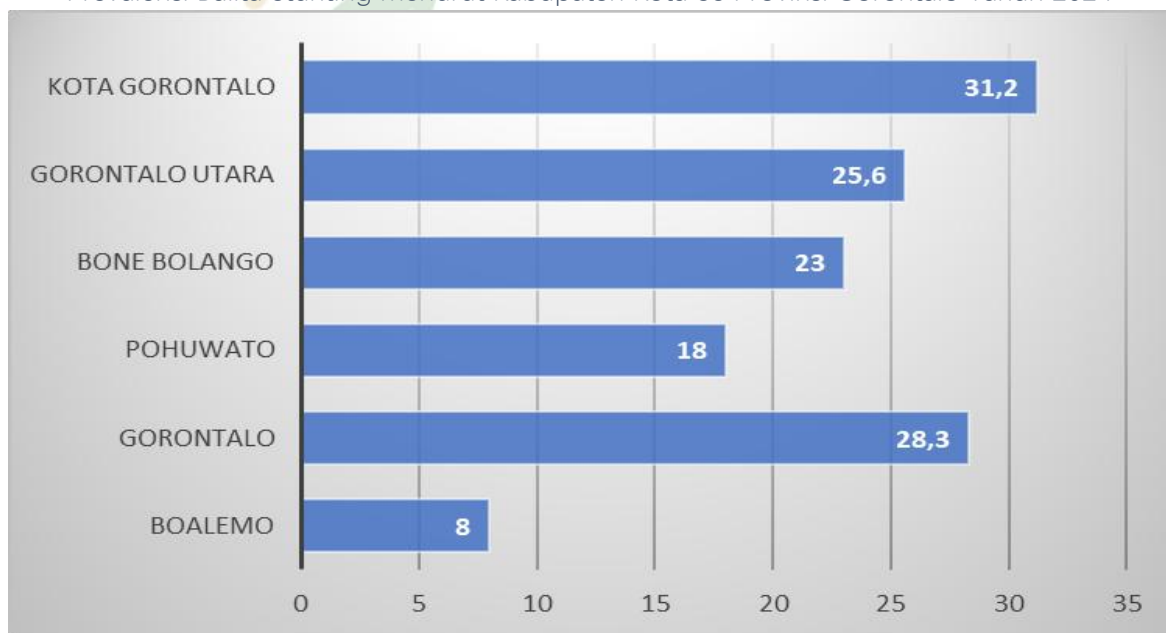
Meski capaian ini patut diapresiasi, namun tantangan masih cukup besar. Masih terdapat ketimpangan antarwilayah, kendala akses layanan kesehatan di daerah terpencil, serta perlunya peningkatan kualitas edukasi gizi dan pola asuh. Namun demikian, tren capaian yang positif menggambarkan bahwa strategi percepatan penurunan stunting berada pada arah yang tepat.

Ke depan, komitmen berkelanjutan, inovasi program, dan sinergi multipihak diperlukan agar target penurunan stunting dapat dicapai secara optimal. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia semakin mendekati tujuan mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif



Grafik 2.8

Prevalensi Balita Stunting menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Page III- 9

Sumber : SSGI, 2024

Lebih lanjut hasil survei dalam SSGI 2024 terhadap 3.023 responden tentang pengetahuan dan sikap yang tepat penyebab Stunting untuk Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Aspek Penyebab Stunting

Aspek Penyebab Stunting	Tepat (%)	Tidak Tepat (%)
Anak stunting lebih disebabkan oleh faktor keturunan	68,1	31,9
Penyebab stunting adalah pada masa hamil dan balita kurang makan sayur	81,5	18,5
Penyebab stunting adalah pada masa hamil dan balita kurang makan lauk hewani	40,1	59,9
Penyebab stunting adalah anak sulit makan dan porsi makannya sedikit	40,2	59,8
Penyebab stunting adalah anak sering sakit atau sakit berulang	45,4	54,6
Penyebab stunting adalah perilaku cara merawat dan memberi makan anak tidak tepat	43,5	56,5
Anak yang tinggal di lingkungan kotor/ tidak bersih lebih beresiko stunting	43,0	57

Berdasarkan tabel tersebut pengetahuan masyarakat tentang penyebab stunting adalah pada hamil dan balita kurang makan sayur memiliki tingkat ketepatan sebesar 81 , %.

2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

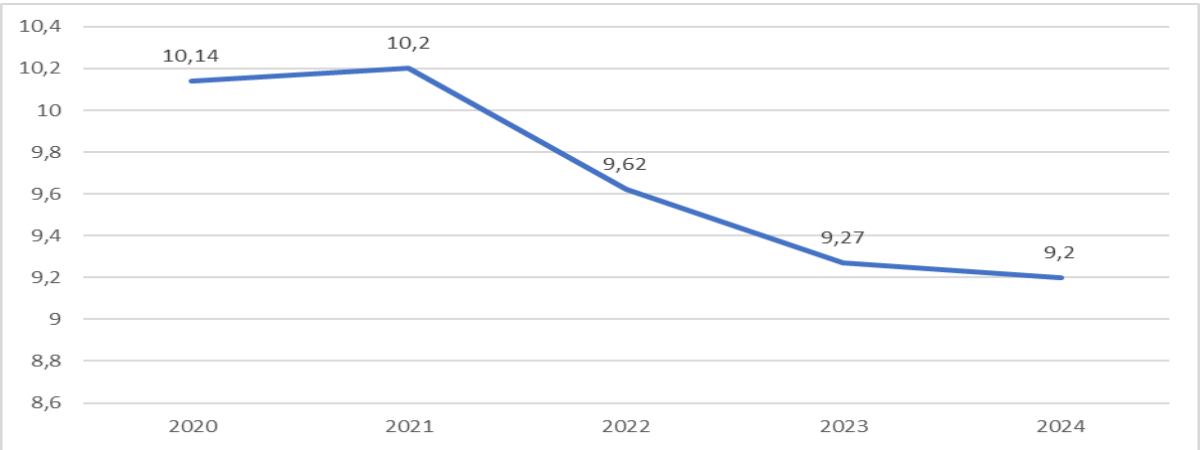
Stunting dan wasting merupakan dua bentuk utama malnutrisi pada anak yang saling berkaitan dan sering muncul dalam satu populasi yang menghadapi masalah ketahanan pangan dan kesehatan. Wasting, yang ditandai dengan berat badan sangat rendah menurut tinggi badan,



merupakan indikasi kekurangan gizi akut yang terjadi dalam waktu singkat akibat penurunan asupan dan/atau penyakit infeksi. Kondisi ini dapat mengganggu pertumbuhan normal anak dan meningkatkan risiko kematian, terutama pada balita. Wasting sering disebut sebagai "gerbang awal" menuju stunting apabila intervensi tidak dilakukan secara tepat waktu. Anak yang sudah stunting lebih rentan mengalami wasting karena fungsi kekebalan tubuh menurun, sehingga mudah terserang infeksi yang dapat menyebabkan penurunan berat badan secara cepat. Di tingkat populasi, tingginya prevalensi wasting yang tidak tertangani akan berdampak pada peningkatan prevalensi stunting dalam beberapa tahun berikutnya, karena masalah gizi akut berkontribusi pada kegagalan pertumbuhan jangka panjang.

Grafik 2.9

Perkembangan Angka Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

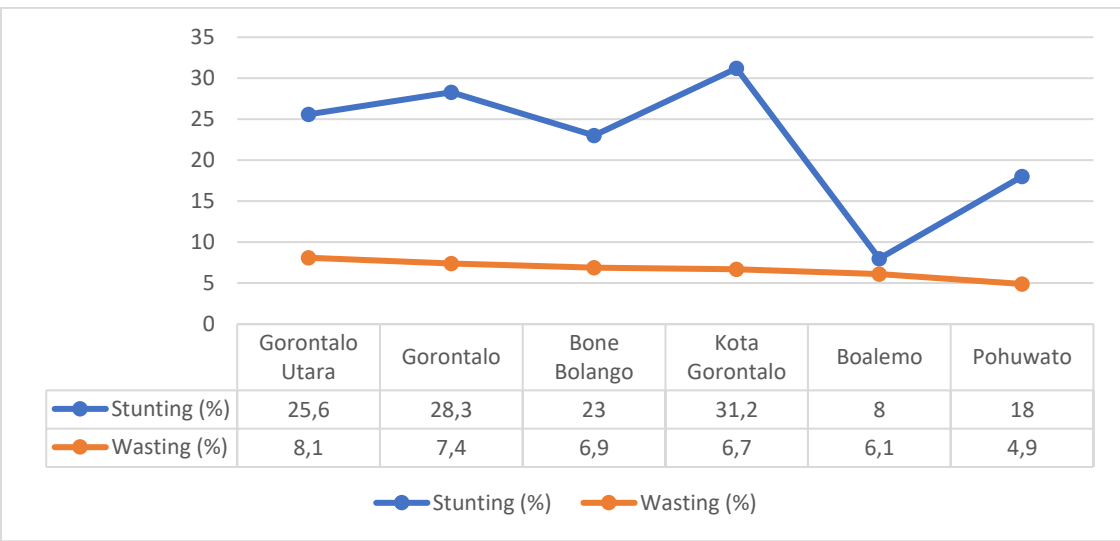


Sumber : SSGI, 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa prevalensi wasting selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dari 10,14 di tahun 2020 menjadi 9,2 di tahun 2024. Selanjutnya kita bisa melihat perbandingan angka stunting dan wasting di Provinsi Gorontalo per wilayah sebagai berikut :

Grafik 2.10

Prevalensi Balita Stunting dan Wasting menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : SSGI, 2024



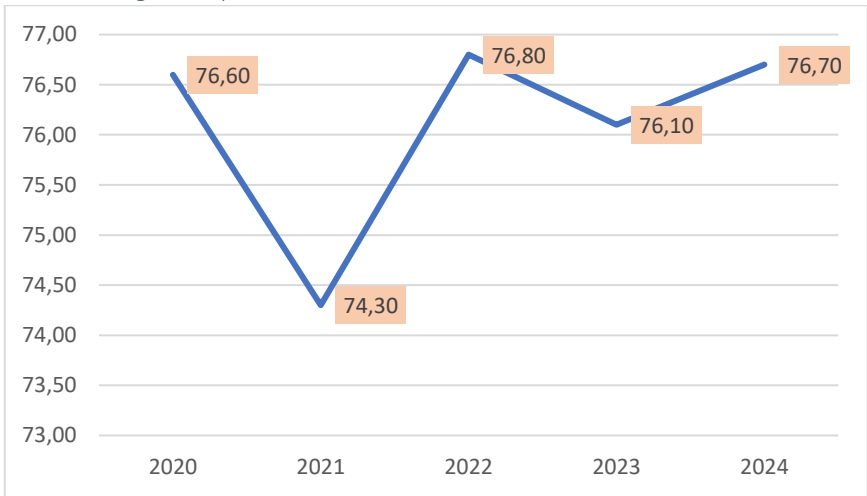
Kab. Gorontalo utara memiliki angka stunting dan wasting yang cukup tinggi . Angka stunting tertinggi di Kota Gorontalo dan terendah di Kab. Boalemo, sedangkan angka wasting tertinggi di Kab. Gorontalo Utara dan terendah di kab. Pohuwato sebesar 4,9 %. Upaya penurunan stunting tidak dapat dipisahkan dari penanganan wasting. Intervensi gizi akut (seperti penanganan balita gizi buruk dan pemberian makanan tambahan) perlu dilaksanakan bersamaan dengan intervensi gizi kronis (seperti perbaikan pola asuh, sanitasi, dan ketahanan pangan). Dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi, siklus antara wasting dan stunting dapat diputus sehingga kualitas kesehatan anak meningkat secara berkelanjutan.

2.2.2 (a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH dan PoU memiliki korelasi negatif. Jika suatu daerah angka PoU nya rendah maka Skor PPH nya akan tinggi dan sebaliknya. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi Skor PPH maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Semakin mendekati angka 100 maka pola konsumsi masyarakat semakin beragam dan seimbang. Rentang skor PPH dibawah 60 dikategorikan rendah, artinya pola pangan belum beragam, masih didominasi pangan pokok (beras) sebagai sumber karbohidrat. Jika skor 60-79 dikategorikan sebagai angka sedang di mana pola pangan daerah tersebut mulai beragam tetapi konsumsi protein hewani, sayur dan buah masih kurang. Sedangkan skor 80-100 artinya baik yaitu pola pangan masyarakat sudah beragam dan seimbang sesuai komposit gizi seimbang.

Grafik 2.11

Perkembangan Capaian Skor PPH Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



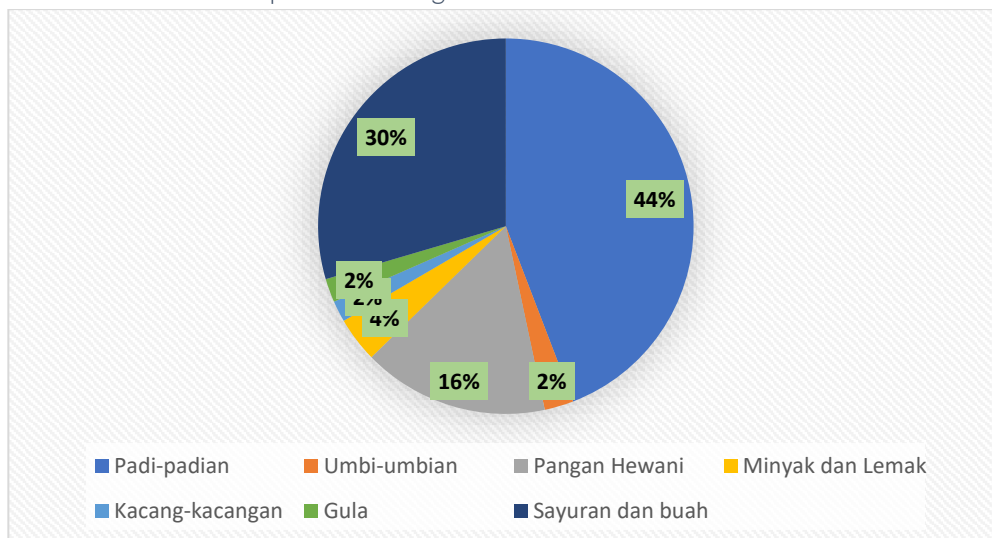
Sumber : Bapanas, 2024

Kualitas konsumsi pangan yang memenuhi standar Beragam Bergizi Seimbang dan Aman tercermin dari angka Skor PPH konsumsi. Posisi relatif Skor PPH Provinsi Gorontalo masih jauh di bawah angka nasional. Posisi nasional sudah berada diangka 95,2 sedangkan Provinsi Gorontalo masih diangka 76, 6. Nasional sudah dalam kategori baik sedangkan Provinsi Gorontalo masih dalam kategori sedang menuju baik. Angka ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masih didominasi karbohidrat (beras, jagung, singkong, dll). Konsumsi pangan sumber protein hewani (ikan, telur, daging), sayur dan buah belum optimal sehingga masih perlu peningkatan kualitas dan keragaman pangan agar gizi masyarakat lebih seimbang. Posisi Skor PPH tertinggi adalah Kabupaten Boalemo dan posisi kabupaten terendah adalah Kab. Gorontalo Utara.

Rata-rata konsumsi masyarakat Gorontalo masih didominasi dari padi-padian (beras, jagung dan terigu) atau 121,5 kg/ kapita per tahun dapat kita lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.12

Rata-rata Konsumsi per Jenis Pangan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Bapanas, 2024

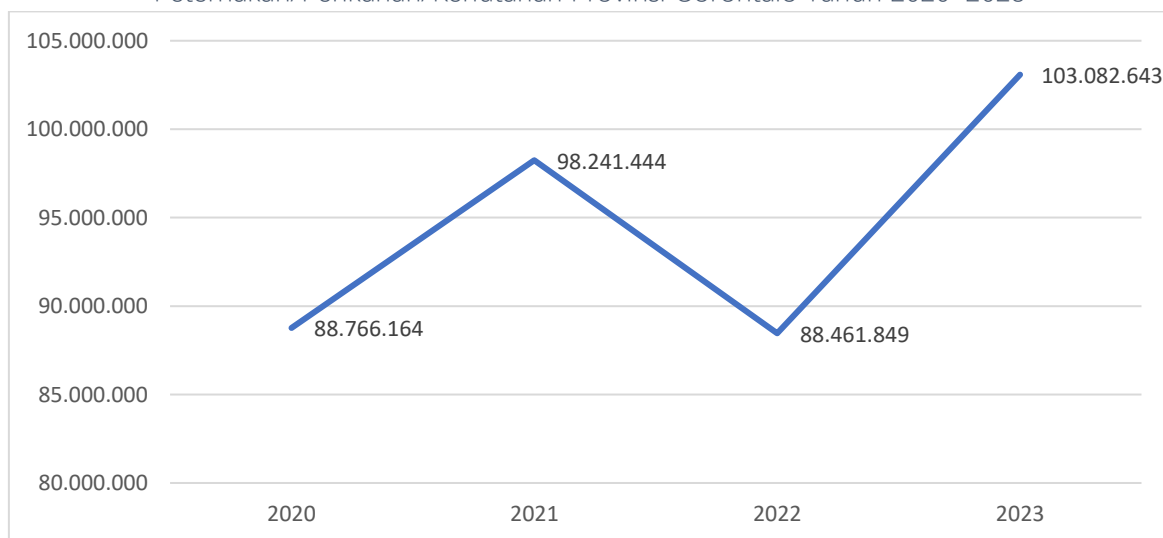
Konsumsi sayuran dan buah sudah cukup bagus 30 % dari jenis pangan yang dikonsumsi, sedangkan proporsi pangan hewani sebesar 16 % atau 44,1 kg/ kapita/ tahun. Konsumsi gula dan kacang-kacangan menempati porsi paling kecil yaitu hanya 2 %.

2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan

Indikator ini mengukur nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani (tanaman, peternakan, perikanan, kehutanan), sebagai salah satu tolok ukur produktivitas dan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian.

Grafik 2.13

Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/ Peternakan/Perikanan/Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023



Sumber : BPS, 2024

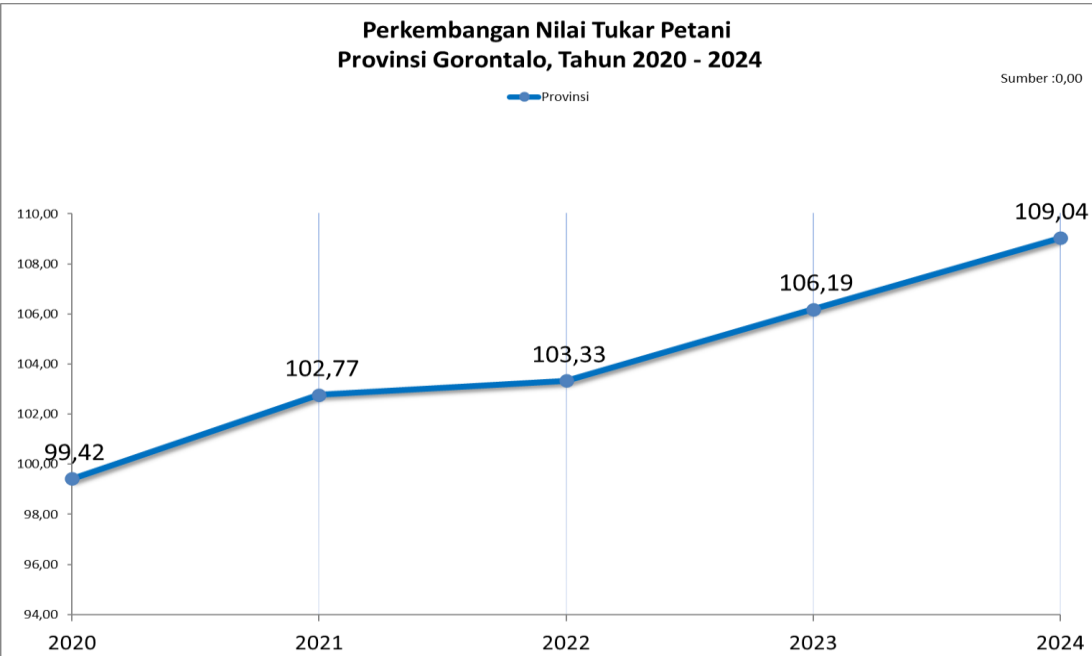


Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Gorontalo telah mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan angka Rp 103.082.642,- per tenaga kerja pada tahun 2023, walaupun sempat mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2022 yaitu di angka Rp. 88.461.849 per tenaga kerja. Data terbaru yang spesifik untuk tahun 2024 dan disajikan menurut kelas usaha tani (tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan) untuk Gorontalo saat ini belum tersedia secara publik

Kenaikan nilai tambah ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja pertanian di Gorontalo makin meningkat, yang pada gilirannya berarti potensi pendapatan lebih besar bagi tenaga kerja pertanian, baik petani tanaman, peternak, nelayan (perikanan), maupun pekerja kehutanan. Peningkatan produktivitas ini sangat relevan dengan tujuan SDGs karena memperkuat kemampuan tenaga kerja pertanian mengakses pangan dengan pola gizi seimbang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kenaikan nilai tukar petani (NTP) di Gorontalo menunjukkan tren positif yang bisa mendukung daya beli petani, walaupun tekanan biaya dan harga-produsen tetap bisa menjadi faktor risiko.

Grafik 2.14



Sumber : BPS, 2025

Angka NTP ini sudah cukup baik walaupun masih belum ideal karena bila dibandingkan dengan Provinsi Lain di Sulawesi maka Provinsi Gorontalo NTP berada paling bawah. Pada sektor pertanian kontribusi NTP Sub sektor tanaman pangan angkanya paling kecil, fluktuatif cenderung menurun.

Capaian nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Gorontalo menunjukkan perkembangan positif dan potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian.

Selanjutnya yang menjadi target goal tanpa kelaparan yaitu Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan



2.4.1 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan

Indikator ini menilai proporsi lahan pertanian yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian produktif dan berkelanjutan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043. Selanjutnya di masing-masing wilayah tingkat 2 menetapkan LP2B untuk mempertahankan kawasan budidaya khususnya tanaman pangan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan produksi pangan di Provinsi Gorontalo. Sebagai daerah yang memiliki kontribusi kuat pada sub sektor pertanian, terutama padi, jagung, dan komoditas hortikultura, keberhasilan Gorontalo dalam mempertahankan dan mengelola LP2B sangat menentukan ketahanan pangan regional maupun nasional. Selain itu setiap daerah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Calon Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rekapan Luas Pertanian Pangan Berkelanjutan Kab. Kota Se Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	LP2B (Ha)	KP2B (Ha)	LCP2B (Ha)
1	Kota Gorontalo	250	459,60	0
2	Kab. Gorontalo	13.386	13.609,00	223,00
3	Kab. Bone Bolango	1.920	3.349,00	1.429,00
4	Kab. Pohuwato	5.661,74	12.032,35	6.370,61
5	Kab. Gorontalo Utara	4.213,76	5.557,51	1.343,75
6	Kab. Boalemo	4.757,20	5.112,96	355,76
TOTAL		30.188,70	40.120,42	9.722,12

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2024

Penguatan LP2B di Gorontalo merupakan langkah strategis untuk memastikan pertanian tetap menjadi sektor unggulan yang berkelanjutan. Dengan tantangan yang semakin kompleks seperti alih fungsi lahan, degradasi tanah, dan perubahan iklim, kebijakan LP2B perlu terus diperkuat melalui perlindungan tata ruang, peningkatan produktivitas lahan, pemberdayaan petani, serta penerapan teknologi pertanian modern. Dengan tata kelola yang tepat, LP2B akan menjadi fondasi kuat menuju ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

2.c.1 Indikator Anomali Harga Pangan

indikator anomali pangan berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan yang dapat memicu kerawanan pangan dapat diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin. Indikator anomali pangan menggambarkan kondisi penyimpangan pasokan atau ketersediaan pangan dari pola normalnya pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Pemantauan anomali pangan menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi kerawanan atau gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas pangan masyarakat.



Grafik 2.15

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan Provinsi Gorontalo Tahu 2020-2023



Sumber : BPS, 2024

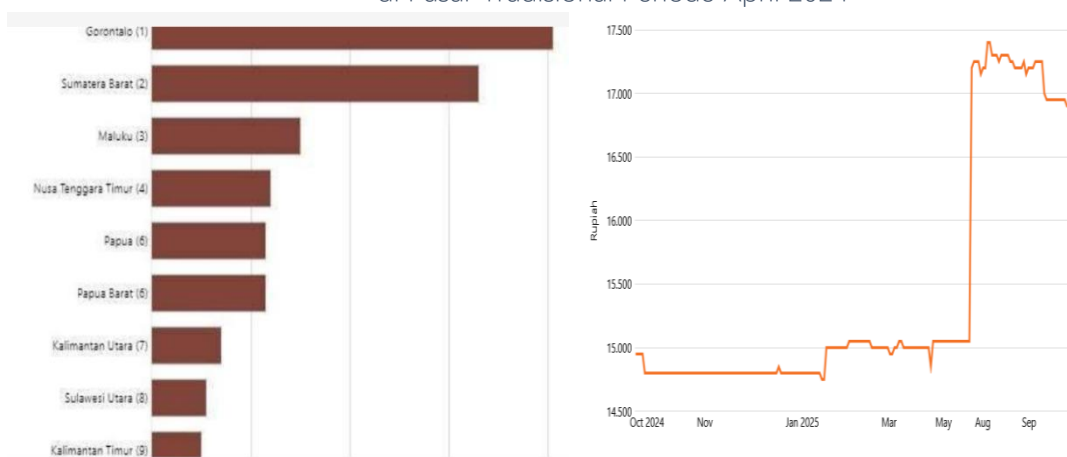
Berdasarkan grafik di atas bahwa anomali harga pangan di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori normal yaitu 0,00 (2020) dan menukik tajam di tahun 2023 sebesar 2,70. Sebagaimana meta data indeks $-0,5 - 0,5$ IAHF termasuk normal dan abnormal apabila Indeks anomali harga pangan di atas angka 1. Artinya harga mengalami penyimpangan dari pola normalnya dan biasanya anomali ini terjadi ketika musim panen bergeser, terjadi gangguan distribusi dan permintaan meningkat menjelang hari-hari besar.

Data publikasi anomali harga pangan 2024 tidak ditemukan, namun Pada tahun 2024, dinamika anomali pangan di berbagai wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perubahan iklim, gangguan rantai pasok, fluktuasi harga, serta gangguan produksi akibat serangan organisme pengganggu tanaman maupun bencana alam. Perubahan pola curah hujan—yang datang lebih awal atau lebih lambat—mengakibatkan pergeseran musim tanam sehingga berdampak pada penurunan produksi komoditas tertentu. Di sisi lain, gangguan distribusi akibat kenaikan biaya logistik dan ketergantungan pada pasokan antarwilayah turut memperbesar potensi anomali.

Beberapa wilayah harga beras sangat bervariasi tergantung pada kualitas beras bahkan mencatat harga sangat tinggi. Dalam 3 tahun terakhir harga Beras di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan yang signifikan jauh di atas harga beras nasional. Pada periode awal 2024 Gorontalo menempati posisi pertama harga beras yang tinggi

Grafik 2.16

Wilayah dengan harga Beras tertinggi dan Perkembangan Harga Beras Gorontalo Kualitas Super I di Pasar Tradisional Periode April 2024





Harga tersebut berlaku hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo yang cukup signifikan terutama menjelang akhir tahun 2024. Pada Februari 2024, harga beras premium di penggilingan naik 6,31% dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai Rp14.525 per kg, dan harga beras medium naik 7,39% menjadi Rp14.162 per kg. Kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan produksi beras pada semester kedua tahun 2024 dan kenaikan harga gabah. Pada 2024, harga beras di Gorontalo sempat mengalami kenaikan signifikan di awal tahun, bahkan memicu inflasi di Maret 2024. Pemerintah provinsi menggelar pasar murah dengan subsidi untuk menekan harga, yang pada awalnya membuat harga dari sekitar Rp17.000-Rp18.000 turun menjadi Rp14.500-Rp15.500 per kg.

C. TANTANGAN

Pencapaian target goal 2 (*Zero Hunger*) di Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai tantangan struktural dan situasional yang memengaruhi ketersediaan pangan, akses pangan, kualitas gizi, serta keberlanjutan sistem pertanian. Tantangan ini meliputi dari aspek produksi, distribusi, gizi masyarakat, hingga tata kelola pangan daerah.

1. Ketergantungan pada Komoditas Tertentu

Gorontalo sangat bergantung pada komoditas tanaman pangan yaitu padi dan jagung sebagai kontributor utama perekonomian dan pertanian. Pada aspek konsumsi ketergantungan tampak pada konsumsi karbohidrat yang bertumpu pada beras. Ketergantungan ini menimbulkan risiko kerentanan ketika terjadi gangguan produksi, belum optimalnya diversifikasi pangan lokal, rendahnya konsumsi pangan bergizi seimbang.

2. Kualitas Gizi Anak dan Ibu yang Masih Menjadi Masalah

Beberapa indikator gizi seperti angka stunting dan wasting masih tinggi di beberapa wilayah seperti di kabupaten Gorontalo Utara, Ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) masih memerlukan penanganan intensif, terutama di wilayah daerah rawan pangan. Akses layanan gizi dan kesehatan belum merata, serta pola konsumsi pangan bergizi masih rendah.

3. Keterbatasan Akses Pangan Rumah Tangga Rentan

Rumah tangga kategori miskin, pekerja sektor informal, buruh tani sering mengalami keterbatasan daya beli terhadap pangan bergizi, terutama saat harga meningkat. Kerentanan ini memperbesar risiko ketidakcukupan konsumsi energi.

4. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Petani yang landai

Petani di Gorontalo masih menghadapi tantangan rendahnya akses teknologi dan inovasi, fluktuasi harga hasil pertanian, tingginya biaya konsumsi rumah tangga petani, kurangnya fasilitas pascapanen seperti dryer, silo, atau gudang, keterbatasan akses modal dan pembiayaan berdampak pada nilai tambah pertanian per tenaga kerja (SDG 2.3) yang belum optimal. NTP belum mampu meningkat pesat khususnya NTP komoditi tanaman pangan.

5. Fluktuasi Harga dan Anomali Pangan

Beberapa komoditas strategis seperti cabai, bawang, beras, dan telur sering mengalami ketidakstabilan harga, khususnya pada menjelang hari-hari besar harga akan bergejolak, pasokan tidak stabil, permintaan yang tinggi pada wilayah provinsi tetangga sering menyebabkan distribusi antarwilayah tidak merata. Fluktuasi ini menyulitkan akses pangan kelompok rentan dan mempengaruhi stabilitas konsumsi rumah tangga.

6. Rendahnya Produktivitas lahan pertanian

Produktivitas lahan rendah akibat perkembangan permukiman di kawasan perkotaan seperti Gorontalo, Limboto, dan Telaga menyebabkan lahan sawah produktif rentan beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian.



penggunaan bahan kimia (pupuk dan pestisida) yang berlebihan yang berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah, Perubahan iklim memengaruhi pergeseran musim tanam, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan risiko gagal panen akibat curah hujan ekstrem atau musim kering,

Sebagian lahan pertanian tanaman jagung di Gorontalo berada di kawasan berlereng dengan risiko erosi tinggi kabupaten menimbulkan tantangan konservasi tanah dan air. Pengelolaan yang tidak menerapkan teknik konservasi menyebabkan terjadinya degradasi tanah dan penurunan produktivitas. Penerapan teknik budidaya monokultur dan keterbatasan Infrastruktur Pendukung Di beberapa wilayah, jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dan mekanisasi belum optimal sehingga membuat lahan LP2B sulit mencapai produktivitas maksimal.

7. Ketergantungan pada Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Beberapa komoditas masih dipasok dari provinsi lain khususnya bawang merah dan bawang putih, kedelai dan susu sapi sehingga distribusi rentan terganggu, harga mudah bergejolak. Bahkan komoditi beras pun sering dipasok dari luar Gorontalo.

8. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi Pangan

Di beberapa daerah akses jalan menuju sentra produksi masih terbatas, rantai dingin (cold chain) untuk daging/ikan belum optimal, biaya transportasi tinggi. Ini berdampak pada kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

9. Penguatan Mekanisasi dan Teknologi Modern

Pemprov mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta teknologi seperti benih unggul toleran iklim, sistem irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen untuk menekan kehilangan hasil, namun belum semua petani memiliki pengetahuan dan akses terhadap mekanisasi dan teknologi modern

10. Sistem Data dan Monitoring Pangan Belum Terintegrasi Optimal

Sistem pemantauan harga pangan, ketersediaan stok, produksi pertanian, status gizi, belum seluruhnya terintegrasi secara *real-time* untuk keperluan early warning system (SKPG). Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam penyiapan pasokan pangan untuk SPPG yang menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo



Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi hak asasi setiap individu. Kesehatan bukan hanya sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Upaya untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kesehatan baik individu dan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan peran secara efektif. Mengingat era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat membawa tantangan tersendiri dalam mewujudkan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Kompleksitas masalah kesehatan yang dimulai dari Transisi epidemiologi yang ditandai dengan pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, penuaan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup menjadi isu-isu yang harus dihadapi. Selain itu, kesenjangan kesehatan antar kelompok masyarakat, baik secara geografis maupun sosial ekonomi, masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendekatan kesehatan masyarakat harus bersifat komprehensif, multi disiplin, dan berbasis bukti. Hal ini perlu melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu, seperti epidemiologi, bio statistik, ilmu perilaku, kebijakan kesehatan, dan manajemen kesehatan. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik, mengingat determinan kesehatan yang kompleks dan saling terkait.

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-3 diarahkan untuk **menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia**. Cakupan indikator Goal 3 terdapat Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani di antaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), masih banyak permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

B. Status Capaian

Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (KH).

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, untuk Provinsi Gorontalo hal ini menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan yang sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 3.1 yaitu menurunkan AKI menjadi di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Capaian AKI tahun 2024 ini mengalami peningkatan setelah ditahun sebelumnya AKI mengalami penurunan signifikan. Tahun 2023 angka kematian ibu mencapai 139 per 100.000 KH dengan jumlah ibu mati sebanyak 26 ibu dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 18.724, sedangkan ditahun 2024 angka kematian ibu meningkat hingga mencapai 147 per 100.000 KH dengan jumlah kematian 29. Angka kematian ibu tertinggi terjadi di Kabupaten Gorontalo terjadi 5 kematian ibu dengan angka

145 per 100.000 KH, sedangkan angka terendah terjadi di Kabupaten Boalemo dengan 2 kematian ibu dengan angka 79 per 100.000 KH. Berikut gambaran angka kematian ibu / 100.000 KH Provinsi Gorontalo kurun waktu 5 tahun terakhir :

Grafik 2.17



Sumber : Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029

Beberapa hal menjadi penyebab kematian ibu di antaranya adalah Gangguan Hipertensi 10%, Infeksi sebanyak 10%, Perdarahan 7% dan Gangguan Kardiovaskular sebesar 1,4% serta penyebab lainnya seperti Gangguan penyakit tertentu sebesar 69%.

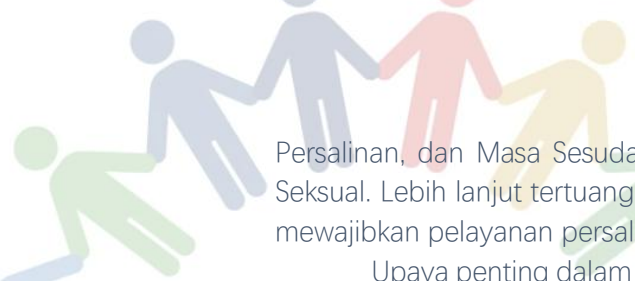
Grafik 2.18



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Secara umum AKI Gorontalo telah berada di bawah target nasional RPJMN 2024 sebesar 183/100.000 KH, kontribusi upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal (ANC), meskipun cakupan ANC 6 kali masih belum optimal di seluruh kabupaten/kota, pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) serta pemberian makanan tambahan (PMT) lokal untuk ibu hamil menjadi hal penting pada penurunan AKI di Provinsi Gorontalo, meskipun demikian faktor penyebab kematian ibu seperti eklampsia, perdarahan obstetri, dan infeksi masih dominan yang diperparah oleh keterlambatan rujukan, kekurangan gizi, dan belum meratanya mutu layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi tinggi rendahnya kematian ibu yaitu persalinan yang dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang mencakup berbagai sarana kesehatan formal seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Praktik Mandiri Bidan yang berjejaring dengan FKTP BPJS serta fasilitas lain yang diakui negara dan tentunya dibantu oleh tenaga kesehatan yang meliputi tenaga medis profesional seperti bidan atau dokter yang terlatih. Kebijakan ini juga dipertegas melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,



Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Lebih lanjut tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mewajibkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes.

Upaya penting dalam program kesehatan ibu di Provinsi Gorontalo adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang menitikberatkan totalitas pemantauan yang menjadi salah satu upaya deteksi dini menghindari resiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir ditingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK). Berikut gambaran persalinan di Fasyankes Provinsi Gorontalo kurun waktu 2022 – 2024 :

Grafik 2.19

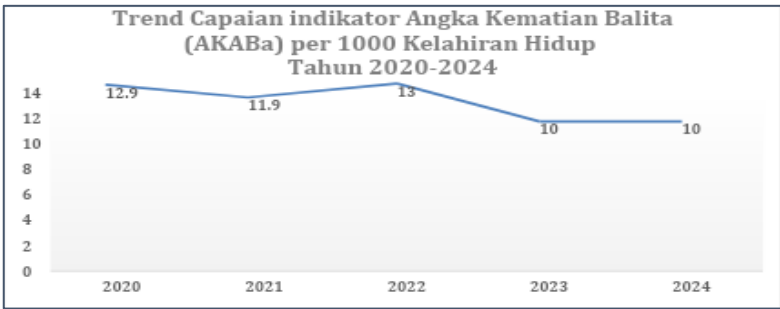


Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 3 tahun cukup dinamis, terjadi kenaikan sebesar 12,1 % dari tahun 2022 ke tahun 2023, namun terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 1,4%. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius di mana kondisi ini juga menggambarkan dukungan daerah terhadap pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten/Kota yang harus mencapai 100%.

Indikator 3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa) Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup merupakan salah satu indikator kunci yang merefleksikan status kesehatan anak usia dini, efektivitas pelayanan kesehatan dasar, serta ketahanan sistem kesehatan di suatu wilayah. AKBa tidak hanya mencerminkan kondisi gizi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menunjukkan capaian dalam aspek promotif, preventif, kuratif, hingga perlindungan sosial di bidang kesehatan. Berdasarkan data SSGI, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan BPS, angka kematian balita di Provinsi Gorontalo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun relatif membaik. Berikut capaian indikator Angka Kematian Balita (AKABa) per 1000 kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.20



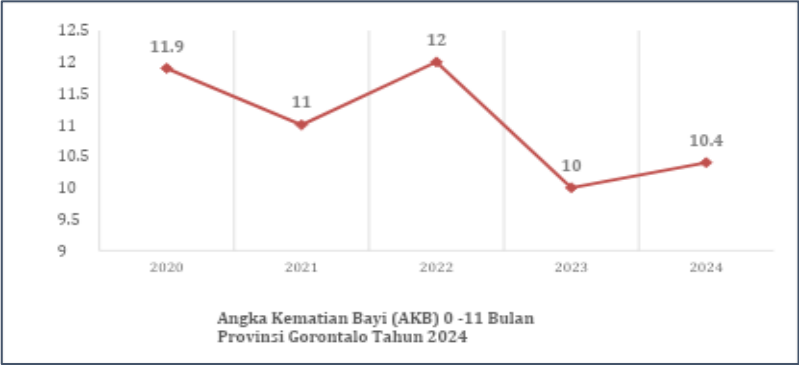
Sumber : Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029



Berdasarkan data di atas Angka Kematian Balita (AKBa) di Gorontalo secara konsisten mengalami tren penurunan yang stabil, pada tahun 2020 tercatat 12,9 per 1.000 kelahiran hidup, angka ini turun menjadi 245 kasus ($\pm 11,9/1.000$ KH) pada tahun 2021, pada tahun 2022 tetap 249 kasus, yang setara sekitar $\pm 13,0/1.000$ KH, tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 129 kasus, yaitu $\pm 10,0/1.000$ KH dan sapai akhir tahun 2024 dapat di pertahankan pada angka 10 per 1000 KH.

Indikator 3.2.1* (b) Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan sosial ekonomi. AKB di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebesar 11,9/1.000 KH, ditahun 2024 turun menjadi 10,4/1.000 KH, walaupun terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu 10/1.000 KH. Dari kasus kematian bayi yang telah dilakukan audit ditemukan bahwa kondisi bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/ kelainan bawaan pada bayi.

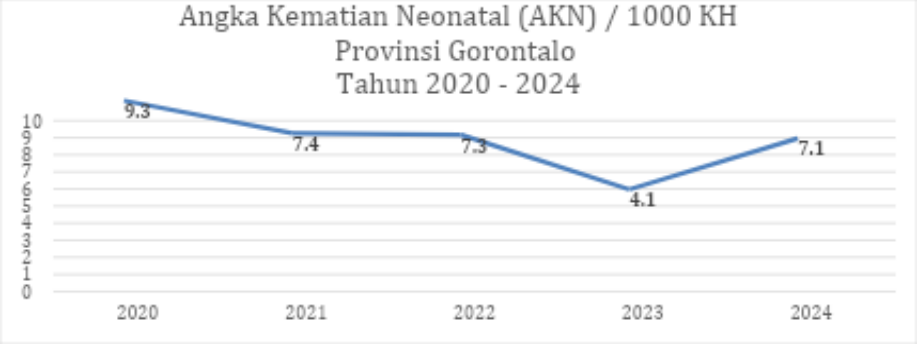
Grafik 2.21



Sumber : Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029

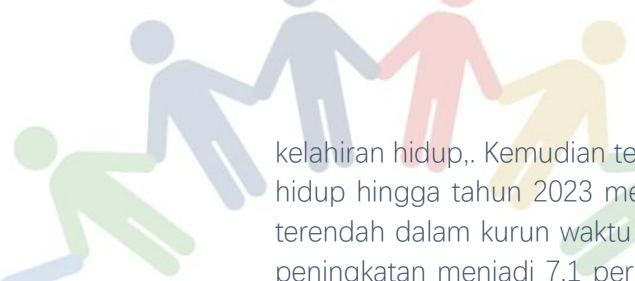
Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neonatal adalah jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada wilayah dan kurun waktu yang sama. Tinggi rendahnya Neonatal Mortality Rate (NMR) berguna untuk menggambarkan 3 (tiga) hal yakni Pelayanan Antenatal Care (ANC) yang berkualitas, pelayanan post natal dan Program pertolongan persalinan dan penanganan kasus kegawatdaruratan neonatal essensial.

Grafik 2.22



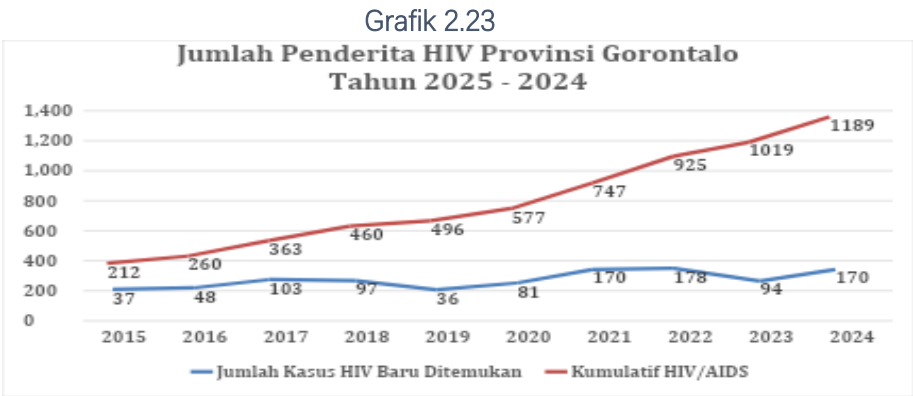
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Informasi di atas menunjukkan tren angka kematian neonatal selama 4 tahun, di mana terjadi penurunan di awal periode dan mengalami kenaikan pada tahun terakhir. Di tahun 2020 Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan angka tertinggi yaitu tercatat sebesar 9,3 per 1.000



kelahiran hidup,. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 7,4 per 1.000 kelahiran hidup hingga tahun 2023 mencapai 4,1 per 1.000 kelahiran hidup sekaligus menjadi capaian terendah dalam kurun waktu 4 tahun. Namun pada tahun 2024 angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 7,1 per 1.000 kelahiran hidup. Tren Angka Kematian Neonatal (AKN) di Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada 2023 namun terjadi kenaikan kembali di tahun berikutnya. Penyebab utama kematian neonatal (bayi usia 0-28 hari) secara umum disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kelahiran prematur, komplikasi persalinan, infeksi neonatal dan kelainan bawaan. BBLR merupakan penyebab kematian utama yang cukup tinggi dengan 45 kasus atau 33,8, penyebab berikutnya Infeksi dan kelainan kongenital dengan masing-masing 9 kasus dan 7 kasus. Hal lain yang mempengaruhi yaitu penyebab tidak langsung yang dipengaruhi oleh kesehatan ibu hamil dan penanganan kegawatdaruratan neonatal, pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya perbaikan gizi ibu hamil, pemberian minimum 90 tablet Fe selama kehamilan dan imunisasi tetanus toksoid (TT) merupakan upaya perlindungan yang sangat baik untuk mencegah kasus bayi berat lahir rendah (BBLR) yang merupakan penyebab terbanyak kematian neonatal.

Indikator 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi (Insiden) Kasus HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga tahun 2024 jumlah kasus HIV meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara kumulatif jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo mencapai 1.189 kasus. Angka tertinggi terjadi ditahun 2022 mencapai 178 kasus dan terendah di tahun 2019 sebanyak 36 kasus baru HIV. Jumlah pengidap HIV/AIDS baru setiap tahunnya berkisar antara 90–150 orang, jumlah kasus HIV/AIDS kurun waktu 10 tahun selengkapnya sebagai berikut :



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan jumlah kasus HIV baru tahun 2024 sebanyak 170 kasus dan kasus kumulatif hingga tahun 2024 sebanyak 1.189 kasus. Rentang usia yang paling terdampak adalah usia produktif yakni antara 25-49 tahun dengan mayoritas penderita adalah laki-laki.

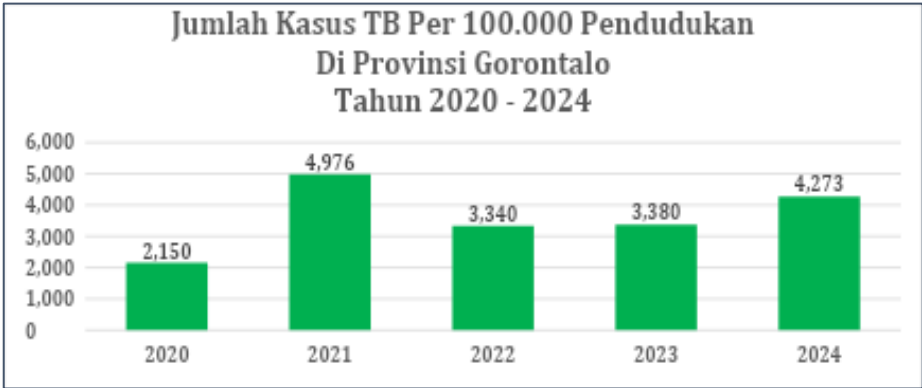
Indikator 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Penyakit TBC merupakan penyakit menular dan menyebabkan kematian nomor dua di seluruh dunia setelah Covid-19 (di atas HIV dan AIDS). Penyakit TBC paru ini merupakan penyakit yang berdampak pada kesehatan fisik dan kondisi psikis serta sosial penderita. Psikologi penderita TB sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga atau social support, bagaimana penderita mampu melakukan coping yang adaptif atau maladaptif.

Angka Insidensi TB Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, meskipun di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari 531,7/100.000 penduduk di tahun 2019, menjadi 275,6/100.000 penduduk di tahun 2023.



Artinya jumlah kasus Tuberkulosis di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan Di mana dari 100.000 penduduk, terdapat 275 penduduk yang mengalami tuberkulosis. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan jumlah 1.171 orang dan terendah di Kabupaten Boalemo dengan jumlah 255 orang.

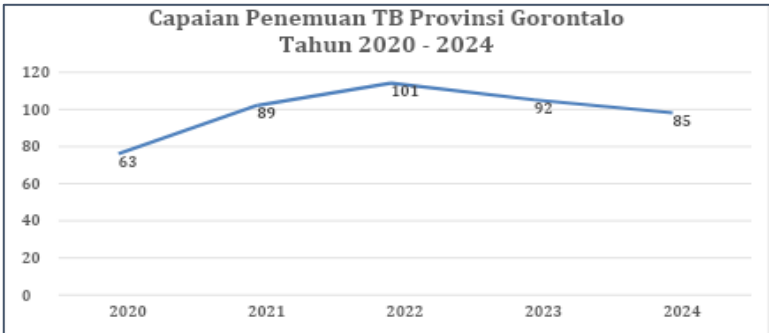
Grafik 2.24



Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029

Berikut adalah cakupan penemuan kasus tuberkulosis Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2024 :

Grafik 2.25



Sumber : Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 67% sedangkan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) berada diangka 92%. Tingginya angka insiden tuberkulosis di Gorontalo mengindikasikan masih tingginya risiko penduduk terjangkit tuberkulosis. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi salah satu cara untuk mengurangi tuberkulosis di masyarakat. Keberhasilan penanganan TBC bukan hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga tentang seberapa cepat kasus ditemukan dan diobati (deteksi dini), seberapa banyak pasien yang berhasil sembuh (pengobatan tuntas), dan seberapa baik sistem memutus rantai penularan (kontak erat & TPT), serta penurunan angka kematian dan insidensi TBC dari tahun ke tahun. Jumlah Kasus TBC di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 berjumlah 4.273 kasus. Berikut grafik proporsi penderita TBC berdasarkan jenis kelamin :

Grafik 2.26



Sumber : Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029



Data di atas menunjukkan pola yang konsisten secara global di mana laki-laki lebih banyak terdiagnosis TBC karena faktor perilaku (merokok, konsumsi alkohol, paparan pekerjaan), serta keterlambatan akses layanan kesehatan. Dengan proporsi penderita TBC lebih tinggi pada laki-laki (58%), strategi penemuan kasus harus lebih agresif di komunitas kerja dan kelompok berisiko misalnya mengintegrasikan layanan dengan program upaya berhenti merokok, sementara pada perempuan (42%) perlu pendekatan berbasis keluarga dan layanan kesehatan ibu-anak. Untuk mencapai target 90% penemuan dan 90% kesembuhan, diperlukan kombinasi skrining aktif, dukungan kepatuhan, serta intervensi berbasis gender dan komunitas.

Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Walaupun Provinsi Gorontalo bukan endemis malaria, meskipun tidak termasuk daerah endemis, namun kasus masih ditemukan.

Salah satu indikator program malaria adalah Annual Parasite Incidence (API) dengan target yaitu peningkatan Kabupaten / Kota dengan API <1 per 1000 penduduk. Pada tahun 2022 capaian API Provinsi Gorontalo berada pada angka 0,04 per 1.000 penduduk meningkat pada tahun 2023 yang mencapai angka 0,18 per 1.000 penduduk, hingga tahun 2024 angka API di Provinsi Gorontalo menurun menjadi 0,8 per 1.000 penduduk di mana angka ini masih berada di bawah target nasional sebesar <1 per 1.000 penduduk namun dalam kondisi waspada melebihi target yang ditetapkan. Berikut gambaran jumlah kasus malaria positif Provinsi Gorontalo 5 Tahun terakhir :

Grafik 2.27



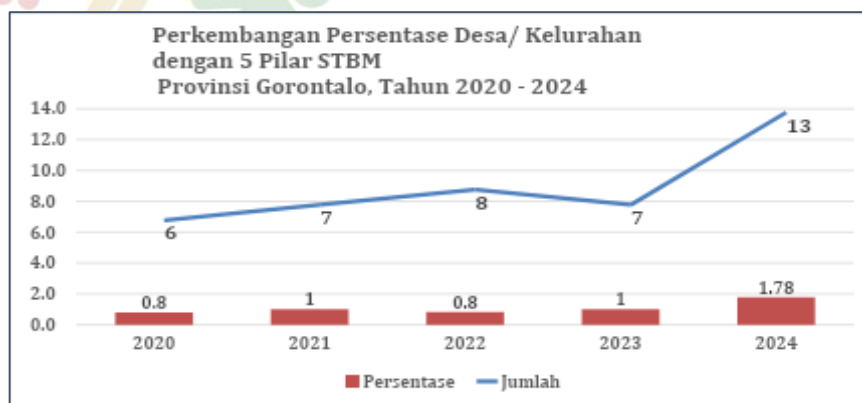
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2023 terjadi lonjakan kasus dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya KLB malaria, dan di tahun 2024 belum mengalami penurunan bahkan terjadi penambahan kasus sebanyak 8 kasus. Di mana kontribusi tertinggi berasal dari Kabupaten Pohuwato yang merupakan endemis malaria.

Untuk mendukung pencegahan penyebaran penyakit menular serta menekan tingginya penyakit tidak menular, upaya jangka panjang perlu dimaksimal diantaranya peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap. Hal ini sangat penting untuk mendukung pencapaian derajat kesehatan Masyarakat yang didalamnya terdiri dari upaya preventif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Tujuan dari imunisasi yaitu memperkuat kekebalan kelompok (herd immunity), mencegah kejadian luar biasa (KLB), serta menekan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang. Kondisi Provinsi Gorontalo berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan capaian cakupan imunisasi dasar lengkap di mana ditahun 2022 berada pada angka 79,0% naik menjadi 89,7% pada tahun 2023, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 68,2%, hal ini disebabkan cakupan IDL di setiap kabupaten belum merata sebagai akibat dari belum optimalnya pemetaan wilayah prioritas, penguatan layanan dan SDM, kolaborasi lintas sektor, hingga edukasi masyarakat dan pengawasan berkala.



Grafik 2.28



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi masyarakat melalui pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat memiliki akses dan menggunakan jamban yang sehat, mencuci tangan dengan sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah rumah tangga dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman, dan kondisi ini sudah diverifikasi oleh tim verifikasi independen, selanjutnya melakukan deklarasi resmi sebagai desa STBM dan yang paling penting adalah sustainability atau keberlanjutannya sehingga menjadi budaya dan kebiasaan sehari – hari di masyarakat.

Grafik 2.29

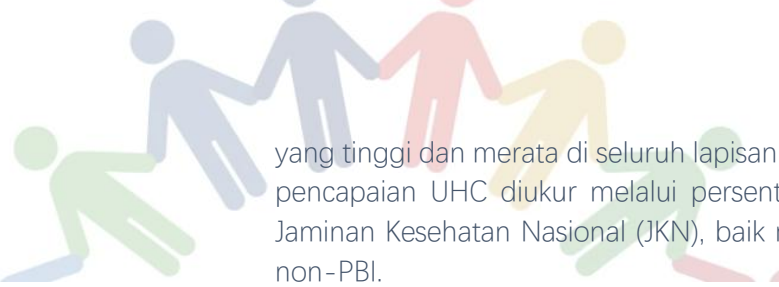


Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat digambarkan bahwa dari 729 desa di Provinsi Gorontalo yang statusnya sudah desa STBM hanya 1% (9 desa) pada tahun 2023 dan 1,78% (13 desa) pada tahun 2024. Cakupan Desa STBM yang berubah pada tahun 2023 dan 2024 hanya 1% dan 2% dikarenakan perbedaan indikator yang dijadikan ukuran. Tahun 2020-2022 indikator yang digunakan adalah Desa STOP BABS, sedangkan tahun 2023-2024 berubah menjadi % Desa STBM. Memperhatikan angka ini maka Provinsi Gorontalo direncanakan akan menetapkan 1 kabupaten/kota mencapai STBM pada tahun 2027 dan 1 kab/kota di tahun 2029. Salah satu tantangan yang dihadapi mencapai STBM secara umum terkait dengan aspek pendanaan, sosialisasi, ketersediaan sarana, dan keberlanjutan program.

Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Cakupan kepesertaan JKN Adalah kondisi di mana masyarakat memiliki perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan nasional, yang bertujuan menjamin seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial, dengan jumlah kepesertaan



yang tinggi dan merata di seluruh lapisan masyarakat termasuk rentan dan miskin. Di Indonesia, pencapaian UHC diukur melalui persentase penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI.

Di akhir tahun 2024 (September) cakupan kepesertaan Provinsi Gorontalo yaitu mencapai 97 %, konsisten dengan poin akhir 2023. Namun, keaktifan peserta sedikit menurun menjadi 91,5 % dan ini tantangan untuk memastikan kartu aktif, pada kondisi ini, untuk wilayah regional Sulawesi menunjukkan Provinsi Gorontalo termasuk di antara provinsi dengan capaian tertinggi untuk cakupan kepesertaan JKN.

Berikut Adalah Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Provinsi Gorontalo selang Tahun 2020 – 2024 :

Grafik 2.30



Sumber : Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong peningkatan cakupan kepesertaan JKN. Beberapa kabupaten/kota bahkan telah berhasil mencapai status UHC, yaitu dengan minimal 95% penduduknya terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Berikut grafik kabupaten/kota UHC di Provinsi Gorontalo 5 tahun terakhir sejak syarat UHC 95% - 98%.

Grafik 2.31



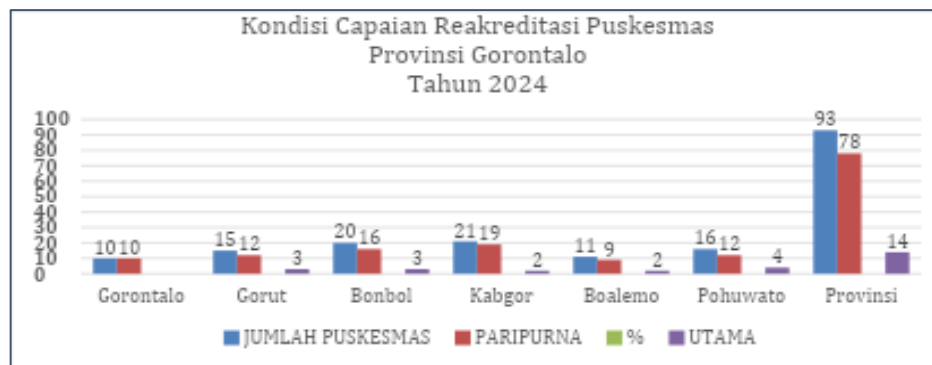
Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Dalam mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang baik, salah satu hal penting untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Adapun cara perhitungannya adalah Jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029 / Jumlah fasilitas Kesehatan yang teregistrasi dikali 100. Di provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2024 Puskesmas yang terakreditasi

paripurna dan puskesmas yang terakreditasi utama capaiannya 84 %, angka ini berada di atas angka rata – rata nasional yang menetapkan target fasyankes terakreditasi paripurna 75.5% pada tahun 2029. Berikut adalah kondisi capaian reakreditasi Puskesmas se Provinsi Gorontalo Tahun 2024 :

Grafik 2.32



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

C. Tantangan

Fokus utama Tujuan 3 ini adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua di segala usia, dengan menangani berbagai masalah kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan mental. Selain itu penekanan pentingnya cakupan kesehatan universal, akses ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas, serta akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua. Tujuan ini juga menyoroti pentingnya mengurangi angka kematian ibu, mengakhiri epidemi, serta memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat.

Tantangan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3, yaitu memastikan kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia, sangatlah kompleks dan multifaset. Tantangan ini berasal dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, ketimpangan akses, dan isu kesehatan global yang terus berkembang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesenjangan akses layanan kesehatan

Meskipun terjadi peningkatan dalam upaya pemenuhan akses dan layanan kesehatan, namun pada aktualisasinya masih tidak sedikit populasi, terutama di daerah pedesaan dan sulit akses, yang memiliki keterbatasan yang memadai terhadap fasilitas dan layanan kesehatan berkualitas. Kesenjangan ini mencakup kurangnya dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, minimnya ketersediaan obat-obatan esensial di FKTP, serta infrastruktur yang tidak memadai, serta masih adanya masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, sehingga menghambat upaya pencapaian cakupan kesehatan universal.

2. Beban ganda penyakit

- Penyakit Menular : Sejalan dengan pentingnya upaya pembangunan kesehatan, saat ini kita tengah diperhadapkan dengan masalah kesehatan yang persisten, di mana terdapat tiga penyakit menular yang sampai sekarang masih menjadi endemi, yaitu tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, dan malaria. Untuk wilayah provinsi Gorontalo sesuai data hasil pelaporan oleh dinas kesehatan, kasus HIV/AIDS terdapat 1.189 kasus, Malaria 979 kasus dan Tuberkulosis sebanyak 4.273 tersebar di seluruh Wilayah Kab/Kota se- Provinsi Gorontalo.
- Penyakit Tidak Menular : Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 pernah menjadi daerah yang capaian tingkat PTM tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, Jantung tertinggi 2



nasional, Kanker tertinggi 3 Nasional, Ginjal Tertinggi 4 Nasional Stroke tertinggi 6 Nasional dan Diabetes tertinggi 8 Nasional sesuai hasil Riskesdas Tahun 2028. Walaupun terjadi penurunan dan perbaikan pada beberapa indikator beban penyakit tidak menular di tahun 2023 (Riskesdas), masalah kesehatan ini masih menjadi bagian yang berkontribusi besar terhadap penyebab kematian di provinsi Gorontalo. sehingga memerlukan perhatian serius serta strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih baik.

- c) Kesehatan Mental : Berdasarkan beberapa hasil penelusuran, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki prevalensi gangguan mental emosional yang signifikan dan depresi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tren kasus Bunuh Diri di Provinsi Gorontalo selama beberapa tahun terakhir. Sesuai Hasil SKI tahun 2023 Prevalensi Gangguan mental/depresi yang berobat, Provinsi Gorontalo menempati peringkat ke 5 tertinggi secara nasional dengan capaian 25,1% angka depresi serta berada di atas rata-rata nasional 12,7%. Ketersediaan dan kurangnya fasilitas dan akses layanan kesehatan mental masih tergolong minim menjadi tantangan tersendiri.

3. Kesehatan ibu dan anak

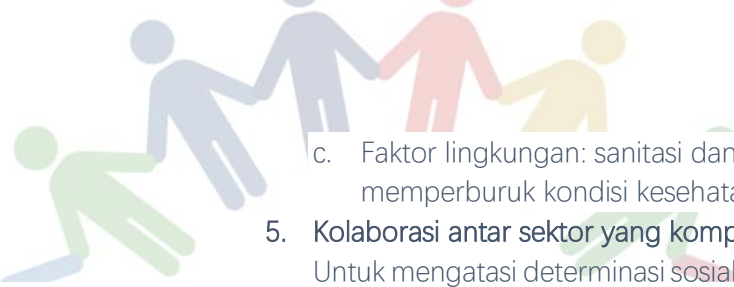
Kesehatan ibu dan anak masih menjadi isu krusial di Provinsi Gorontalo. hal ini berdampak pada angka kematian ibu dan anak serta beberapa beban penyakit lainnya. Kasus kematian ibu dan anak sangat fluktuatif di setiap wilayah kabupaten kota, walaupun sempat mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir namun pada tahun 2024 sesuai data rilis dinas kesehatan misalnya untuk AKI terjadi kenaikan selang waktu 2023 ke tahun 2024 terpaut selisih kenaikan 14,2 poin dengan dengan capaian 153,1 per 100.000 KH. Tantangan dalam pemenuhan kesehatan ibu dan anak mencakup :

- a. Disparitas geografis dan sosio ekonomi seperti akses ke layanan kesehatan berkualitas tidak merata, terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan komunitas marjinal yang sering kekurangan sumber daya dan tenaga kesehatan.
- b. Kualitas perawatan: Terdapat kekhawatiran mengenai kualitas perawatan, terutama di fasilitas kesehatan tingkat bawah, yang dipengaruhi oleh kekurangan tenaga kesehatan yang berkompeten.
- c. Banyak ibu dan keluarga yang belum memiliki pemahaman memadai tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan teratur, ASI eksklusif, dan imunisasi, Konsumsi nutrisi dan gizi seimbang.
- d. Tingginya tingkat anemia dan kekurangan gizi pada wanita hamil berkontribusi pada komplikasi selama kehamilan dan persalinan.
- e. Keterbatasan keluarga berencana: Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi tetap menjadi tantangan, yang dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan dan peningkatan risiko kesehatan, serta :
- f. Tingginya kasus angka pernikahan dini.

4. Determinasi sosial kesehatan

Kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sistem kesehatan, yang dikenal sebagai determinasi sosial kesehatan. Tantangan dalam hal ini antara lain :

- a. Kemiskinan dan ketidaksetaraan: Status sosial-ekonomi memengaruhi akses terhadap gizi, perumahan, dan pendidikan yang berkualitas, pemenuhan layanan dan jaminan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan.
- b. Kesenjangan gender: Diskriminasi berbasis gender dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan sumber daya ekonomi



c. Faktor lingkungan: sanitasi dan air bersih, serta masalah lingkungan lainnya, dapat memperburuk kondisi kesehatan.

5. Kolaborasi antar sektor yang kompleks

Untuk mengatasi determinasi sosial ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, infrastruktur, sektor Swasta dan para pemangku kepentingan lainnya. Namun, tantangan birokrasi dan koordinasi sering kali menghambat implementasi kebijakan lintas sektor yang efektif.

Page III- 29

6. Keberlanjutan finansial

Pencapaian Tujuan 3 membutuhkan investasi besar dalam sistem kesehatan, riset, dan pengembangan. Memastikan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil, termasuk perlindungan risiko finansial. Mengingat keadaan fiskal daerah yang penuh dinamika yang diakibatkan oleh penerapan kebijakan pusat.



Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua



Pendidikan berperan penting dalam membangun manusia bermoral dan beretika, mengembangkan SDM berkualitas untuk memperkuat daya saing bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Pendidikan memainkan peran sentral dalam pembangunan dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan produktivitas nasional. Semua pemangku kepentingan perlu menjalankan peran dan fungsi secara efektif dalam membangun pendidikan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Selain itu, para pemangku kepentingan diharapkan mampu mengembangkan arah kebijakan pendidikan yang fokus pada peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan. Tantangan pemenuhan layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas, komposisi demografis penduduk, keterlibatan teknologi dalam pendidikan, serta perubahan lanskap lapangan kerja merupakan isu-isu utama yang perlu segera diselesaikan ke depan

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-4 diarahkan untuk *“Menjamin pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.”*. Cakupan indikator Goals 4 meliputi akses pendidikan dasar dan menengah, kualitas hasil belajar, pemerataan guru dan tenaga pendidik, kesetaraan gender dalam pendidikan, serta pendidikan vokasi dan literasi masyarakat.

Capaian Tujuan ke 4 SDGs di Provinsi Gorontalo mengindikasikan perbaikan, walaupun dalam aspek tertentu, peningkatan tersebut mengalami pelambatan khususnya pada indikator Rata - rata Lama Sekolah. Demikian halnya terkait kualitas siswa satuan Pendidikan Menengah dan Khusus serta lulusan Sekolah Menengah Kejuruan masih menjadi tantangan pemenuhan Tujuan 4 SDGs.

B. Status Capaian

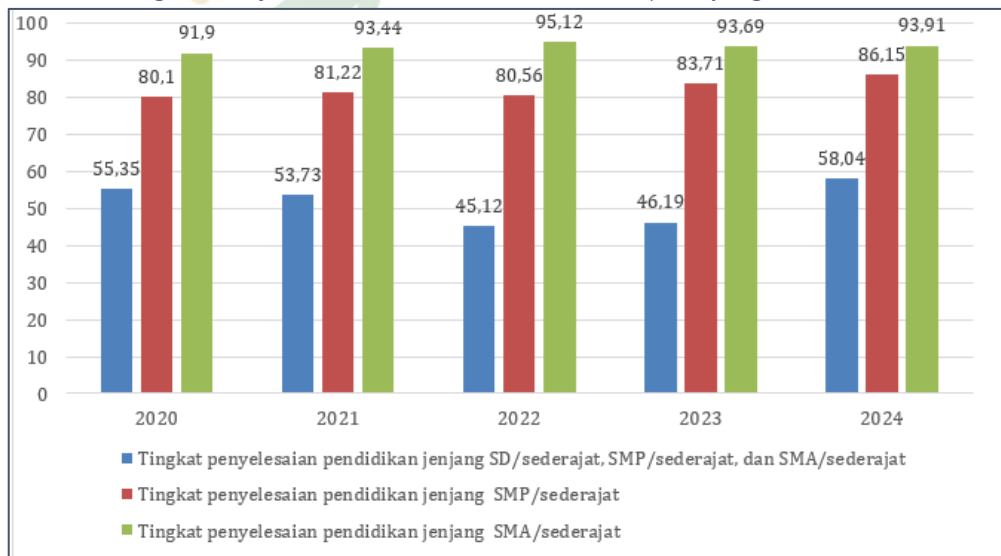
Indikator 4.1.2 : Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat .

Indikator Tingkat Penyelesaian Pendidikan menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan (SD, SMP, atau SMA) dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia yang seharusnya menyelesaikan jenjang tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan dalam memastikan bahwa semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Data menunjukkan terdapat perbaikan capaian penyelesaian pendidikan di seluruh jenjang, meskipun laju capaian semakin berkurang seiring peningkatan jenjang pendidikan. Tertinggi berada pada pendidikan dasar sebesar 93,01 % di 2024 berbanding terbalik dengan jenjang pendidikan menengah yang baru mencapai 58,04 % di 2024



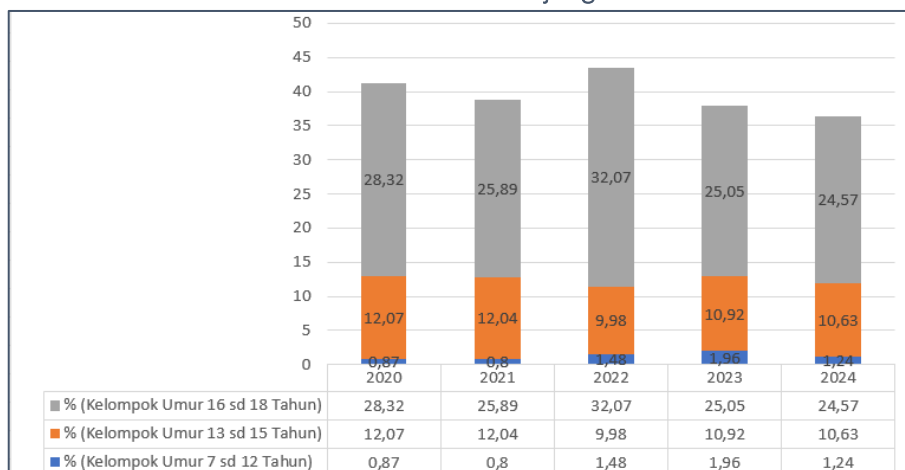
Grafik 2.33
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Pada Setiap Jenjang Pendidikan



Indikator 4.1.2 (a) : Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.

Indikator ini merupakan salah satu ukuran penting untuk mengevaluasi keberhasilan program pendidikan. Indikator ini berkaitan erat dengan tujuan untuk mengetahui prevalensi anak yang tidak mengenyam pendidikan di setiap jenjang pendidikan sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi area dan jenjang pendidikan yang membutuhkan perhatian lebih. Adanya pelambatan capaian penuntasan Pendidikan di jenjang dasar dan menengah khususnya, terkonfirmasi oleh peningkatan jumlah anak tidak sekolah dijenjang Pendidikan menengah/ sederajat. Di mana pada 2024 total ATS setelah mencapai 24,57 persen

Grafik 2.34
Anak Tidak Sekolah Pada Jenjang Pendidikan



Indikator 4.2.2* : Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia SD) menurut jenis kelamin

Capaian penting lainnya terkait tingkat partisipasi sekolah jenjang PAUD, Pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam bentuk apa pun (formal, nonformal, informal). Pendidikan dan pengasuhan yang diterima anak sejak lahir hingga usia enam tahun memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan potensi pembelajarannya di masa depan. Mengingat pada usia tersebut merupakan usia keemasan (*golden age*) dalam perjalanan hidup manusia dan menjadi fase terpenting dalam tumbuh kembang seorang anak.

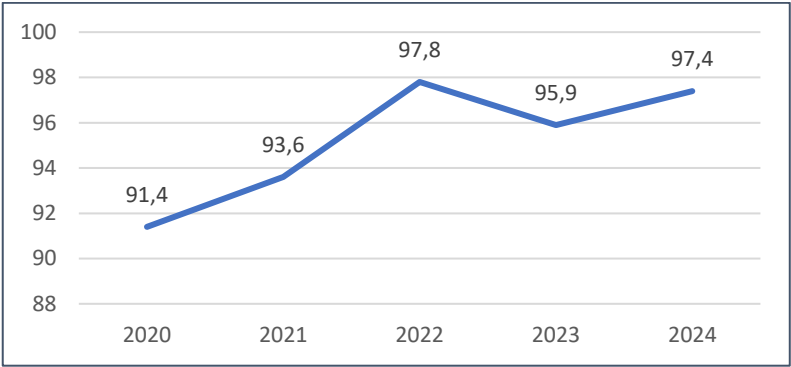


Indikator ini menunjukkan secara spesifik apakah ada perbedaan partisipasi antara anak laki-laki dan perempuan di usia prasekolah. Lebih jauh lagi indikator ini dapat digunakan mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di usia dini, yang penting untuk memastikan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang setara. Partisipasi dalam pembelajaran terorganisir di usia dini sangat penting Tanpa intervensi yang berimbang, anak rentan berisiko kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sejak awal.

Indikator ini merupakan alat ukur yang esensial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah maupun non-pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan anak usia dini secara merata dan inklusif. Khusus kondisi Gorontalo, meskipun sempat menurun pada 2023, namun secara cepat di 2024 indikator ini terkoreksi positif ke angka 97,4 atau hanya 0,4 poin lebih rendah dibandingkan *peak performance* di Tahun 2022.

Grafik 2.35

Tingkat Partisipasi Pembelajaran Tahun 2020 - 2024

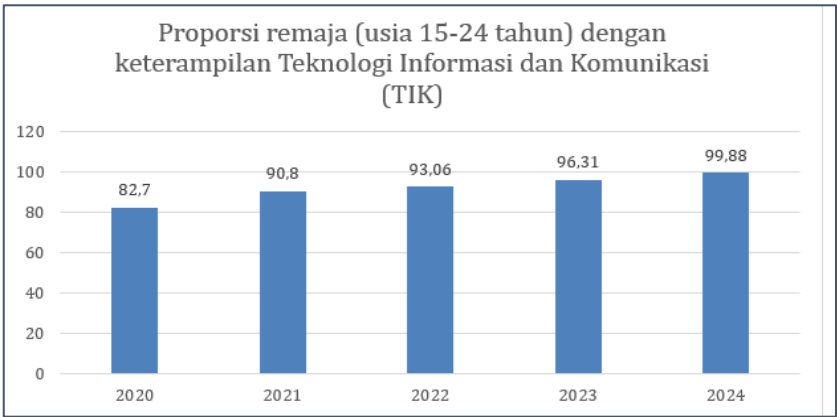


Indikator 4.1.2 (a) : Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Proporsi remaja usia 15-24 tahun yang memiliki keterampilan TIK sangat mendesak karena era digital menuntut kemampuan ini untuk mengakses informasi, melanjutkan pendidikan, dan bersaing di pasar kerja. Meningkatnya proporsi tersebut menunjukkan perbaikan akses dan keterampilan.

Data menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten terkait Proporsi Remaja Usia 15-24 Tahun dengan keterampilan TIK setiap tahunnya, kenaikan signifikan terjadi dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 8,1 poin, kemudian meningkat stabil hingga hampir mencapai 100% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh remaja di kelompok usia tersebut telah memiliki keterampilan dasar dalam penggunaan TIK. Keseluruhan sajian informasi di atas sedikit banyak menggambarkan tren positif digitalisasi generasi muda, kesiapan SDM dalam transformasi digital, dan pemerataan akses maupun kualitas layanan digital.

Grafik 2.36

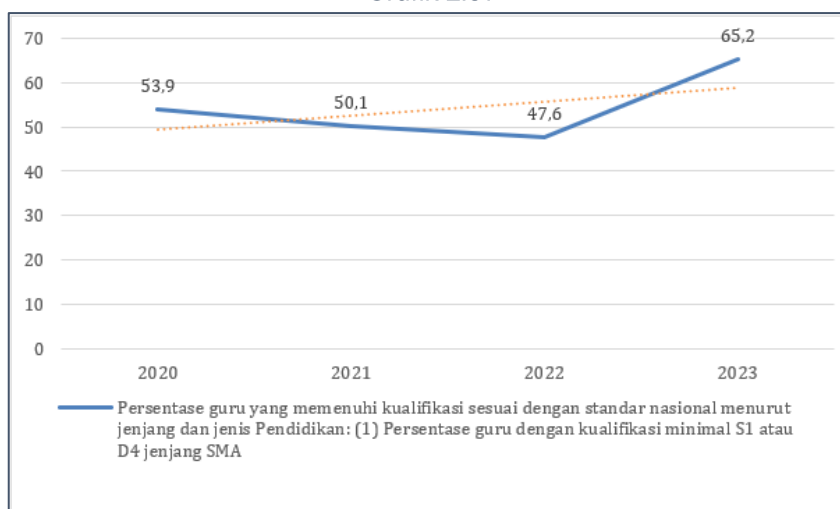


Indikator 4.c.1* : Persentase Guru Kualifikasi Minimal S1 atau D4

Perubahan dinamis dalam dunia pendidikan membawa fenomena-fenomena yang memerlukan adaptasi dan inovasi dalam dunia pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tuntutan masa depan. Konteks tersebut mensyaratkan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru merupakan salah satu pilar perbaikan kualitas layanan pendidikan guru yang berkualitas dan profesional adalah kunci utama untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik. Guru yang kompeten, inovatif, dan berdedikasi dapat meningkatkan proses pembelajaran, menghasilkan lulusan yang lebih baik, serta berperan langsung pada peningkatan input, proses, hingga output pendidikan di sekolah. Masih tersisa pekerjaan besar dalam upaya peningkatan kualitas Guru. Capaian 65,2 persen menunjukkan hampir separuh Guru di Gorontalo belum memenuhi kriteria/stadar nasional. Kondisi ini perlu mendapatkan penanganan segera.

Page III- 33

Grafik 2.37



Ketersediaan Sumber daya, Sarana, dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan mencakup semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Sebaliknya, prasarana pendidikan mencakup semua perangkat kelengkapan yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. (Fatmawati, N., Mappincara, A., & Habibah, 2019). Data Potensi Desa (Podes) Tahun 2025 menunjukkan, secara umum seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo telah memiliki satuan dan lembaga pendidikan dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi.

Tabel 2.4

Satuan dan Lembaga Pendidikan di Setiap Jenjang

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SD	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SMP	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SMA	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - SMK	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah - Perguruan Tinggi
Boalemo	82	57	15	10	1
Gorontalo	192	124	34	14	3
Pohuwato	100	54	16	12	1
Bone Bolango	124	53	16	7	2
Gorontalo Utara	110	52	14	6	1
Kota Gorontalo	50	23	14	6	8
Gorontalo	658	363	109	55	16

Sumber : BPS 2025

Data Neraca Pendidikan Daerah juga menunjukkan peningkatan jumlah pendidik seiring dengan peningkatan jumlah peserta didik, ruang kelas, maupun rombongan belajar.

Tabel 2.4

Neraca Pendidikan Daerah 2019 - 2024

KRITERIA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
SATUAN PENDIDIKAN	2,992	2,897	2,927	2,993	2,931
PENDIDIK	17,851	19,687	2,148	2,258	2,202
PESERTA DIDIK	267,05	279,588	258,214	250,446	247,249
RUANG KELAS	12,598	13,497	15,136	13,891	14,21
TENDIK	3,078	1,964	17,706	18,148	18,394
ROMBEL	13,053	13,369	13,101	13,098	13,202

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, NPD diolah

Demikian halnya alokasi Program Indonesia Pintar yang membaik secara proporsional setiap tahunnya, menunjukkan upaya pemerintah Pusat dan daerah dalam membantu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar dapat melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah, serta mengurangi kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Program ini juga bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan personal peserta didik seperti biaya transportasi dan perlengkapan sekolah, serta memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan layak sampai tamat pendidikan menengah

Tabel 2.6

Penerima Program PIP 2019 - 2023

Penerima Program Indonesia Pintar	2019	2020	2021	2022	2023
SD	57,895	70,422	64,512	72,437	67,618
SMP	24,434	33,596	30,038	33,913	37,056
SMA	8,554	14,702	12,012	14,518	13,531
SMK	6,428	11,21	8,065	9,373	15,31

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, NPD diolah

Kualitas Layanan Pendidikan

Kualitas layanan pendidikan digambarkan melalui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai hak setiap warga. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Ada empat Kelompok Indikator yang menjadi indikator prioritas dengan sekolah dalam wewenang Provinsi yakni jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Tabel 2.7

Indikator Pendidikan terkait Prioritas Provinsi

NO	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas Provinsi
1	Kualitas Hasil Belajar	Kemampuan Literas
		Kemampuan Numerasi
2	Iklim Lingkungan Belajar	Iklim Keamanan Sekolah
		Iklim Kebinekaan
		Iklim Inklusivitas
3	Kualitas Lulusan SMK	Penyerapan Lulusan SMK
		Kepuasan Dunia Kerja pada budaya kerja lulusan
4	Akses	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas

Hasil penilaian rapor pendidikan menunjukkan bahwa pada rata-rata capaian pemenuhan SPM Pendidikan di Provinsi Gorontalo telah mencapai kategori tuntas muda.

Tabel 2.8

Persentase Capaian Indikator Rapor Mutu Pendidikan, tahun 2024

Indikator Prioritas	SMA umum	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Kemampuan Literasi	62.29	55.14	64.29	73.09	35
Kemampuan Numerasi	58.64	52.72	57.14	60.86	30
Penyerapan Lulusan SMK		73.46			
Kepuasan Dunia Kerja terhadap kompetensi lulusan		93.4			
Kualitas Pembelajaran	61.53	59.49	69	63.14	61
Iklim Keamanan Satpen	71.75	67.21	73.39	73.43	67
Iklim Kebhinekaan	71.06	67.96	73	70.7	71.14
Iklim Inklusivitas	56.43	53.81	63.6	66.43	60.42

Sumber : Rapor Mutu Pendidikan , 2024

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian SDGs Tujuan 4 dalam rangka mewujudkan Pendidikan Berkualitas, yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Secara umum meliputi meliputi ketidaksetaraan akses, kesenjangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur digital, kualitas guru, kurikulum yang usang, dan pendanaan yang tidak memadai. :

1. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 15 tahun ke atas rendah (tahun 2024: 8,64). Rendahnya RLS membatasi kemampuan lulusan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan memahami materi pembelajaran yang kompleks hal yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
2. Tingginya angka putus sekolah (tahun 2023: 458 SD/MI). turut dipengaruhi oleh kondisi sosial , ekonomi , dan budaya.
3. Layanan pendidikan belum merata, Kualitas Pendidikan masih rendah belum capaian mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional.
4. Kualitas, kuantitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan masih terbatas. Kualitas pelatihan guru yang belum memenuhi standar dan metode pembelajaran yang tidak kompatibel dan adaptif dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan
5. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum optimal;
6. Kesadaran masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah masih rendah;
7. Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi masih belum optimal, terutama pada jenjang pendidikan khusus dan SMK;
8. Pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

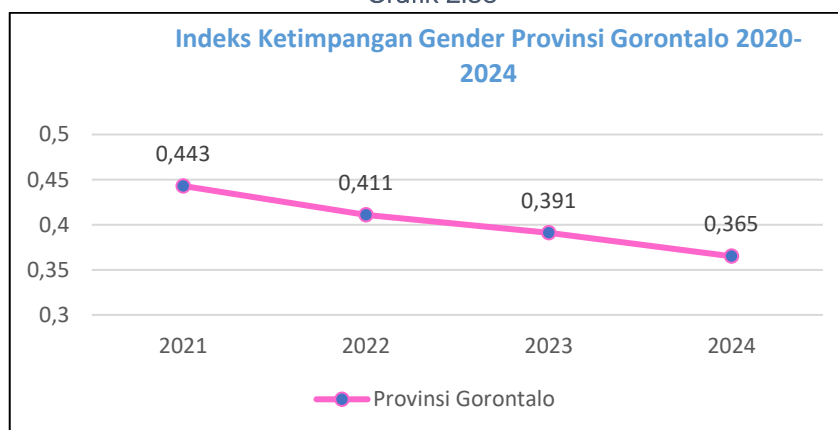


A. Pengantar

Kesetaraan Gender penting dalam pembangunan global karena merupakan hak asasi manusia dan kunci keberlanjutan pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan laki-laki secara setara meningkatkan produktivitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan. Ketika perempuan mendapat akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, kualitas hidup keluarga dan masyarakat meningkat. Selain itu, kesetaraan gender menjadi faktor lintas sektor yang menentukan keberhasilan seluruh tujuan SDGs lainnya. Oleh karena itu, SDG 5 ditetapkan sebagai pilar utama untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua.

Jika dilihat dari analisis posisi relatif berdasarkan tren data BPS (2020–2024), nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Gorontalo berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Gorontalo relatif rendah dibanding banyak provinsi lain di Indonesia. Seiring waktu perempuan Gorontalo semakin meningkat aksesnya terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan juga peluang kerja, optimis untuk pencapaian Goals 5 tahun 2030. Disisi lain dapat mendukung pendapatan dalam rumah tangga, dan berkontribusi terhadap penurunan angka Kemiskinan yaitu tujuan 1 SDGs.

Grafik 2.38



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

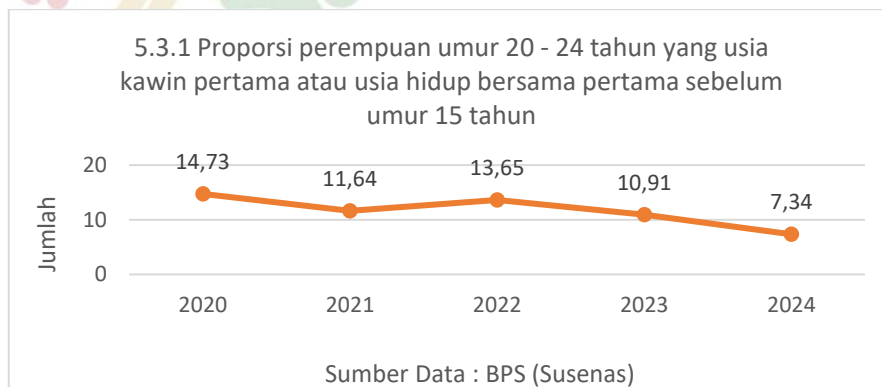
B. Status Capaian

5.3.1 Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun.

Data BPS menyebutkan adanya perbaikan capaian pada komponen IKG layanan kesehatan, namun hal ini belum optimal sebab masih ada kasus perkawinan anak. Masih terdapat perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun sebesar 7,34 persen di tahun 2024. Perlu di maksimalkan upaya preventif dan kuratif untuk pencegahan perkawinan anak dan layanan kesehatan reproduksi remaja. Serta memberikan penegasan melalui penaikan batas usia kawin menjadi 19 tahun dan jika menikah di bawah usia tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama.

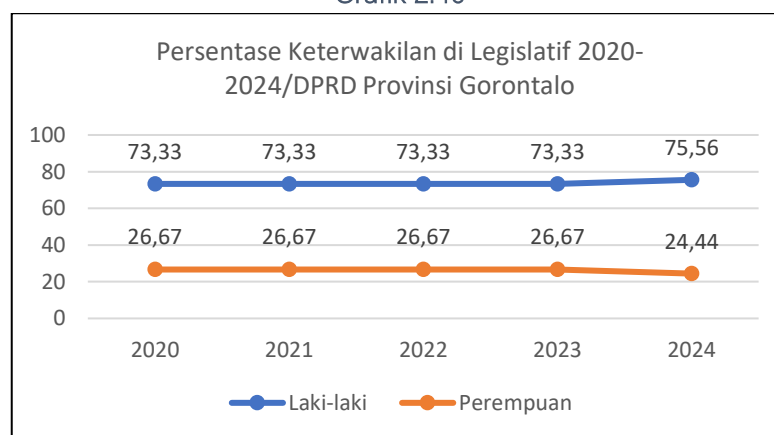


Grafik 2.39



5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.

Grafik 2.40

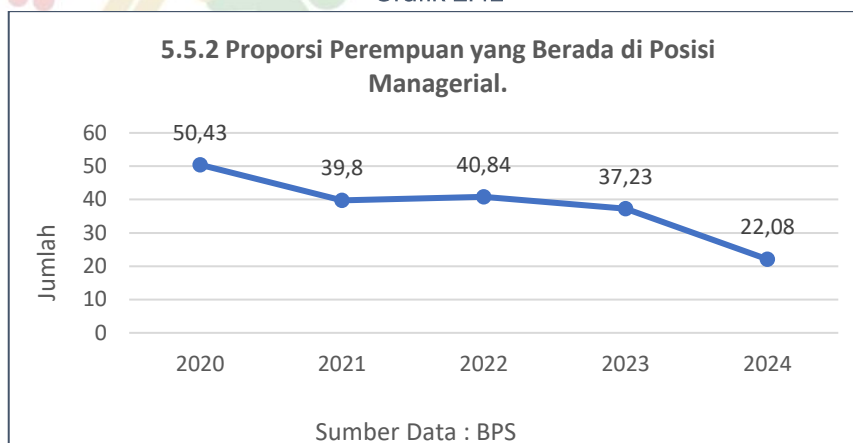


Jika dilihat dari capaian indikator ini presentasi keterwakilan perempuan di legislatif cenderung menurun dan terdapat kesenjangan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan cenderung tidak setara.

5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sesuai data BPS menunjukkan capaian yang relative tinggi di tahun 2020 diangka 50,43 namun kondisi ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 tercatat terjadi penurunan 28,35 poin. Penurunan ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan dan pengambil kebijakan/keputusan di sector public dan swasta semakin kecil. Hal ini antara lain disebabkan oleh efek pandemi covid di mana banyak perempuan kehilangan pekerjaan atau kembali ke sektor informal. Selain itu kondisi *double burden* yang dialami perempuan yaitu peran perempuan untuk produktif di ranah publik dan domestik secara bersamaan sehingga perempuan dalam dunia kerja cenderung lebih rentan kelelahan fisik, hambatan mengembangkan diri khususnya untuk akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan karir. Hal ini dapat di stimulus dengan mengambil kebijakan afirmatif dan dukungan bagi pengembangan karir perempuan seperti fleksibilitas kerja, pelatihan kepemimpinan dan lingkungan kerja yang ramah perempuan dan anak.



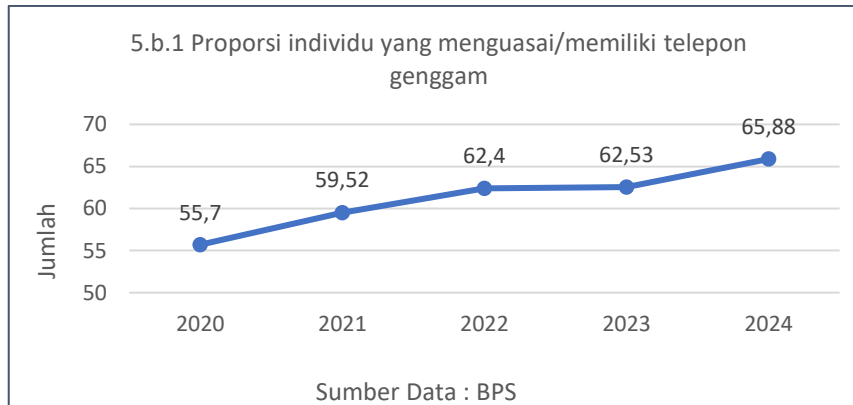
Grafik 2.41



5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Capaian indikator 5.b.1 Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yakni dari 55,7 persen menjadi 65,88 persen. Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat, termasuk perempuan, terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kepemilikan telepon genggam tidak hanya menandakan kemajuan literasi digital, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital, memperoleh akses pendidikan daring, dan memperkuat jejaring sosial. Capaian ini berkontribusi langsung terhadap tujuan SDGs 5 tentang kesetaraan gender, khususnya dalam pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan teknologi informasi namun untuk mencapai target TPB di tahun 2030 tantangannya adalah meningkatkan layanan akses terhadap teknologi informasi yang merata di seluruh wilayah provinsi Gorontalo.

Grafik 2.42



TANTANGAN

- 1) Keterwakilan Politik Rendah, perempuan hanya mengisi 20 persen kursi DPRD, masih jauh dari target dalam kesetaraan untuk representasi perempuan di politik, yaitu 30 persen. Demikian pula posisi perempuan yang berada dalam jabatan publik maupun posisi pengambil kebijakan terus turun dalam beberapa tahun terakhir hal ini disebabkan oleh factor sosial kultural pembagian peran antara perempuan dan laki-laki sebagai figur publik dan pemimpin sedangkan perempuan pada ranah domestik.
- 2) Ketimpangan antar wilayah, kota dan desa menimbulkan ketimpangan akses terdapat pendidikan dan ekonomi yaitu pekerjaan formal, serta kontrol terhadap aset dan pengembangan usaha rendah. Turut berdampak pada ketimpangan gender tantangannya ke depan pemerintah perlu mendorong kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemanfaatan potensi lokal desa.



- 3) Kapasitas kelembagaan untuk implementasi pembangunan kesetaraan gender, belum optimal, *mainstreaming* gender belum merata serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan responsif gender yang belum sepenuhnya terukur. Pemerintah Provinsi maupun kab/kota perlu untuk melakukan penguatan Pokja PUG, penguatan vokal point PUG, manajemen data terpilah dan monitoring dan evaluasi.
- 4) Data tematik Gedsu untuk indikator pembangunan belum sepenuhnya tersedia dan terupdate di level provinsi dan kabupaten/kota seperti kekerasan berbasis gender, kepemilikan aset, kesenjangan upah.

A. Pengantar

Akses terhadap air bersih, sanitasi dan kebersihan adalah kebutuhan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Seiring pertumbuhan jumlah populasi, permintaan air tidak hanya meningkat, tetapi juga melampaui laju pertumbuhan penduduk. Laporan PBB (2023) mengungkapkan bahwa separuh populasi dunia telah mengalami kelangkaan air setidaknya sekali dalam setahun. Situasi ini diproyeksikan akan memburuk akibat kenaikan suhu global. Oleh karena itu, langkah-langkah penting untuk mewujudkan akses universal air minum yang aman dan terjangkau pada 2030 meliputi investasi dalam infrastruktur sanitasi, perlindungan ekosistem perairan, pendidikan hygiene, serta peningkatan efisiensi penggunaan air yang menjadi kunci mengatasi kelangkaan.

Tujuan 6 memiliki 4 target dan 4 indikator yang tersedia disagregasinya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga evaluasi pencapaian target tujuan 6 ini, difokuskan pada 4 target dengan menganalisis 4 indikator yang datanya tersedia.

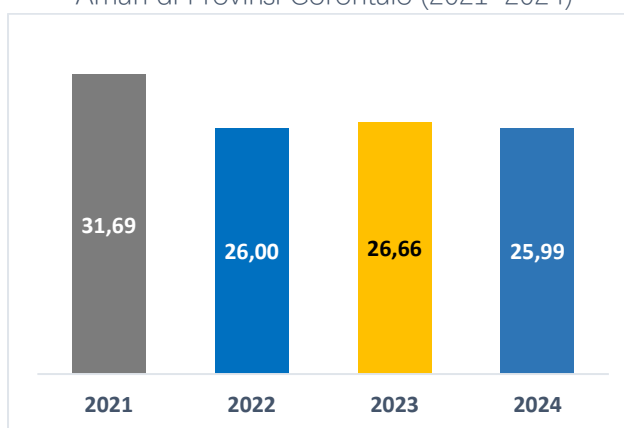
B. Status Capaian

6.1.1 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola secara Aman

Pada periode 2021-2024, Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air, yang ditandai dengan ketimpangan antara ketersediaan air dan kebutuhan yang terus meningkat. Berdasarkan data BPS 2024, dampak dari ketimpangan ini adalah menurunnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Gorontalo. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, angkanya turun dari 31,69% pada 2021 menjadi 26,00% di 2022, kemudian sedikit memulih ke 26,66 % pada 2023. Sayangnya tren positif ini tidak berlanjut karena angka tersebut Kembali turun menjadi 25,99 di tahun 2024.

Grafik 2.43

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola secara Aman di Provinsi Gorontalo (2021-2024)



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)

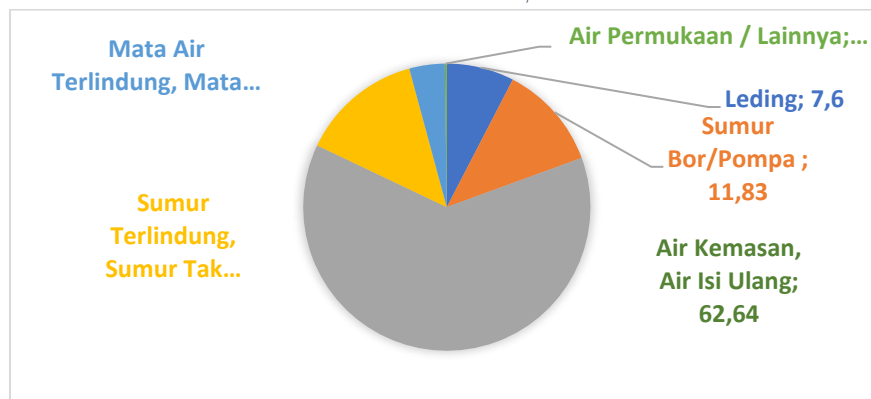
Penurunan akses terhadap air minum layak di Provinsi Gorontalo menandakan capaian yang *off-track* (cenderung mundur) dari target universal 100% pada 2030. Akar masalahnya terletak pada ketimpangan antara kebutuhan air baku yang terus meningkat dan ketersediaannya yang terbatas. Meskipun pemerintah telah berupaya melalui program perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan non-perpipaan seperti Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), upaya tersebut belum cukup untuk membalikkan tren. Oleh karena itu,

diperlukan kolaborasi dan inovasi multi pihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menutup kesenjangan capaian yang sangat besar, yaitu sekitar 74% untuk menuju target 100% pada tahun 2030.

Grafik 2.44

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Minum di Provinsi Gorontalo, 2023

Page III- 41



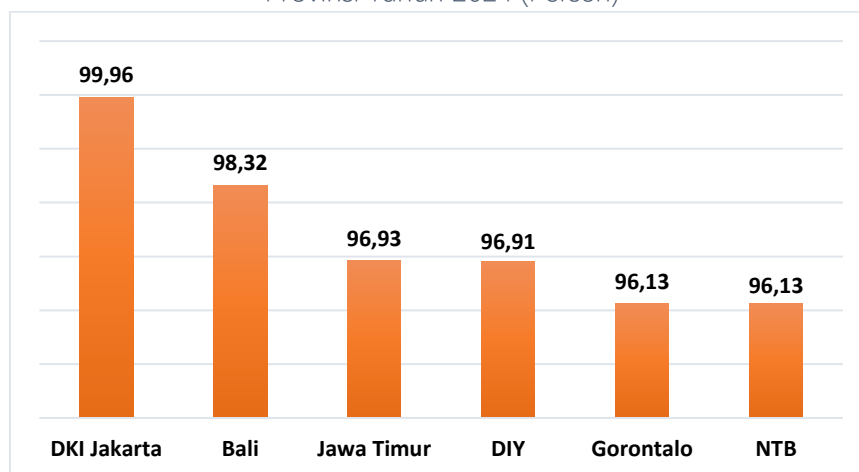
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)

Pada 2023, ketergantungan sebagian besar rumah tangga di Provinsi Gorontalo terhadap air kemasan/isi ulang sebagai sumber air minum utama sangat tinggi, yakni mencapai 62,64%. Sumber lainnya adalah sumur terlindungi (13,72%) dan sumur bor/pompa (11,83%). Air minum kemasan ataupun air minum isi ulang menjadi sumber air minum dengan pengguna terbesar di wilayah ini. Meskipun demikian, masih terdapat 0,22% rumah tangga yang bergantung pada air permukaan yang tidak layak.

Di sisi lain, data 2024 mencatat bahwa Gorontalo menempati peringkat kelima secara nasional dengan 96,13% rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum layak. Pencapaian ini, yang setara dengan Nusa Tenggara Barat dan berada di bawah DKI Jakarta (99,96%), Bali (98,32%), Jawa Timur (96,93%), dan DI Yogyakarta (96,91%), menunjukkan bahwa akses terhadap air layak secara infrastruktur memang tinggi. Namun, tingginya ketergantungan pada air kemasan mengisyaratkan adanya tantangan dalam hal keterjangkauan, kualitas, atau kepercayaan terhadap air yang disuplai melalui sumber-sumber lainnya.

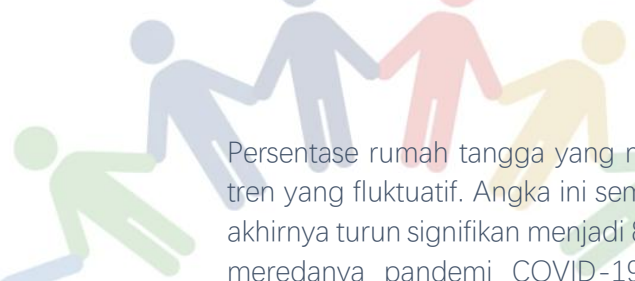
Grafik 2.45

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Provinsi Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

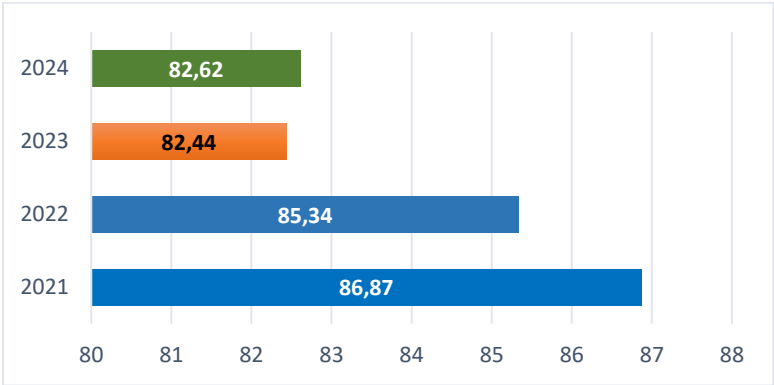
6.2.1 (b) Persentase Rumah Tangga yang memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air



Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menunjukkan tren yang fluktuatif. Angka ini sempat menurun dari 86,87% (2021) menjadi 85,34% (2022), sebelum akhirnya turun signifikan menjadi 82,44% pada tahun 2023. Penurunan ini diduga kuat terkait dengan meredanya pandemi COVID-19, yang sebelumnya mendorong kesadaran akan pentingnya kebiasaan mencuci tangan. Meskipun sempat mengalami kenaikan tipis menjadi 82,62% pada 2024, capaian ini masih jauh di bawah level awal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang telah dibangun, khususnya di lingkup rumah tangga, perlu terus diupayakan agar tidak semakin mengendur kebiasaan mencuci tangan, terlepas dari ada atau tidaknya pandemi.

Grafik 2.46

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Gorontalo (2021-2024)



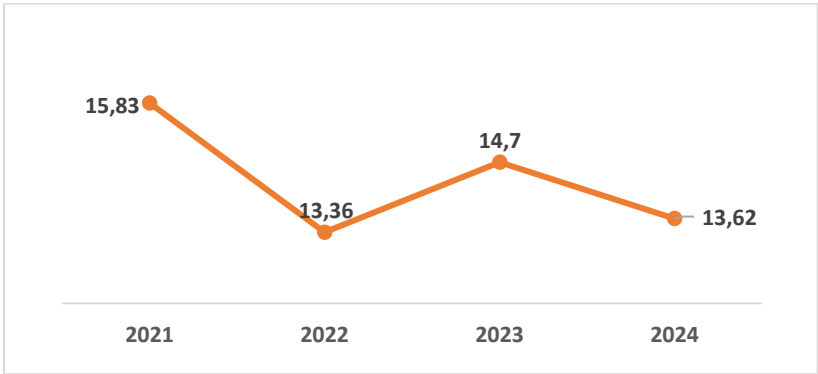
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)

6.2.1 (c) Persentase Rumah Tangga yang Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka

Provinsi Gorontalo telah menunjukkan komitmen dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada indikator penurunan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Data periode 2021-2024 (Gambar 6.5) menunjukkan dinamika capaian tersebut. Angka BABS berhasil ditekan dari 15,83% pada tahun 2021 menjadi 13,36% di tahun 2022. Meski sempat mengalami kenaikan sedikit menjadi 14,70% pada 2023, upaya pembenahan terus dilakukan sehingga angka tersebut kembali turun menjadi 13,62% di tahun 2024. Tren fluktuatif ini mengindikasikan bahwa meski progres telah dicapai, perilaku BABS masih rentan untuk kembali terjadi dan membutuhkan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Grafik 2.47

Persentase Rumah Tangga yang Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka (2021-2024)



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)



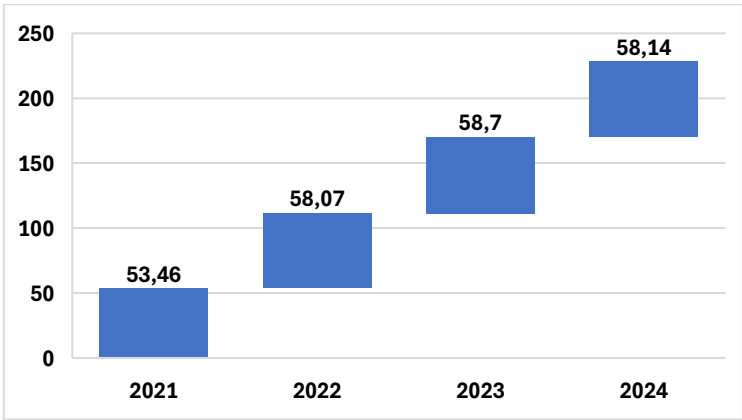
Permasalahan dari masih adanya praktik BABS tidak lepas dari keterbatasan akses terhadap sanitasi layak yang dikelola secara aman. Sanitasi layak tidak sekadar berarti memiliki jamban, tetapi harus memenuhi standar teknis yang dapat mencegah pencemaran lingkungan. Standar ini mencakup (1) kloset leher angsa yang berfungsi mencegah baliknya bau dan hawa kotor dari saluran pembuangan, (2) tangki septik yang kedap air, sehingga limbah tinja tidak meresap dan mencemari air tanah, (3) pengelolaan lumpur tinja yang aman, di mana tangki septik harus disedot secara berkala (minimal 5 tahun sekali) dan limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau tersambung ke sistem perpipaan (SPALD-T). Pemenuhan standar ini, ditambah dengan praktik cuci tangan pakai sabun dan air sebagai intervensi kesehatan yang murah dan efektif, menjadi kunci dalam memutus mata rantai penularan penyakit.

Ketika satu atau lebih dari elemen ini tidak terpenuhi, fasilitas sanitasi menjadi tidak optimal. Akibatnya, masyarakat mungkin merasa bahwa jamban mereka tidak nyaman atau justru mencemari lingkungan sekitar, yang pada akhirnya dapat mendorong kembali ke praktik BABS di tempat terbuka. Oleh karena itu, strategi ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sanitasi baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas sanitasi existing untuk memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses ke sistem pembuangan yang tertutup (leher angsa) dan pengolahan yang aman (septik tank + IPLT). Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap kualitas sanitasi ini, diharapkan penurunan angka BABS dapat konsisten dan target SDGs untuk mengakhiri praktik BABS dapat tercapai.

6.3.2 (a) Indeks Kualitas Air

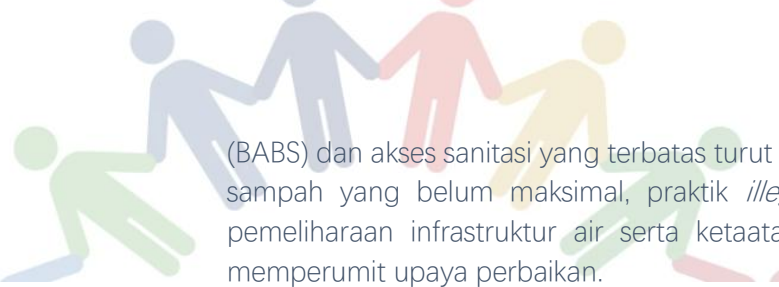
Kualitas air permukaan yang meliputi sungai, danau, dan waduk di Provinsi Gorontalo, yang diukur melalui Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada dalam kategori rendah dan menunjukkan tren peningkatan yang belum stabil selama periode 2021-2024. Meskipun sempat mengalami peningkatan dari 53,46 pada 2021 menjadi 58,07 di 2022 dan 58,70 di 2023, perbaikan ini bersifat sementara. Pada 2024, Indeks Kualitas Air justru turun menjadi 58,14, yang mengonfirmasi bahwa capaian tersebut masih berkategori rendah dan belum lepas dari status "buruk". Kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa tujuh sungai utama, termasuk Sungai Bone dan Paguyaman, berstatus tercemar ringan hingga sedang, yang mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Grafik 2.48
Indeks Kualitas Air di Provinsi Gorontalo (2021-2024)



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)

Penyebab kualitas air di Provinsi Gorontalo rendah yaitu bersifat multidimensi, terutama didorong oleh tingginya beban pencemaran dari limbah pertanian, peternakan, dan industri yang belum dikelola dengan optimal, bahkan limbah domestik akibat perilaku Buang Air Besar Sembarangan

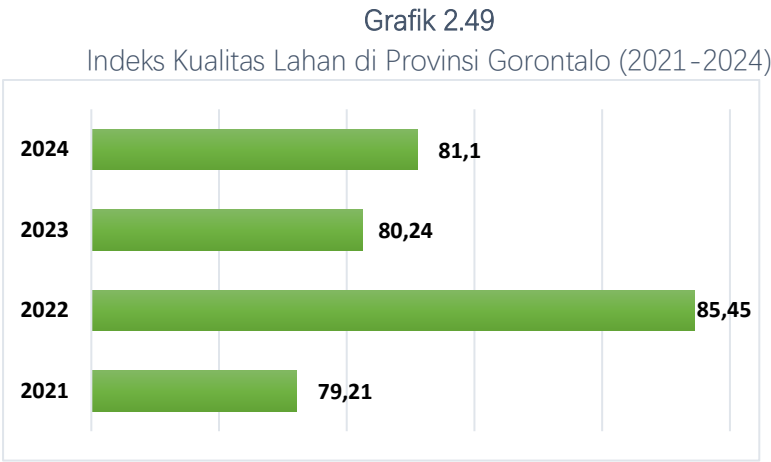


(BABS) dan akses sanitasi yang terbatas turut memperburuk kondisi. Faktor lain seperti pengelolaan sampah yang belum maksimal, praktik *illegal logging*, dan keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan infrastruktur air serta ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah, semakin memperumit upaya perbaikan.

Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan target SDGs untuk menjamin ketersediaan air bersih dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk semua pada 2030 berisiko tinggi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih agresif dan sistematis guna membalikkan tren ini. Langkah strategis harus difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku pencemar, disertai dengan program percepatan pembangunan sarana sanitasi dan pengelolaan sampah yang terpadu. Di sisi lain, rehabilitasi lingkungan melalui penghijauan daerah aliran sungai dan promosi praktik pertanian berkelanjutan juga mendesak dilakukan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan aksi nyata dan terukur, harapan untuk memperbaiki kualitas air dan mewujudkan target SDGs di Provinsi Gorontalo masih dapat diupayakan.

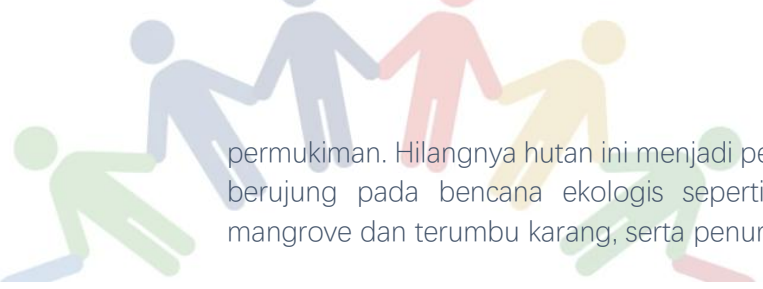
6.1.1 (a) Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan data BPS tahun 2024, indeks kualitas lahan Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan sebesar 81,10% dibandingkan capaian tahun 2023 yang 80,24%. Terlebih ketika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 61,95%, yang menegaskan posisi Gorontalo yang lebih baik secara relatif. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, tren indeks kualitas lahan justru mengungkap dinamika yang fluktuatif dan mengkhawatirkan. Setelah melonjak drastis dari 79,21% (2021) menjadi 85,45% (2022), indeks ini justru mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun berikutnya. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas lahan belum stabil dan keberlanjutannya rentan terganggu oleh berbagai tekanan.



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)

Angka indeks yang tampak positif, justru tersimpan tantangan krisis lahan yang sistematis. Data RKPD 2025 mengungkap bahwa dari total 245.000 Ha lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto-Bone Bolango, sebanyak 140.487 Ha atau lebih dari setengahnya berada dalam kondisi agak kritis hingga sangat kritis. Kerusakan ini diperparah oleh laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu lima tahun saja (2013–2018), telah terjadi alih fungsi lahan hutan seluas 2.100 Ha menjadi permukiman dan pertanian, yang secara langsung memicu peningkatan laju erosi dan sedimentasi. Lebih lanjut data dari Forest Watch Indonesia (FWI), menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo kehilangan 33.492 Ha tutupan hutan alam selama periode 2017–2021, menyisakan hanya 693.795 hektare (57% tutupan hutan alam dari total luas daratan). Penyebabnya adalah alih fungsi lahan skala besar untuk ekspansi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, proyek bio energi, dan



permukiman. Hilangnya hutan ini menjadi pemicu utama erosi dan sedimentasi, yang pada akhirnya berujung pada bencana ekologis seperti penyusutan Danau Limboto, kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta penurunan kualitas air secara keseluruhan.

Tabel 2.9

Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, Kualitas Air Laut, dan IKL Provinsi Gorontalo, 2021-2024

No	Indeks	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	53,46	58,07	58,70	58,14
2	Indeks Kualitas Udara	93,96	94,47	94,43	-
3	Indeks Tutupan Lahan	79,21	85,45	80,24	81,10
4	Indeks Kualitas Air Laut	-	84,08	85,54	-
5	Indeks Kualitas Lingkungan	77,32	79,79	79,52	-

Sumber data: BPS Provinsi Gorontalo (2024) dan RKPD Provinsi Gorontalo (2025)

Tekanan dari aktivitas manusia semakin memperparah degradasi ini. Maraknya pembangunan permukiman di sempadan sungai yang mengabaikan prinsip *waterfront city* tidak hanya merusak fungsi ekologis kawasan, tetapi juga berujung pada meningkatnya kerentanan terhadap banjir. Fakta bahwa 57% populasi di pusat Kota Gorontalo tinggal di kawasan rawan banjir menjadi bukti nyata bahwa kerusakan lahan telah bertransformasi dari sekadar isu lingkungan menjadi ancaman sosial-ekonomi yang langsung mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, respons pemerintah daerah, masih belum sepenuhnya optimal. Komitmen yang tercermin dari ketersediaan kebijakan pengendalian pencemaran, sayangnya, belum diimbangi dengan inovasi dan efektivitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis melalui program yang lebih integratif dan aplikatif. Fokus aksi harus diarahkan pada perlindungan mata air dan pemulihan kesehatan sungai dengan pendekatan lintas wilayah DAS, yang diwujudkan melalui rehabilitasi lahan kritis secara masif, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sempadan sungai, serta insentif untuk praktik pertanian konservasi. Pada akhirnya, kolaborasi multi pihak antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci untuk mengubah capaian indeks yang fluktuatif ini menjadi tren keberlanjutan, sehingga target SDGs untuk ekosistem daratan dapat diwujudkan.

C. Tantangan

- Ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
- Keterbatasan infrastruktur air baku atau sanitasi yang berkelanjutan.
- Isu pendanaan dan kemampuan fiskal daerah.
- Faktor geografis (misalnya, kondisi cekungan air tanah atau daerah rawan bencana).



Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua



A. PENGANTAR

Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Gorontalo telah menunjukkan kemajuan nyata dalam memperluas akses terhadap energi yang bersih, andal, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian integral dari komitmen daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) nomor 7, yaitu memastikan ketersediaan energi modern bagi semua. Akses terhadap listrik kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan dan kepulauan, sebagai hasil dari kebijakan perluasan jaringan dan pemanfaatan teknologi energi yang efisien. Capaian ini menggambarkan keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan layanan energi yang inklusif.

Selain peningkatan akses, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan energi secara efisien juga mulai tumbuh. Peralihan penggunaan energi rumah tangga menuju sumber yang lebih bersih, seperti gas dan listrik, memperlihatkan transformasi pola konsumsi energi yang lebih modern. Pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendorong penggunaan energi ramah lingkungan melalui program edukasi dan fasilitasi infrastruktur pendukung. Transformasi ini menjadi pondasi penting bagi terwujudnya sistem energi daerah yang lebih mandiri dan berkeadilan.

Dari sisi penyediaan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Meskipun kontribusi EBT dalam bauran energi daerah masih berfluktuasi, berbagai inisiatif pengembangan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikro hidro, dan biogas telah mulai dijalankan di beberapa wilayah. Inovasi ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui pemanfaatan potensi energi setempat yang berwawasan lingkungan.

Upaya pembangunan sektor energi di Provinsi Gorontalo semakin terarah dengan adanya Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2025–2050 dan integrasinya dalam RPJMD 2025–2029. Kedua dokumen tersebut menegaskan arah kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis potensi lokal, memperluas akses energi terbarukan, serta memastikan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penyediaan energi. Dengan pondasi yang telah dibangun, Provinsi Gorontalo menatap periode 2025–2030 sebagai momentum untuk mempercepat transisi menuju sistem energi yang tangguh, bersih, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

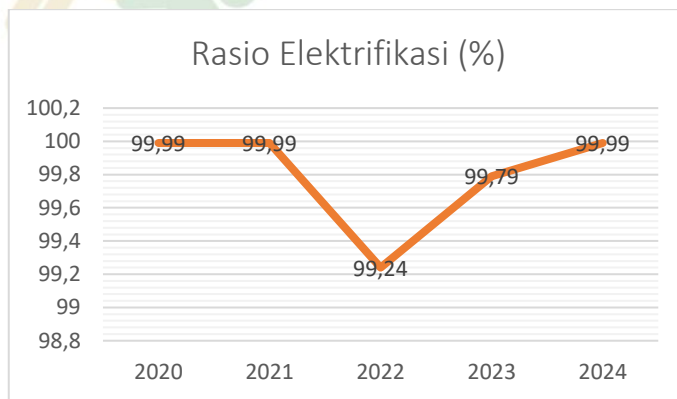
B. STATUS CAPAIAN

a. Rasio Elektrifikasi

"Akses listrik di Provinsi Gorontalo telah mencapai tahap universal, menandai keberhasilan pemerataan layanan energi hingga wilayah terpencil. Fokus ke depan diarahkan pada peningkatan keandalan dan kualitas pasokan energi."



Grafik 2.50



Sumber: PLN (2024)

Rasio elektrifikasi Provinsi Gorontalo selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat penetrasi yang sangat tinggi dan relatif stabil, dengan capaian hampir menyentuh universal pada hampir seluruh titik waktu. Grafik yang menampilkan tren ini sebaiknya menonjolkan stabilitas di level tinggi—pesan kunci: akses dasar listrik telah berhasil diperluas hingga menjangkau hampir seluruh rumah tangga dan fasilitas publik, sehingga permasalahan utama kini bergeser dari akses ke kualitas, keandalan, dan keberlanjutan pasokan.

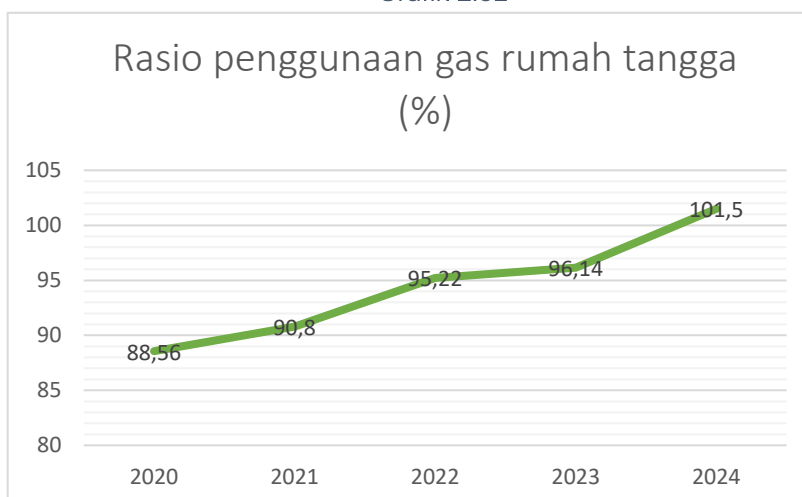
Faktor pendorong capaian ini meliputi perluasan jaringan listrik, intervensi sistem off-grid untuk kawasan terpencil (misal instalasi PLTS kecil / mikrogrid dan PLTMH skala mikro), serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia jasa energi. Untuk pembacaan grafik, beri anotasi pada titik-titik keluarnya proyek infrastruktur utama atau program percepatan elektrifikasi—hal ini membantu pembaca memahami hubungan antara kebijakan/aktivitas lapangan dan lompatan (atau pemulihan) angka.

Meskipun rasio tinggi menunjukkan keberhasilan akses, interpretasi grafis harus diimbangi dengan catatan kualitas layanan: frekuensi gangguan, kapasitas pembangkitan lokal, dan beban puncak musiman yang tidak tertangani dapat menimbulkan kerentanan baru. Rekomendasi untuk grafik: sertakan layer atau catatan kecil mengenai indikator kualitatif pendukung (mis. indeks keandalan/pemadaman rata-rata jika tersedia) sehingga pembaca tidak keliru menganggap “100%” berarti semuanya sempurna.

b. Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

“Peningkatan pemanfaatan gas rumah tangga menunjukkan pergeseran menuju energi yang lebih bersih dan efisien, didukung oleh kemudahan akses, kebijakan konversi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan energi ramah lingkungan.”

Grafik 2.51



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (2024)



Rasio penggunaan gas rumah tangga menunjukkan perubahan pola konsumsi energi domestik yang bergerak dari bahan bakar tradisional menuju penggunaan energi yang lebih modern dan efisien. Dalam interpretasi grafik, fokuskan narasi pada kecenderungan substitusi: peningkatan adopsi gas menandakan keberhasilan program distribusi dan subsidi, kemudahan akses infrastruktur, serta perubahan perilaku konsumen di perkotaan dan sebagian wilayah perdesaan.

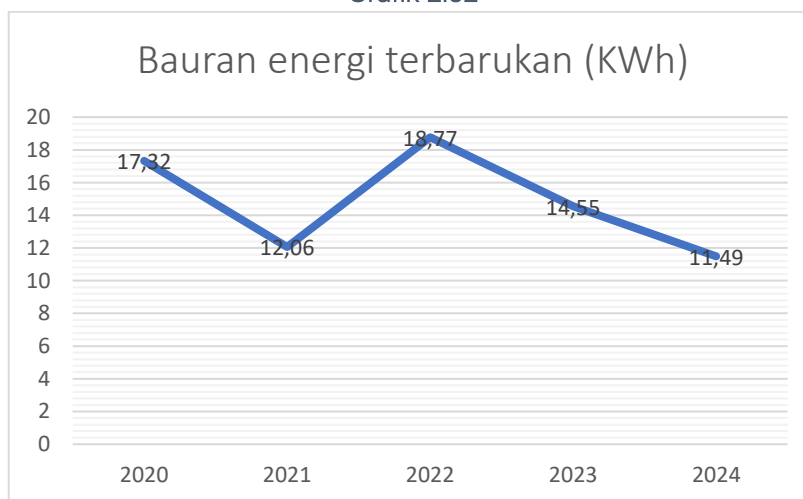
Analisis lebih mendalam perlu memasukkan konteks ekonomi dan ketersediaan pasokan — misalnya, lonjakan adopsi bisa dipengaruhi oleh program subsidi atau kampanye konversi, sementara fluktuasi bisa terkait masalah logistik distribusi atau perubahan harga. Untuk pembacaan grafik, tandai periode intervensi kebijakan (misal program konversi kompor, subsidi, atau intervensi distribusi) agar korelasi antara kebijakan dan pergeseran konsumsi terlihat jelas.

Perlu juga diingat bahwa peningkatan penggunaan gas rumah tangga bukan otomatis menjamin dampak lingkungan yang netral: penting mengkaji sumber gas (LPG vs biogas lokal), keamanan penyimpanan, dan akses yang merata antara kelompok pendapatan. Pada grafik pendukung, sertakan catatan tentang kesenjangan wilayah misal perbedaan adopsi antara kabupaten pesisir, dataran tinggi, dan pulau terpencil agar pembaca memahami dinamika ruang yang mendasari tren agregat.

c. Bauran Energi Terbarukan

“Bauran energi terbarukan di Provinsi Gorontalo mulai menunjukkan tren positif melalui pengembangan PLTS, PLTMH, dan biogas. Ke depan, penguatan investasi dan integrasi sistem energi bersih menjadi kunci menuju ketahanan energi daerah yang berkelanjutan.”

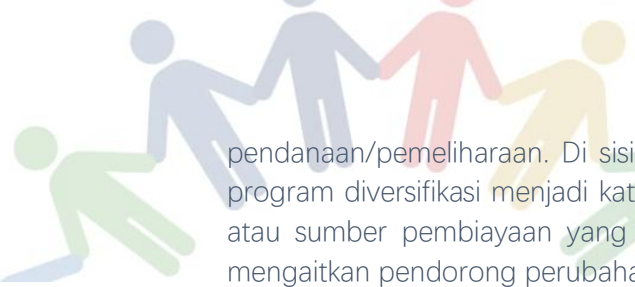
Grafik 2.52



Sumber: Dinas ESDM Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Gorontalo (2025)

Bauran energi terbarukan menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir namun terdapat sinyal pemulihan dan penguatan sejak 2022. Ketika menyajikan grafik, penting menekankan dua pesan: pertama, adanya langkah konkret menuju diversifikasi sumber energi; kedua, kontribusi EBT masih perlu ditingkatkan agar transformasi energi benar-benar substansial. Narasi harus membantu pembaca melihat bahwa angka tahunan mewakili hasil kumulatif dari proyek-proyek kecil (PLTMH mikro, PLTS atap, fasilitas biogas) dan upaya skala provinsi.

Dalam ulasan mendalam, jelaskan hambatan yang menjelaskan fluktuasi misal investasi awal yang besar untuk infrastruktur EBT, proses perizinan, kapasitas teknis lokal, dan keterbatasan



pendanaan/pemeliharaan. Di sisi lain, dorongan kebijakan seperti road map energi daerah dan program diversifikasi menjadi katalis. Pada grafik, tandai proyek EBT penting, perubahan regulasi, atau sumber pembiayaan yang memengaruhi kapasitas terpasang untuk membantu pembaca mengaitkan pendorong perubahan dengan hasil numerik.

Agar grafik mendukung pengambilan kebijakan, tambahkan lapisan proyeksi konservatif versus ambisius dan bandingkan bauran EBT dengan kebutuhan beban puncak atau kapasitas cadangan. Juga tampilkan catatan mengenai kualitas data (misal pembeda antara kapasitas terpasang dan produksi aktual) supaya pembaca memahami bahwa peningkatan persentase EBT harus diikuti dengan pengukuran output riil dan integrasi ke dalam jaringan untuk menilai dampak energi bersih secara substansial.

C. TANTANGAN

Berikut sejumlah tantangan utama yang dihadapi Provinsi Gorontalo dalam upaya mewujudkan sistem energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan:

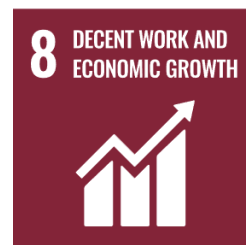
- a. Akses dan Keandalan Energi
 - Meskipun rasio elektrifikasi telah mencapai hampir universal, kualitas dan keandalan pasokan listrik di beberapa wilayah perdesaan dan kepulauan masih belum stabil, terutama saat beban puncak dan musim ekstrem.
 - Keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi menyebabkan ketimpangan kualitas layanan energi antar kabupaten/kota.
 - Kapasitas cadangan energi daerah masih bergantung pada sistem interkoneksi eksternal, belum sepenuhnya tangguh menghadapi gangguan teknis atau bencana.
- b. Transisi Energi Rumah Tangga
 - Distribusi infrastruktur gas rumah tangga belum merata; sebagian wilayah pedesaan masih bergantung pada bahan bakar konvensional (minyak tanah, kayu bakar).
 - Keterjangkauan harga dan logistik distribusi LPG masih menjadi hambatan, terutama di wilayah dengan akses transportasi terbatas.
 - Kesadaran masyarakat terhadap efisiensi energi dan keselamatan penggunaan gas masih perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan.
- c. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - Kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi daerah masih rendah dan berfluktuasi akibat keterbatasan investasi, pendanaan, dan teknologi.
 - Kendala teknis dan regulasi seperti proses perizinan, tata kelola lahan, serta minimnya kapasitas teknis lokal menghambat realisasi proyek EBT skala kecil hingga menengah.
 - Kurangnya insentif dan model bisnis inovatif yang menarik bagi sektor swasta dan investor lokal untuk berpartisipasi dalam proyek energi bersih.
 - Integrasi sistem EBT dengan jaringan utama (grid interconnection) masih terbatas, menyebabkan pemanfaatan energi terbarukan belum optimal.
- d. Tata Kelola dan Sinergi Lintas Sektor
 - Koordinasi antar pemangku kepentingan energi (pemerintah daerah, PLN, swasta, dan masyarakat) belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem kebijakan energi daerah.
 - Keterbatasan data dan basis informasi energi terbarukan menghambat proses perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).
 - Sinergitas program energi dengan sektor lain (seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil) masih lemah, padahal potensi integrasi lintas sektor tinggi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- e. Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
 - Keterbatasan daya beli sebagian masyarakat terhadap energi modern berpotensi menimbulkan kesenjangan energi (energy poverty) di wilayah tertentu.



- Kendala sosial dan budaya dalam penerimaan teknologi energi baru masih terjadi, terutama di komunitas pedesaan yang kuat mempertahankan kebiasaan lama.
- Dampak lingkungan dari eksplorasi energi non-terbarukan (seperti pertambangan) masih perlu dikendalikan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan.



Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Layak untuk Semua



A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (SDG 8) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan tersedianya pekerjaan yang layak dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2030, SDG 8 menargetkan terciptanya lapangan kerja yang bermartabat, penguatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Pencapaian SDG 8 yang ditandai dengan perkembangan perekonomian dan produktivitas tenaga kerja menunjukkan kinerja positif melalui intervensi kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Laju pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 44,43 juta rupiah. Disektor ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja juga terus menunjukkan perbaikan, didukung oleh penguatan sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan UMKM. Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta didukung transformasi digital turut memberikan kontribusi positif terhadap pembukaan peluang ekonomi yang lebih luas. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Tingginya tingkat pekerjaan informal, ketimpangan spasial, serta kesenjangan berbasis gender dan pendidikan menunjukkan perlunya penguatan kualitas pekerjaan, perluasan perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Perkembangan ekonomi Provinsi Gorontalo juga sejalan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional dengan munculnya fenomena baru seperti pertumbuhan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi berbasis platform digital yang secara imperatif membuka ruang sekaligus menuntut penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif dan visioner. Selain itu, pencapaian SDG 8 harus tetap memastikan prinsip Leave No One Behind (LNOB) yaitu memastikan setiap kelompok, terutama yang paling rentan, memperoleh akses terhadap kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan.

B. Status Capaian

Kinerja perekonomian Provinsi Gorontalo yang ditunjukkan dengan PDRB Per kapita menunjukkan kinerja positif. PDRB per kapita yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai 44,43 juta Rupiah meningkat 4,92 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 42,35 juta Rupiah. PDRB per kapita mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,63 persen selama 5 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 10 tahun PDRB per kapita meningkat sebesar 76,73 persen, di mana tahun 2015 PDRB per kapita sebesar 25,14 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di Provinsi Gorontalo semakin membaik dalam 10 tahun terakhir.

Berbanding terbalik dengan peningkatan PDRB per kapita, laju pertumbuhan PDRB sedikit mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 2,89 persen. Laju pertumbuhan PDRB dalam 5 tahun terakhir mengalami pelambatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2015 dengan laju pertumbuhan mencapai 4,57 persen. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Gorontalo juga masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan PDRB per kapita Nasional yang tumbuh 3,95 persen. Hal ini menggambarkan laju PDRB mengalami peningkatan, namun masih belum optimal. Sektor-sektor perekonomian belum optimal mendorong peningkatan nilai tambah produk, sehingga secara tidak langsung belum signifikan dapat mendorong tingkat kesejahteraan penduduk.

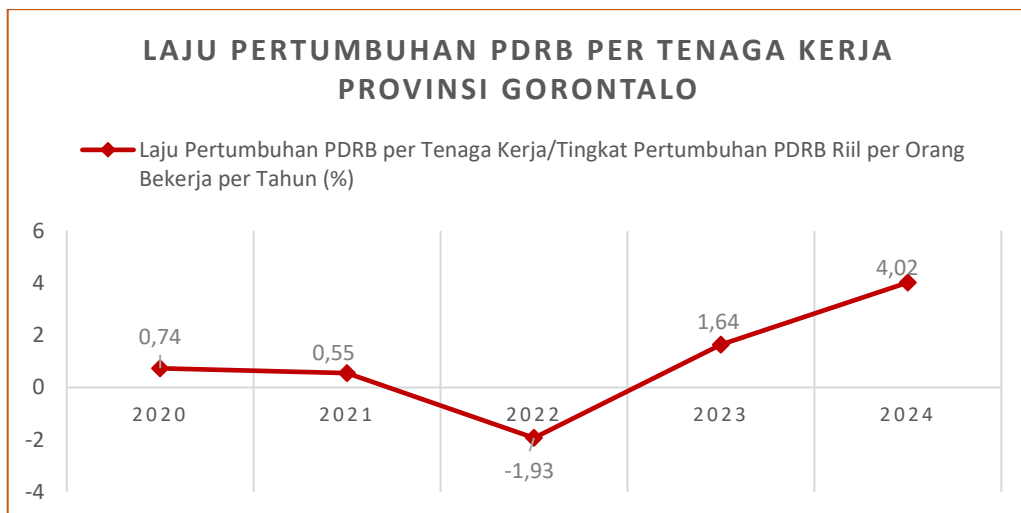
Grafik 2.53



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2025)

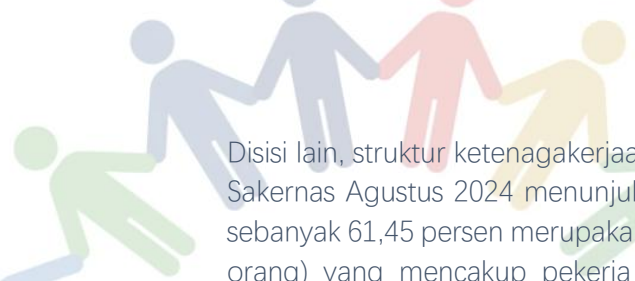
Dari sisi produktivitas, indikator 8.2.1 Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan fluktuatif, di mana pada kurun waktu 2020-2022 mengalami pelambatan rata-rata sebesar -0,2 persen, namun 2023 hingga 2024 mengalami pertumbuhan positif. Tingkat pertumbuhan PDRB Riil per kapita tahun 2024 mencapai 4,02 persen meningkat 2,38 persen poin dibandingkan tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,004 persen. Jika dibandingkan tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,09 persen, tren laju pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan.

Grafik 2.54



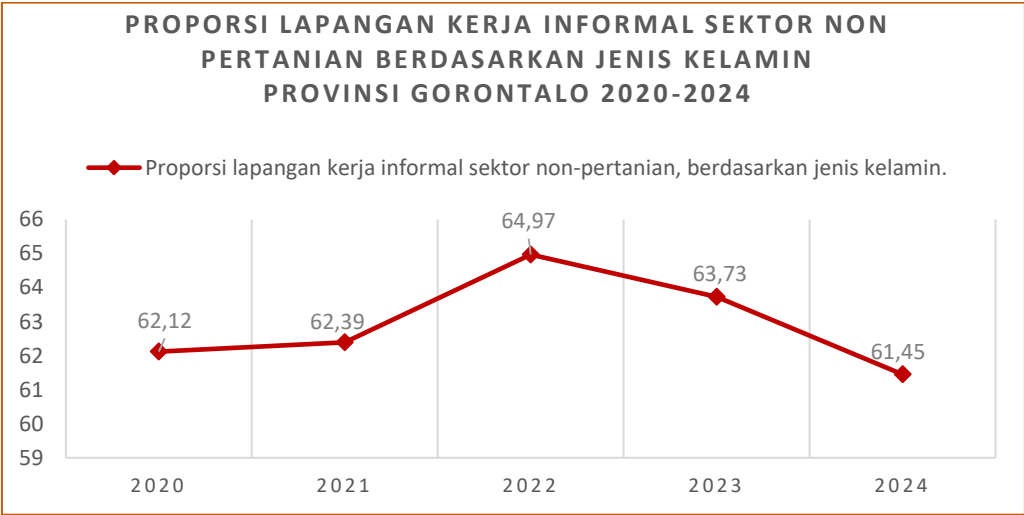
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Perbaikan kinerja pertumbuhan PDRB dalam 2 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan ekonomi di level makro dan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja telah dilaksanakan melalui kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, meskipun dalam implementasinya pencapaian kinerja pertumbuhan PDRB per kapita maupun per tenaga kerja belum dapat menggambarkan tingkat pemerataan ekonomi di masing-masing sektor, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB per kapita dan per tenaga kerja dalam delapan tahun terakhir (2015-2024) memperlihatkan tren pemulihan, seiring dengan peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian seperti UMKM, pariwisata, pertanian, industri, pertambangan serta sektor-sektor strategis lainnya. Namun demikian fluktuasi yang masih sering terjadi menggambarkan kinerja perekonomian yang belum cukup stabil.



Disisi lain, struktur ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh sektor informal. Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa penduduk bekerja dari 632.184 orang yang bekerja, sebanyak 61,45 persen merupakan penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor informal (388.459 orang) yang mencakup pekerja mandiri, buruh tidak tetap dan pekerja keluarga. Konsentrasi terbesar masih terdapat pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, terutama di wilayah perdesaan serta kelompok dengan tingkat pendidikan rendah. Meskipun secara proporsi pendidikan informal masih relatif tinggi, namun persentase penduduk bekerja di sektor informal mengalami penurunan selama kurun tiga tahun terakhir, persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2022 sebesar 64,97 persen, turun menjadi 63,73 persen pada Agustus 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 61,45 persen pada Agustus 2024.

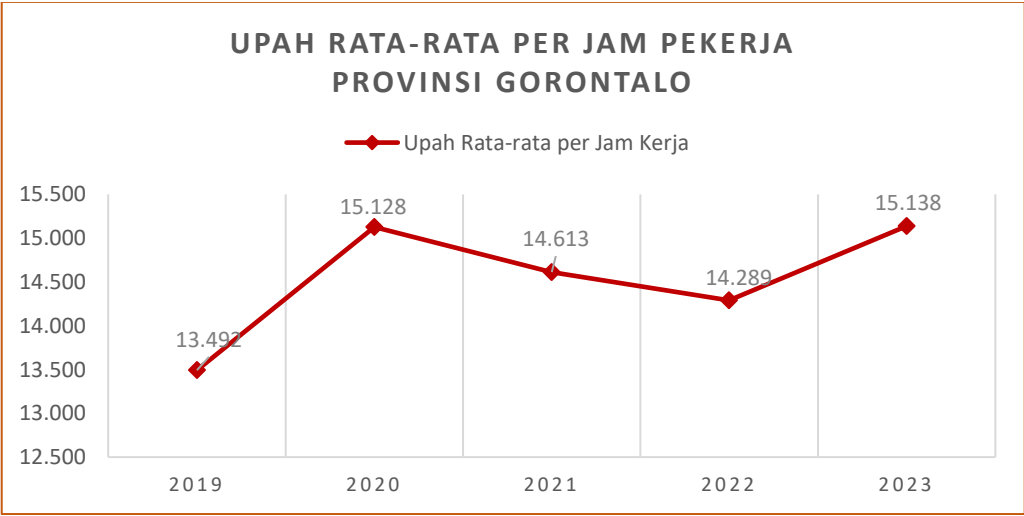
Grafik 2.55



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Mayoritas pekerja di Provinsi Gorontalo bekerja disektor informal, dengan struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,18 persen, dan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang cenderung relatif rendah. Jika ditinjau dari data sakernas terhadap upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang fluktuatif. Di mana tahun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 15.128 /jam, dan selanjutnya selama dua tahun berturut-turut (2021-2022) mengalami penurunan, dan kembali naik ditahun 2023 mencapai Rp. 15.138.

Grafik 2.56



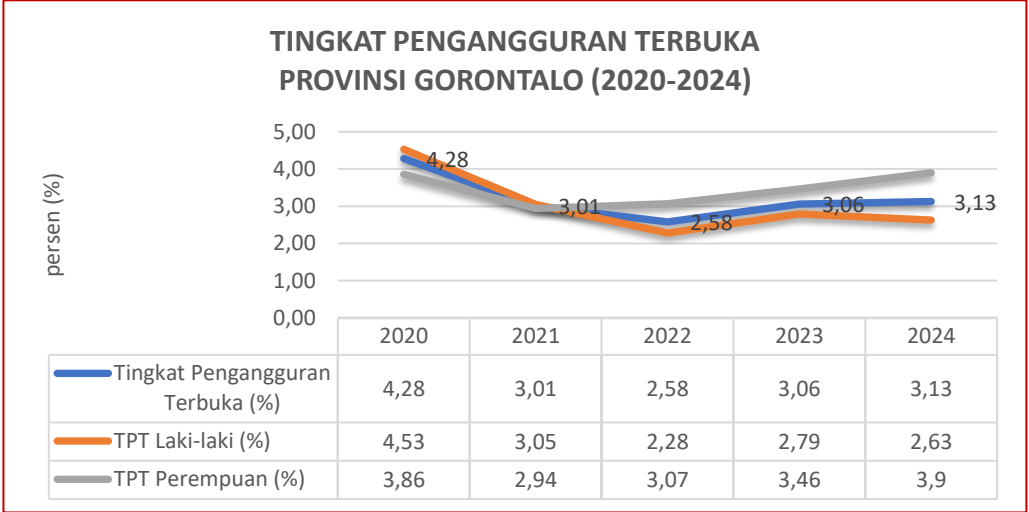
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025



Indikator ketenagakerjaan lainnya ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Di mana TPT Agustus 2022 turun hingga mencapai 2,58 persen, dan pada Agustus 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,06 persen pada Agustus 2023, dan kembali naik sebanyak 0,07 persen poin menjadi 3,13 pada Agustus 2024. Hal ini berarti bahwa selama 3 tahun terakhir proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja mengalami kenaikan, namun persentase TPT Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang mencapai 4,91 persen tahun 2024.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, maka TPT perempuan masih lebih tinggi dibanding dengan TPT laki-laki. Dalam tiga tahun terakhir TPT perempuan menunjukkan peningkatan dari 3,07 persen pada 2022 menjadi 3,46 persen pada 2023, kemudian naik kembali menjadi 3,90 persen pada tahun 2024. Sedangkan, TPT laki-laki mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Dari 2,28 persen pada tahun 2022 naik menjadi 2,79 persen pada tahun 2023, kemudian turun pada tahun 2024 menjadi 2,63 persen.

Grafik 2.57

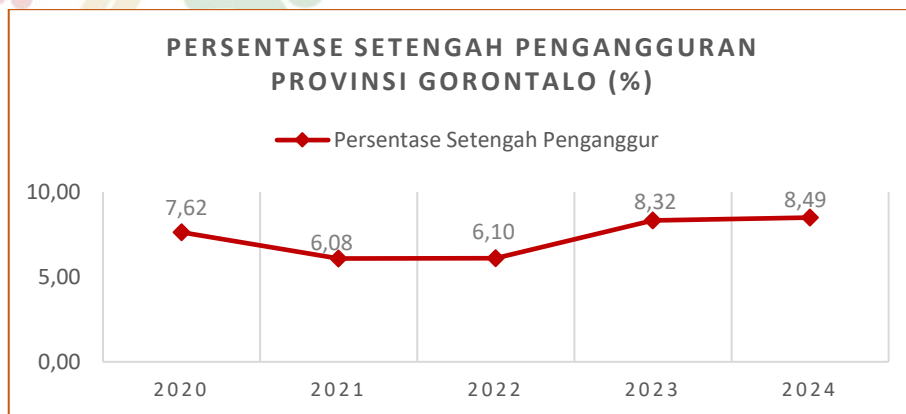


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan Sakernas Agustus 2024 penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur yaitu penduduk yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan mengalami peningkatan. Selama 4 tahun terakhir persentase setengah penganggur mengalami peningkatan. Tahun 2024 persentase setengah penganggur sebesar 8,49 persen. Dilihat dari jumlah setengah penganggur di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai 53.686 orang, di mana sebanyak 34.211 orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 19.475 orang adalah perempuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih tingginya pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu. Hal ini menggambarkan kualitas dan kestabilan pekerjaan pekerja masih jauh dari ideal dan banyak dari para pekerja terjebak dalam pekerjaan paruh waktu atau informal. Peningkatan jumlah setengah penganggur menunjukkan permasalahan struktural dalam pasar kerja, di mana sektor formal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.



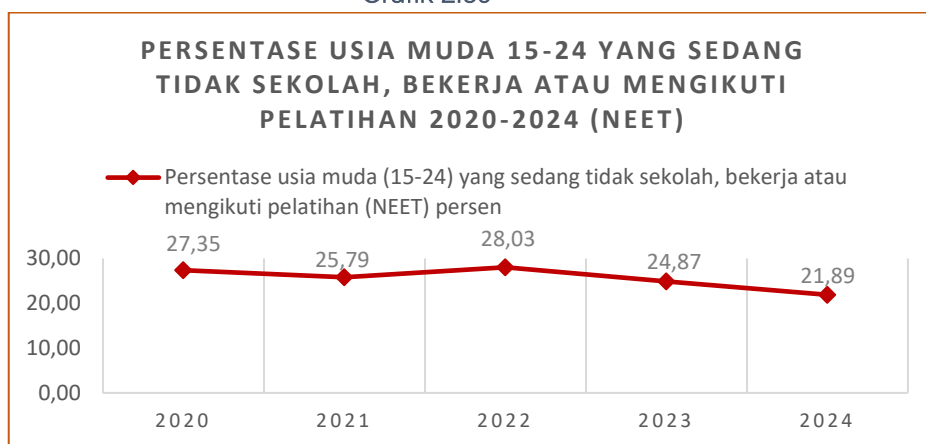
Grafik 2.58



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Komponen lainnya menunjukkan bahwa persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2024 NEET Provinsi Gorontalo sebesar 21,89 persen.

Grafik 2.59



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Disisi lain persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi Gorontalo tahun 2024 mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2024 turun hingga mencapai 5,39 persen. Indikator ini memberikan gambaran positif terhadap upaya penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, sebagaimana salah satu target SDG tujuan 8 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya. Sehingga meski terjadi penurunan, target ini masih perlu menjadi perhatian khusus melalui kebijakan-kebijakan pemerintah maupun seluruh stakeholder pembangunan untuk memberikan ruang serta akses pendidikan maupun pelatihan yang layak dan memadai bagi penduduk usia 10-17 yang masih merupakan usia sekolah.

Grafik 2.60



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Dalam rangka peningkatan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pengembangan terhadap pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Grafik 2.61



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian SDGs Tujuan 8 dalam rangka memastikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Produktivitas tenaga kerja masih rendah
2. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor-sektor pertanian
3. Masih tingginya pekerja sektor informal yang diantaranya disebabkan karena masih rendahnya kualitas tenaga kerja.
4. Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan industri yang ramah lingkungan. Dari aspek ketenagakerjaan, masih rendahnya kualitas SDM ketenagakerjaan, serta belum optimalnya pengembangan kerjasama dunia pendidikan dengan dunia usaha.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata, diantaranya masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung (amenitas), Masih rendahnya aksesibilitas, tingkat kenyamanan, kebersihan dan keamanan, masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas; masih kurangnya investasi dalam usaha wisata, Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata halal; dan Kurangnya Promosi dan Pemasaran, Masih kurangnya koordinasi sektor-sektor swasta, kelompok usaha seperti Pokdarwis ataupun BUMDES Kepariwisataan.
6. Kapasitas dan daya saing UMKM masih rendah. Beberapa aspek yang masih menjadi tantangan dan pengembangan UMKM diantaranya dari aspek Sumber Daya Manusia yang mencakup kemampuan UMKM dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Dari aspek aksesibilitas teknologi yang berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital khususnya untuk pemasaran produk. Selain itu dari aspek strategi bisnis maupun akses permodalan juga masih rendah. Tantangan lainnya yaitu kolaborasi wirausaha dalam membangun komunitas bisnis/usaha masih belum terfasilitasi dengan optimal, mulai dari membangun mitra kerjasama serta membangun citra atau branding dengan kualitas produk UMKM lokal.
7. Masih kurangnya investasi yang dapat menstimulus perekonomian daerah, serta pembukaan lapangan pekerjaan.
8. Masih tingginya pekerja informal, dengan upah yang minim. Selain itu belum optimalnya sistem perlindungan sosial yang disediakan untuk membantu masyarakat pekerja informal dari berbagai macam elemen.



Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



A. PENGANTAR

Tujuan 9 SDGs menempatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan sebagai landasan penting untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Gorontalo terus memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat tumbuhnya perekonomian daerah dan naiknya daya saing wilayah. Peningkatan kualitas dan konektivitas wilayah diyakini mampu mengurangi hambatan mobilitas, menekan biaya logistik, mempermudah akses layanan dasar, serta mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru.

Arah pembangunan infrastruktur juga sejalan dengan kerangka pembangunan nasional dan daerah yang menekankan percepatan konektivitas antara kawasan produksi dan distribusi. Upaya pembangunan infrastruktur darat, laut, udara, serta digital dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk desa, kawasan tertinggal, dan pulau-pulau terluar, dapat terhubung secara efektif dalam sistem ekonomi regional. Hal ini menjadi strategi penting dalam mendukung efisiensi transaksi ekonomi, pergerakan barang dan jasa, serta mobilitas tenaga kerja dan masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, Provinsi Gorontalo juga mulai mengarahkan kebijakannya pada industrialisasi yang inklusif dan mendorong produktivitas daerah. Transformasi ini dilakukan dengan memperkuat peran UMKM, IKM, dan sektor usaha rakyat sebagai bagian penting dari rantai nilai industri. Upaya tersebut ditunjang melalui peningkatan akses terhadap teknologi, pembiayaan, kemitraan usaha, serta dukungan regulasi yang lebih ramah investasi. Pendekatan ini bertujuan agar industrialisasi tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi agenda yang semakin strategis dalam mendorong transformasi industri daerah. Berbagai program peningkatan kompetensi, reskilling, dan upskilling diarahkan untuk memperkuat tenaga kerja di sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Dengan demikian, pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur di Gorontalo tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki sarana fisik, namun juga memastikan terbangunnya manusia dan ekosistem pendukung yang mampu mempercepat modernisasi ekonomi serta mendukung pencapaian target SDGs secara berkelanjutan.

B. STATUS CAPAIAN

a. Kondisi mantap jalan nasional di Provinsi Gorontalo

Capaian indikator kondisi mantap jalan nasional di Provinsi Gorontalo pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan mempertahankan kategori sangat baik. Pada tahun 2020, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 97,89%, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 94,94% pada 2021 dan kembali turun ke titik terendah dalam lima tahun terakhir pada 92,89% pada 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya beban lalu lintas yang meningkat, kebutuhan pemeliharaan yang belum sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi, ataupun adanya penambahan ruas yang sedang dalam tahap peningkatan kualitas sehingga belum masuk kategori mantap.

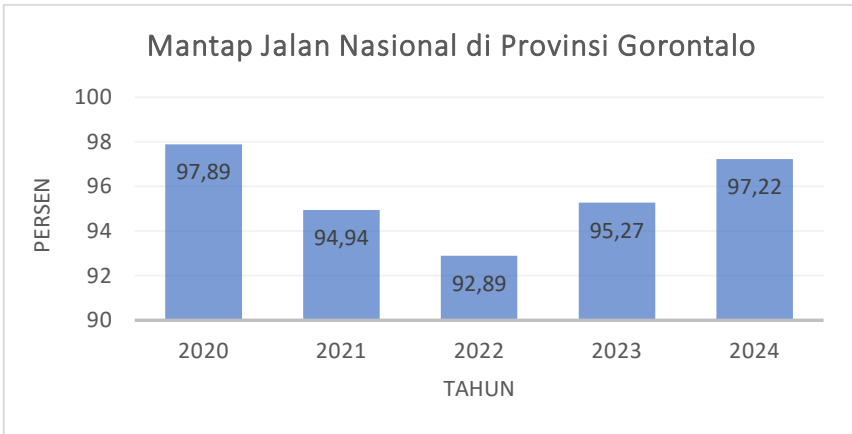
Memasuki tahun berikutnya, tren menunjukkan perbaikan kinerja dengan meningkatnya kondisi mantap menjadi 95,27% pada 2023, bahkan kembali mendekati level semula pada 97,22% pada 2024.



Hal ini menandakan bahwa intervensi pemeliharaan rutin, peningkatan kapasitas jalan, serta program rekonstruksi dan preservasi telah efektif mengembalikan performa jaringan jalan nasional di Provinsi Gorontalo. Pemulihan ini juga mengonfirmasi berjalannya perencanaan pemeliharaan jalan secara bertahap dan terukur, termasuk pada koridor-koridor strategis yang menghubungkan pusat produksi, distribusi, dan permukiman.

Secara keseluruhan, kinerja lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jalan nasional di Gorontalo sudah berada dalam kondisi sangat mantap dan dapat dikatakan berada di atas standar rata-rata nasional. Konsistensi angka di kisaran 92–98% selama 2020–2024 menunjukkan bahwa jaringan jalan nasional telah mampu memberikan dukungan yang kuat bagi mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, serta kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, capaian ini menjadi landasan penting untuk mendukung peningkatan produktivitas wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian target SDGs Tujuan 9 terkait infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.

Grafik 2.62



Sumber: Kementerian PUPR 2025

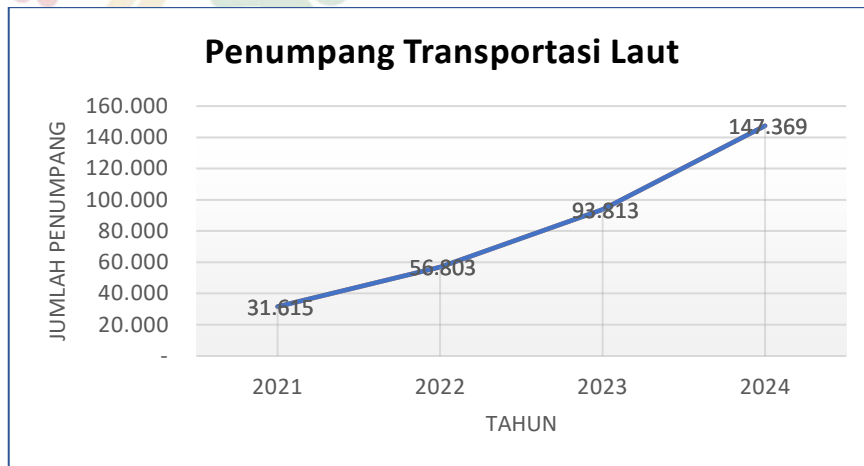
b. Transportasi Laut

- Jumlah Penumpang Transportasi Laut

Jumlah penumpang transportasi laut di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang konsisten meningkat selama 2021–2024. Data memperlihatkan peningkatan dari 31.615 penumpang (2021) menjadi 56.803 (2022), lalu hampir dua kali lipat menjadi 93.813 pada 2023, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 147.369 penumpang pada 2024. Tren ini menandakan pemulihan kuat pasca pandemi serta menunjukkan bahwa transportasi laut kembali memainkan peran penting dalam mobilitas antarwilayah, terutama karena karakteristik geografis Gorontalo yang memiliki hubungan erat dengan jalur distribusi antarpulau.

Peningkatan ini juga dapat dikaitkan dengan mulai membaiknya aktivitas ekonomi domestik, peningkatan pergerakan tenaga kerja, serta penguatan aktivitas perdagangan dan kunjungan wisata. Selain itu, lonjakan jumlah penumpang juga mencerminkan meningkatnya keandalan sektor transportasi laut sebagai moda yang terjangkau bagi masyarakat di berbagai kabupaten/kota, termasuk wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap moda transportasi lain. Dengan demikian, periode 2021–2024 dapat dikategorikan sebagai fase pemulihan dan ekspansi pemanfaatan angkutan laut oleh masyarakat.

Grafik 2.63



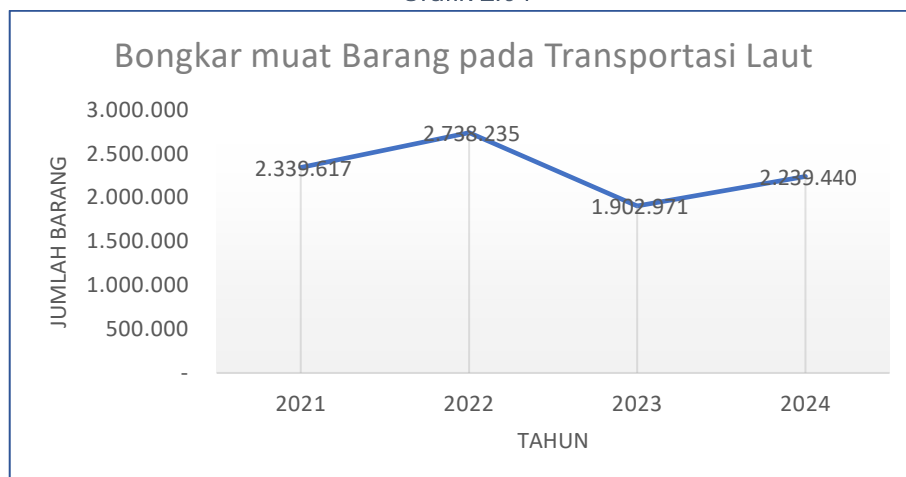
Sumber: BPS 2025

- Jumlah Barang (Bongkar + Muat) Transportasi Laut

Arus bongkar muat barang melalui transportasi laut menunjukkan dinamika yang lebih berfluktuasi dibanding penumpang. Pada 2021, volume tercatat sebesar 2.339.617 ton, naik menjadi 2.738.235 ton pada 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 1.902.971 ton pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 2.239.440 ton pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa logistik laut masih sangat dipengaruhi oleh kondisi makro seperti kinerja sektor produksi daerah, permintaan pasar, serta kelancaran rantai pasok dari dan ke Provinsi Gorontalo.

Kenaikan pada 2022 dapat dikaitkan dengan percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas distribusi komoditas utama seperti pertanian dan perikanan, serta menguatnya volume perdagangan antarpulau. Sementara penurunan pada 2023 kemungkinan berkaitan dengan perlambatan aktivitas sektor primer atau gangguan pada distribusi regional. Namun, meningkat kembali pada 2024 menunjukkan stabilisasi pergerakan logistik di jalur laut dan kembalinya permintaan komoditas yang diangkut melalui pelabuhan Gorontalo. Secara keseluruhan, meski fluktuatif, tren empat tahun terakhir menegaskan bahwa jalur laut tetap menjadi kanal utama distribusi barang dalam skala besar.

Grafik 2.64



Sumber: BPS 2025

c. Transportasi Udara

- Jumlah Penumpang Transportasi Udara

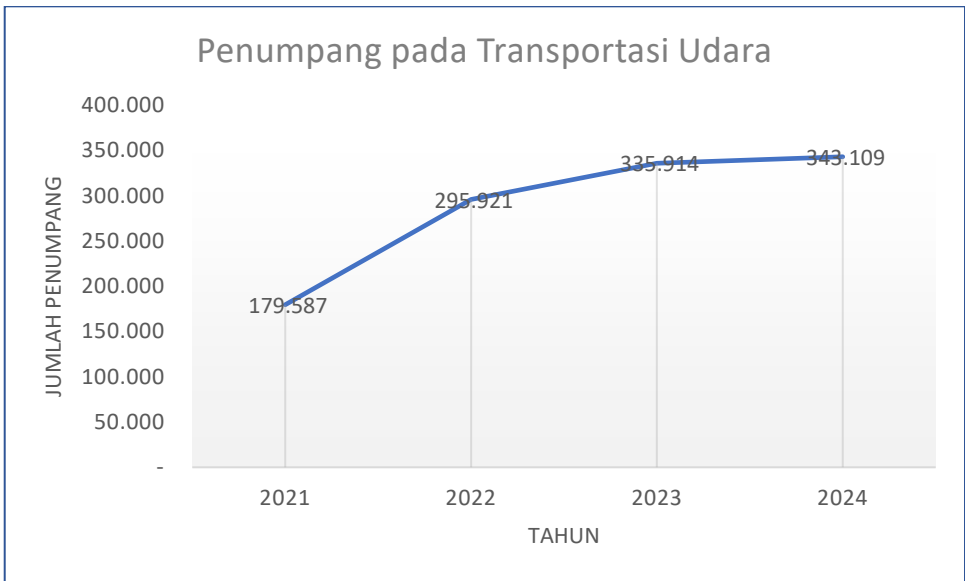
Pergerakan penumpang transportasi udara menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang lebih stabil dibanding transportasi laut. Jumlah penumpang tercatat 179.587 orang pada 2021, naik



tajam menjadi 295.921 orang (2022), kemudian meningkat lebih moderat menjadi 335.914 orang (2023) dan 343.109 orang (2024). Kenaikan ini menggambarkan pemulihan mobilitas masyarakat yang semakin kuat, baik untuk tujuan kerja, pelayanan publik, bisnis, pemerintahan, maupun pariwisata.

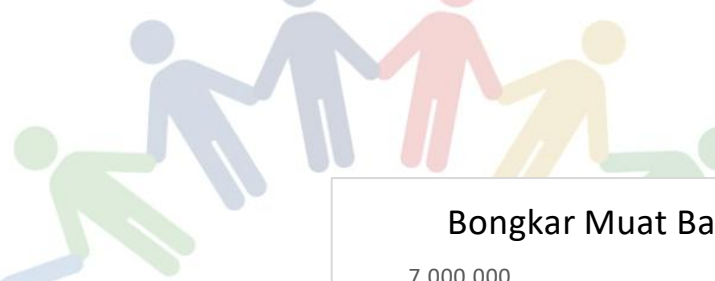
Jika dibandingkan dengan transportasi laut, ritme kenaikan penumpang udara relatif lebih stabil, yang menunjukkan bahwa permintaan perjalanan udara di Gorontalo lebih elastis terhadap pemulihan ekonomi regional. Selain itu, transportasi udara telah menjadi moda utama bagi konektivitas antar provinsi, terutama untuk perjalanan cepat dari dan menuju pusat-pusat layanan nasional seperti Makassar, Manado, dan Jakarta. Data tersebut menegaskan bahwa pasca pandemi, sektor penerbangan di Gorontalo tidak hanya pulih tetapi juga mengalami pertumbuhan yang mengarah pada peningkatan mobilitas masyarakat dari tahun ke tahun.

Grafik 2.65

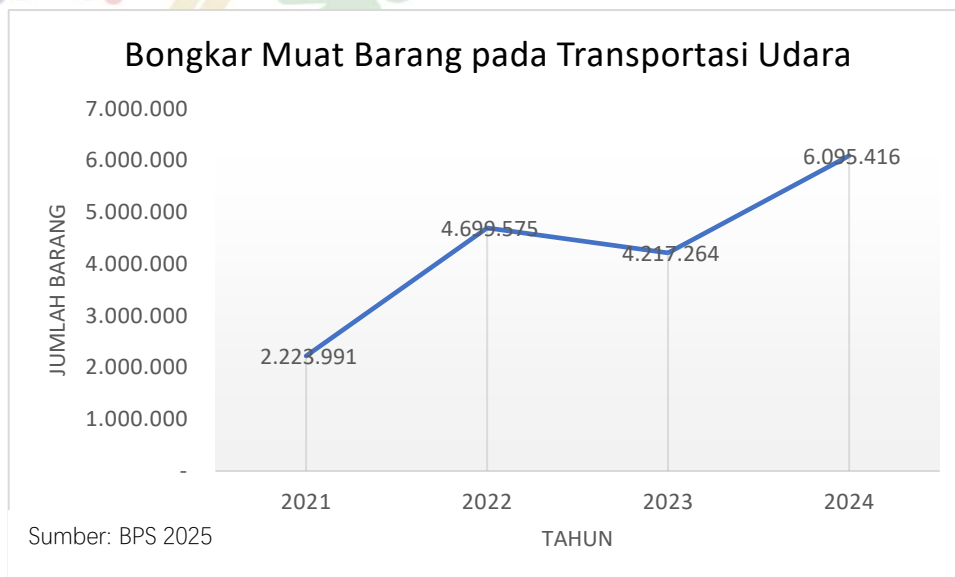


Sumber: BPS 2025

- Jumlah Barang (Bongkar + Muat) Transportasi Udara
Volume barang yang melalui transportasi udara meningkat jauh lebih pesat dibanding angkutan laut. Pada 2021 tercatat 2.223.991 ton, melonjak hampir dua kali lipat menjadi 4.699.575 ton pada 2022, kemudian turun sedikit pada 2023 menjadi 4.217.264 ton, sebelum kembali melesat ke 6.095.416 ton pada 2024. Lonjakan ini menandakan bahwa transportasi udara semakin menjadi pilihan penting untuk pengiriman barang, terutama yang membutuhkan pengiriman cepat atau bernilai ekonomi tinggi.
Fenomena ini sejalan dengan perkembangan pasar domestik yang semakin modern, meningkatnya transaksi lintas daerah, serta berkembangnya aktivitas e-commerce yang membutuhkan kecepatan layanan. Lonjakan pada 2022 dan 2024 menunjukkan momentum peningkatan permintaan layanan logistik udara yang kuat, sementara penurunan sementara pada 2023 masih berada dalam tren pertumbuhan umum yang meningkat dalam jangka menengah. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa arus barang melalui udara telah memasuki fase ekspansi setelah pandemi, dan menjadi elemen penting dalam mendukung rantai pasok modern di Gorontalo.



Grafik 2.66



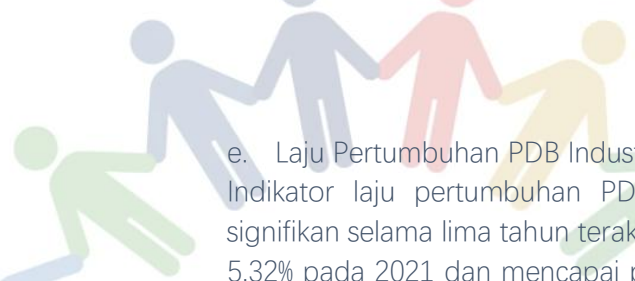
d. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB Per Kapita

Kinerja proporsi nilai tambah industri manufaktur terhadap PDB per kapita di Provinsi Gorontalo selama 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun belum mengalami akselerasi yang signifikan. Nilai indikator bergerak pada kisaran 4,13% hingga 4,40%, dengan titik tertinggi dicapai pada 2022 sebesar 4,40%, sebelum sedikit menurun menjadi 4,19% pada 2024. Pergerakan yang relatif stagnan ini menggambarkan bahwa meskipun sektor industri telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatannya belum bersifat struktural dan masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi serta skala usaha.

Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa komposisi industri di Gorontalo masih didominasi oleh industri pengolahan berbasis komoditas primer yang bernilai tambah rendah, seperti pertanian dan perikanan. Kontribusi yang cenderung stabil juga menandakan bahwa ekspansi sektor ini belum sepenuhnya berhasil mendorong pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor manufaktur yang lebih kuat. Namun demikian, capaian ini tetap konsisten dengan karakteristik ekonomi daerah yang masih berada pada fase awal industrialisasi serta ketergantungan pada sektor primer sebagai sektor penopang utama.

Grafik 2.67





e. Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Indikator laju pertumbuhan PDB industri manufaktur memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan meningkat tajam dari 1,13% pada 2020 menjadi 5,32% pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 7,85%. Lompatan pertumbuhan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus peningkatan aktivitas industri pengolahan sebagai respon terhadap pemulihan permintaan dan produksi. Namun demikian, pertumbuhan kembali melemah tajam menjadi 0,46% pada 2023, sebelum naik kembali menjadi 3,23% pada 2024.

Variasi pertumbuhan yang cukup lebar ini merupakan refleksi dari sensitivitas sektor industri manufaktur terhadap fluktuasi volume pasokan komoditas input dan permintaan pasar. Karena struktur industri pengolahan di Gorontalo masih terkonsentrasi pada produk berbasis sumber daya alam, pergerakan kinerja sangat dipengaruhi oleh faktor produksi hulu, situasi harga komoditas regional, dan kondisi pasar eksternal. Kinerja 2024 menunjukkan pemulihan moderat, menandakan proses normalisasi produksi setelah penurunan tajam pada 2023.

Grafik 2.68

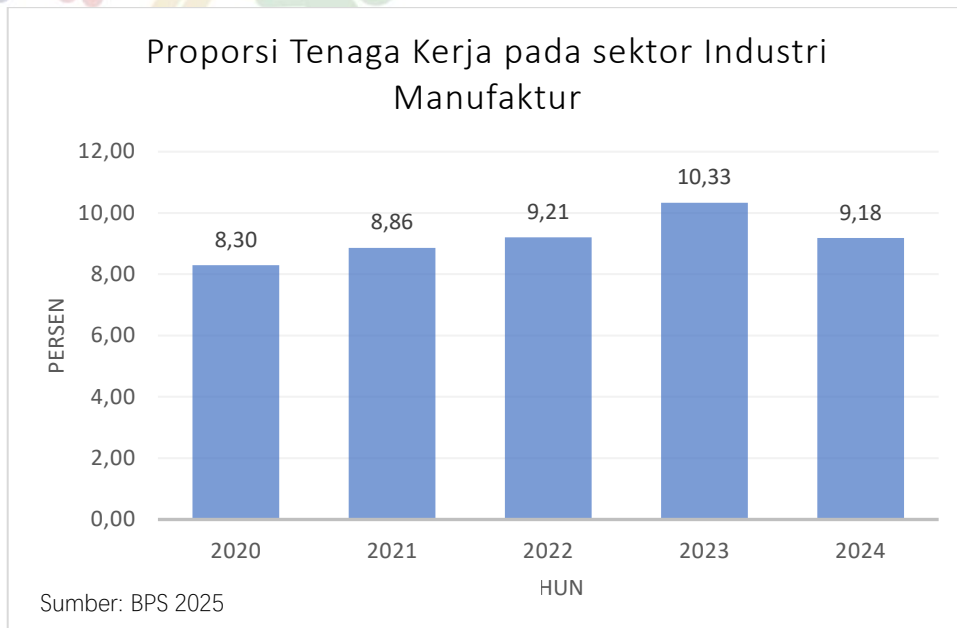


f. Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur

Indikator proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, meskipun mengalami fluktuasi. Porsinya naik dari 8,30% pada 2020, kemudian bertahap mencapai 9,21% pada 2022 dan mencatat kenaikan tertinggi pada 2023 sebesar 10,33%, sebelum sedikit terkoreksi menjadi 9,18% pada 2024. Kenaikan yang terjadi memperlihatkan bahwa sektor manufaktur mulai menyerap lebih banyak tenaga kerja seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi dan pengolahan berbasis komoditas daerah.

Pergerakan angka ini menggambarkan bahwa sektor industri pengolahan mulai memainkan peran yang lebih besar dalam struktur kesempatan kerja di Gorontalo, meskipun penyerapannya masih berada pada level menengah dan belum dominan dibandingkan sektor primer. Penurunan pada 2024 menunjukkan adanya penyesuaian alami sebagai akibat perubahan kinerja industri pada tahun sebelumnya, namun tidak menghilangkan gambaran bahwa tren jangka menengah menunjukkan peningkatan kapasitas sektor manufaktur dalam menyerap tenaga kerja. Capaian ini sejalan dengan transformasi ekonomi daerah yang mulai memperluas nilai tambah komoditas lokal melalui industrialisasi bertahap.

Grafik 2.69



C. TANTANGAN

Dalam upaya mewujudkan Tujuan 9 SDGs – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, Provinsi Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan struktural yang secara khas melekat pada daerah yang masih berada pada tahap awal pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Meskipun beberapa indikator menunjukkan kemajuan, skalanya masih terbatas, dan belum menunjukkan transformasi ekonomi yang fundamental.

a. Struktur Industri yang Masih Dangkal dan Belum Terdiversifikasi

Sebagai wilayah yang masih berkembang, struktur perekonomian Gorontalo masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB relatif kecil serta fluktuatif, menunjukkan bahwa proses hilirisasi belum berjalan kuat. Industri pengolahan yang ada umumnya masih bersifat sederhana dan belum menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. Kondisi ini merupakan tantangan mendasar dalam membangun basis industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Kualitas dan Kapasitas Tenaga Kerja yang Belum Siap Mengikuti Modernisasi Industri

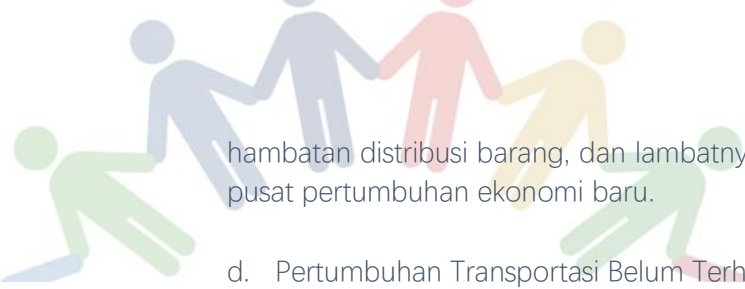
Meskipun proporsi tenaga kerja sektor manufaktur menunjukkan peningkatan, kapasitas kompetensi teknis masih menjadi kendala serius. Tantangan ini umum dialami oleh daerah yang masih berkembang, terutama karena:

- Akses pendidikan vokasi dan teknologi belum merata,
- Kemampuan adopsi digital masih rendah, dan
- Kemitraan dengan industri modern belum berkembang kuat.

Hal ini menyebabkan kesiapan SDM untuk mendukung industrialisasi berbasis teknologi dan produktivitas tinggi masih terbatas.

c. Infrastruktur Dasar Belum Sepenuhnya Terintegrasi dan Masih Menunjukkan Ketimpangan Wilayah

Data menunjukkan bahwa kondisi jalan nasional sudah sangat baik, namun untuk daerah seperti Gorontalo, persoalan utamanya bukan hanya kualitas jalan, tetapi ketimpangan akses antar wilayah. Kawasan rural, perdesaan, dan sentra produksi potensial belum semuanya terkoneksi optimal dengan pusat perdagangan dan logistik. Kondisi ini berisiko menyebabkan tingginya biaya logistik,



hambatan distribusi barang, dan lambatnya tumbuhnya kawasan produksi baru yang bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

d. Pertumbuhan Transportasi Belum Terhubung dengan Sistem Logistik yang Kuat Arus penumpang dan barang, baik laut maupun udara, menunjukkan tren meningkat. Namun tantangan khas daerah berkembang adalah belum adanya sistem logistik terpadu, antara lain:

- Belum tersedianya pusat distribusi terpadu,
- Keterbatasan fasilitas penyimpanan modern (cold storage, warehouse),
- Koneksi pelabuhan–bandara–kawasan produksi yang belum efisien.

Akibatnya, peningkatan aktivitas transportasi belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah secara optimal.

e. Keterbatasan Infrastruktur dan Ekosistem Digital untuk Mendorong Inovasi

Sebagai daerah yang masih berkembang, penetrasi infrastruktur digital modern di Gorontalo masih belum kuat. Keterbatasan ini meliputi:

- Ketersediaan jaringan broadband yang belum merata,
- Rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku industri kecil dan menengah,
- Belum berkembangnya pusat inovasi, inkubasi bisnis, atau riset terapan.

Kondisi ini menghambat laju transformasi digital yang kini menjadi kunci pertumbuhan industri modern di daerah yang ingin mengejar ketertinggalan.

f. Minimnya Investasi Industri Bernilai Tambah dan Keterbatasan Dukungan Ekosistem

Daerah yang masih berkembang umumnya menghadapi tantangan daya tarik investasi, termasuk Gorontalo. Beberapa kendala yang menonjol meliputi:

- Skala pasar yang masih kecil,
- Biaya logistik relatif tinggi,
- Industri pendukung belum terbentuk,
- Keterbatasan insentif yang kompetitif dibanding provinsi lain.

Tanpa peningkatan intensitas investasi dan kehadiran industri hulu–hilir yang saling menopang, pertumbuhan manufaktur akan berjalan perlahan.



Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

A. PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-10 berfokus pada upaya mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara. Dalam konteks daerah, Tujuan 10 menekankan pentingnya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa ada yang tertinggal.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup kompleks. Ketimpangan ini tampak dari perbedaan pendapatan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat, ketimpangan akses layanan dasar, perlindungan sosial yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan, serta kesenjangan kesempatan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, isu pengurangan ketimpangan menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan RPJMD dan implementasi SDGs di Provinsi Gorontalo.

B. Status Capaian

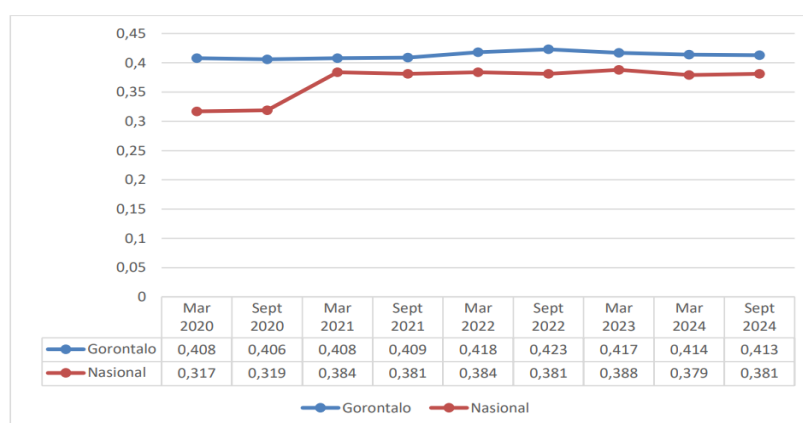
a. Rasio Gini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode Maret 2020 – September 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio sebesar 0,413. Capaian ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,414. Angka ini masih di atas dari capaian Nasional pada September 2024 sebesar 0,381. Jika dilihat dari regional Sulawesi, tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo masih tergolong tinggi dibanding wilayah lainnya se-Sulawesi yang capaian Gini Rasio berkisar antara 0,309 – 0,381. Nilai 0,413 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori sedang (tidak sangat rendah), namun juga belum sangat tinggi. Berdasarkan literatur, 0,4–0,45 masih menunjukkan ketimpangan yang menonjol. Penurunan dari 0,414 ke 0,413 menunjukkan progres kecil ke arah pemerataan yang lebih baik, tetapi perubahan sangat kecil (–0,001 poin), artinya perubahan belum signifikan dalam skala besar.

Distribusi pengeluaran kelompok terbawah (–16,57 %) menunjukkan bahwa 40% penduduk dengan pengeluaran paling rendah hanya menguasai –16,6% dari total pengeluaran. Ini memperkuat bahwa kelompok ekonomi bawah masih relatif tertinggal dibandingkan kelompok atas.

Grafik 2.70

Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional
periode Maret 2020 - September 2024

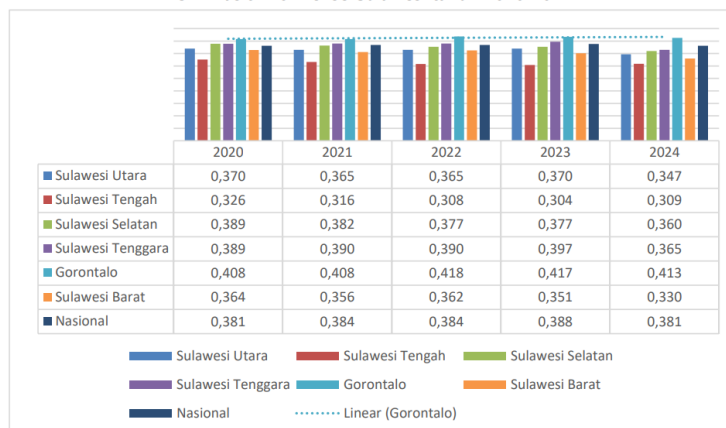


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)



Grafik 2.71

Gini Rasio Provinsi se-Sulawesi tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2024)

Selain gini rasio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kemiskinan Provinsi Gorontalo selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 14,57 persen pada Maret 2024, menjadi 13,87 persen pada September 2024. Persentase kemiskinan di Provinsi Gorontalo jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 8,57 persen pada periode yang sama. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo termasuk salah satu dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia dan menghadapi tantangan kemiskinan yang lebih besar dibanding nasional. Jika diartikan secara kasar: untuk setiap 100 orang di Provinsi Gorontalo, sekitar 14 orang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan secara nasional untuk setiap 100 orang sekitar 9 orang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, Provinsi Gorontalo juga menunjukkan tren penurunan kemiskinan dari Maret 2024 ke September 2024 persentasenya turun sebesar 0,70 poin. Angka ini merupakan Penurunan tingkat kemiskinan terendah sepanjang berdirinya Provinsi Gorontalo. Meski saat Pandemi Covid-19 melanda angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sempat naik, namun secara umum angka kemiskinan Provinsi Gorontalo dari waktu ke waktu mengalami penurunan.

Grafik 2.72

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2020-2024



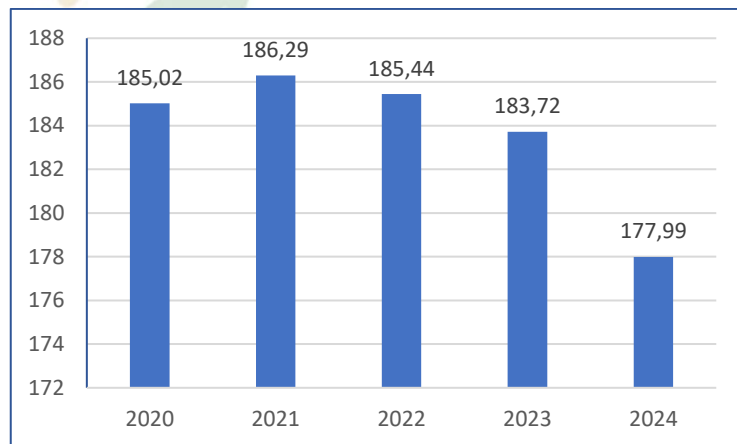
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 mencapai 177,99 ribu Jiwa, bila dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 183,72 ribu Jiwa, mengalami penurunan sebanyak 5,73 ribu Jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo 5 tahun terakhir dapat di lihat pada Gambar berikut :



Grafik 2.73

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



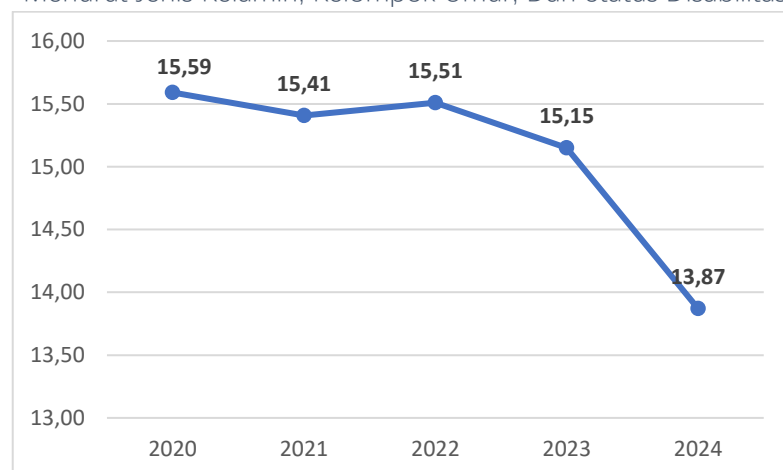
Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2024)

- b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan status disabilitas.

Jika dilihat dari data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan status disabilitas, pada tahun 2024 sebesar 13,87 persen, mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2023 sebesar 15,15 persen. Angka ini masih berada di atas rata-rata Nasional dan termasuk salah satu dari 5 Provinsi tertinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok bawah yang berpenghasilan rendah terus mengalami perbaikan tingkat kesejahteraannya. Program bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan yang bersumber dari APBD dan APBN memberikan kontribusi perbaikan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Efektivitas penentuan sasaran penerima manfaat utamanya masyarakat marginal menjadi poin penting dalam keberhasilan pencapaian indikator ini.

Grafik 2.74

Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Dan Status Disabilitas



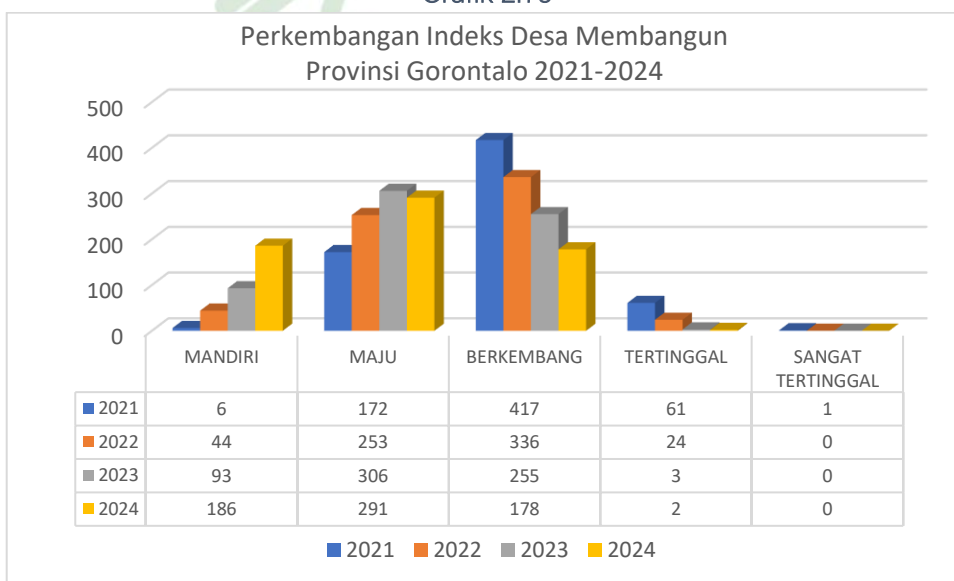
Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2025)

- c. Jumlah Desa Tertinggal dan Mandiri

Kinerja positif pemerintah daerah juga tampak dalam penurunan jumlah desa tertinggal. Menurut data Indeks Daerah Membangun (IDM) Jumlah daerah tertinggal berhasil dientaskan selama kurun waktu 2021-2024 sebanyak 59 desa dan tersisa 2 Desa Tertinggal yang berada di Kabupaten Boalemo sedangkan di kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo sudah tidak terdapat lagi Desa Tertinggal. Secara keseluruhan IDM dengan status mandiri pada tahun 2024 sebanyak 186 desa,

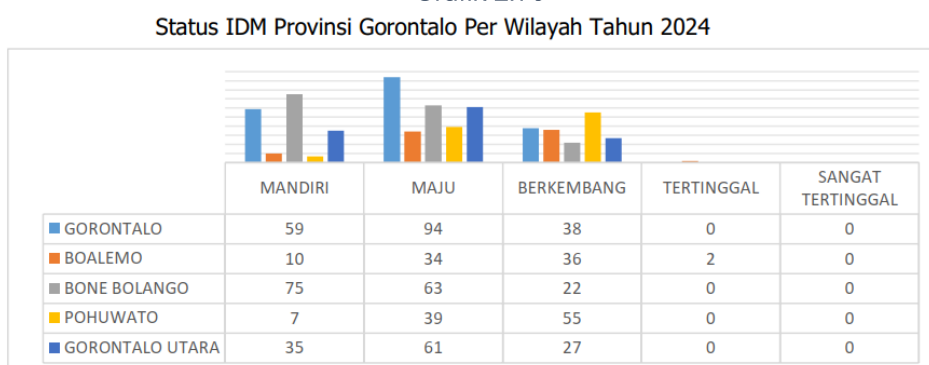
desa maju sebanyak 291 desa, desa berkembang menjadi 178 desa, dan desa tertinggal 2 sebanyak desa.

Grafik 2.75



Sumber : Kementerian Desa dan PDT RI, (diolah 2024)

Grafik 2.76



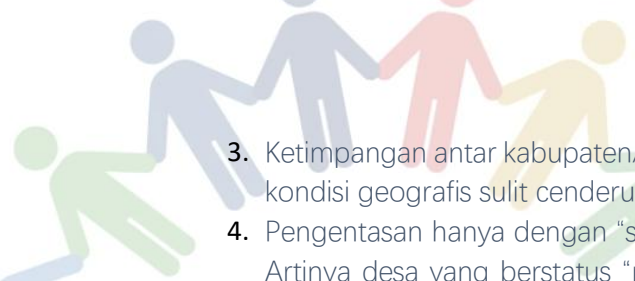
Sumber : Kementerian Desa dan PDT RI, 2024

Strategi pengentasan daerah dan desa tertinggal di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui upaya sinergis dan kolaboratif, peningkatan ketersediaan dan akses infrastruktur dasar yang mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Penggunaan dana desa dan intervensi pembangunan infrastruktur di desa-tertinggal, seperti rumah layak huni, MCK, fasilitas sekolah, pemberian modal usaha maupun bibit pertanian/perikanan
2. Peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, termasuk pendampingan, pemerataan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
3. Fokus penurunan tingkat kemiskinan dan pembangunan layanan dasar di perdesaan, yang secara langsung berdampak pada status desa..

Meskipun kemajuannya signifikan, namun ada beberapa tantangan yang perlu perhatian antara lain :

1. Meskipun status “tertinggal” sangat minim (2 desa pada 2024), hal ini tidak menjamin bahwa semua desa yang berstatus “berkembang”, “maju” atau “mandiri” telah bebas dari masalah seperti kemiskinan, stunting, atau akses layanan. Jangan sampai kategori mandiri tapi angka kemiskinannya tinggi
2. Infrastruktur di beberapa desa terbatas terutama di daerah terpencil/pesisir, akses transportasi, dan layanan sosial dasar masih perlu penguatan.



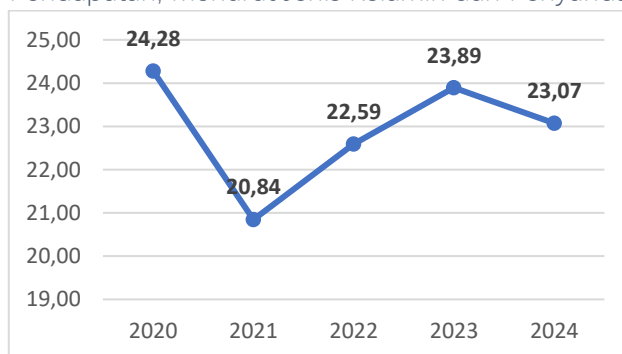
3. Ketimpangan antar kabupaten/kota dan antar desa masih ada, desa yang paling jauh atau dalam kondisi geografis sulit cenderung lebih lambat dalam perubahan status.
4. Pengentasan hanya dengan “status” belum cukup, yang penting adalah kualitas pembangunan. Artinya desa yang berstatus “maju”/“mandiri” harus juga menunjukkan indikator kesejahteraan yang nyata (pendapatan, layanan, SDM) bukan hanya pengukuran administratif.

- d. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas

Hal berbeda ditunjukan oleh indikator Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas, pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 dari 24,28 persen menjadi 20,84 persen, namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan menjadi 22,59 persen tahun 2022 dan 23,89 persen tahun 2023, setelah itu turun lagi di tahun 2024 menjadi 23,07 persen. Hal ini bertolak belakang dengan capaian nasional yang secara konsisten terus menunjukkan angka penurunannya dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2023 sangat jauh di bawah angka Provinsi Gorontalo yakni sebesar 9,44 persen.

Grafik 2.77

Proporsi Penduduk Yang Hidup di bawah 50 persen
dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin dan Penyandang Disabilitas

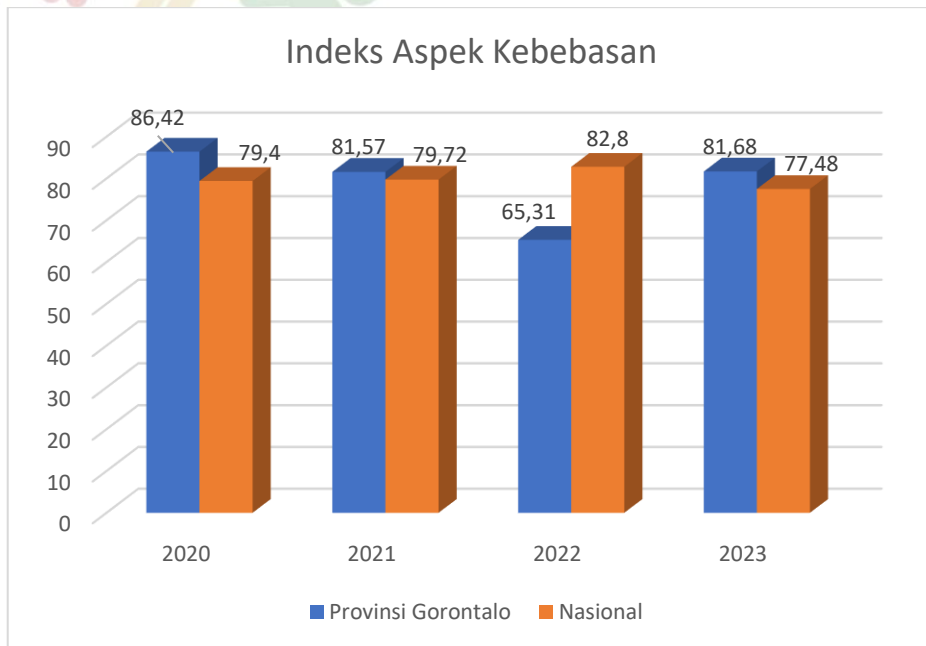


Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2025)

- e. Indeks Aspek Kebebasan

Target TPB selanjutnya untuk mencapai pemerataan adalah Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Berkaitan dengan target tersebut terdapat satu indikator yaitu Indeks Kebebasan. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebebasan sipil dalam hal berpendapat, berkumpul dan berserikat, berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Melalui indikator ini pula kita bisa memperoleh gambaran kesetaraan akses individu/ kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Data Indeks Kebebasan Provinsi Gorontalo menunjukkan fluktuatif berada pada kategori moderat sebagaimana yang ditampilkan gambar di bawah ini.

Grafik 2.78



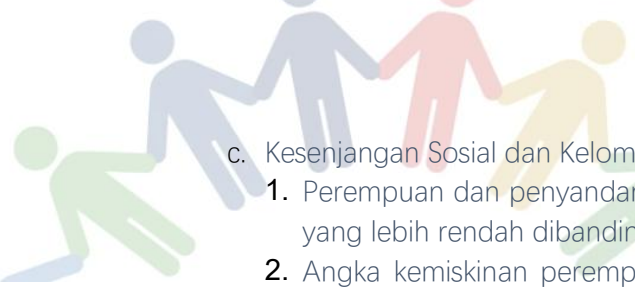
Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2024)

Dari grafik di atas terlihat bahwa Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam aspek kebebasan, terutama terlihat lonjakan pada tahun 2020, dan angka cukup kuat pada 2023 sebesar 81,68. Namun, terdapat titik terendah pada tahun 2022 sebesar 65,31 di mana aspek kebebasan sangat rendah, yang menunjukkan bahwa kemajuan tersebut belum sepenuhnya stabil. Bila dibandingkan dengan tingkat nasional, Gorontalo dalam beberapa hal unggul (skor IDI dan aspek kebebasan lebih baik dari rata-rata provinsi), tetapi masih perlu menguatkan aspek kapasitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik agar indeks keseluruhan bisa naik ke kategori “baik” secara konsisten.

III. Tantangan

Tantangan utama dalam mengurangi kesenjangan yaitu :

- a. Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan, antara lain :
 1. Distribusi pendapatan tidak merata antara pekerja sektor formal dan informal. Sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Gorontalo masih bekerja di sektor pertanian dan perdagangan kecil, dengan produktivitas dan upah yang rendah.
 2. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif, sebagian besar terkonsentrasi di Kota Gorontalo dan sebagian Kabupaten Gorontalo, sementara daerah seperti Gorontalo Utara, Pohuwato dan Bone Bolango masih tertinggal secara ekonomi.
 3. Akses modal dan pelatihan usaha masih terbatas bagi kelompok berpenghasilan rendah, terutama perempuan dan pemuda.
- b. Ketimpangan Wilayah, antara lain :
 1. Pusat pertumbuhan ekonomi masih terfokus di Kota Gorontalo, sementara wilayah kabupaten seperti Boalemo dan Pohuwato bagian barat memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dan akses infrastruktur lebih rendah.
 2. Keterbatasan konektivitas transportasi dan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, internet) menghambat pemerataan ekonomi antarwilayah.
 3. Kesenjangan pembangunan desa dan kota masih jelas. Data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan masih ada desa berstatus tertinggal dan berkembang di wilayah pedesaan Gorontalo.



c. Kesenjangan Sosial dan Kelompok Rentan, antara lain :

1. Perempuan dan penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki atau non-disabilitas.
2. Angka kemiskinan perempuan dan kepala keluarga perempuan relatif lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak dan pelatihan keterampilan.
3. Kesenjangan antar kelompok umur, khususnya generasi muda (15-24 tahun), masih menghadapi pengangguran terbuka cukup tinggi sekitar 7-8 %, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Goals 11 berfokus pada mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dinamika pesat seperti pertumbuhan kota dan arus urbanisasi telah menyebabkan peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, yang sekaligus menimbulkan kompleksitas tantangan. Sebagai respons, Goals 11 menetapkan sejumlah target krusial, yang mencakup perencanaan pembangunan kota terpadu, penyediaan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta penguatan ketangguhan terhadap bencana. Agenda prioritas lainnya meliputi layanan pengumpulan sampah, dan kualitas udara yang baik bagi seluruh masyarakat.

Dalam implementasinya, Goals 11 memiliki 10 target global yang dijabarkan ke dalam 27 indikator pada tingkat nasional. Namun, evaluasi pencapaiannya pada konteks ini dibatasi pada analisis terhadap 5 target utama, dengan menggunakan 8 indikator yang datanya tersedia dan memadai. Adapun indikator-indikator lainnya tidak dapat dianalisis lebih lanjut akibat keterbatasan ketersediaan data.

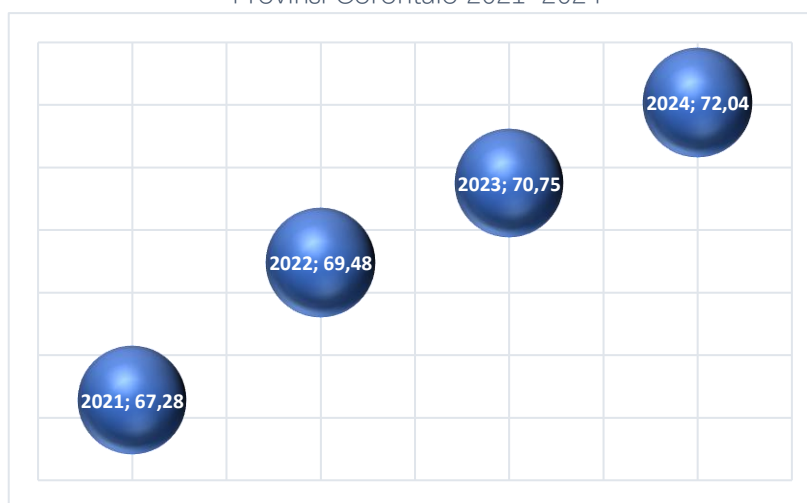
B. Status Capaian

11.1.1 (a) Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

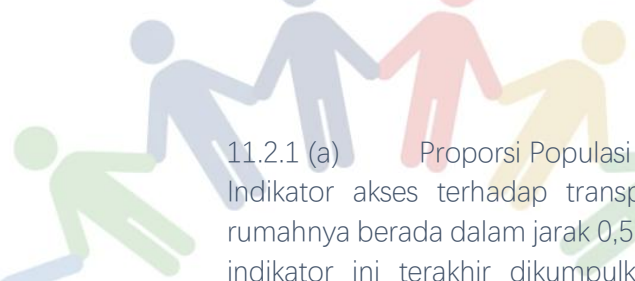
Provinsi Gorontalo telah mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam penyediaan akses hunian layak dan terjangkau. Selama empat tahun terakhir (2021-2024), persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 67,28% (2021) menjadi 72,04% (2024). Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan tren positif, tetapi juga secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, misalnya, Gorontalo mencapai 70,75%, sementara angka nasional masih berada di 63,15%. Data ini mengindikasikan kemajuan yang positif baik Provinsi Gorontalo maupun nasional sama-sama bergerak ke arah yang tepat dalam memenuhi komitmen penyediaan hunian yang layak.

Grafik 2.79

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Provinsi Gorontalo 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)



11.2.1 (a) Proporsi Populasi yang mendapatkan Akses yang Nyaman pada Transportasi Publik Indikator akses terhadap transportasi publik yang nyaman diukur proporsi penduduk yang rumahnya berada dalam jarak 0,5 km dari halte/terminal angkutan umum berjalan tetap. Data untuk indikator ini terakhir dikumpulkan pada tahun 2020, mengingat surveinya dilakukan secara triwulanan. Pada saat itu, capaian Provinsi Gorontalo sebesar 64,88%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,41 poin dari capaian tahun 2017 sebesar 64,47%. Namun, data terkini untuk tahun 2024 belum tersedia, sehingga analisis tren yang mutakhir belum dapat disajikan.

11.2.2 (b) Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum pada Transportasi Publik Indikator ini mengukur proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang menggunakan angkutan umum (baik kereta api maupun angkutan jalan) sebagai moda transportasi. Data untuk indikator ini dikumpulkan melalui survei yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Data terbaru yang tersedia adalah pada tahun 2020, di mana 5,96% penduduk Gorontalo telah memanfaatkan transportasi umum. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017. Namun, data terkini untuk tahun 2024 belum tersedia. Keterbatasan data ini menghambat pemantauan kemajuan yang mutakhir terhadap target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam mewujudkan kota inklusif yang didukung oleh sistem transportasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

11.5.1* Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana kategori sedang, yang tercermin dari skor indeks risiko bencana sebesar 116,02 pada Tahun 2024 berdasarkan Data Geoportal Bencana Indonesia. Meskipun skor ini mengalami penurunan kecil dibandingkan tahun sebelumnya (116,71), ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan masih mendominasi selama periode 2015-2024. Frekuensi kejadian bencana alam seperti cuaca ekstrem, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, dan abrasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mengakibatkan dampak kerugian di berbagai sektor.

Grafik 2.80

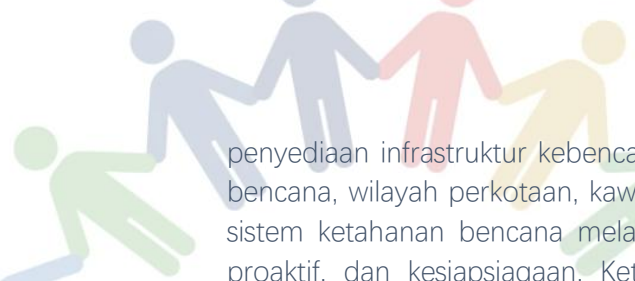
Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Tahun 2024



Sumber: BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia, 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), bencana telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 53 jiwa, korban luka-luka 244 jiwa, serta pengungsi yang mencapai 186.588 jiwa. Tahun 2023 menjadi tahun paling memprihatinkan di mana total korban yang terdampak (meninggal, hilang, luka, dan mengungsi) mencapai 83.554 jiwa, mencerminkan tingginya kerentanan masyarakat dan belum optimalnya sistem ketahanan bencana yang ada.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu segera menyusun kebijakan strategis yang berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, pengembangan perencanaan terpadu dan



penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis kewilayahan dengan prioritas pada daerah pasca bencana, wilayah perkotaan, kawasan ekonomi strategis, dan pusat pariwisata. Kedua, penguatan sistem ketahanan bencana melalui peningkatan investasi dalam program pencegahan, mitigasi proaktif, dan kesiapsiagaan. Ketiga, pembangunan manajemen bencana berbasis masyarakat dengan kolaborasi multipihak untuk memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi saat terjadi bencana. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan jumlah korban akibat bencana dapat ditekan dan ketahanan Provinsi Gorontalo dalam mencapai target SDGs terkait pengurangan dampak bencana dapat terwujud secara berkelanjutan.

Tabel 2.10

Jumlah Korban Meninggal dan Hilang, Luka-Luka serta Mengungsi Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Korban (dalam Jiwa)		
	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Mengungsi
2020	5	5	25.632
2021	2	2	41.464
2022	0	0	35.419
2023	0	0	83.554
2024	46	237	519
Total	53	244	186.588

Sumber: BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia 2024 (diolah)

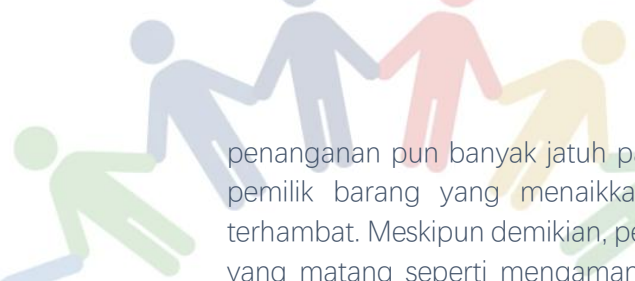
Berdasarkan pemantauan selama satu dekade (2015-2024) pada Tabel 11.2, capaian Indeks Risiko Bencana di Provinsi Gorontalo menunjukkan dinamika fluktuatif di tingkat kabupaten. Tren ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengendalian kerentanan terhadap ancaman bencana belum stabil dan konsisten. Meskipun secara keseluruhan pada tahun 2024, rata-rata kelas risiko bencana di provinsi berada pada kategori sedang. Analisis mendalam mengungkap disparitas yang signifikan antar kabupaten.

Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian serius dengan nilai indeks 155,87 yang menempatkannya pada kelas risiko tinggi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain seperti Gorontalo Utara (126,82), Bone Bolango (115,21), Boalemo (113,32), Kota Gorontalo (96,09), dan Gorontalo (88,80). Kondisi ini menegaskan Pohuwato sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan dan paparan bencana yang paling mengkhawatirkan di Gorontalo, sekaligus menjadi titik kritis yang memerlukan intervensi dan penanganan prioritas.

Dalam kerangka pencapaian target SDGs Goals 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) khususnya aspek pengurangan dampak bencana, tantangan utama terletak pada disparitas tingkat risiko ini. Oleh karena itu, alokasi sumber daya yang lebih besar untuk program pengurangan risiko bencana (PRB) di Kabupaten Pohuwato menjadi keharusan, sambil tetap mempertahankan upaya pencegahan di kabupaten lain agar kelas risikonya tidak meningkat.

Sebagai bagian dari strategi penanganan, pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan sistem respon darurat berbasis komunitas yang memanfaatkan sumber daya lokal. Langkah strategis ini mencakup: (1) pemetaan menyeluruh terhadap ketersediaan air bersih, pangan, dan hunian sementara dari aspek kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas; (2) penguatan layanan kesehatan darurat dan perlindungan aset penghidupan masyarakat; (3) penanganan khusus kelompok rentan (lansia, anak-anak, disabilitas); dan (4) pengembangan mekanisme recovery yang dapat segera menutupi kesenjangan saat terjadi bencana.

Selain itu, jenis bencana tertentu di wilayah pesisir dan laut, seperti banjir rob selama siklus musim angin barat, belum menjadi prioritas penanganan yang memadai dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di daerah terdampak sering terisolasi hingga tiga bulan, menghadapi kesulitan mengakses kebutuhan pokok seperti beras dan gas. Beban



penanganan pun banyak jatuh pada masyarakat, sementara fluktuasi ekonomi dimanfaatkan oleh pemilik barang yang menaikkan harga komoditas secara signifikan saat akses transportasi terhambat. Meskipun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa dengan perencanaan kontingensi yang matang seperti mengamankan stok BBM dan gas untuk tiga bulan ke depan, kelangkaan kebutuhan pokok sebenarnya dapat diantisipasi. Oleh karena itu, penting untuk menerjemahkan kondisi kritis ini ke dalam rencana aksi yang nyata dan proaktif, meskipun bencana tersebut bersifat musiman dan dapat diprediksi seperti angin barat.

Dengan pendekatan terintegrasi yang memadukan program struktural dan pemberdayaan komunitas, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendukung percepatan pencapaian target SDGs di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.11
Nilai Indeks Risiko Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	POHUWATO	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	155.87	TINGGI
2	GORONTALO UTARA	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	134.37	131.85	126.57	126.82	SEDANG
3	BONE BOLANGO	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	135.07	123.98	115.21	SEDANG
4	BOALEMO	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	116.77	110.01	113.32	SEDANG
5	KOTA GORONTALO	123.20	123.20	115.02	98.90	87.82	87.82	78.75	84.34	91.52	96.09	SEDANG
6	GORONTALO	146.40	146.40	133.01	114.92	103.21	103.21	94.04	94.04	86.55	88.80	SEDANG

***Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan**

Sumber: BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia 2024

11.6.1 (a) Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah berfungsi sebagai parameter kunci dalam menilai pencapaian Goals 11 terkait kota dan pemukiman berkelanjutan. Indikator ini tidak hanya mengukur ketersediaan layanan sampah, tetapi lebih menekankan pada cakupan dan kualitas layanan yang memadai. Suatu rumah tangga dikategorikan terlayani secara penuh jika sampahnya diangkut secara berkala (minimal seminggu sekali) dari sumbernya dan dibawa ke fasilitas pengelolaan akhir yang tepat, seperti TPA atau TPS 3R. Capaian indikator yang tinggi merefleksikan keberhasilan dalam meningkatkan standar kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan dari polusi, dan menciptakan kota yang lebih bersih dan layak huni, yang pada gilirannya mendukung kemajuan berbagai tujuan SDGs lainnya seperti kesehatan, ketersediaan air bersih, serta pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, survei ini dilakukan secara triwulan setiap 3 tahun sekali, dan data tersedia hanya sampai 2022 dengan capaian 42,38%. Sementara itu, data dari sistem informasi pengelolaan sampah nasional tahun 2023 (Tabel 11.3) menunjukkan persentase sampah perkotaan yang tertangani di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan signifikan menjadi 35%, jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 92,93%. Disparitas geografis tampak jelas dimana Kota Gorontalo mendominasi dengan persentase penanganan sampah tertinggi sebesar 95,70% pada tahun 2023, sementara wilayah lain masih tertinggal. Meskipun demikian, pengelolaan sampah dan limbah secara keseluruhan masih belum optimal.

Beberapa tantangan mendasar yang dihadapi antara lain: (1) implementasi kebijakan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga belum berjalan maksimal; (2) minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumbernya; (3) sistem pengolahan sampah yang belum terintegrasi secara komprehensif dari hulu hingga hilir; (4) keterbatasan sarana dan prasarana pemilahan sampah yang memadai; (5) fungsi TPS 3R yang belum optimal; (6) belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memadai. Untuk meningkatkan capaian indikator ini,

diperlukan pendekatan terintegrasi komprehensif diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target SDGs di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.12

Persentase Sampah Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota yang Terkelola Periode 2021-2024

No	Prov/Kab/Kota	% Sampah Terkelola (ton/tahun)			
		2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Gorontalo	92,9	-	35	-
2	Kabupaten Gorontalo	-	-	13,97	-
3	Kabupaten Bone Bolango	-	-	34,99	48,52
4	Kabupaten Pohuwato	-	-	28,11	-
5	Kota Gorontalo	92,93	-	95,70	93,59

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

11.6.2 (b) Indeks Kualitas Udara

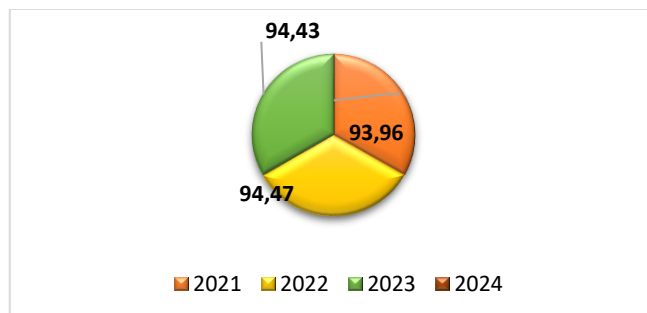
Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu indikator SDGs untuk memantau tingkat pencemaran udara ambien (outdoor) di suatu wilayah. IKU biasanya dihitung berdasarkan konsentrasi beberapa polutan kunci, dengan metode perhitungan yang distandardisasi secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk dan intensifikasi aktivitas perkotaan seperti peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas udara di wilayah perkotaan.

Secara konseptual, semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara yang tercatat, semakin tinggi pula tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut. Selama periode 2021-2023, Provinsi Gorontalo menunjukkan tren indeks kualitas udara yang berfluktuasi namun cenderung meningkat, meskipun masih dalam kategori sedang. Capaian IKU dimulai dari 93,96 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 94,47 di tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 94,43 pada tahun 2023. Sementara data terdisagregasi untuk tahun 2024 belum tersedia dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Meskipun nilai IKU Provinsi Gorontalo masih berada dalam kategori sedang, tren peningkatan yang terjadi selama periode 2021-2023 mengindikasikan tekanan terhadap kualitas udara yang terus meningkat. Kondisi ini memerlukan upaya mitigasi yang komprehensif melalui penguatan sistem monitoring kualitas udara secara real-time, pengendalian emisi dari sektor transportasi dan industri, serta regulasi yang lebih ketat. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara yang terintegrasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan kualitas udara di Provinsi Gorontalo dapat terjaga dan mendukung pencapaian target SDGs terkait kota berkelanjutan dan kesehatan masyarakat.

Grafik 2.81

Indeks Kualitas Udara Provinsi Tahun 2021-2024



Sumber: KLH dalam BPS Provinsi Gorontalo, 2024



11.7.2 (a) Proporsi Penduduk yang mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir
Indikator ini mengukur persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam kurun waktu 12 bulan sebelum survei dilakukan. Kejahatan kekerasan mencakup segala tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan fisik terhadap seseorang, antara lain penyerangan fisik, perampasan dengan kekerasan, pelecehan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2023, proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, persentase korban tercatat sebesar 0,08%, yang kemudian menurun menjadi 0,03% pada tahun 2022. Namun, angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 0,04% pada tahun 2023. Salah satu syarat untuk menjadikan kota yang aman dan inklusif adalah keamanan untuk semua, baik perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.

Pencapaian kota yang aman dan inklusif salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) mensyaratkan terjaminnya keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, indikator kejahatan kekerasan tidak hanya merefleksikan tingkat keamanan suatu wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai barometer kualitas tata kelola pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya sistematis untuk menekan dan menstabilkan angka kejahatan kekerasan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan semangat SDGs.

C. Tantangan

Tantangan utama dalam mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo sebagai ibu kota, berpusat pada masalah perluasan kota yang tidak terkendali (*urban sprawl*), kepadatan penduduk yang tinggi, dan penanganan kawasan kumuh yang belum tuntas.

1. Tantangan Tata Ruang dan Kependudukan

1. Urban Sprawl dan Konversi Lahan

Pembangunan yang pesat di Kota Gorontalo memicu fenomena *urban sprawl* (perluasan kota yang tak terkendali) ke wilayah penyangga di kabupaten sekitar (seperti Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango).

- Implikasi: Hal ini menyebabkan inefisiensi aglomerasi dan distorsi tata ruang.
- Dampak Nyata: Terjadi konversi lahan pertanian secara masif menjadi perumahan dan perkantoran, mengakibatkan penurunan signifikan luas sawah.

2. Kepadatan Penduduk

Kota Gorontalo memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi (sekitar 2.589 jiwa per kilometer persegi), jauh lebih tinggi dari beberapa kota lain di Sulawesi.

- Risiko: Kepadatan ini memicu tekanan terhadap ketersediaan lahan dan infrastruktur, serta berpotensi menimbulkan segregasi sosial-ekonomi dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

2. Tantangan Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman

1. Penanganan Kawasan Kumuh

Meskipun Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, masalah ini masih menjadi isu utama.

Faktor Penyebab: Permukiman kumuh sering dipicu oleh faktor fisik (infrastruktur), sosial (sikap dan perilaku), dan ekonomi (pendapatan masyarakat rendah).



Masalah Dominan: Di kawasan kumuh, masalah terbesar yang diidentifikasi adalah pada drainase dan ketersediaan air minum yang layak.

Kasus Khusus: Permukiman kumuh juga terjadi di kawasan pesisir yang padat penduduk, sering kali dibangun di lahan sempit atau terlarang.

2. Persoalan Sampah

Volume dan timbunan sampah perkotaan masih menjadi tantangan serius.

Penyebab: Kebiasaan membuang sampah sembarangan atau di tempat yang tidak sesuai berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

3. Tantangan Tata Kelola dan Keberlanjutan

1. Inklusivitas Pembangunan

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pembangunan bersifat inklusif dan adil (No One Left Behind), terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Integrasi dan Konsistensi Perencanaan

Diperlukan konsistensi dalam penetapan kegiatan dan anggaran, serta keselarasan antara program daerah dengan pusat. Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga menjadi fokus penting untuk memastikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan "Gorontalo Maju dan Berkelanjutan" sebagai visi pembangunan jangka panjang (RPJPD 2025-2045), dan Kota Gorontalo juga menjadi percontohan implementasi SDGs, menunjukkan adanya komitmen untuk mengatasi tantangan tersebut melalui kolaborasi dan perencanaan yang lebih baik.

A. Pengantar

Tujuan 12 dalam SDGs merepresentasikan komitmen global dan nasional untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Implementasinya mencakup beberapa strategi utama, yaitu pengurangan limbah pangan dan kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Konsumsi berkelanjutan merupakan manifestasi dari proses pengambilan keputusan konsumen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam pemenuhan kebutuhannya. Penerapan konsumsi berkelanjutan mengindikasikan transformasi perilaku konsumen menjadi lebih bijak dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan konsumsinya.

Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan memiliki keterkaitan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, konsep supply and demand dalam pemenuhan kebutuhan manusia menjadi faktor penentu dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Peningkatan tingkat ekonomi masyarakat diharapkan dapat mendorong transformasi menuju pola produksi dan konsumsi yang lebih berimbang. Sementara itu, dimensi sosial berkaitan erat dengan dimensi lingkungan, yang tercermin dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan bijaksana.

B. Status Capaian

12.3.1.(a) Persentase sisa makanan

Berdasarkan meta data terkini, data disagregasi khusus untuk indikator persentase penurunan susut dan sisa pangan di tingkat Provinsi Gorontalo belum tersedia. Namun, data pembanding yang relevan menunjukkan progres positif dalam pengurangan sisa makanan. Pada tahun 2024, persentase sisa makanan berhasil diturunkan menjadi 27,25%, menunjukkan perbaikan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 29,04%. Meski demikian, produksi sampah makanan di wilayah ini masih menunjukkan fluktuasi, yang mencerminkan perlunya upaya pengelolaan sampah makanan yang lebih efektif melalui optimalisasi sistem pengolahan limbah organik, pengurangan limbah pada sumbernya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Food waste merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan, ekonomi, dan lingkungan. Di Provinsi Gorontalo, terdapat lima penyebab utama yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah sampah makanan yaitu:

- 1) Implementasi Good Handling Practice (GHP) yang belum optimal
Proses penanganan pangan yang tidak optimal, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyimpanan, menyebabkan banyak bahan pangan rusak sebelum dikonsumsi. Juga standar GHP yang belum diterapkan secara luas meningkatkan risiko kehilangan makanan di berbagai tahap rantai pasok.
- 2) Infrastruktur penyimpanan yang tidak memadai
Kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal, termasuk fasilitas pendinginan yang terbatas dan tempat penyimpanan yang tidak memenuhi standar higienis, mengakibatkan banyak bahan makanan cepat membusuk atau mengalami penurunan kualitas sebelum mencapai konsumen.
- 3) Standar kualitas pasar dan preferensi konsumen yang ketat
Persyaratan pasar terhadap bentuk, ukuran, dan tampilan produk pangan sering kali menyebabkan banyak hasil pertanian tidak terjual dan terbuang, meskipun masih layak konsumsi. Selain itu, preferensi konsumen terhadap produk segar yang sempurna turut meningkatkan tingkat pemborosan makanan.

- 4) Minimnya edukasi bagi pekerja pangan dan konsumen

Minimnya pemahaman tentang cara penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan bahan makanan yang efisien menyebabkan food waste semakin tinggi. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi bertanggung jawab juga masih perlu ditingkatkan.

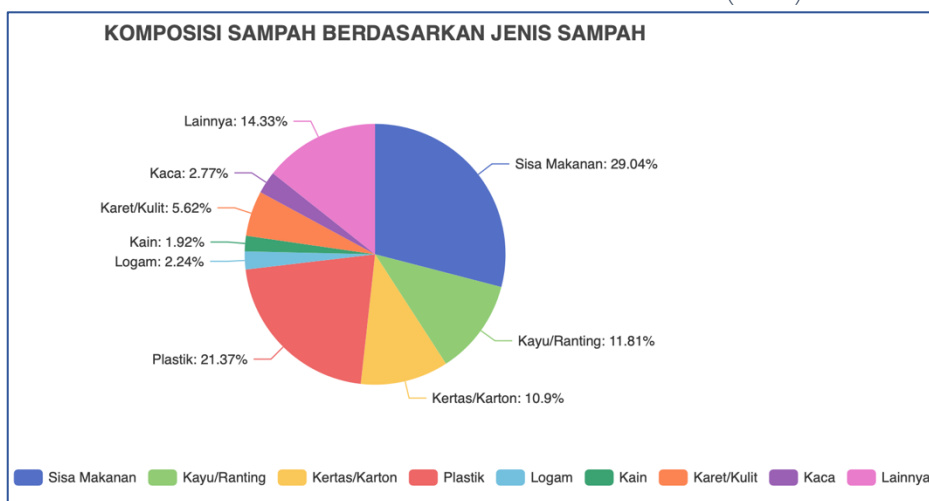
- 5) Kelebihan porsi dan perilaku konsumtif

Kebiasaan menyajikan makanan dalam porsi berlebih serta perilaku konsumtif yang tidak memperhatikan kebutuhan nyata menyebabkan makanan terbuang sia-sia, baik di rumah tangga, restoran, maupun industri jasa makanan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah-langkah prioritas meliputi peningkatan penerapan GHP, perbaikan sistem penyimpanan, edukasi konsumen, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pengurangan sampah makanan guna menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.82

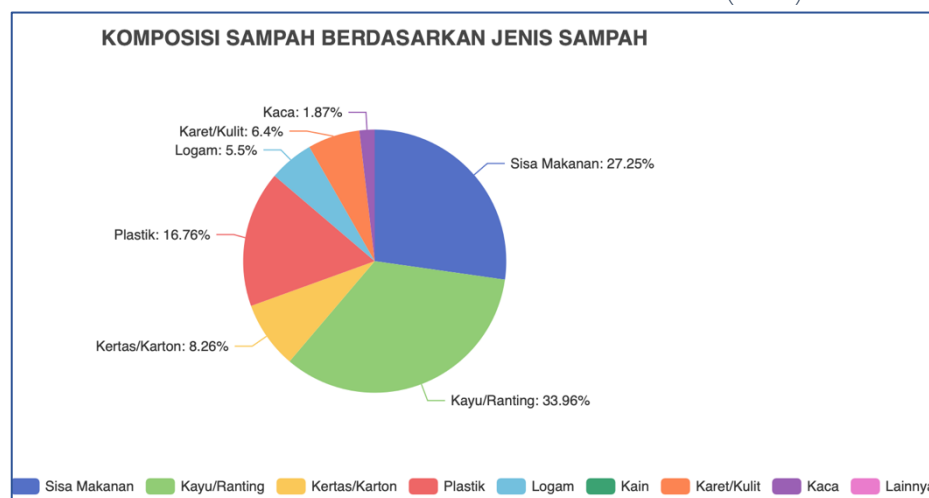
Persentase Sisa Makanan di Provinsi Gorontalo (2023)



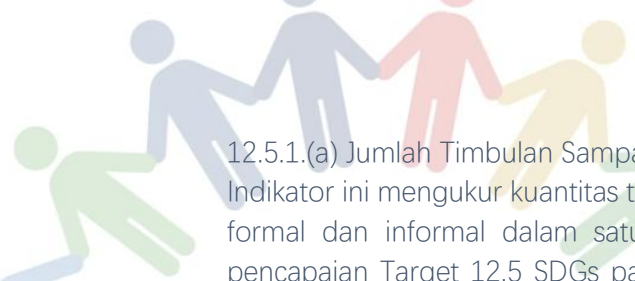
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

Grafik 2.83

Persentase Sisa Makanan di Provinsi Gorontalo (2024)



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024



12.5.1.(a) Jumlah Timbunan Sampah yang Didaur Ulang

Indikator ini mengukur kuantitas timbunan sampah yang berhasil diproses melalui sistem daur ulang formal dan informal dalam satuan ton per tahun. Indikator ini secara langsung mendukung pencapaian Target 12.5 SDGs pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

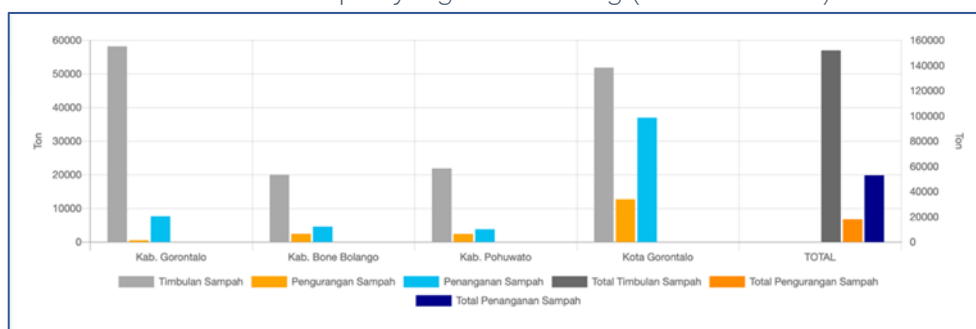
Berdasarkan data SIPSN (2024), jumlah timbunan sampah di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 152.050,94 ton/tahun pada tahun 2023 menjadi 72.967,64 ton/tahun pada tahun 2024. Secara paralel, volume sampah yang terkelola juga mengalami penurunan dari 70.982,18 ton/tahun (2023) menjadi 58.935,28 ton/tahun (2024).

Yang patut diapresiasi adalah peningkatan efektivitas pengelolaan sampah, di mana sampah yang tidak terkelola berhasil ditekan dari 81.068,76 ton menjadi 14.032,36 ton per tahun. Capaian ini merefleksikan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah di daerah, sekaligus menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian Target 12.5 SDGs yang berfokus pada pengurangan produksi limbah melalui strategi pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

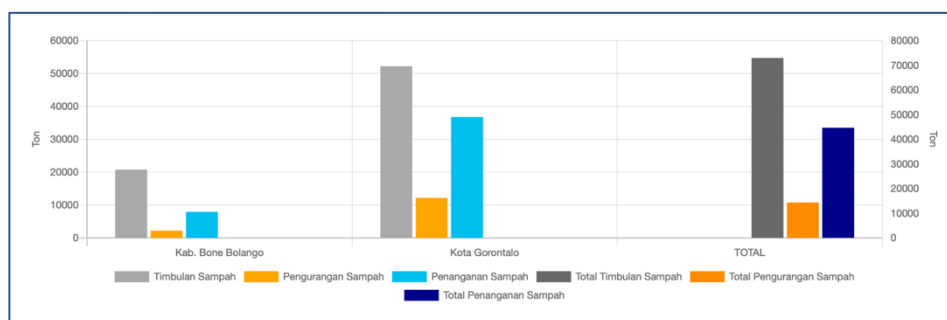
Meski menunjukkan tren positif, upaya optimalisasi masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi kunci. Pertama, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga) untuk mendukung proses daur ulang yang lebih efektif. Kedua, implementasi program pengurangan limbah makanan secara komprehensif, baik di tingkat konsumen maupun dalam rantai produksi pasca panen. Ketiga, optimalisasi fungsi TPS 3R melalui penguatan kapasitas dan peningkatan cakupan layanan. Keempat, membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan komitmen yang konsisten dan implementasi strategi yang terintegrasi, Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang besar untuk tidak hanya mempertahankan tapi juga meningkatkan capaian pengelolaan sampah yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah.

Grafik 2.84
Timbunan Sampah yang Didaur Ulang (2023 dan 2024)



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024



Tabel 2.13
Jumlah Timbunan Sampah yang Didaur Ulang (2023 dan 2024)

Prov/Kab/Kota	Timbunan Sampah (ton/tahun)		Sampah Terkelola (ton/tahun)		Persentase	Persentase
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Provinsi Gorontalo	152.050,94	72.967,64	70.982,18	58.935,28	47%	81%
Kab. Gorontalo	58.224,95	-	8.136,88	-	14%	0%
Kab. Bone Bolango	20.018,79	20.753,66	7.003,92	10.070,15	35%	49%
Kab. Pohuwato	21.888,32	-	6.153,25	-	28%	0%
Kota Gorontalo	51.918,88	52.213,98	49.688,13	48.865,13	96%	94%

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

C. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 12 adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Pola Pangan Harapan (PPH) dan Konsumsi Pangan Lokal
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Gorontalo masih rendah untuk ketersediaan dan konsumsi.
 - Warga kurang mengonsumsi pangan lokal, yang dapat mengurangi jejak transportasi dan mendukung produksi berkelanjutan.
2. Penggunaan Bahan Kimia dan Limbah Industri
 - Banyak produk olahan makanan di Gorontalo yang menggunakan bahan kimia, dan kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih rendah.
 - Limbah berbahaya (B3) dari industri meningkat sebagai tantangan produksi yang lebih “bersih”.
3. Sampah dan Daur Ulang yang Belum Efektif
 - Aktivitas daur ulang di Provinsi Gorontalo masih minim.
 - Jumlah sampah terus meningkat, sedangkan sistem pengelolaan sampah belum memadai.
 - Di kota Gorontalo, masalah persampahan adalah isu lama yang belum tertangani secara menyeluruh, dan dibutuhkan keterlibatan multi pihak.
4. Kurangnya Perusahaan dengan Sertifikat Lingkungan
 - Relatif sedikit perusahaan di Gorontalo yang punya sertifikat ISO 14001 (standar sistem manajemen lingkungan) untuk menjamin produksi ramah lingkungan.
 - Produk makanan “ramah lingkungan” lokal pun belum banyak yang terdaftar atau memiliki sertifikasi hijau.
5. Kurangnya Penelitian & Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan
 - Minim riset lokal terkait pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta teknologi murah dan ramah lingkungan di Gorontalo.
 - Karena teknologi belum masif, sulit skala upaya produksi bersih di sektor-sektor lokal.
6. Ketaatan dan Kesadaran Lingkungan Rendah
 - Tingkat ketaatan pelaku usaha (pemrakarsa kegiatan) dalam pengelolaan lingkungan masih kurang.
 - Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan belum merata, terutama terkait limbah B3 dan konsumsi ramah lingkungan.
7. Keterbatasan Data SDGs
 - Ketersediaan data indikator SDGs di Gorontalo masih menjadi kendala. Misalnya,

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 (SDG 13) merupakan tujuan yang krusial karena menekankan aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Goal ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga pada peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi akibat kondisi geografis, iklim tropis, serta kerentanan ekosistem.

Kondisi letak wilayah Provinsi Gorontalo yang berada di iklim tropis ini berpotensi mengalami kejadian bencana musiman, di mana saat musim hujan berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta gelombang pasang dan abrasi. Sedangkan saat musim kemarau berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi kering, seperti kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

B. Status Capaian

13.1.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi. Kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana gempa yang merusak sangat diperlukan mengingat jalur Gorontalo, Limboto, hingga Teluk Kwandang, dilalui oleh patahan yang diperkirakan aktif dan dikenal sebagai Sesar Gorontalo (Kertapati, 2006). Melalui sesar-sesar aktif itulah penjalaran gempa bumi terjadi. Apalagi susunan batuan lunak bekas endapan danau, dan lereng-lereng terjal di perbukitan sekitarnya merupakan tempat-tempat yang tidak baik untuk fondasi bangunan, kecuali setelah melalui perhitungan teknik sipil yang cermat.

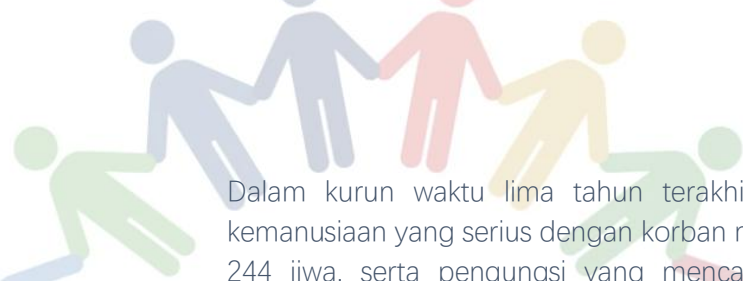
Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana kategori sedang, yang tercermin dari skor indeks risiko bencana sebesar 116,02 pada Tahun 2024 berdasarkan Data Geoportal Bencana Indonesia. Meskipun skor ini mengalami penurunan kecil dibandingkan tahun sebelumnya (116,71), ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan masih mendominasi selama periode 2015-2024. Frekuensi kejadian bencana alam seperti cuaca ekstrem, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, dan abrasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mengakibatkan dampak kerugian di berbagai sektor.

Grafik 2.85

Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Tahun 2024



Sumber: BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia, 2024



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), bencana telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 53 jiwa, korban luka-luka 244 jiwa, serta pengungsi yang mencapai 186.588 jiwa. Tahun 2023 menjadi tahun paling memprihatinkan di mana total korban yang terdampak (meninggal, hilang, luka, dan pengungsi) mencapai 83.554 jiwa, mencerminkan tingginya kerentanan masyarakat dan belum optimalnya sistem ketahanan bencana yang ada.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu segera menyusun kebijakan strategis yang berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, pengembangan perencanaan terpadu dan penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis kewilayahan dengan prioritas pada daerah pasca bencana, wilayah perkotaan, kawasan ekonomi strategis, dan pusat pariwisata. Kedua, penguatan sistem ketahanan bencana melalui peningkatan investasi dalam program pencegahan, mitigasi proaktif, dan kesiapsiagaan. Ketiga, pembangunan manajemen bencana berbasis masyarakat dengan kolaborasi multi pihak untuk memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi saat terjadi bencana. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan jumlah korban akibat bencana dapat ditekan dan ketahanan Provinsi Gorontalo dalam mencapai target SDGs terkait pengurangan dampak bencana dapat terwujud secara berkelanjutan.

Tabel 2.14
Jumlah Korban Meninggal dan Hilang, Luka-Luka serta Mengungsi Tahun 2020-2024

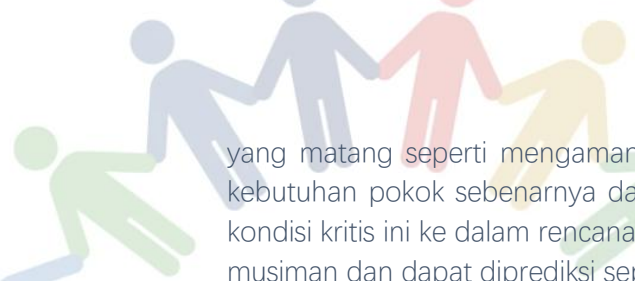
Tahun	Jumlah Korban (dalam Jiwa)		
	Meninggal dan Hilang	Luka-Luka	Mengungsi
2020	5	5	25.632
2021	2	2	41.464
2022	0	0	35.419
2023	0	0	83.554
2024	46	237	519
Total	53	244	186.588

Sumber: BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia 2024 (diolah)

Berdasarkan pemantauan selama satu dekade (2015-2024) pada Tabel 2, capaian Indeks Risiko Bencana di Provinsi Gorontalo menunjukkan dinamika fluktuatif di tingkat kabupaten. Tren ini mengindikasikan bahwa kapasitas pengendalian kerentanan terhadap ancaman bencana belum stabil dan konsisten. Meskipun secara keseluruhan pada tahun 2024, rata-rata kelas risiko bencana di provinsi berada pada kategori sedang. Analisis mendalam mengungkap disparitas yang signifikan antar kabupaten.

Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian serius dengan nilai indeks 155,87 yang menempatkannya pada kelas risiko tinggi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain seperti Gorontalo Utara (126,82), Bone Bolango (115,21), Boalemo (113,32), Kota Gorontalo (96,09), dan Gorontalo (88,80). Kondisi ini menegaskan Pohuwato sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan dan paparan bencana yang paling mengkhawatirkan di Gorontalo, sekaligus menjadi titik kritis yang memerlukan intervensi dan penanganan prioritas.

Selain itu, jenis bencana tertentu di wilayah pesisir dan laut, seperti banjir rob selama siklus musim angin barat, belum menjadi prioritas penanganan yang memadai dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di daerah terdampak sering terisolasi hingga tiga bulan, menghadapi kesulitan mengakses kebutuhan pokok seperti beras dan gas. Beban penanganan pun banyak jatuh pada masyarakat, sementara fluktuasi ekonomi dimanfaatkan oleh pemilik barang yang menaikkan harga komoditas secara signifikan saat akses transportasi terhambat. Meskipun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa dengan perencanaan kontingensi



yang matang seperti mengamankan stok BBM dan gas untuk tiga bulan ke depan, kelangkaan kebutuhan pokok sebenarnya dapat diantisipasi. Oleh karena itu, penting untuk menerjemahkan kondisi kritis ini ke dalam rencana aksi yang nyata dan proaktif, meskipun bencana tersebut bersifat musiman dan dapat diprediksi seperti angin barat.

Dengan pendekatan terintegrasi yang memadukan program struktural dan pemberdayaan komunitas, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendukung percepatan pencapaian target SDGs di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.15
Nilai Indeks Risiko Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	POHUWATO	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	155.87	TINGGI
2	GORONTALO UTARA	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	134.37	131.85	126.57	126.82	SEDANG
3	BONE BOLANGO	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	147.20	135.07	123.98	115.21	SEDANG
4	BOALEMO	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	116.77	110.01	113.32	SEDANG
5	KOTA GORONTALO	123.20	123.20	115.02	98.90	87.82	87.82	78.75	84.34	91.52	96.09	SEDANG
6	GORONTALO	146.40	146.40	133.01	114.92	103.21	103.21	94.04	94.04	86.55	88.80	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia 2024

Indikator 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menginternalisasikan dan mengimplementasikan kerangka penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan nasional. Indikator ini tidak hanya merepresentasikan komitmen politik daerah, tetapi juga menjadi ukuran efektivitas tata kelola penanggulangan bencana dan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di era perubahan iklim.

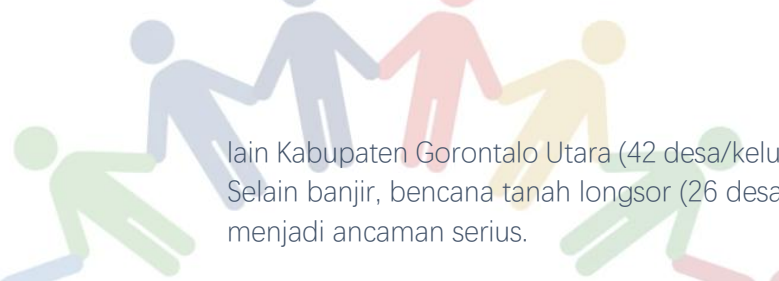
Berdasarkan data terbaru dari BNPB dan BAPPENAS (2024), indikator ini menunjukkan tren positif dengan status yang akan tercapai atau mengalami perbaikan. Meskipun capaian tahun berjalan (2024) masih stabil di angka 50,00%, sama dengan pencapaian tahun sebelumnya. Analisis progres dari baseline tahun 2021 menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan terjadi kenaikan sebesar 16,67% dari baseline menuju capaian tahun berjalan, yang merepresentasikan peningkatan lebih dari 100% dalam kurun waktu tiga tahun.

Grafik 2.86
Penyelarasan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Gorontalo



Sumber: BNPB dan BAPPENAS, 2024 (diolah)

Berdasarkan data Podes 2024, banjir merupakan bencana paling dominan di Provinsi Gorontalo, yang melanda 130 desa/kelurahan dari total 732 desa/kelurahan. Daerah terdampak terparah antara



lain Kabupaten Gorontalo Utara (42 desa/kelurahan) dan Kabupaten Pohuwato (30 desa/kelurahan). Selain banjir, bencana tanah longsor (26 desa/kelurahan) dan gempa bumi (9 desa/kelurahan) juga menjadi ancaman serius.

Tabel 2.16

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2024

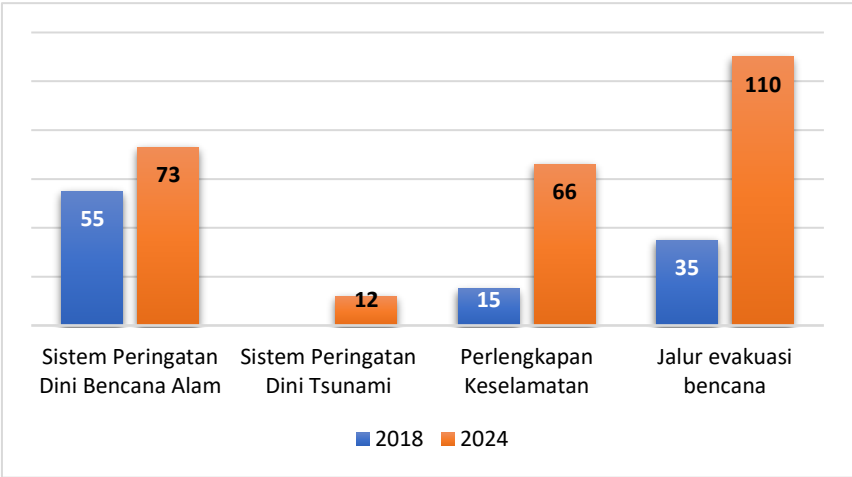
Prov/Kab/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam – Banjir	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam – Gempa Bumi	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam – Tanah Longsor
Provinsi Gorontalo	130	9	26
Kab. Boalemo	10	1	1
Kab. Gorontalo	24	1	6
Kab. Pohuwato	30	-	4
Kab. Bone Bolango	16	-	3
Kab. Gorontalo Utara	42	-	9
Kota Gorontalo	8	7	3

Sumber: BPS, Podes, 2024

Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana, yang terlihat pada (Gambar 13.2) sistem peringatan dini bencana meningkat dari 55 desa/kelurahan (2018) menjadi 73 desa/kelurahan (2024). Juga telah memiliki perlengkapan keselamatan (masker, tenda) yang meningkat dari 15 desa/kelurahan (2018) menjadi 66 desa/kelurahan (2024). Selain itu, desa/kelurahan yang telah memiliki jalur evakuasi bencana bertambah dari 35 (2018) menjadi 110 desa/kelurahan (2024). Juga di tahun berjalan, terdapat 12 desa/kelurahan di wilayah pesisir yang telah dilengkapi sistem peringatan dini tsunami.

Grafik 2.87

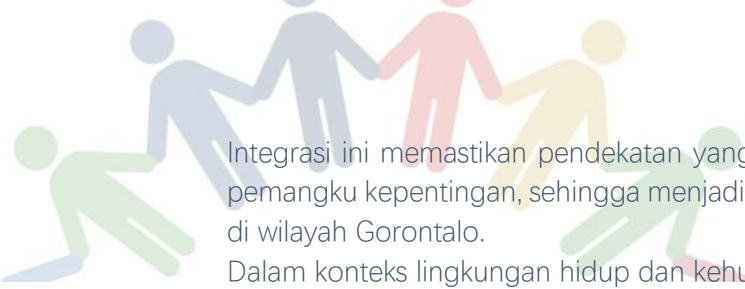
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/ Mitigasi Bencana Alam (Desa) di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dan 2024



Indikator 13.2.2(a) Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Berdasarkan data yang tersedia, capaian indikator potensi penurunan emisi GRK di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, persentase penurunan emisi GRK tercatat sebesar 20,59% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 19,28% pada tahun 2022. Meskipun demikian, data disagregasi untuk tahun-tahun berikutnya belum tersedia.

Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2023-2027 yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Integrasi ini memastikan pendekatan yang terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga menjadi landasan strategis bagi upaya penanggulangan bencana di wilayah Gorontalo.

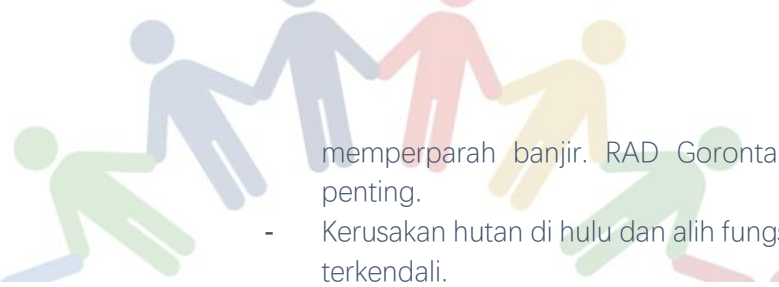
Dalam konteks lingkungan hidup dan kehutanan, isu strategis periode 2023-2026 difokuskan pada perubahan iklim dan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi di Provinsi Gorontalo bersumber dari tiga bidang utama: berbasis lahan (95,8%), berbasis energi (3,8%), dan pengelolaan limbah (0,9%) berdasarkan proyeksi Business as Usual (BAU) tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa sektor berbasis lahan masih menjadi kontributor utama emisi GRK di provinsi Gorontalo.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya melakukan penurunan emisi gas rumah kaca melalui dukungan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Dalam dokumen RPD 2023-2026, telah ditargetkan penurunan emisi GRK terverifikasi sebesar 0,9% dari sektor kehutanan dan limbah pada tahun 2026. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, terutama melalui upaya pencegahan deforestasi.

C. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 13 adalah sebagai berikut :

1. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Relatif Tinggi
 - Menurut laporan RAD SDGs Gorontalo, satu kebijakan utama adalah “penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”.
 - Namun implementasi mitigasi GRK masih menantang, karena membutuhkan koordinasi antar sektor, kapasitas teknis, dan pendanaan yang cukup besar.
2. Inventarisasi dan Monitoring GRK yang Belum Optimal
 - Meski Gorontalo sudah menyusun Rencana Aksi Daerah GRK (RAD GRK), tantangan tetap pada pengukuran dan pelaporan emisi secara berkala.
 - Tanpa data GRK yang andal, sulit menilai efektivitas kebijakan mitigasi dan menyesuaikan strategi adaptasi.
3. Kerusakan Hutan dan Deforestasi
 - RAD SDGs Gorontalo menyoroti pentingnya menurunkan deforestasi dan meningkatkan tutupan hutan.
 - Aktivitas ilegal, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dapat menghambat upaya menjaga hutan sebagai penyerap karbon (carbon sink).
4. Keterbatasan Sumber Daya untuk Adaptasi dan Mitigasi
 - Program adaptasi (misalnya kesiapsiagaan bencana) dan mitigasi (rehabilitasi lingkungan, pengendalian pencemaran) ada di RAD, tetapi pelaksanaannya bisa terkendala anggaran, SDM, dan peralatan.
 - Infrastruktur dasar seperti sistem pengendalian banjir, perlindungan pesisir, dan penataan kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) perlu diperkuat.
5. Risiko Bencana Iklim yang Tinggi
 - Gorontalo sangat rentan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, erosi) karena kondisi geografis dan iklimnya.
 - Risiko genangan air, kerusakan pantai, dan degradasi DAS menjadi tantangan besar dalam adaptasi iklim.
 - Kesiapsiagaan masyarakat dan sistem pemberitahuan dini bencana mungkin belum merata di seluruh kabupaten.
6. Siltasi dan Kerusakan Ekosistem Perairan
 - Sungai dan danau (termasuk DAS) Gorontalo berisiko mengalami degradasi, dan pengangkutan atau sedimentasi (siltasi) dapat mengurangi kapasitas aliran air dan



memperparah banjir. RAD Gorontalo menyebut pemeliharaan DAS sebagai kebijakan penting.

- Kerusakan hutan di hulu dan alih fungsi lahan memperparah sedimentasi atau aliran air tidak terkendali.

7. Tantangan Sosial-Ekonomi dan Kesadaran Publik

- Ada tantangan keterlibatan masyarakat dalam aksi iklim, baik mitigasi maupun adaptasi. Partisipasi publik, edukasi iklim, dan kolaborasi multi pihak (pemerintah, akademisi, masyarakat) perlu ditingkatkan.
- Komitmen lokal terhadap penanganan iklim bisa terkendala oleh prioritas lain (misal: pembangunan ekonomi, infrastruktur) dan keterbatasan kapasitas fiskal.
- Tantangan dalam pendanaan: meskipun ada RAD, menyelaraskan pendanaan dari APBD, CSR, dan donor eksternal untuk aksi iklim tidak selalu mudah.

Page III- 88

8. Tantangan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan

- Penegakan regulasi lingkungan terkait emisi, deforestasi, dan pencemaran mungkin kurang konsisten.

9. Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia

- Untuk menjalankan program adaptasi dan mitigasi iklim yang berkelanjutan diperlukan tim teknis dan institusi yang kuat. Di Gorontalo, kapasitas SDGs/pengelolaan iklim di tingkat daerah mungkin masih perlu ditingkatkan.
- Butuh riset lokal terkait fenomena iklim (seperti dampak iklim terhadap DAS, tutupan lahan, kerentanan masyarakat pesisir) agar strategi adaptasi relevan dengan konteks lokal.

10. Perubahan Pola Hidrologi dan Kekeringan

- Menurut analisis perubahan iklim di Gorontalo, beberapa DAS mengalami kerusakan sehingga fungsi hidrologisnya terganggu, menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
- Ketidakpastian iklim (curah hujan, musim) membuat prediksi dan perencanaan adaptasi lebih sulit dilakukan secara efektif.

A. Pengantar

Tujuan 14 SDGs berkomitmen untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Provinsi Gorontalo, dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimilikinya, diharapkan dapat mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian ekonomi daerah. Pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui perlindungan ekosistem laut yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo tahun 2022, wilayah ini memiliki panjang garis pantai di bagian Utara (Laut Sulawesi) sepanjang 331,2 Km dan sekitar 572,5 Km Pantai Selatan (Teluk Tomini). Sedangkan luas perairan laut Provinsi Gorontalo sekitar 963.844 Ha (9.638,44 Km²) yang terdiri dari luas Perairan Teluk Tomini sekitar 6.678,80 Km², Laut Sulawesi 2.959,64 Km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi sekitar 40.000 Km².

Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, telah ditetapkan 10 target di tingkat global dan 13 indikator di level nasional. Namun, evaluasi capaian SDGs Goals 14 di Provinsi Gorontalo saat ini hanya dapat menganalisis 2 target dengan 2 indikator akibat keterbatasan data.

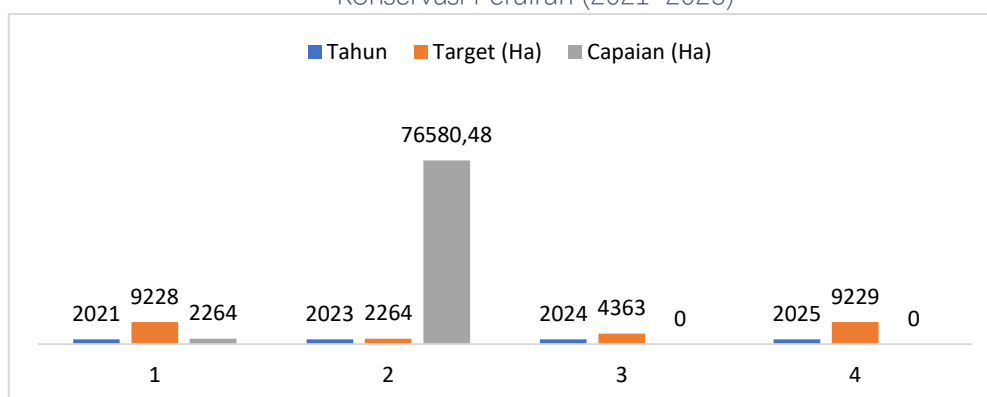
B. Status Capaian

Luas Kawasan Konservasi Perairan

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan target peningkatan luas kawasan konservasi perairan secara bertahap. Pada tahun 2021, target seluas 9.228 Ha hanya dapat terealisasi seluas 2.264 Ha, dengan tingkat capaian sebesar 24,5%. Tahun 2022 tidak menunjukkan adanya penambahan luas kawasan konservasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 76.580,48 Ha, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 2.264 Ha. Sementara itu, target tahun 2024 sebesar 4.363 Ha belum dapat tercapai.

Grafik 2.88

Target dan Capaian Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperluas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan (2021-2025)



Sumber: Renstra DKP Provinsi Gorontalo, 2024 (Diolah)

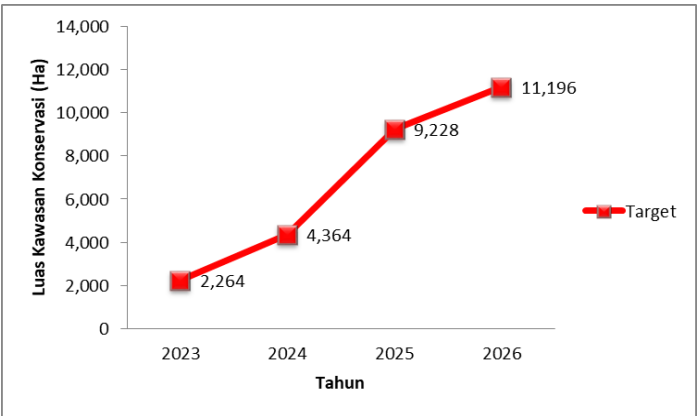
Faktor yang mempengaruhi capaian target luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2021-2022 dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan realokasi anggaran operasional konservasi perairan untuk penanganan Kesehatan dan pembatasan aktivitas lapangan dan sosialisasi. Selanjutnya pada tahun 2024 dikarenakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang



berimbang pada pemangkasan kegiatan konservasi, dan kompetisi prioritas pembangunan dengan sektor lainnya.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen meningkatkan luas kawasan konservasi perairan melalui optimalisasi kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, pengalokasian anggaran yang lebih memadai untuk kegiatan konservasi, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan, serta pengembangan skema pendanaan alternatif dan kemitraan multi pihak.

Grafik 2.89
Target Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperluas Kawasan Konservasi Perairan (2023 – 2026)



Sumber: Renstra DKP Provinsi Gorontalo, 2024 (Diolah)

Dengan strategi yang komprehensif dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan target luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2025-2026 dapat tercapai secara optimal, sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem perairan dan pencapaian target SDGs di Provinsi Gorontalo.

Jumlah provinsi dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengimplementasikan serangkaian strategi komprehensif untuk meningkatkan akses pendanaan bagi usaha nelayan. Upaya strategis ini diwujudkan melalui fasilitasi akses ke lembaga keuangan dan perbankan dengan skema kredit khusus bagi nelayan skala kecil, implementasi program Bina Kelompok Perikanan yang mencakup pembinaan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pendampingan manajemen usaha dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan. Program Bina Kelompok Perikanan dirancang untuk menjangkau tiga klaster utama, yaitu Kelompok Perikanan Tangkap, Kelompok Budidaya Perikanan, dan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan. Bentuk pembinaan yang diberikan meliputi peningkatan produksi perikanan, manajemen pengelolaan usaha perikanan, penyediaan sarana produksi perikanan, serta penguatan kelembagaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perikanan dan Kelompok Wanita Pesisir. Sebagai target konkret, Pemerintah Provinsi Gorontalo mencanangkan peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan dari Rp4.412.034 per bulan pada tahun 2023 menjadi Rp5.034.749 per bulan pada tahun 2026.

Beberapa inisiatif pemberdayaan yang telah diimplementasikan mencakup pelaksanaan Temu Usaha dan Pembinaan Koperasi bagi penerima kapal bantuan perikanan, Program Pendampingan dan Pembinaan manajemen usaha terstruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil, pengembangan *Science and Techno-Park* (STP) untuk meningkatkan akses teknologi dan informasi, serta penerbitan Kartu KUSUKA dan premi asuransi nelayan sebagai bentuk perlindungan sosial.



Meskipun berbagai program telah diluncurkan, monitoring lapangan mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi di tingkat desa. Nelayan skala kecil masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses wilayah penangkapan yang optimal, mata rantai distribusi yang panjang menyebabkan margin keuntungan nelayan tidak maksimal, serta manfaat program belum sepenuhnya dirasakan dampaknya secara langsung oleh nelayan skala kecil. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan nelayan di Provinsi Gorontalo.



Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan



A. PENGANTAR

Tujuan 15 SDGs berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Tujuan ini mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, pengendalian desertifikasi, serta penghentian hilangnya keanekaragaman hayati. Secara nasional, kinerja pengelolaan hutan Indonesia mengalami penurunan signifikan pasca reformasi pemerintahan dan implementasi otonomi daerah di awal tahun 2000-an, yang berdampak pada kontribusi ekonomi sektor kehutanan.

Evaluasi pencapaian Tujuan 15 di Provinsi Gorontalo menghadapi kendala signifikan dalam ketersediaan data. Analisis terbatas pada 1 target dengan 1 indikator tertentu, dimana data disagregasi tingkat provinsi hanya tersedia hingga tahun 2021. Keterbatasan meta data untuk 7 indikator tambahan menyulitkan pemantauan komprehensif. Untuk memperkuat implementasi Tujuan 15 SDGs di Provinsi Gorontalo, diperlukan penguatan sistem pemantauan melalui penyediaan data yang lebih mutakhir dan terdisagregasi, integrasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor untuk pengelolaan ekosistem daratan, serta peningkatan kapasitas terkait penguatan kelembagaan pengelola ekosistem daratan, pemberdayaan masyarakat dalam konservasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis ekosistem.

B. STATUS CAPAIAN

Proporsi Kawasan Hutan terhadap Total Luas Lahan

Penggunaan lahan merepresentasikan interaksi dinamis antara aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi, dinamika kependudukan, dan karakteristik fisik wilayah. Pola penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo mencerminkan kompleksitas aktivitas masyarakat dan respons terhadap kondisi lingkungan, yang terus mengalami transformasi seiring dengan evolusi pembangunan dan perubahan kebutuhan sosial-ekonomi. Sifat dasar penggunaan lahan yang dinamis dan transformatif ini dipengaruhi oleh pertimbangan multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepentingan strategis lainnya.

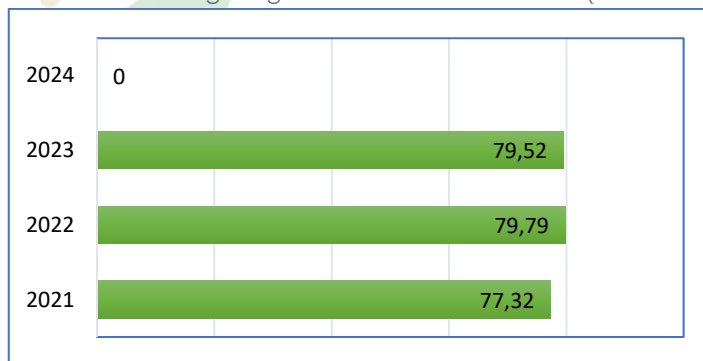
Berdasarkan perkembangan historis, luas kawasan hutan Provinsi Gorontalo mengalami perubahan signifikan. Melalui SK Menhut No. 325/Menhut-II/2010, luas kawasan hutan Provinsi Gorontalo semula ditetapkan sebesar 824.668 Ha. Namun, akibat pelepasan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit dan transmigrasi, hingga tahun 2023 luas kawasan hutan menyusut menjadi 764.881,23 Ha atau 61,5% dari total luas wilayah. Terdapat variasi data dari Kemenhut 2024 yang menunjukkan proporsi 73,26% dari luas wilayah 1.125.707 Ha, mengindikasikan perbedaan metodologi penghitungan antar instansi.

Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) Provinsi Gorontalo menunjukkan tren yang fluktuatif dengan capaian 77,32% pada tahun 2021, meningkat menjadi 79,79% di tahun 2022, kemudian menurun menjadi 79,52% pada tahun 2023. Fluktuasi ini merefleksikan kerentanan keberlanjutan perbaikan kualitas lingkungan terhadap berbagai tekanan pembangunan yang terjadi.



Grafik 2.90

Indeks Kualitas Lingkungan di Provinsi Gorontalo (2021-2024)



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024 (diolah)

Berdasarkan analisis Forest Watch Indonesia, Provinsi Gorontalo mengalami tekanan berat terhadap kawasan hutannya. Sisa hutan alam saat ini hanya tersisa 693.795 Ha atau 57% dari luas daratan, dengan laju deforestasi mencapai 35.770,36 Ha dalam periode 2017-2023. Alih fungsi lahan didominasi oleh industri ekstraktif pertambangan, perkebunan kelapa sawit, proyek bio energi (56%) dan pertanian monokultur (43%), sementara untuk pemukiman hanya 1%. Dalam periode 2013-2018 tercatat alih fungsi hutan seluas 2.100 Ha, sementara pada periode 2017-2021 kehilangan tutupan hutan alam mencapai 33.492 Ha.

Grafik 2.91

Tutupan Pohon dalam Batas Kawasan Hutan Primer Provinsi Gorontalo (2002-2024)

Dari **2002** sampai **2024**, **Gorontalo kehilangan 12.2 kha hutan primer basah**, menyumbang **40%** dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. **Area total hutan primer basah di Gorontalo berkurang 18%** dalam periode waktu ini.



Sumber: Global Forest Watch, 2025

Data pada (Tabel 15.1) menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato memiliki kawasan hutan terluas yaitu 311.347,23 Ha (41% dari total kawasan hutan provinsi), disusul oleh Bone Bolango 140.165,70 Ha (18%), Boalemo 128.456,15 Ha (17%), Gorontalo Utara 115.245,39 Ha (15%), Gorontalo 69.206,00 Ha (9%), dan Kota Gorontalo 460,76 Ha (0,06%). Namun, kondisi lahan kritis cukup memprihatinkan dengan total 334.475 Ha, terdiri dari 136.117 Ha dalam kawasan hutan dan 198.358 Ha di luar kawasan hutan.



Tabel 2.17

Luas Kawasan Hutan per Kabupaten di Provinsi Gorontalo s/d Tahun 2023

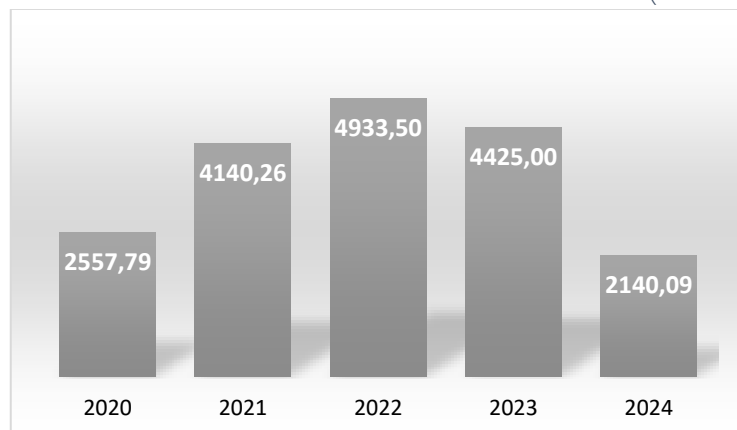
No	Kabupaten	FUNGSI KAWASAN HUTAN							Total
		CA	HL	HP	HPK	HPT	SM	TN	
1	Boalemo		28.645,55	14.717,99	4.783,07	44.299,83	10.922,66		103.369,11
2	Bone Bolango		15.644,20	824,10		18.817,22		104.880,20	140.165,70
3	Gorontalo	100,45	13.116,63	17.714,06	2.395,35	41.901,89	24.734,61		99.962,98
4	Gorontalo Utara	155,87	7.985,46	15.540,08	5.554,01	64.399,59	16.006,44	14,29	109.655,73
5	Kota Gorontalo		460,76						460,76
6	Pohuwato	39.707,97	136.495,90	41.295,79	10.522,52	83.244,77			311.266,98
	TOTAL	39.964,29	202.348,50	90.092,02	23.254,95	252.663,30	51.663,71	104.894,50	764.881,23

Sumber: Shapefile (shp) Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2018 SK. 9419/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 Tanggal 6 November 2019

Data dari BPDAS Bone Limboto tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo adalah 217.177 Ha atau sekitar 19,29% dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo. Namun demikian, upaya penanganan terhadap lahan kritis kian meningkat melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Di mana upaya RHL menunjukkan fluktuasi capaian dengan realisasi 2.557,79 Ha (2020), meningkat menjadi 4.140,26 Ha (2021), kemudian 4.933,50 Ha (2022), namun menurun menjadi 4.425,00 Ha (2023), dan turun signifikan menjadi 2.140,09 Ha (2024). Penurunan capaian RHL ini menjadi tantangan serius dalam pemulihan kawasan yang terdegradasi.

Grafik 2.91

Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo (2020-2024)



Sumber: Buku Statistik Kementerian Kehutanan, 2024 (diolah)

Hilangnya kawasan hutan telah memicu berbagai dampak lingkungan seperti peningkatan erosi dan sedimentasi, penyusutan Danau Limboto, kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta penurunan kualitas air. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif meliputi harmonisasi data, percepatan rehabilitasi, pengendalian alih fungsi lahan, pemulihan ekosistem, dan penguatan sistem monitoring berbasis teknologi.

Dengan komitmen yang konsisten dan pendekatan terintegrasi, Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mempertahankan proporsi kawasan hutan yang optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan.

C. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 15 adalah sebagai berikut :

1. Degradasi Lahan dan DAS (Daerah Aliran Sungai)



- Kawasan DAS di Gorontalo mengalami degradasi yang masif dalam dua dekade terakhir, luas lahan yang dikategorikan “sangat kritis” meningkat tajam, dari 65.414 ha (2004) menjadi 259.483 ha (2020).
 - Degradasi lahan ini berdampak ekologi (fungsi ekosistem menurun) dan sosial-ekonomi (komunitas lahan kritis sulit mendapat penghidupan berkelanjutan).
2. Deforestasi dan Pembalakan Ilegal
 - Menurut Pergub Gorontalo, salah satu tantangan adalah pembalakan hutan ilegal dan peredaran hasil hutan ilegal.
 - Aktivitas izin pemanfaatan lahan untuk bio energi di Gorontalo juga menjadi ancaman bagi tutupan hutan alam. E
 - Proyek bio energi berbasis lahan hutan bisa mendorong konversi hutan alami menjadi lahan komersial, yang merusak keanekaragaman hayati.
 3. Konflik Manusia-Satwa dan Kapasitas Pelestarian Hutan
 - Hutan konservasi Gorontalo menghadapi ancaman perambahan ilegal dan konflik manusia-satwa.
 - Keterbatasan kapasitas lokal (tenaga pengelola konservasi, dana, dan teknologi) dalam menjaga kawasan lindung menjadi kendala nyata. Pergub menyebut perlunya peningkatan “kapasitas dan kapabilitas masyarakat.”
 - Kolaborasi multi pihak (pemerintah, masyarakat, LSM) untuk pengelolaan hutan konservasi masih perlu diperkuat.
 4. Kehilangan Keanekaragaman Hayati
 - Salah satu target SDG 15 adalah “menghentikan kehilangan spesies” dan menjaga habitat alami.
 - Konversi hutan untuk pemanfaatan ekonomi (seperti bio energi) berisiko mengurangi keanekaragaman hayati lokal jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
 5. Perubahan Tata Ruang yang Kurang Mendukung Kawasan Lindung
 - Dalam kebijakan RPJMD Gorontalo, ada program “pengembangan pola ruang” untuk menjaga dan memperkuat kawasan lindung. Namun, menegakkan pembatasan ruang agar tidak terjadi konversi lahan lindung secara ilegal atau tidak sesuai peruntukan adalah tantangan besar (regulasi, pengawasan, sanksi).
 6. Pendanaan untuk Rehabilitasi dan Restorasi
 - Memulihkan lahan kritis (reforestasi, rehabilitasi DAS) memerlukan anggaran dan investasi yang besar. Kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk mendukung program restorasi jangka panjang bisa terbatas.
 7. Kesadaran dan Partisipasi Komunitas Lokal
 - Untuk restorasi ekosistem (misalnya di lahan kritis atau hutan terdegradasi), diperlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai aktor utama.
 - Kurangnya edukasi dan insentif yang jelas untuk masyarakat lokal agar ikut dalam konservasi atau reforestasi bisa menjadi penghambat.
 8. Ancaman Bio energi dan Perubahan Izin Lahan
 - Sebagaimana disebutkan, izin bio energi yang dikeluarkan di Gorontalo bisa memicu deforestasi. Jika tidak diatur dengan kebijakan berkelanjutan, pemanfaatan bio energi bisa merusak ekosistem daratan dan menggusur fungsi ekologis hutan.



Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh



A. PENDAHULUAN

Perkembangan Tujuan 16 SDGs di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan dalam aspek keamanan dan keadilan, meskipun masih terdapat tantangan dalam partisipasi publik dan pelayanan hukum. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbaikan bertahap dalam indikator utama seperti rasa aman dan akses terhadap keadilan, dengan beberapa capaian signifikan dalam pendaftaran kelahiran dan pencatatan sipil.

B. STATUS CAPAIAN

Analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat kekerasan yang dilaporkan berada pada level yang sangat rendah, dengan nilai berkisar antara 0,04% hingga 0,06% selama periode pengamatan. Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang mengalami kekerasan tercatat sebesar 0,04%, yang merupakan baseline terendah selama periode pengamatan. Namun, terjadi kenaikan signifikan secara relatif pada tahun 2021 menjadi 0,06%, yang berarti peningkatan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Meskipun kenaikan persentase relatif terlihat besar, nilai absolut peningkatan hanya 0,02 poin persentase. Yang mengkhawatirkan adalah sejak tahun 2021 hingga 2023, indikator ini mengalami stagnasi pada level 0,06% tanpa menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau penurunan. Tidak ada perubahan sama sekali dalam periode dua tahun tersebut, dengan pertumbuhan 0% pada periode 2021-2022 dan 2022-2023. Rata-rata tingkat kekerasan selama empat tahun periode pengamatan adalah 0,055%, dengan standar deviasi 0,0087%, menunjukkan variabilitas yang sangat rendah namun dengan tren yang tidak menguntungkan.

Berbeda dengan indikator kekerasan, indikator persepsi keamanan menunjukkan tren positif yang konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2020, sebesar 51,72% penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Angka ini meningkat secara bertahap menjadi 52,40% pada tahun 2021, 53,07% pada tahun 2022, dan mencapai 53,75% pada tahun 2023.

Pertumbuhan tahunan menunjukkan konsistensi yang luar biasa, dengan peningkatan sebesar 0,68% pada periode 2020-2021 (pertumbuhan relatif 1,31%), 0,67% pada periode 2021-2022 (pertumbuhan relatif 1,28%), dan 0,68% pada periode 2022-2023 (pertumbuhan relatif 1,28%). Total peningkatan selama periode empat tahun mencapai 2,03 poin persentase atau pertumbuhan relatif sebesar 3,92%. Rata-rata persepsi keamanan selama periode tersebut adalah 52,74%, dengan standar deviasi 0,7558%, menunjukkan peningkatan yang stabil dan terukur.

Stagnasi indikator 16.1.3.(a) pada level 0,06% sejak 2021 harus dilihat sebagai sinyal peringatan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa hipotesis yang perlu diinvestigasi antara lain kemungkinan telah tercapai "titik jenuh" dalam sistem pelaporan, di mana korban yang bersedia melaporkan telah mencapai batas maksimal dengan sistem saat ini. Ini berarti masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena berbagai hambatan seperti stigma sosial, ketidakpercayaan pada sistem hukum, atau ketakutan terhadap pembalasan, kemungkinan terjadi under reporting sistematis, terutama untuk kekerasan psikologis yang sering dianggap "normal" atau tidak serius, serta kekerasan seksual yang memiliki stigma sosial tinggi. Sehingga program pencegahan kekerasan yang ada mungkin telah mencapai efektivitas maksimalnya dengan pendekatan saat ini, dan memerlukan inovasi atau pendekatan baru untuk menurunkan angka lebih lanjut.

Hasil yang menunjukkan trend menurun juga terjadi pada tujuan Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak. Data menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan selama empat tahun periode



pengamatan. Total penurunan selama periode 2020-2023 mencapai 6,33 poin persentase atau 14,23% secara relatif, dengan rata-rata penurunan konsisten sebesar 2,11 poin persentase per tahun. Konsistensi penurunan ini menunjukkan efektivitas program pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan

Grafik 2.92

Tren Proporsi Rumah Tangga dengan Anak yang Mengalami Kekerasan Fisik/Psikologis 2020-2023



Sumber : BPS (SUSENAS) / tahunan

Meskipun indikator 16.2.1.(a) menunjukkan tren positif, Namun, urgensi intervensi masih dikategorikan "Sangat Tinggi " karena pada tahun 2023 masih terdapat 38,16% rumah tangga atau sekitar 4 dari 10 rumah tangga dengan anak yang melaporkan pengalaman kekerasan fisik atau psikologis.

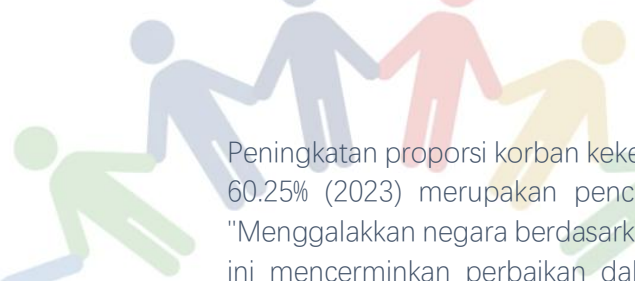
Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2023. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pelaporan meningkat dari 34.243% pada tahun 2020 menjadi 60.25% pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 26.007 poin persentase (peningkatan relatif 75.95%).

Grafik 2.93

Pelaporan Korban Kekerasan kepada Polisi 2020-2023



Sumber data: BPS (SUSENAS)/ Tahunan



Peningkatan proporsi korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi dari 34.243% (2020) menjadi 60.25% (2023) merupakan pencapaian signifikan dalam upaya mewujudkan SDG Target 16.3 "Menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses keadilan bagi semua." Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kepercayaan publik, kesadaran akan hak-hak korban, dan efektivitas sistem perlindungan korban kekerasan.

Namun, masih ada 39.75% korban yang belum melaporkan, menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk menghilangkan hambatan struktural dan budaya terhadap pelaporan. Target ambisius adalah meningkatkan proporsi ini mendekati 100% sambil memastikan bahwa proses pelaporan dan penanganan kasus berjalan dengan adil, responsif, dan berpihak pada korban.

Provinsi Gorontalo mencatat 13.967 total kasus kejahatan dalam periode lima tahun (2020-2024) dengan tren keseluruhan menurun sebesar 4,88%. Penurunan ini menunjukkan upaya signifikan dalam peningkatan keamanan, meskipun tidak stabil tahunan masih terjadi. Polres Kota Gorontalo dan Polres Gorontalo menjadi dua resort dengan beban kejahatan tertinggi, berkontribusi 42,4% dari total kejahatan provinsi.

Data menunjukkan pola kejahatan yang fluktuatif namun cenderung stabil di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2020, kejahatan mencapai puncak dengan 2.969 kasus, kemudian menurun sebesar 377 kasus (12,7%) pada tahun 2021 menjadi 2.592 kasus. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan 2.672 kasus dan mencapai puncak sekunder pada tahun 2023 dengan 2.910 kasus. Akhirnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan moderat menjadi 2.824 kasus.

Tabel 2.18
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort
Di Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2024

Kepolisian Resort	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Polres Boalemo	269	235	267	252	341
Polres Gorontalo	780	563	557	549	503
Polres Pohuwato	401	338	356	441	403
Polres Bone Bolango	335	352	383	296	309
Polres Gorontalo Utara	147	638	197	203	211
Polres Kota Gorontalo	786	224	616	728	620
Polda Gorontalo	251	242	296	441	437
Provinsi Gorontalo	2.969	2.592	2.672	2.910	2.824

Sumber: Gorontalo DalamAngka, BPS 2024

Polres Kota Gorontalo menempati posisi teratas dengan 2.974 total kasus (2020-2024), menyumbang 21,3% dari total kejahatan provinsi. Namun, resort ini menunjukkan fluktuabilitas tinggi dengan fluktuasi signifikan: dari 786 kasus (2020) → 224 kasus (2021) → 616 kasus (2022) → 728 kasus (2023) → 620 kasus (2024). Penurunan dramatis pada 2021 diikuti peningkatan yang konsisten hingga 2023. Polres Gorontalo menempati posisi kedua dengan 2.952 total kasus (21,1%). Resort ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan berkelanjutan: dari 780 kasus (2020) turun menjadi 503 kasus (2024), representasi -35,5%. Ini adalah penurunan terbesar di antara semua resort, menunjukkan strategi keamanan yang efektif.

Polres Boalemo memiliki beban kejahatan terendah dengan 1.364 total kasus (9,8%), meskipun menunjukkan tren peningkatan +26,8% dari 2020 ke 2024 (269 → 341 kasus). Peningkatan terakhir pada 2024 memerlukan perhatian khusus untuk pengendalian. Polres Gorontalo Utara mencatat 1.396 total kasus (10,0%) dengan peningkatan tertinggi +43,5% (147 → 211 kasus). Anomali signifikan terjadi pada 2021 dengan lonjakan drastis ke 638 kasus, jauh melampaui rata-rata. Penyebab lonjakan ini perlu diteliti lebih lanjut.

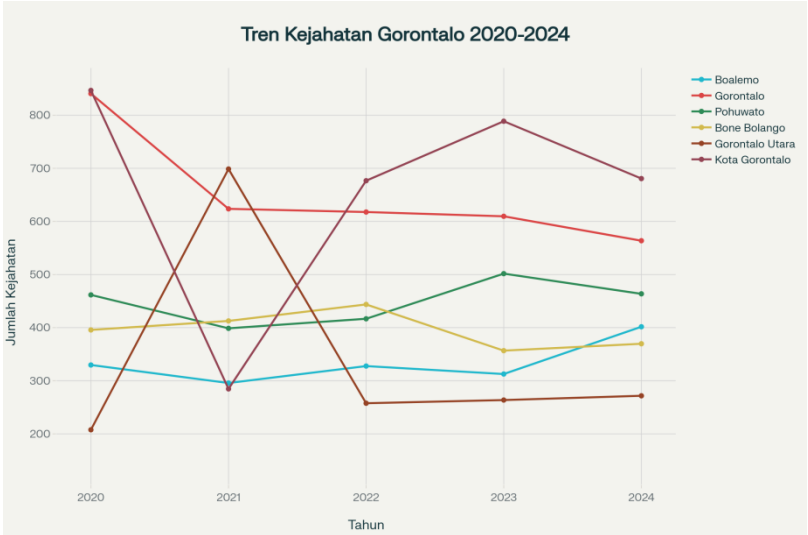


Data jumlah kejahatan yang dilaporkan oleh berbagai Kepolisian Resort di Gorontalo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi. Secara keseluruhan, total kejahatan di Provinsi Gorontalo berfluktuasi, mulai dari 2.969 pada tahun 2020, menurun menjadi 2.592 pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 2.910 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun lagi menjadi 2.824 pada tahun 2024. Polres Kota Gorontalo secara konsisten mencatat jumlah kejahatan tertinggi, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 dan 2023, meskipun mengalami penurunan drastis pada tahun 2021.

Di sisi lain, Polres Gorontalo menunjukkan penurunan yang stabil dari 780 ke 503 selama periode yang sama, mencerminkan perbaikan dalam penanganan kejahatan. Sementara itu, Polres Pohuwato dan Polres Boalemo menunjukkan fluktuasi yang mencolok, dengan lonjakan di tahun 2023 untuk Pohuwato dan peningkatan tajam pada tahun 2024 untuk Boalemo. Polres Gorontalo Utara mengalami lonjakan tajam pada tahun 2021, tetapi kemudian menurun. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan jumlah kejahatan, ada juga lonjakan yang tidak terduga di beberapa wilayah, menandakan perlunya strategi yang lebih fokus dan kolaboratif untuk mengatasi masalah kejahatan di Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.94

Trend Kejahatan yang Dilaporkan per Kepolisian Resort Provinsi Gorontalo (2020-2024)



Provinsi Gorontalo mencatat prestasi konsisten dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan 100% instansi pemerintah daerah meraih skor SAKIP $\geq$ B secara berturut-turut selama periode 2020-2024. Dari tujuh instansi pemerintah daerah yang ada, seluruhnya memperoleh predikat minimal "Baik" dalam penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

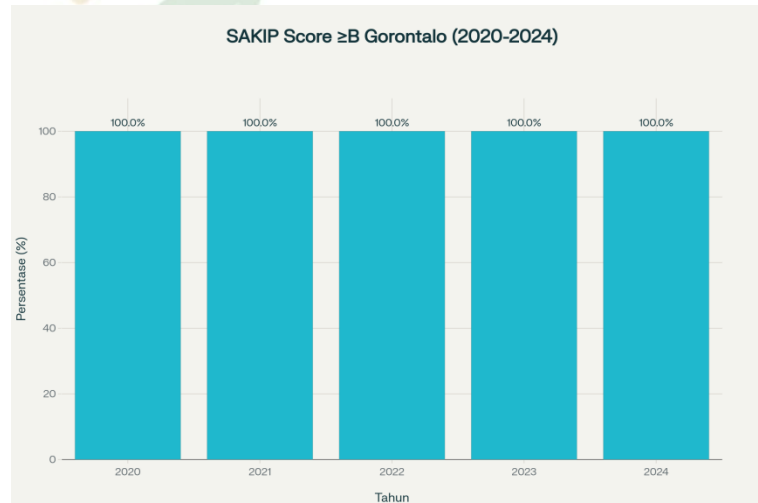
Provinsi Gorontalo memiliki 7 instansi pemerintah daerah yang dievaluasi SAKIP, terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 5 Pemerintah Kabupaten (Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato), dan 1 Pemerintah Kota (Gorontalo). Distribusi predikat SAKIP periode 2020-2024:

- 6 instansi (85,7%) memperoleh predikat B (Baik): Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kota Gorontalo
- 1 instansi (14,3%) memperoleh predikat BB (Sangat Baik): Kabupaten Bone Bolango.

Grafik persentase instansi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang meraih skor SAKIP $\geq$ B (Baik) tahun 2020-2024



Grafik 2.95



Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan pencapaian yang mengesankan dalam hal akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo selaku leading sektor pelaporan Nilai AKIP dari 29 OPD yang ada di Provinsi Gorontalo Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B mencapai 100 %.

Bersamaan dengan konsistensi pencapaian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 tahun berturut-turut sejak 2012, Gorontalo telah membuktikan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, analisis mendalam terhadap data capaian juga mengungkapkan tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian SDGs indikator 16.6.2.(a) berdasarkan data yang bersumber dari Ombudsman Gorontalo, terjadi peningkatan signifikan jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 15 instansi, naik menjadi 31 pada tahun 2022 dan mencapai 34 instansi pada tahun 2023. Lonjakan ini menandakan adanya upaya intensifikasi pembinaan, pengawasan, dan komitmen kepemimpinan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan indikator kritis untuk mengukur kesetaraan gender dan kualitas demokrasi. Provinsi Gorontalo telah menunjukkan komitmen terhadap isu ini, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target 30% yang ditetapkan oleh undang-undang. Data menunjukkan bahwa capaian persentase keterwakilan di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 sebesar 24,40%, bahkan lebih rendah dibanding 2020 yang mencapai 26,66%.

Indeks Lembaga Demokrasi Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, indeks ini mencapai 67,18, meningkat menjadi 71,92 pada tahun 2022 (peningkatan 4,74 poin atau 7,06%), dan terus meningkat menjadi 73,43 pada tahun 2023 (peningkatan 1,51 poin atau 2,10%). Secara keseluruhan, komponen ini mengalami peningkatan sebesar 6,25 poin atau 9,30% selama tiga tahun.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kapasitas lembaga-lembaga demokrasi di Provinsi Gorontalo mengalami penguatan. Indeks Lembaga Demokrasi mencerminkan sejumlah aspek yang mencakup efektivitas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menjalankan fungsi demokrasi, termasuk responsivitas terhadap aspirasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Meskipun nilai ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76,46 pada tahun 2023,



ten yang konsisten menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan demokrasi lokal.

Komponen Indeks Kebebasan menunjukkan dinamika yang berbeda dengan fluktuatif signifikan dalam periode pengamatan. Tahun 2021 memulai dengan nilai yang relatif tinggi sebesar 81,57, namun mengalami penurunan drastis menjadi 65,31 pada tahun 2022 (penurunan 16,26 poin atau 19,94%). Penurunan tajam ini merepresentasikan tantangan serius dalam menjaga kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat di tingkat provinsi. Namun demikian, indeks ini berhasil pulih dengan cepat pada tahun 2023 mencapai 81,68 (peningkatan 16,37 poin atau 25,07%), bahkan melampaui nilai awal tahun 2021.

Page III- 101

Fluktuasi yang signifikan ini mencerminkan dinamika situasi demokrasi yang sensitif terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, seperti pemilihan umum atau perubahan kebijakan terkait kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan, dan hak-hak pekerja. Indeks Aspek Kebebasan secara metodologis dirancang untuk responsif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional berdasarkan evidence-based dari berbagai sumber pemberitaan dan dokumen resmi. Pemulihan yang cepat menunjukkan resiliensi sistem demokrasi Gorontalo dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebebasan-kebebasan fundamental.

Indeks Kesetaraan menampilkan pola yang paling stabil di antara ketiga komponen, menunjukkan peningkatan yang gradual namun konsisten. Mulai dari 81,46 pada tahun 2021, meningkat menjadi 82,21 pada tahun 2022 (peningkatan 0,75 poin atau 0,92%), dan terus meningkat menjadi 83,32 pada tahun 2023 (peningkatan 1,11 poin atau 1,35%). Total peningkatan selama tiga tahun mencapai 1,86 poin atau 2,28%. Stabilitas indeks ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan hak-hak politiknya di Provinsi Gorontalo secara konsisten terjaga. Indeks Kesetaraan mengukur dimensi-dimensi seperti pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan, keterwakilan perempuan, dan akses terhadap keadilan. Nilai yang mencapai 83,32 pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa provinsi ini berada di atas rata-rata nasional untuk aspek kesetaraan, yang pada tahun 2023 mencapai 83,74. Peningkatan bertahap ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat inklusi dan representasi dalam proses demokrasi lokal.

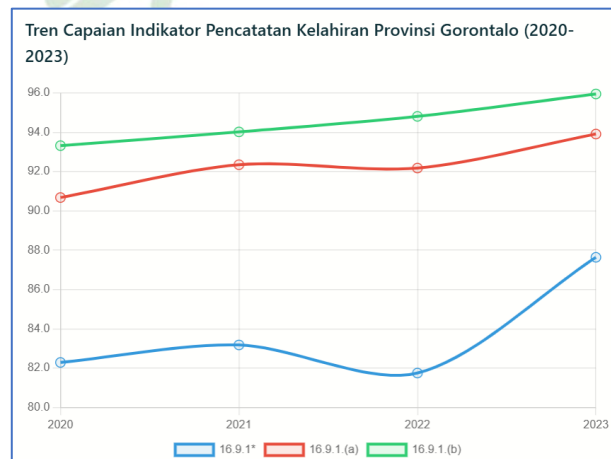
Proporsi anak di bawah 5 tahun dengan kelahiran tercatat (16.9.1)* menunjukkan tren yang tidak stabil namun berakhir dengan pencapaian positif. Pada tahun 2020, indikator ini berada di level 82,29%, meningkat tipis menjadi 83,18% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan ke 81,75% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, indikator ini kembali meningkat secara signifikan mencapai 87,64%, menunjukkan peningkatan keseluruhan sebesar 5,35 poin atau 6,50% dalam empat tahun. Ketidakstabilan ini mungkin berkaitan dengan dinamika pelayanan pencatatan sipil dan perubahan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Cakupan kepemilikan akta lahir untuk kelompok 40% berpendapatan bawah (16.9.1.a) menunjukkan tren yang lebih stabil dengan peningkatan berkelanjutan. Mulai dari 90,68% pada tahun 2020, meningkat menjadi 92,35% pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 92,18% pada tahun 2022, kemudian naik kembali menjadi 93,91% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 3,23 poin atau 3,56% dalam empat tahun, menunjukkan bahwa upaya Pemerintah untuk menjamin akses anak-anak di keluarga berpendapatan rendah terhadap akta lahir sudah efektif. Tingginya nilai ini (di atas 90%) mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mencapai equity dalam pencatatan sipil.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun (16.9.1.b) menampilkan capaian tertinggi dan paling stabil di antara ketiga indikator 16.9.1. Dimulai dari 93,32% pada tahun 2020, indikator ini menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun mencapai 94,02% (2021), 94,81% (2022), dan 95,95% (2023). Total peningkatan dalam empat tahun adalah 2,63 poin atau 2,82%, mencerminkan pencapaian yang mendekati target 100%. Dengan capaian 95,95% pada tahun 2023, Provinsi Gorontalo telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 95% dan berada dalam posisi yang sangat baik untuk mencapai target SDG 2030.



Grafik 2.96



Sumber data: BPS (Susenas) / Tahunan

C. TANTANGAN

TARGET SDGs: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak serta menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

1. Keterbatasan Kapasitas Sistem Perlindungan dan Layanan

Sistem perlindungan anak dan perempuan di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kapasitas. Meskipun pemerintah daerah telah mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan layanan perlindungan, banyak daerah di Gorontalo masih belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus untuk menangani perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran UPTD dianggap penting untuk memberikan layanan yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan. Keterbatasan infrastruktur ini juga diikuti dengan keterbatasan anggaran daerah dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang kompleks.

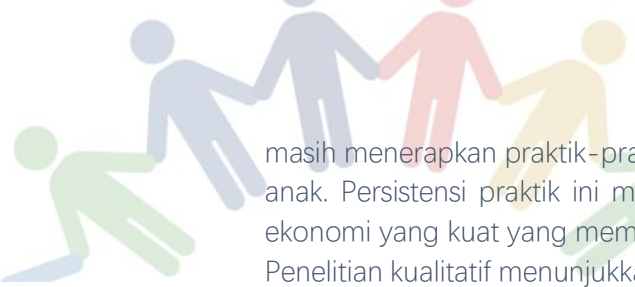
Tantangan tambahan mencakup koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Meskipun berbagai institusi seperti Kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), lembaga kesehatan, dan institusi pendidikan telah menjalin kolaborasi, tingkat integrasi layanan masih perlu ditingkatkan. Layanan terpadu satu pintu (one-stop service) yang dirancang untuk memudahkan akses korban kekerasan masih mengalami hambatan dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah kecil dan terpencil. Kurangnya kesadaran publik tentang layanan yang tersedia juga menjadi hambatan signifikan dalam menjangkau korban potensial yang membutuhkan pertolongan.

2. Kondisi sosial-budaya di tingkat komunitas dan keluarga.

Permasalahan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga sering kali tidak dilaporkan karena alasan sosial, budaya, atau ekonomi. Banyak masyarakat masih menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai masalah privat yang tidak perlu melibatkan pihak luar, sehingga kasus-kasus tersebut tersembunyi dari sistem pelaporan formal. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, menciptakan hambatan psikologis bagi korban untuk melaporkan dan mencari bantuan.

3. Persistensi Praktik Hukuman Fisik pada Segmen Masyarakat Tertentu

Meskipun telah terjadi penurunan yang signifikan, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bahwa masih 38,16% rumah tangga di Gorontalo yang melakukan hukuman fisik dan/atau agresi psikologis terhadap anak-anak mereka. Hal ini berarti bahwa hampir dua dari lima rumah tangga



masih menerapkan praktik-praktik disiplin yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak. Persistensi praktik ini mengindikasikan bahwa masih ada hambatan budaya, sosial, dan ekonomi yang kuat yang mempertahankan pola asuh tradisional berdasarkan hukuman fisik. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa peran orang tua dalam menanamkan disiplin pada anak masih belum maksimal di berbagai komunitas di Gorontalo, khususnya di daerah-daerah perdesaan dan perkampungan. Masih diperlukan peningkatan pemahaman yang signifikan dari orang tua tentang cara-cara alternatif dalam menanamkan disiplin pada anak yang tidak melibatkan hukuman fisik atau agresi psikologis. Hambatan pemahaman ini dapat berasal dari berbagai faktor termasuk tingkat pendidikan orang tua, pengaruh pola asuh generasi sebelumnya yang masih tradisional, tekanan ekonomi yang menciptakan stres pada orang tua, dan kurangnya akses terhadap informasi dan program pelatihan parenting.

4. Keterbatasan Jangkauan dan Aksesibilitas Program Pelatihan

Tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan jangkauan program pelatihan parenting education di tingkat desa dan kelurahan. Meskipun berbagai program telah dirancang untuk mempromosikan pengasuhan positif, program-program ini masih terpusat pada kota-kota besar dan belum sepenuhnya menjangkau komunitas-komunitas di daerah terpencil. Pelatihan kepada orang tua dan pengasuh perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk dapat menjangkau orang tua, pengasuh, dan calon orang tua yang lebih luas di seluruh wilayah Gorontalo, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Aksesibilitas program juga terhambat oleh faktor-faktor lain seperti kesibukan orang tua dalam mencari nafkah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi untuk menjangkau daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat administrasi. Program yang ada sering kali hanya mampu menjangkau sektor-sektor tertentu seperti orang tua di sekolah formal, sementara anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dan orang tuanya tetap berada di luar jangkauan program perlindungan yang ada.

5. Akar Masalah Sosial-Ekonomi yang Mendalam

Tantangan yang lebih dalam lagi adalah bahwa praktik hukuman fisik dan agresi psikologis sering kali berakar pada kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat pendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan hukuman fisik terhadap anak, karena stres ekonomi dapat memicu agresi terhadap anggota keluarga. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh ketegangan, sehingga orang tua lebih cenderung untuk melampiaskan stress mereka melalui hukuman yang keras terhadap anak.

Permasalahan ini diperparah oleh adanya pola inter generasi di mana anak-anak yang mengalami hukuman fisik dan agresi psikologis pada awalnya akan lebih cenderung untuk mengulangi pola yang sama ketika mereka menjadi orang tua sendiri. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memutus siklus ini, diperlukan upaya yang tidak hanya fokus pada edukasi parenting semata, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial-ekonomi keluarga agar mereka memiliki kapasitas fisik dan psikologis yang lebih baik untuk menerapkan pengasuhan positif.

6. Tantangan Struktural dan Infrastruktur Keamanan

Keterbatasan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), Sistem keamanan lingkungan atau ronda malam yang merupakan pilar penting keamanan masyarakat masih belum optimal di banyak wilayah, Infrastruktur Penerangan Publik yang Belum Memadai, Lingkungan yang gelap menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Kurangnya penerangan jalan di area strategis dan sudut-sudut rawan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap tindak kriminal. Penggunaan CCTV, sistem alarm, dan teknologi smart security masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran.

7. Tantangan Sosial



Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Rasa keamanan bersama yang lemah menyebabkan masyarakat kurang proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan atau berpartisipasi dalam pengamanan lingkungan. Kepedulian sosial dan kewaspadaan kolektif perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan.

Minimnya Koordinasi dan Komunikasi Antar warga. Di era modern dengan kesibukan tinggi, banyak warga yang tidak mengenal tetangganya dengan baik, sehingga sulit membangun sistem pengawasan komunal yang efektif.

8. Ancaman Keamanan Non-Tradisional

Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi menyebar cepat, termasuk disinformasi yang dapat memicu ketidakamanan sosial. Isu radikalisme dan ekstremisme juga menjadi ancaman terhadap keharmonisan sosial

TARGET SDGs: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

9. Kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata, terutama dalam hal Keterampilan teknis dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, Pemahaman terhadap sistem akuntabilitas dan transparan, Kemampuan inovasi dalam pelayanan publik, Literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi

10. Belum optimalnya penerapan merit sistem dalam pengembangan karier AS sehingga Memperlambat transformasi menuju birokrasi yang agile, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

11. Sistem Teknologi Informasi yang Belum Terintegrasi

Sistem informasi yang masih parsial dan belum terintegrasi antar instansi Infrastruktur TI yang belum merata di semua instansi Keamanan data dan privasi yang belum optimal, literasi digital aparatur yang bervariasi sehingga menghambat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik berbasis elektronik.

12. Partisipasi Publik yang Masih Rendah

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah Akses informasi publik yang belum optimal Forum-forum partisipatif yang belum berjalan efektif Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan yang masih terbatas, sehingga Mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah dan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

13. Sistem Pengawasan Internal yang Perlu Diperkuat

Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang perlu ditingkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal di semua instansi Tindak lanjut rekomendasi audit yang belum maksimal sehingga Risiko penyimpangan, inefisiensi, dan penurunan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

TARGET SDGs: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

14. Budaya Patriarki

Masyarakat Gorontalo, seperti kebanyakan wilayah Indonesia, masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang, menganggap kepemimpinan sebagai domain maskulin, membatasi perempuan pada peran domestik, mempertanyakan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan.

15. Persepsi Bias Gender

Stigma bahwa perempuan lebih emosional dan kurang rasional dalam membuat keputusan, Keraguan terhadap kapabilitas dan kompetensi perempuan pemimpin, serta Preferensi pemilih terhadap kandidat laki-laki



16. Keterbatasan Akses dan Sumber Daya

Program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan masih terbatas, beberapa partai belum memiliki strategi sistematis untuk mengembangkan calon perempuan serta kurangnya program mentoring dan pelatihan kepemimpinan internal.

17. Kebebasan Berkumpul-Bereksresi Antar Masyarakat perlu ditingkatkan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta pemenuhan hak - hak pekerja perlu ditingkatkan

18. Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik melalui Lembaga Perwakilan perlu ditingkatkan

19. Pendidikan politik pada kader partai politik serta kinerja lembaga pengawasan perlu ditingkatkan

TARGET SDGs Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

20. Disparitas Wilayah Geografis

Disparitas geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang mudah diakses dengan daerah terpencil. Data nasional menunjukkan bahwa cakupan akta kelahiran di wilayah pedesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan. Di Gorontalo, meskipun cakupan provinsi sudah mencapai 95,95%, kemungkinan masih terdapat kantong-kantong wilayah terpencil yang belum terlayani optimal.

21. Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah memiliki tingkat kepemilikan akta kelahiran yang lebih rendah dibandingkan keluarga dengan ekonomi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran, biaya transportasi untuk mengurus dokumen, dan prioritas kebutuhan hidup sehari-hari yang lebih mendesak.

22. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan dan desa masih menjadi kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan. Banyak desa yang belum memiliki petugas khusus yang terlatih dalam bidang administrasi kependudukan, sehingga layanan hanya dapat dilakukan secara insidental ketika ada kunjungan dari tim Disdukcapil.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti komputer, printer, peralatan bio metrik, dan koneksi internet di daerah terpencil juga menghambat proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Sistem dokumentasi yang masih mengandalkan cara manual di beberapa wilayah juga memperlambat proses pelayanan.

23. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum memahami manfaat akta kelahiran untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya. Akibatnya, mereka cenderung menunda pengurusan akta kelahiran hingga anak hendak masuk sekolah, padahal seharusnya pengurusan dilakukan segera setelah kelahiran.

24. Keterbatasan Data Terpilah

Salah satu tantangan dalam monitoring dan evaluasi adalah keterbatasan data terpilah (disaggregated data) menurut kelompok rentan seperti anak dengan disabilitas, anak dari orang tua tunggal, anak dari perkawinan tidak tercatat, dan anak dari kelompok minoritas. Tanpa data yang terpilah, sulit untuk mengidentifikasi kelompok mana yang masih tertinggal dan memerlukan intervensi khusus.

A. PENGANTAR

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memerlukan dukungan sistem pelaksanaan yang kuat serta kemitraan yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Di Provinsi Gorontalo komitmen terhadap pelaksanaan SDGs diwujudkan melalui upaya penguatan sarana pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi kemitraan global, nasional, maupun lokal.

Upaya tersebut menjadi penting mengingat tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses pembangunan, serta kebutuhan akan inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan internasional agar capaian SDGs dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan sarana pelaksanaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan data dan informasi pembangunan yang terintegrasi, serta penguatan pembiayaan inovatif untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Sementara itu revitalisasi kemitraan global diarahkan untuk memperluas jejaring kerja sama lintas sektor dan lintas negara, guna mendorong transfer pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Provinsi Gorontalo berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan SDGs dan memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kemitraan yang saling menguntungkan.

B. STATUS CAPAIAN

a. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB

Rasio pajak daerah menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap Produk Domestik PDB. Rasio pajak daerah $< 1\%$ menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH). PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan daerah. Banyak kegiatan ekonomi belum terdata sebagai objek pajak (terutama sektor informal, UMKM, dan pertanian). Basis pajak di Provinsi Gorontalo masih terbatas pada kendaraan bermotor dan konsumsi BBM, sedangkan pajak sektor jasa dan perdagangan masih rendah. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Sistem pemungutan di beberapa kabupaten/kota masih manual sedangkan Digitalisasi pajak daerah baru mulai diterapkan di beberapa sektor (contoh: e-Pajak kendaraan bermotor dan e-BPHTB).

Grafik 2.97



Sumber : BPS, KEMENKEU, KEMENDAGRI (Diolah 2025)

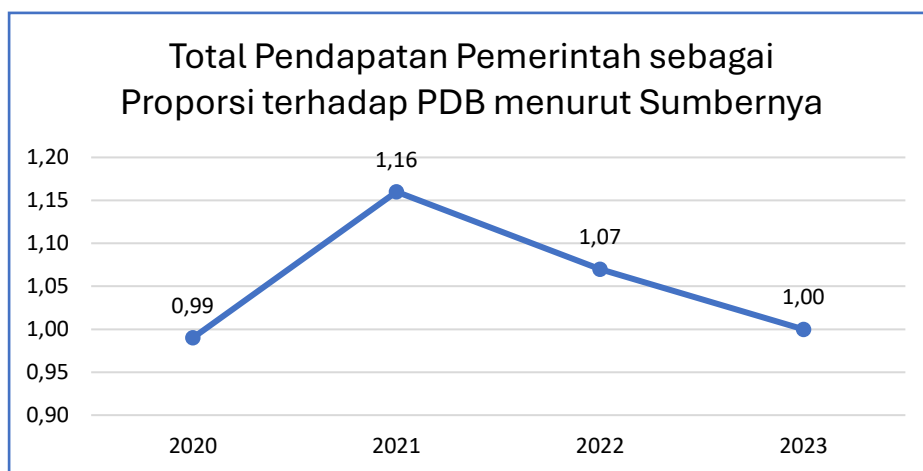


Jika dilihat dari grafik di atas, terlihat bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 0,84 Persen naik menjadi 0,93 persen pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 turun menjadi 0,84 persen dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi 0,93 persen. Rata-rata selama 5 tahun terakhir rasio penerimaan pajak berada di bawah 1 persen, hal ini menggambarkan bahwa kemandirian fiskal rendah menyebabkan Gorontalo masih bergantung pada dana pusat untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ruang fiskal terbatas, karena pertumbuhan PAD tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah. Ke depan Efisiensi pajak perlu ditingkatkan, agar penerimaan tidak hanya bergantung pada sektor transportasi dan konsumsi, potensi pajak baru perlu digali melalui pengembangan sektor pariwisata, industri kecil, dan jasa perdagangan.

b. Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya

Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDB adalah ukuran intensitas penerimaan/pengumpulan pemerintah provinsi dibandingkan ukuran ekonomi regional. Semakin besar proporsi, semakin besar kemampuan pemda memobilisasi sumber daya dari ekonomi lokal (meskipun komposisi sumbernya PAD dan transfer ke daerah juga penting). Nilai di kisaran 3–5% untuk total pendapatan pemerintah provinsi adalah wajar secara struktural bila sebagian besar pendapatan berasal dari transfer (dana perimbangan) dan PAD masih relatif kecil. Namun, interpretasi terbaik harus melihat komposisi (berapa persen PAD dan dana perimbangan).

Grafik 2.98



Grafik di atas menunjukkan bahwa total pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 0,99 persen naik menjadi 1,16 persen pada tahun 2021, setelah itu turun menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : PDRB tumbuh kuat (misalnya: peningkatan produksi/ aktivitas di sektor primer dan konstruksi) tanpa diiringi peningkatan proporsional pada PAD (karena struktur ekonomi banyak sektor non-pajak atau informal), selain itu PAD tidak berkembang jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB, di mana basis pajak daerah (PAD) relatif sempit masih terbatas pajak kendaraan, PBB, retribusi, dan lain-lain belum tumbuh signifikan serta daerah masih ketergantungan pada transfer pusat, jika dana perimbangan (yang bisa berfluktuasi atau dikategorikan dengan cara tertentu) tetap dominan, maka total pendapatan tidak otomatis mengikuti pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depan perlu perhatian pada kualitas pendapatan (bukan hanya nominal) dan target kebijakan harus menekankan peningkatan PAD yang produktif, misalnya. memperluas basis pajak lokal

(pariwisata, jasa, reklame, pajak hotel/restaurant pada tingkat kabupaten/kota yang kolaboratif), dan mempermudah kepatuhan wajib pajak.

c. **Proporsi Anggaran Domestik yang didanai oleh Pajak Domestik**

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menggambarkan sejauh mana kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai anggaran (terutama belanja daerah) dari sumber pajak daerah sendiri, tanpa bergantung penuh pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi proporsinya maka semakin mandiri keuangan daerah tersebut.

Page III- 108

Grafik 2.99



Grafik di atas menunjukkan bahwa Proporsi Anggaran Domestik yang didanai oleh Pajak Domestik di Provinsi Gorontalo dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 17,43 persen naik menjadi 27,37 persen pada 2021. Setelah itu turun menjadi 26,20 persen di tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 26,94 persen pada tahun 2023. Kenaikan proporsi tahun 2020 ke tahun 2021 kemungkinan disebabkan kenaikan PAD nominal (lebih banyak pendaftaran/peningkatan pungutan pajak daerah) atau fluktuasi transfer pusat (jika transfer turun, porsi pajak naik secara mekanis), sedangkan pada tahun 2022-2023 menunjukkan pajak domestik memberikan kontribusi stabil namun belum tumbuh cepat dari total pendapatan. Untuk meningkatkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik ke depan perlu adanya Perluasan basis pajak, dengan memperluas objek pajak (wisata, reklame, perizinan), optimalkan Samsat (PKB / BBNKB) serta Digitalisasi dan integrasi data dengan memperbaiki basis data wajib pajak, integrasikan data perizinan/OSS dan perpajakan untuk identifikasi Wajib Pajak baru.

C. **Tantangan**

Tantangan Utama Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan antara lain :

a. **Keterbatasan Kapasitas Fiskal dan Mobilisasi Dana Lokal**

- Proporsi pendapatan daerah terhadap PDB masih rendah, dan ketergantungan pada dana transfer pusat sangat tinggi (>70%).
- Ruang fiskal untuk membiayai program kolaboratif pembangunan masih sempit.
- Pajak daerah belum mampu menopang pembiayaan inovatif atau kemitraan publik-swasta.

b. **Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Pembangunan**

- Integrasi data SDGs antar-OPD, Bappeda, dan lembaga non-pemerintah belum optimal.
- Kurangnya data mikro yang dapat digunakan untuk memantau pencapaian indikator SDGs secara lokal (misalnya untuk sektor kemiskinan, lingkungan, dan ketimpangan).



c. Kelembagaan dan Koordinasi Kemitraan yang Lemah

- Forum kemitraan global dan multi-pihak (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil) belum berjalan secara konsisten.
- Masih terbatasnya lembaga lokal yang memiliki kapasitas dalam mengelola proyek kerja sama internasional atau filantropi.

d. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi layanan publik dan transparansi pembangunan masih rendah.
- Minimnya kemitraan riset dan inovasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan inklusif.

e. Keterbatasan Akses terhadap Pendanaan dan Investasi Internasional

- Gorontalo belum menjadi prioritas utama dalam *foreign direct investment* (FDI) maupun program hibah pembangunan dari lembaga donor global.
- Terbatasnya kesiapan proposal proyek (project readiness) yang dapat menarik minat lembaga donor atau mitra internasional.

f. Partisipasi Swasta Masih Rendah

- Peran sektor swasta lokal dalam pendanaan dan implementasi program pembangunan masih terbatas pada kegiatan CSR skala kecil.
- Belum terbentuk mekanisme *Public-Private Partnership* (PPP) yang menarik bagi investor.

g. Isu Keberlanjutan Program

- Banyak program kerja sama berakhir ketika proyek donor selesai karena tidak ada mekanisme keberlanjutan lokal.
- Kurangnya *ownership* (kepemilikan lokal) terhadap hasil kerja sama global.

[illegible]

TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan															
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Kondisi Dasar (Basis)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12				
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.															
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Unadequate Consumption of Food)	BPS, RPJMD	%	10,33	14,84	18,63	15,1	15,99	15,63	15,53	15,46	14,62	14,46	13,6	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	BPS	%	5,67	9	5,15	5,96		1,73	1,47	1,21	0,95	0,69	0,43	
Target SDGs : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.															
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5 tahun	SSGI	%	32,97	29	23,84	26,9	23,8	22,14	19,74	18,96	17,88	15,31	13,82	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia 5-14 tahun	SSGI dan Rikesdas 2018	%	10,14	10,2	9,62	9,27		9,34	9,3	9,27	9,23	9,19	9,13	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (BKP) Kementerian Pertanian	BKP, Kementerian Pertanian	%	76,6	74,3	76,8	76,1	76,7	78	78	78,2	78,5	78,8	79	
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap sumber daya alam dan teknologi.															
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan														
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan	Data Nilai Tambah Pertanian	Rp per Tenaga Kerja	88.766.164	98.241.444	88.461.849	103.082.643		115.193.312	122.938.108	132.080.603	142.840.637	155.438.052	170.092.687	
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.														
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan pangan.															
2.4.2001	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	Kemenkeu, BPS													
TARGET SDGs : Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian.															
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah														
TARGET SDGs : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk memitigasi risiko kelangkaan pangan.															
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	BPS		0,19	-0,19	-0,38	-0,41								

TUJUAN 3 : Kesehatan dan Kesejahteraan															
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
-1	-2	-3	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup															
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Renstra OPD	Kematian per 100.000 KH	274	252	195	139	147	120.75	111.2	113.94	109.9	83.1	85.81	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;	BPS	%	98.22	97.55	96.69	98.60	98.33	100	100	100	1001	100	100	
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan.		%	87.91	88.91	90.21	91.15	97.14	98.44	99.68	100.00	100.00	100.00	100.00	
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Profil Kesehatan Kab/Kota	%	12.9	11.9	13	10	10	15	13.8	13.1	12.5	11.9	11.9	
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Renstra OPD	%	11.9	11	12	10	10.4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Profil Kesehatan Kab/Kota	%	9.3	7.4	7.3	4.1	7.1	NA	8.4	8	7.6	7.2	NA	
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Renstra OPD	%	930	35	NA	NA	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Renstra OPD	Jumlah per 100.000 penduduk	28.9	95.4	104.2	228.1	91.7	90	90	90	90	90	90	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes	Per 1000 orang	0.03	0.04	0.04	1.30	1.19	1.27	1.34	1.42	1.49	1.57	1.64	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes		5	5	5	5	5	5	0	0	0	1	0	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.			NA	NA	NA	NA	NA	NA	22	15	10	5		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	NA		100	100	100	92.91	100	100	100	100	100	100	100	
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta.	Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes		5	4	2	1	3.83	3.85	3.87	3.89	3.90	3.91	3.93	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
TARGET SGDs : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
3.4.1*	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, atau penyakit pemapasan kronis.			NA	NA	NA	NA	29.84	29.87	29.89	29.92	29.94	29.96	29.98	
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia > 15 Tahun	BPS		30.30	30.50	30.38	30.69	31.61	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	NA		NA	NA	NA	3.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Renstra OPD		6.7	155	55		29.84	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Renstra OPD		25.61	26.24	26.87	27.50	27.73	27.97	28.20	28.43	28.67	28.90	29.13	
TARGET SDGs : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.			40.00	42.00	40.00	71.00	79.66	86.74	92.72	97.90	102.47	106.56	110.26	
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.			NA	NA	NA	4.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs : Pada tahun 2020, mengurangi setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.															
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	BPS	(Vanila menikah usia reproduksi)	79.94	79.92	79.90	79.88	79.86	79.84	79.82	79.80	79.78	79.76	79.74	
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-														

3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SGDs : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.														
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS		30.30	30.50	30.38	30.69	31.61						
TARGET SGDs : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.														
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Risksdas Kementerian Kesehatan	(DPT-3)	93.65	88.92	94.05	95.41	94.64	94.49	94.33	94.17	94.01	93.85	93.69
			(Campak-2)	86.03	83.79	77.32	80.39	79.28	79.56	80.10	80.90	81.97	83.29	84.88
			(Imunisasi Dasar Lengkap)	69.43	72.02	69.27	70.56	69.52	69.64	69.77	69.89	70.02	70.14	70.27
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Laporan Rutin Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan / BPS		86.02	100.00	96.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
TARGET SGDs : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.														
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), Kementerian Kesehatan	Dokter Umum	0.35	0.41	0.41	0.38	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45	0.45
			Dokter Gigi	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			Perawat	2.14	2.52	2.83	03.08	3.27	3.38	3.48	3.57	3.65	3.72	3.78
			Bidan	1.31	1.55	1.83	1.94	02.08	2.17	2.24	2.30	2.35	2.40	2.45
			Farmasi	0.12	0.15	0.17	0.19	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24
			Kesehatan Masyarakat	0.55	0.60	0.74	0.77	0.83	0.87	0.91	0.94	0.97	1.00	01.02
			Kesehatan Lingkungan	0.16	0.19	0.23	0.23	0.26	0.28	0.31	0.33	0.36	0.38	0.41
			Gizi	0.36	0.40	0.45	0.49	0.50	0.52	0.54	0.56	0.57	0.59	0.60

TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas																
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TARGET SDGs: 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Raport Mutu Pendidikan 2021	Indeks (SMA/Sederajat)													
	Kemahiran minimum membaca (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun															
	Usia 15															
	SMA				1.67	45,91	62,17	62	47,19	49,31	51,44	53,56	55,69			
	SMK				1.67	37,61	55,11	55	58	60,5	62,5	64	65			
	Pendidikan Khusus					13,33	19,96	35	44,43	55,27	66,1	76,94	87,77			
	Kemahiran minimum berhitung (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun															
	Usia 15															
	SMA				1.6	35,29	58,71	58	78	88	94	97	99			
	SMK				1.59	29,46	52,95	52	62,4	71,76	78,94	82,89	84,55			
	Pendidikan Khusus					20	28,26	30	36,09	41,09	46,09	51,09	56,09			
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	% (SMA Sederajat)	Dokren , LPPD (APM)													
		% (SMA Sederajat)	Statistik Kesejahteraan Rakyat (diambil dari data Persentase Penduduk Laki/ perempuan 15	55,35	53,73	45,12	46,19	58,04	59,09	60,14	61,18	62,23	63,28	64,33		
		% (SMP Sederajat)		80,1	81,22	80,56	83,71	86,15	87,69	89,23	90,76	92,3	93,84	95,34		
		% (SD Sederajat)		91,9	93,44	95,12	93,69	93,91	94,29	94,63	94,95	95,25	95,52	95,78		
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	% (SMA/SMK Sederajat)	Dokren , LPPD (APM) Dikpora Provinsi Gorontalo	28,32	25,89	32,07	25,05	24,57	24,19	23,8	23,41	23,03	22,64	22,25		
		% (Kelompok Umur 5 sd 6 Tahun)	BPS													
		% (Kelompok Umur 7 sd 12 Tahun)	BPS	0,87	0,8	1,48	1,96	1,24	1,26	1,27	1,29	1,3	1,32	1,33		
		% (Kelompok Umur 13 sd 15 Tahun)	BPS	12,07	12,04	9,98	10,92	10,63	10,48	10,32	10,16	10,01	9,85	9,69		
		% (Kelompok Umur 16 sd 18 Tahun)	BPS	28,32	25,89	32,07	25,05	24,57	24,19	23,8	23,41	23,03	22,64	22,25		
TARGET SDGs: 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.																
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	%	BPS	91,4	93,6	97,8	95,9	97,4	97,7	98	98,3	98,6	98,9	99,2		
TARGET SDGs: 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.																
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.															
4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	%	BPS	37,74	37,32	36,94	36,23	38,01	38,75	39,5	40,25	40,99	41,74	42,49		
TARGET SDGs: 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.																
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Usia 15-24 tahun	Seknas SDGs	82,7	90,8	93,06	96,31	99,88	102,26	106,44	108,3	110,03	113,16	114,59		
TARGET SDGs: 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.																
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Rasio APM/APK-SD Perempuan dan Laki-laki	BPS	100,38	101,22	100,23	99,77	99,77	99,77	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78		
		Rasio APM/APK-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	BPS													
		Rasio APM/APK-SMP Perempuan dan Laki-laki	BPS	107,22	106,92	109,54	112,21	112,83	113,12	113,41	113,7	113,98	114,27	114,56		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN 7 :	Energi Bersih dan Terjangkau														
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern															
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	PLN	%	99,99	99,99	99,24	99,79	99,99	100	100	100	100	100	100	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	PLN	Kwh												
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Dirjen SDM (Untuk Kab/Kota yang memiliki jaringan gas)	Jumlah												
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS	%	88,56	90,8	95,22	96,14	101,5	109,87	113,86	117,69	121,39	123,99	128,65	
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.															
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM	Kwh	17,32	12,06	18,77	14,55	11,49	15,4	16,38	17,36	18,34	19,32	20,3	

TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi															
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TARGET SDGs : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Negara Berkembang															
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	%	0,60	1,38	3,01	3,23	4,92	3,264	3,313	3,313	3,313	3,362	3,362	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	Juta Rp	35.693	37.087	39.694	42.347	44.430	47.842	49.391	50.941	52.490	54.040	55.589	
TARGET SDGs : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.															
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	0,73	0,56	-1,93	1,64	4,02	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
TARGET SDGs : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.															
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	62,12	62,39	64,97	63,73	61,45							
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Layanan Keuangan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo														
TARGET SDGs : Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the															
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.														
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi Produksi Berkelanjutan														
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).														
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama															
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS	Rp	15.128	14.613	14.289	15.138		16.188	16.541	16.874	17.189	17.487	17.771	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	4,28	3,01	2,58	3,06	3,08	3,07 - 3,19	3,01 - 3,26	2,95 - 3,32	2,89 - 3,39	2,83 - 3,46	2,77 - 3,52	
	TPT berdasarkan Jenis Kelamin	BPS	%												
	- Laki-laki	BPS	%	4,53	3,05	2,28	2,79	2,63							
	- Perempuan	BPS	%	3,86	2,94	3,07	3,46	3,9							
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	7,68	6,08	6,1	8,32	8,49							
TARGET SDGs : Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.															
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	27,35	25,79	28,03	24,87	21,89	25,94	25,84	25,74	25,65	25,55	25,45	
TARGET SDGs :Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.															
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)														
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	5,46	4,28	6,78	5,37	5,39							
TARGET SDGs : Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.															
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.														
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.														
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.														
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.															
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB														
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata	Jumlah	2.112	65	75	1.465	4.055							
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Jumlah	510.421	484.580	704.821	1.080.271	3.437.439							
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.														

TUJUAN 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur															
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TARGET SDGs : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.															
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.														
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Balai Jalan	Persen	97,89	94,94	92,89	95,27	97,22	97,5	98	98,2	98,5	98,7	99	
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.														
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.														
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.														
	- Jumlah Penumpang Pada Transportasi Laut (Datang+Berangkat)	BPS	Orang		31615	56803	93813	147369	178.468	216.895	255.322	293.750	332.177	370.604	
	- Jumlah Barang Pada Transportasi Laut (Bongkar+Muat)	BPS	Ton		2339617	2738235	1902971	2239440	2.207.010	2.175.050	2.143.552	2.112.511	2.081.919	2.051.770	
	- Jumlah Penumpang Pada Transportasi Udara (Datang+Berangkat)	BPS	Orang		179587	295921	335914	343109	425.604	528.158	655.796	814.479	1.011.096	1.253.555	
	- Jumlah Barang Pada Transportasi Udara (Bongkar+Muat)	BPS	Ton		2223991	4699575	4217264	6095416	7.385.000	8.675.000	9.965.000	11.255.000	12.545.000	13.835.000	
	- Jumlah Penumpang Pada Transportasi Darat (Datang+Berangkat)	BPS	Orang												
	- Jumlah Barang Pada Transportasi Darat (Bongkar+Muat)	BPS	Ton												
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Dishub													
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	Dishub													
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dishub													
TARGET SDGs : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali															
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	BPS	%	4,13	4,24	4,4	4,23	4,19	4,25	4,32	4,4	4,48	4,55	4,63	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	%	1,13	5,32	7,85	0,46	3,23	3,80	4,25	4,70	5,10	5,40	5,70	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	%	8,30	8,86	9,21	10,33	9,18	9,3	9,45	9,6	9,75	9,95	10,15	
TARGET SDGs : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke															
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.														
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.														
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.															
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.														
9.4.1.(a)	Penurunan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca sektor industri.														
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri														
TARGET SDGs : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.															
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB														
9.5.2	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.														
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)														
TARGET SDGs : Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.															
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.														
TARGET SDGs : Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.															
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.														
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi			0,29	0,09	1,38	0,0	0	0	0,02	0,05	0,07	0,1	0,12	
TARGET SDGs : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.															
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.			98,43	98,57	80,58	89,18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

TUJUAN 10 : Berkurangnya Kesenjangan																
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.																
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Indeks	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41		
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan status disabilitas	BPS	%	15.59	15.41	15.51	15.15	13,87	13,41	13,08	12,75	12,43	12,12	11,83		
10.1.1.(c)	Jumlah Desa tertinggal Menurut Provinsi	IDM/KEMENDES	Desa	N/A	61	24	3	2	2	2	2	2	2	1		
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri Menurut Provinsi	IDM/KEMENDES	Desa	N/A	6	44	93	186	188	192	198	201	202	204		
10.1.1.(e)	Jumlah Daerah tertinggal	BPS	Daerah													
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS	%													
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS	%													
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.																
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyangang difabilitas.	BPS	%	24.28	20.84	22.59	23.89		25.36	25.17	25.00	24.84	24.69	24.54		
TARGET SDGs : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.															
10.3.1.(a)	Indeks aspek Kebebasan	BPS	%	86.42	81.57	65.31	81.68		83.55	83.65	83.75	83.85	83.95	84.05		
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).															
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.															
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.															
TARGET SDGs : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.																
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.															
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.															
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%													
	Jaminan Pensiun	BPS	%													
	Jaminan hari tua															
	Asuransi kecelakaan															
	Jaminan/Auransi kematian															
	Pesangon PHK															
10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.															
TARGET SDGs : Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.																
10.5.1	Financial Soundness Indicator.															
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.															
TARGET SDGs : Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.																
10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.															
TARGET SDGs : Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.																
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.															
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.															
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.															
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.															
10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.															
10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.															
TARGET SDGs : Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization.																
10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.															
TARGET SDGs : Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.																
10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).															
TARGET SDGs : Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN 16 :																
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Capaian				Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4					-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
TARGET SDGs: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.																
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	BPS (SUSENAS) / tahunan	%		0,04	0,06	0,06	0,06		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS (MODUL HANSOS)	%		51,72	52,4	53,07	53,75		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.																
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS (SUSENAS) Modul Hansos/ 3 Tahunan	%		44,49	42,38	40,27	38,16		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs: Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.																
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS (SUSENAS)/ Tahunan	Persen		34,243	54,36	57,49	60,25		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.																
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	BPK	Persen		100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	KEMENPAN RB						100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB ≥ B									NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman Gorontalo					15	31	34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.																
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				26,66%				24,40%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks	BPS / Tahunan			67,18	71,92	73,43	77,51	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks	BPS / Tahunan			81,57	65,31	81,68	64,56	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks	BPS / Tahunan			81,46	82,21	83,32	80,36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.																
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	BPS (Susenas) / Tahunan		82,29	83,18	81,75	87,64		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	BPS (Susenas) / Tahunan		90,68	92,35	92,18	93,91		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	BPS (Susenas) / Tahunan		93,32	94,02	94,81	95,95		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
TARGET SDGs: Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.																
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.															
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).															
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.															
TARGET SDGs: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.																
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.															
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	BPK		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%							
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B							100%								
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB ≥ B							86%	78.5%							
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.															
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman Gorontalo				15	31	34								
TARGET SDGs: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.																
16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.															
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).							24,40%								
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).															
16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.															
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks	BPS / Tahunan		67,18	71,92	73,43		79,50	80,51	81,45	82,35	83,20	84,00		
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks	BPS / Tahunan		81,57	65,31	81,68									

16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks	BPS / Tahunan		81,46	82,21	83,32								
TARGET SDGs: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.															
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	BPS (Susenast) / Tahunan	82,29	83,18	81,75	87,64		83,43	84,14	84,84	85,54	86,25	86,96	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	BPS (Susenast) / Tahunan	90,68	92,35	92,18	93,91		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	BPS (Susenast) / Tahunan	93,32	94,02	94,81	95,95		99,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

A photograph of a bustling fish market stall. A long table covered with a bright red cloth is filled with a large quantity of fresh fish, likely mackerel, showing silvery scales and reddish-brown sides. A man in a blue cap and a patterned shirt stands to the left of the table, looking towards the fish. To the right, a woman is partially visible, and a green mechanical scale sits on the table. The stall is covered by a red canopy, and a white light fixture hangs above. In the background, other market stalls and people can be seen. A white banner with text is visible in the upper right corner.

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB / SDGS

Aktivitas Pasar Minggu Telaga
photo taken by @wivik_ismail



BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB / SDGs



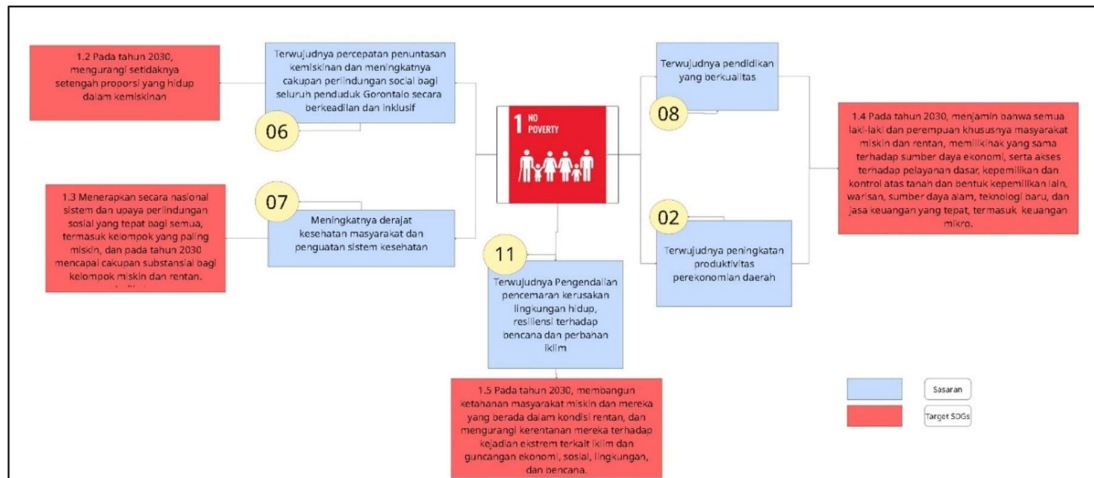
Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Page | III - 1

A. TARGET DAN KETERKAITAN

Gambar 3.1

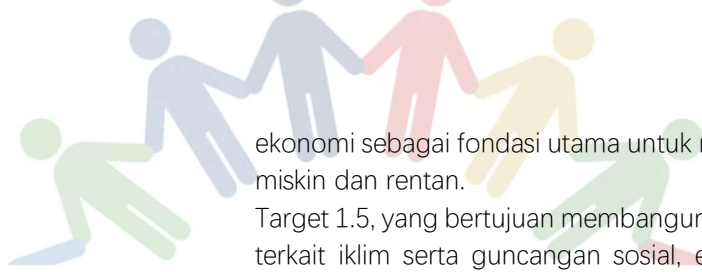
Keterkaitan Tujuan 1 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



Tujuan 1 SDGs, yaitu *Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun*, memiliki relevansi strategis bagi arah pembangunan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil analisis keterkaitan, target-target pada Tujuan 1 SDGs tersinergi secara langsung dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029. Integrasi ini memastikan bahwa agenda global pengentasan kemiskinan dapat diimplementasikan secara operasional melalui prioritas pembangunan daerah. Target 1.2 menekankan pengurangan setidaknya separuh proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2030. Target ini sejalan dengan salah satu sasaran utama RPJMD, yaitu sasaran 6 terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif. Sinergi ini mencerminkan komitmen daerah dalam mempercepat penurunan kemiskinan melalui intervensi yang komprehensif dan menjangkau kelompok paling rentan.

Selanjutnya, Target 1.3 yang berfokus pada penerapan sistem perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok termiskin, beririsan dengan sasaran 7 pada RPJMD yaitu *meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan*. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial di Gorontalo dipahami secara holistik, mencakup layanan kesehatan sebagai instrumen penting dalam menurunkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

Target 1.4 menekankan jaminan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, kepemilikan aset, teknologi, dan jasa keuangan termasuk keuangan mikro. Target ini berhubungan erat dengan sasaran daerah yang ke 8 yaitu *terwujudnya pendidikan yang berkualitas* serta sasaran 2 *peningkatan produktivitas perekonomian daerah*. Melalui sasaran ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas



ekonomi sebagai fondasi utama untuk memperluas akses kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

Target 1.5, yang bertujuan membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrem terkait iklim serta guncangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, terhubung langsung dengan sasaran 11 yaitu *terwujudnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim*. Integrasi ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Gorontalo dilakukan dengan memahami kerentanan ekologis dan risiko bencana yang dapat semakin memperdalam kondisi kemiskinan.

Secara keseluruhan, bagan keterkaitan ini menggambarkan bahwa pencapaian Tujuan 1 SDGs di Provinsi Gorontalo telah terintegrasi secara sistematis ke dalam kerangka RPJMD 2025–2029. Setiap target SDGs dihubungkan dengan sasaran pembangunan daerah yang relevan, sehingga intervensi untuk mengurangi kemiskinan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan lintas sektor yang mencakup perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan sinergi ini, Provinsi Gorontalo memiliki landasan perencanaan yang kuat untuk memastikan percepatan pencapaian pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif hingga tahun 2030.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025–2030

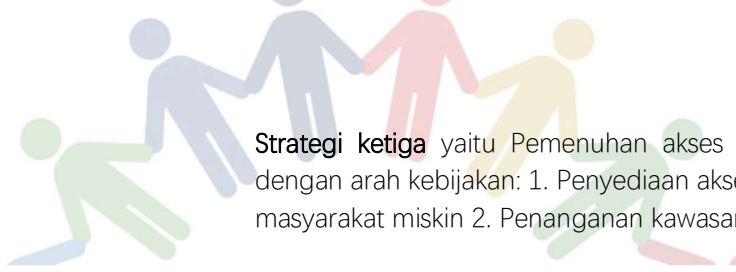
Sasaran Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif Strategi yang dilakukan adalah :

Strategi pertama adalah Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif, dengan kebijakan:

1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif
2. Pendekatan pemanfaatan satu data tunggal sosial ekonomi sebagai baseline data sasaran penerima manfaat
3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas.
4. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia
5. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 6. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional yaitu Sekolah Rakyat.

Strategi kedua yaitu kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui perencanaan, pendanaan, dan intervensi yang sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan kebijakan :

1. Penguatan fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi melalui penguatan komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pendanaan dan penentuan sasaran intervensi program
3. Pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah
4. Memperkuat evaluasi rencana APBD Kabupaten/Kota dalam mendukung sinergi pembangunan



Strategi ketiga yaitu Pemenuhan akses hunian layak dan penanganan pemukiman kumuh, dengan arah kebijakan: 1. Penyediaan akses perumahan layak, terjangkau, dan berkualitas untuk masyarakat miskin 2. Penanganan kawasan kumuh.

TUJUAN 1 :	Tanpa Kemiskinan												
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs : *Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.													
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim												
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional													
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)			73,98	74,63	75,27	75,91	76,55				Dikbud
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)			37,12	38,72	40,31	41,91	43,51				
1.01.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)			71	71	71	71	71				
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)					3	3	4				
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)					1						
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)					2	1	1				
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)					921	921	921				
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					1						
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)					1.028	1.028	1.028				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)			100	100		100	100				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)			346	346	346	346	346				
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)					223	230	237				
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					1						
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)					1	1	1				
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)			38	74	110	110	110				
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)					1						
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					2	1	1				
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)					5	2	3				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					1	1	1				

		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)		5	5	5	6	4				
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)				1	1	1				
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				1	1	1				
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					1					
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)				1						
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		8	9	4	3	2				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)				1						
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)				1						
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		71	71	71	71	71				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		314	314	314	314	314				
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)				71	71	71				
1.01.02.1.01.0001	Subkegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)				1						
1.01.02.1.01.0003	Subkegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)				1						
1.01.02.1.01.0010	Subkegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				1	1	1				
1.01.02.1.01.0011	Subkegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)				1	1	1				
1.01.02.1.01.0012	Subkegiatan : Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)		5	5	5	6	4				
1.01.02.1.01.0013	Subkegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)				1						
1.01.02.1.01.0014	Subkegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		8	9	4	3	2				
1.01.02.1.01.0019	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)				1	1	1				
1.01.02.1.01.0020	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)				2	1	1				
1.01.02.1.01.0027	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					1					
1.01.02.1.01.0028	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)				1						
1.01.02.1.01.0029	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)				1	1	1				
1.01.02.1.01.0036	Subkegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)				1.028	1.028	1.028				
1.01.02.1.01.0039	Subkegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)				223	230	237				
1.01.02.1.01.0041	Subkegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)				3	3	4				
1.01.02.1.01.0045	Subkegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)		38	74	110	110	110				
1.01.02.1.01.0049	Subkegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		314	314	314	314	314				

1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)			346	346	346	346	346				
1.01.02.1.01.0051	Subkegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)			100	100			100	100			
1.01.02.1.01.0052	Subkegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)			71	71	71	71	71				
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)			71	71	71	71	71				
1.01.02.1.01.0054	Subkegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)					71	71	71				
1.01.02.1.01.0066	Subkegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)					921	921	921				
1.01.02.1.01.0068	Subkegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)					1						
1.01.02.1.01.0069	Subkegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)					2	1	1				
1.01.02.1.01.0071	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)					1						
1.01.02.1.01.0072	Subkegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)					5	2	3				
1.01.02.1.01.0073	Subkegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)					1						
1.01.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan												
1.01.02.1.02.0009	Subkegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)				1	3	3	2				
1.01.02.1.02.0010	Subkegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)			7	19	7	5	6				
1.01.02.1.02.0033	Subkegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)			7	5	5	5	5				
1.01.02.1.02.0037	Subkegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)		2.096	2.100	2.100	2.150	2.300					
1.01.02.1.02.0041	Subkegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		400	500	550	600	650					
1.01.02.1.02.0042	Subkegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)		212	212	212	212	212					
1.01.02.1.02.0043	Subkegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		177	177	177	177	177					
1.01.02.1.02.0045	Subkegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)				3	3	3					
1.01.02.1.02.0046	Subkegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		58	59	60	60	60					
1.01.02.1.02.0047	Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)				60	60	60					
1.01.02.1.02.0060	Subkegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)				550	600	650					
1.01.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus												
1.01.02.1.03.0001	Subkegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)				1							

[illegible]

2.19.02.1.02.0004	Subkegiatan : Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi (Organisasi)	5	5	5	5	5						
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)										Dinas PPPA	
2.08.06.1.01	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi												
2.08.06.1.01.0007	Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	6	10	12	18	24						
2.08.06.1.02	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi												
2.08.06.1.02.0006	Subkegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	6	6	6	6	6						
2.08.06.1.02.0007	Subkegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi (Dokumen)		2	2	2	2						
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	100	100						
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75,75	79,07	82,39	85,71	89,03						
2.08.07.1.01	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
2.08.07.1.01.0006	Subkegiatan : Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Provinsi (Orang)	10	15	20	25	30						
2.08.07.1.01.0007	Subkegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)		1	1	1	1						
2.08.07.1.01.0010	Subkegiatan : monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Provinsi (Laporan)		3	4	5	6						
2.08.07.1.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi												
2.08.07.1.02.0010	Subkegiatan : Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)		30	25	20	15						
2.08.07.1.02.0008	Subkegiatan : Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	40	40	40						
2.08.07.1.03	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
2.08.07.1.03.0011	Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)		4	6	8	10						

2.08.07.1.03.0009	Subkegiatan : penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)			1	1	1	1					
2.08.07.1.03.0006	Subkegiatan : Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)			6	6	6	6					
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	16,99	17,4	18,21	19,02	20,23					Dinsos	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	8,77	9,57	10,36	11,16	11,96						
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100	100	100						
1.06.05.1.01	Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal												
1.06.05.1.01.0001	Subkegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	17	18	19	20	21						
1.06.05.1.01.0002	Subkegiatan : Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)	1	1	1	1	1						
1.06.05.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi												
1.06.05.1.02.0011	Subkegiatan : Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota (Orang)	550	600	650	700	750						
1.06.05.1.02.0008	Subkegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	6	6	6	6	6						
1.06.05.1.02.0003	Subkegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	30	30	30	30	30						
1.06.05.1.02.0006	Subkegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	4.200	4.300	4.500	4.700	5.000						
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlarant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100						
		Persentase Anak Terlarant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100						
		Persentase lanjut usia terlarant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100						
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	100	100						
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100	100	100						
		Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi peyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant dan/atau gelandangan dan pengemis didalam panti yang layak dan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100						
		Persentase sarana prasarana bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100						
1.06.04.1.01	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti												
1.06.04.1.01.0003	Subkegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	12	15	17	18	19						

1.06.04.1.01.0021	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (Dokumen)			1	1	1	1	1				
1.06.04.1.01.0015	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. (Kabupaten/Kota)			6	6	6	6	6				
1.06.04.1.01.0020	Subkegiatan : Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0007	Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0006	Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0019	Subkegiatan : Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (orang)			1	1	1	1	1				
1.06.04.1.01.0016	Subkegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0001	Subkegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0017	Subkegiatan : Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0009	Subkegiatan : Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0004	Subkegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0005	Subkegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0010	Subkegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0011	Subkegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.01.0002	Subkegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)			12	15	17	18	19				
1.06.04.1.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant												
1.06.04.1.02.0004	Subkegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0017	Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant (Dokumen)			1	1	1	1	1				
1.06.04.1.02.0007	Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0006	Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0018	Subkegiatan : Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0019	Subkegiatan : Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi (Orang)			2	2	2	2	2				
1.06.04.1.02.0001	Subkegiatan : Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)			4	4	4	4	4				

1.06.04.1.02.0021	Subkegiatan : Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi (Orang)			5	5	5	5	5				
1.06.04.1.02.0020	Subkegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0015	Subkegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0022	Subkegiatan : Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)			5	5	5	5	5				
1.06.04.1.02.0009	Subkegiatan : Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0005	Subkegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0010	Subkegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.02.0011	Subkegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			10	10	10	10	10				
1.06.04.1.02.0023	Subkegiatan : Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)			3	3	3	3	3				
1.06.04.1.02.0003	Subkegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)			50	55	60	65	70				
1.06.04.1.03	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti												
1.06.04.1.03.0003	Subkegiatan : Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0017	Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Dokumen)			1	1	1	1	1				
1.06.04.1.03.0007	Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0006	Subkegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0012	Subkegiatan : Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi (Orang)			4	4	4	4	4				
1.06.04.1.03.0018	Subkegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0001	Subkegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0015	Subkegiatan : Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0016	Subkegiatan : Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)			23	25	27	29	31				
1.06.04.1.03.0004	Subkegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0005	Subkegiatan : Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0010	Subkegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				
1.06.04.1.03.0011	Subkegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)			25	27	29	31	33				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

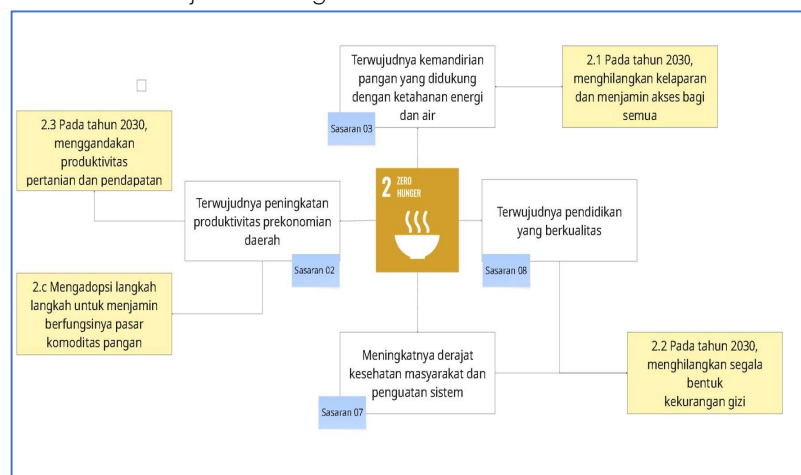
Page | III - 4

A. TARGET DAN KETERKAITAN

Pencapaian Goals 2: Tanpa Kelaparan di Provinsi Gorontalo tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan sejumlah sektor kunci yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara sistem pangan, gizi, kesehatan, lingkungan, dan pembangunan ekonomi daerah sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 3.2

Keterkaitan Tujuan 2 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



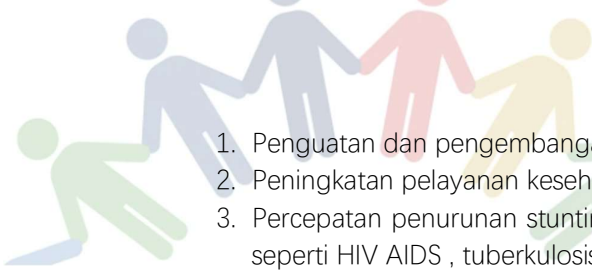
Dalam konteks RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2030 , pencapaian Goals 2 (tanpa kelaparan) diterjemahkan dan diperkuat melalui sasaran daerah yaitu sasaran 3 : Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air; sasaran 2 : terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah ; sasaran 7 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan; sasaran 8 : terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air, arah kebijakannya yaitu :

1. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air melalui perluasan jaringan primer , sekunder dan tersier,
2. Peningkatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan derajat kesehatan
3. Pemenuhan air baku dalam rangka ketahanan air seperti pembangunan kolam-kolam retensi dan bendung
4. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energi Water (FEW) Nexus

Angka Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/PoU yang ditargetkan pada tahun 2023 pada sasaran ini adalah 13,05 %. Perbaikan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan dengan Skor PPH ditargetkan meningkat menjadi 79.

Selanjutnya pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan dilakukan melalui strategi peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut. Arah kebijakan yang dilakukan adalah



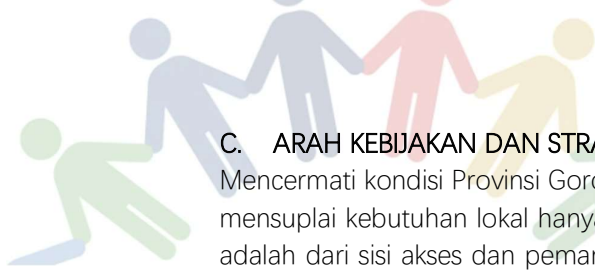
1. Penguatan dan pengembangan upaya promosi kesehatan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
3. Percepatan penurunan stunting dan percepatan eliminasi penyakit tidak menular dan menular seperti HIV AIDS , tuberkulosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multi sektor. Target pemerintah provinsi Gorontalo di tahun 2030 dalam menurunkan angka prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita sebesar 13,82 %.

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas perekonomian daerah dilakukan dengan menerapkan 2 strategi yang relevan yaitu :

1. Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi dan Tenaga kerja dengan arah kebijakan :
 - Intervensi dini UMKM dan tenaga kerja melalui pengembangan sekolah vokasi baik di tingkatan sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan keunggulan lokal wilayah
 - Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan dan industri pengolahan
2. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan :
 - Penyediaan dan pengelolaan terpadu sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan yang modern dan berkelanjutan
 - Peningkatan produksi dan populasi ternak sapi, kambing, unggas
 - Peningkatan luasan lahan pertanian (cetak sawah baru) di kawasan potensial
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian
 - Penguatan dan perlindungan sosial di bidang pertanian khususnya untuk pengendalian izin serta kelembagaan petani dan nelayan
 - Optimalisasi program intervensi manajemen dan pengawasan yang lebih konsisten baik terkait stabilisasi harga, penggunaan peralatan ukur dan pengendalian sarana dan sarana pertanian
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang modern dan berkelanjutan seperti pelabuhan perikanan, balai benih perikanan
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha dan industri sumber daya perikanan dan kelautan
 - Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi kewenangan provinsi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian
 - Peningkatan kelembagaan petani, peternak dan kelompok nelayan dan sistem pengawasan mutu serta perbaikan pola distribusi
 - Peningkatan kualitas produksi pertanian melalui riset dan pengembangan khususnya terkait benih yang bersesuaian dengan iklim lokal

Sasaran daerah mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak berkaitan secara langsung terhadap pencapaian Goals ini namun lebih berkaitan pada aspek pemanfaatan pangan dengan arah kebijakan :

- Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
- Penyediaan dan peningkatan akses pendidikan khususnya di wilayah terisolir dan rawan putus sekolah
- Peningkatan kualitas literasi masyarakat
- Dukungan terhadap program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis



C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

Mencermati kondisi Provinsi Gorontalo Dari aspek ketersediaan dapat dikatakan kita cukup mampu mensuplai kebutuhan lokal hanya saja yang menjadi kendala dan tantangan terbesar adalah pada adalah dari sisi akses dan pemanfaatan pangan. Hal ini diperkuat dengan melihat perkembangan harga beras yang meningkat drastis pada tahun 2023-2024 bahkan mencatatkan rekor sebagai provinsi dengan harga beras termahal se nasional yang pernah mencapai angka Rp. 19.400 untuk kualitas beras premium.

Page | III - 6

Intervensi untuk mencapai Goals 2 perlu dilakukan secara terpadu dari sisi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Berikut uraian intervensi yang dapat dilakukan di tiap aspek:

1. Aspek Ketersediaan Pangan, tujuannya adalah memastikan pangan cukup tersedia sepanjang waktu. Intervensi yang dapat dilakukan adalah :
 - a) Peningkatan produksi pangan lokal melalui intensifikasi dan diversifikasi (misalnya pengembangan komoditas sumber karbohidrat alternatif selain beras).
 - b) Penerapan teknologi pertanian untuk efisiensi lahan, air, dan input produksi.
 - c) Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan (konservasi tanah dan air, agroforestry, pertanian lahan kering).
 - d) Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (lumbung pangan desa, buffer stock).
 - e) Pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss and waste*) di rantai pasok.
2. Aspek Akses Pangan, bertujuan untuk memastikan semua rumah tangga mampu memperoleh pangan yang cukup, baik fisik maupun ekonomi. Bentuk intervensinya adalah
 - a) Peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, melalui pemberdayaan ekonomi (UMKM pangan, usaha tani, padat karya).
 - b) Program perlindungan sosial seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), PKH, dan subsidi pangan.
 - c) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan (jalan, transportasi, pasar desa, gudang).
 - d) Stabilisasi harga pangan pokok, terutama di wilayah rentan.
 - e) Penguatan sistem logistik pangan daerah agar suplai merata dan tidak tergantung pada wilayah lain.
3. Aspek Pemanfaatan (Konsumsi) Pangan, tujuannya adalah meningkatkan kualitas konsumsi pangan agar memenuhi kebutuhan gizi. Intervensi:
 - a) Edukasi gizi dan pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).
 - b) Kampanye peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH).
 - c) Peningkatan akses terhadap pangan bergizi, seperti sayur, buah, dan protein hewani.
 - d) Intervensi gizi spesifik (pemberian suplemen zat besi, vitamin, fortifikasi pangan).
 - e) Pemberdayaan keluarga dan perempuan dalam pengelolaan pangan rumah tangga.
4. Aspek Stabilitas Sistem Pangan untuk menjamin pasokan dan akses pangan tetap stabil meski ada guncangan (iklim, bencana, krisis ekonomi), melalui intervensi :
 - a) Adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana (asuransi pertanian, early warning system).
 - b) Diversifikasi sumber pangan dan pasar.
 - c) Pembangunan ketahanan pangan berbasis wilayah, seperti pengembangan *food estate* atau kawasan sentra pangan.
 - d) Koordinasi lintas sektor dan daerah untuk menjaga kesinambungan pasokan dan harga

Dari beberapa aspek yang dapat diintervensi tersebut akan dapat meningkatkan produksi pangan, ketersediaan energi pangan dan penurunan kehilangan pascapanen (*food lost*), terkendalnya harga pangan yang akan bermuara pada peningkatan kualitas konsumsi, penurunan prevalensi stunting dan penurunan angka kemiskinan.

Intervensi tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian terutama dalam mengendalikan harga pangan.

TUJUAN 2 :	Tanpa Kelaparan	Tanpa Kelaparan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.													
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%											
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%		5	8	10	12	15	15	20.144.279.962	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Target SDGs : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%		22,14	19,74	18,96	17,88	15,31	13,82				
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%		9,34	9,3	9,27	9,23	9,19	9,13				
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%		78	78	78,2	78,5	78,8	79				
TARGET SDGs : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk memb...													
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.												
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	poin	78	78	78,2	78,5	78,8	79	14.750.425.080	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	laporan	1	0	1	1	1	1		DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	laporan	2	2	2	2	2	2		DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	dokumen	1	0	1	1	1	1	8.373.887.843	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	2.207.231.837	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	laporan	2	2	2	2	2	2	4.646.656.006	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	laporan	1	0	1	1	1	1	600.000.000	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	dokumen	1	0	1	1	1	1	920.000.000	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	ton	20	20	39	42	45	48	3.844.959.658	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	ton	20	20	39	42	45	48	3.844.959.658	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	dokumen	2	2	2	2	2	2	2.531.577.579	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03.1.04.0001	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	dokumen	2	2	2	2	2	2	2.531.577.579	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	%	5	8	10	12	15	15	20.144.279.962	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	dokumen	1	0	1	1	1	1	610.000.000	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	dokumen	1	0	1	1	1	1	610.000.000	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	dokumen	0	0	1	1	1	1		DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	laporan	1	0	1	1	1	1	19.534.279.962	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	13.909.864.183	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	dokumen	1	0	1	1	1	1	5.000.000.000	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	laporan	1	1	1	1	1	1	624.415.779	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	%	75	76	77	78	79	80	1.826.676.037	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	Sertifikat	15	15	18	21	24	27	2.306.676.037	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	Sertifikat	15	15	18	21	24	27	1.187.599.208	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1.119.076.829	DAU	Prov. Gorontalo	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (%)	%	100	100	100	100	100	100	490.081.513.962	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	11.595.870.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	paket	6	6	6	6	6	6		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	3.045.870.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	paket	6	6	6	6	6	6	8.550.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	orang	45.585	45.585	45.585	45.585	45.585	45.585		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	orang	24.712	24.712	24.772	24.832	24.892	24.952		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	paket	50	50	50	50	50	50		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	dokumen	2	2	2	2	2	2		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1			DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	<i>orang</i>	10	10	10	10	10	10			DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1			DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1			DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	365.935.065.552		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	<i>orang</i>	45.585	45.585	45.585	45.585	45.585	45.585	3.712.130.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	<i>orang</i>	24.712	24.712	24.772	24.832	24.892	24.952	3.199.317.383		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	3.818.302.750		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	630.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	360.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	2.308.302.750		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	2.523.345.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	11.145.820.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	1.050.000.000				
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	800.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	3.800.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	711.020.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	868.825.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	<i>orang</i>	10	10	10	10	10	10	1.300.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	318.889.867.669		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	2.123.970.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	1.300.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	6.658.565.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	<i>paket</i>	50	50	50	50	50	50	735.600.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	3.849.996.772		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	<i>dokumen</i>	1	1	1	1	1	1	2.250.000.000		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	<i>unit</i>	1	1	1	1	1	1			DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	<i>unit</i>	1	1	1	1	1	1	29.605.619.346		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan

1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1	17.755.619.342	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1	11.850.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	paket	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	unit	4	4	4	4	4	4		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	unit	15	15	15	17	20	25		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	unit	6	6	6	6	6	6	79.094.962.296	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Unit)	unit	6	6	6	6	6	6	2.842.270.744	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	unit	4	4	4	4	4	4	1.989.338.544	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	unit	15	15	15	17	20	25	60.000.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1	10.534.964.060	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	paket	1	1	1	1	1	1	3.728.388.948	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1.599.996.772	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1.599.996.772	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
											DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100	127.960.207.489	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi pada sub kegiatan yang dipilih	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	orang	23	23	25	30	33	35	3.782.456.931	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	orang	23	23	25	30	33	35	2.187.455.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1.595.001.931	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	orang	5	0	5	6	9	12	1.379.082.432	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)	orang	5	0	5	6	9	12	1.379.082.432	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	orang	163	163	163	163	163	163	122.798.668.126	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan

1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	orang	163	163	163	163	163	163	122.798.668.126	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	orang	11	11	11	11	11	11	381.935.056	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan (Sarana)	orang	11	11	11	11	11	11	381.935.056	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100	1.930.611.544	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	236.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	236.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	129.393.744	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	129.393.744	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	146.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	146.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	dokumen	0	0	100	100	100	100	510.510.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	dokumen	0	0	100	100	100	100	510.510.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	dokumen	0	0	100	100	100	100	908.707.800	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	dokumen	0	0	100	100	100	100	908.707.800	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertilitic Rate / ASFR 15-19) kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	%	19	19	18,6	18,2	17,8	17,8	1.253.987.540	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1.253.987.540	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	laporan	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.02.1.01.0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	813.987.540	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	persentase	61,2	61,2	61,5	61,7	62	62	1.627.735.872	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1		DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	laporan	1	1	1	1	1	1	1.627.735.872	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan

2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	laporan	1	1	1	1	1	1	1.081.735.872	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	dokumen	1	1	1	1	1	1	546.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	persentase	29,7	29,7	34,6	39,5	42,4	42,4	325.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Laporan)	laporan	1	1	1	1	1	1	325.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
2.14.04.1.02.0010	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Laporan)	laporan	1	1	1	1	1	1	325.000.000	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Kesehatan
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produk													
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan												
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/kehutanan	Rp per Tenaga Kerj		115.193.312	122.938.108	132.080.603	142.840.637	155.438.052	170.092.687				
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Persen (%)	25	50	50	50	50	50	8.069.962.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	30	155	220	220	220	220	7.269.962.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	30	155	220	220	220	220	7.269.962.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0	5	5	5	5	400.000.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0	5	5	5	5	400.000.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	-	0	1	1	1	1	400.000.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	-	0	1	1	1	1	400.000.000	DAU	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.												
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perub													
2.4.2001	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan												
TARGET SDGs : Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berk													
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah												
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.081.618	1.086.900	1.089.547	1.092.201	1.094.863	1.094.863	7.474.220.600	DAU	Prov/Kab/kota	Dinas Pertanian
		-Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	68.949	69.615	69.953	69.291	70.629	70.629				
		-Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	21.224	21.437	21.544	21.651	21.760	21.760				
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	8	8	8	8	8	8	5.893.858.200	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
		-Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	3.000	2.900	2.900	2.950	3.000	3.000				
		-Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700				
		-Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	175	175	175	175	175	175				
		-Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	0	0	0	0	0	0				
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	160	160	175	175	175	175	1.090.960.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	1.277.093.700	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian

3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	8	8	8	8	8	8	876.652.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	545.774.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	444.972.250	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	149.118.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru)	VUB	1	2	2	1	1	1	1.421.536.400	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru)	VUB	1	2	2	1	1	1	1.421.536.400	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	22.182.548.210	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	1	0	1	1	1	2				
		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan	4	0	4	4	4	4				
		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan	1	0	1	1	1	1				
		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1				
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1	13.365.194.210	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	457.354.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan	4	4	4	4	4	4	400.000.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	7.400.000.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan	1	1	1	1	1	1	560.000.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	21.174.985.153	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1				
		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1				
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	3.373.753.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	15.228.732.153	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian

3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	1	1	1	1	1	2.572.500.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Laporan	1	1	1	1	1	1	895.096.931	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	895.096.931	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	1000	1000	1000	1000	1000	1000	27.298.013.273	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	4	4	4	4	4	4	953.888.000	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	1000	1000	1000	1000	1000	1000	27.059.541.273	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	1	1	1	1	1	1	10.530.635.500	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	1	1	1	1	1	1	10.530.635.500	DAU	Provinsi	Dinas Pertanian
				90,7	75,5	74,3	76,8	76,8					
				76,6	74,3	76,8	76,1	76,7					

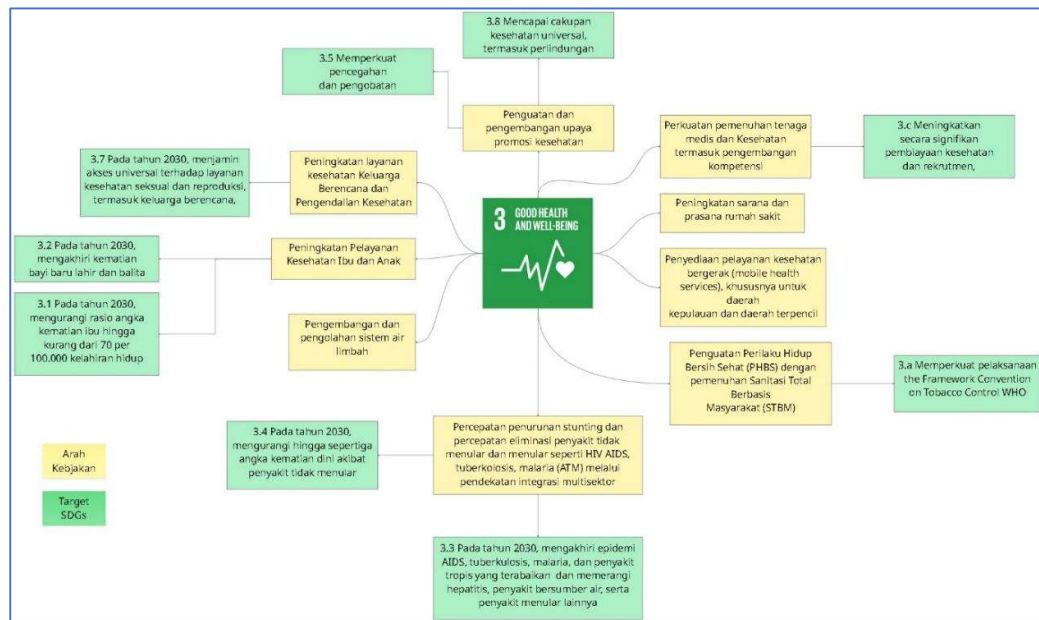


Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

A. Target Dan Keterkaitan

Gambar 3.3

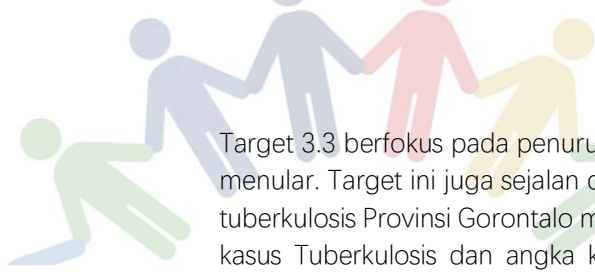
Keterkaitan tujuan 3 dengan RPJMD 2025 – 2029 Provinsi Gorontalo



Mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi segenap masyarakat dengan prinsip tidak ada satu pun yang tertinggal khususnya kehidupan sehat dan sejahtera merupakan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). Kehidupan sehat dan sejahtera yang merupakan tujuan 3 pada SDGs ini sangat relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Target 3.1 berfokus pada kondisi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target penurunan angka kematian ibu yang signifikan diharapkan terjadi dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu indikator sasaran yang mendukung tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dalam RPJMD. Jika kondisi ini dapat dicapai dalam 5 tahun ke depan berdasarkan penetapan target tahunan maka akan memberikan kontribusi pada peningkatan IPM Provinsi Gorontalo. Semakin tinggi IPM suatu wilayah, semakin rendah AKI-nya, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan IPM yang tinggi mencerminkan dimensi kesehatan yang lebih baik (termasuk angka harapan hidup dan ketersediaan tenaga kesehatan), pendidikan yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih layak, yang semuanya berkontribusi pada penurunan AKI.

Target 3.2 menitikberatkan pada penurunan angka kematian balita melalui penyediaan layanan kesehatan bagi bayi dan balita yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini selaras dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pada arah kebijakan daerah yang mendukung target ini yaitu peningkatan layanan KIA, pemenuhan tenaga medis serta peningkatan sarana prasarana RS dan layanan bergerak, di mana pada akhir periode RPJMD berada pada angka 11,9/1.000 KH.



Target 3.3 berfokus pada penurunan angka kesakitan yang disebabkan penyakit menular dan tidak menular. Target ini juga sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD di mana untuk kasus tuberkulosis Provinsi Gorontalo masih cukup besar gap antara Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis dan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis, di mana untuk masing – masing berada pada angka 91% dan 64% sehingga masih perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga bisa mencapai eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Kondisi ini masih mengindikasikan rendahnya penerapan PHBS.

Page | III - 8

Target 3.8 bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Sejalan dengan sasaran dalam RPJMD yang berfokus pada meningkatnya akses layanan kesehatan masyarakat melalui program jaminan kesehatan. Gorontalo termasuk provinsi dengan jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh. Hingga Juli 2024 jumlah peserta JKN di Gorontalo sebanyak 1.201.443 jiwa atau mencapai 97,1 persen dari total penduduk Gorontalo. UHC memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang adil dan berkualitas, terlindungi secara finansial saat seseorang membutuhkan layanan kesehatan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025–2030

Untuk mencapai sasaran SDG's pada Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dilakukan melalui strategi Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Kuratif Serta Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan penerapan Kebijakan Sebagai Berikut :

1. Penguatan dan pengembangan upaya promosi kesehatan

Pentingnya Promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, aktivitas fisik dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pada sisi pencegahan salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan yaitu gerakan pemberdayaan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang berfokus pada langkah-langkah pencegahan. Untuk mewujudkan hal tersebut sangat penting mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar, baik melalui program pemerintah maupun inisiatif komunitas.

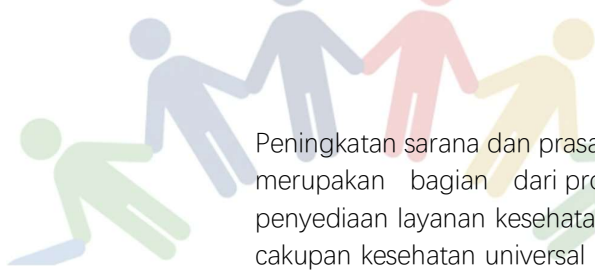
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara signifikan memberikan kontribusi pada pencapaian target SDGs 3, di mana kondisi yang diharapkan yaitu berkurangnya angka kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal dan balita. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas penduduk secara keseluruhan. Kesehatan ibu dan anak yang baik mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu negara dan berkontribusi pada produktivitas jangka panjang.

3. Percepatan penurunan stunting dan percepatan eliminasi penyakit tidak menular dan menular seperti HIV AIDS, tuberkulosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multisektor.

Pendekatan integrasi multisektor untuk percepatan penurunan stunting dan eliminasi penyakit menular/tidak menular (HIV AIDS, TB, Malaria/ATM) dilaksanakan secara konvergen di semua tingkatan baik pusat, daerah sampai ke tingkat desa. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan sektor kesehatan dan di luar sektor kesehatan dengan berfokus pada program dan kegiatan yang beririsan. Dengan menerapkan pendekatan terintegrasi ini, upaya penurunan stunting dan eliminasi penyakit menular/tidak menular dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan meminimalisir intervensi yang tumpang tindih dan berulang.

4. Peningkatan sarana dan prasana rumah sakit serta penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services).



Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit serta penyediaan pelayanan kesehatan bergerak merupakan bagian dari program transformasi kesehatan nasional dengan fokus pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Selain itu untuk mencapai cakupan kesehatan universal layanan kesehatan bergerak membawa fasilitas medis dan tenaga kesehatan langsung ke masyarakat di daerah terpencil, pedesaan, atau yang sulit dijangkau, sehingga menjembatani kesenjangan akses dan mewujudkan cakupan kesehatan universal bagi semua orang.

5. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan termasuk pengembangan kompetensi
Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan harus mendapatkan perhatian yang cukup di mana penyediaan dilakukan melalui perencanaan secara berjenjang dan bottom-up dari fasilitas kesehatan terkecil yang melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Selain itu pemerataan distribusi tenaga kesehatan di faskes juga sangat penting untuk meminimalisir penumpukan jenis nakes di faskes tertentu serta untuk memastikan jenis layanan tersebar secara merata. Untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan yang paripurna juga perlu didukung oleh SDM kesehatan yang berkualitas melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkala.
6. Pengembangan dan pengolahan sistem air limbah.
Dalam mencapai kondisi derajat masyarakat yang baik salah satu faktor yang cukup memberikan kontribusi yaitu sistem pengolahan air limbah di mana sumber air limbah sangat beragam, meliputi domestik (rumah tangga), industri, pertanian, komersial, laboratorium, pertambangan dan limbah medis jenis limbah yang berbeda. Pengolahan ini mencegah penyebaran penyakit akibat kontaminasi bakteri dan zat berbahaya, melindungi ekosistem air dan darat dari polusi, serta memungkinkan pemanfaatan kembali air untuk kebutuhan lain.
7. Penguatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dengan pemenuhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah strategi operasional yang efektif untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai PHBS di tengah masyarakat, memastikan perubahan perilaku yang holistik dan berkelanjutan. PHBS adalah tujuan akhir berupa sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi untuk menolong diri sendiri dan berperan aktif dalam penurunan angka penyakit menular dan tidak menular, peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
8. Peningkatan layanan kesehatan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Kesehatan dilakukan melalui optimalisasi teknologi, dan pendekatan yang lebih terintegrasi dan edukatif. Beberapa langkah konkretnya meliputi pengembangan sistem informasi untuk pemantauan, penyuluhan berbasis pasangan untuk meningkatkan keterlibatan suami, dan pengintegrasian layanan KB dengan program kesehatan lainnya seperti kesehatan ibu dan anak serta gizi.

[illegible]

3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).													
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi												
1.02.02.1.02.00.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	3,818,302,750	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	1	1	1	1	630,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	1	1	1	1	1	360,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	2,308,302,750	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	1	1	2,523,345,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	3,145,820,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1,050,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	1	800,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	2	3,800,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	1	1	1	1	711,020,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	1	1	1	1	868,825,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	10	10	10	10	10	1,300,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	318,889,867,669	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	2,123,970,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1,300,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.00.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	6,658,565,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi												
1.02.05.1.01.00.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	236,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.05.1.02.00.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	1	1	1	129,393,744	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
1.02.05.1.03.00.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	1	1	1	1	146,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk												
2.14.02.1.01.00.21	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1	1	1	1	1	440,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	

2.14.02.1.01.00.22	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen		1	1	1	1	1	813,987,540	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal												
2.14.03.1.01.00.01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan		1	1	1	1	1	1,081,735,872	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
2.14.03.1.01.00.07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen		1	1	1	1	1	546,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
2.14.04.1.02.00.10	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan		1	1	1	1	1	325,000,000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
TARGET SGDs : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.													
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.													
3.b.2* Total official development assistance (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.													
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.													
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan (Sarana)											
1.02.04.1.01.00.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan (Sarana)	Sarana		11	11	11	11	11	381,935,056.00	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
TARGET SGDs : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.													
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.													
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang)			23	25	30	33	35	2,187,455,000.00	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)			1	1	1	1	1	1,595,001,931.00	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan



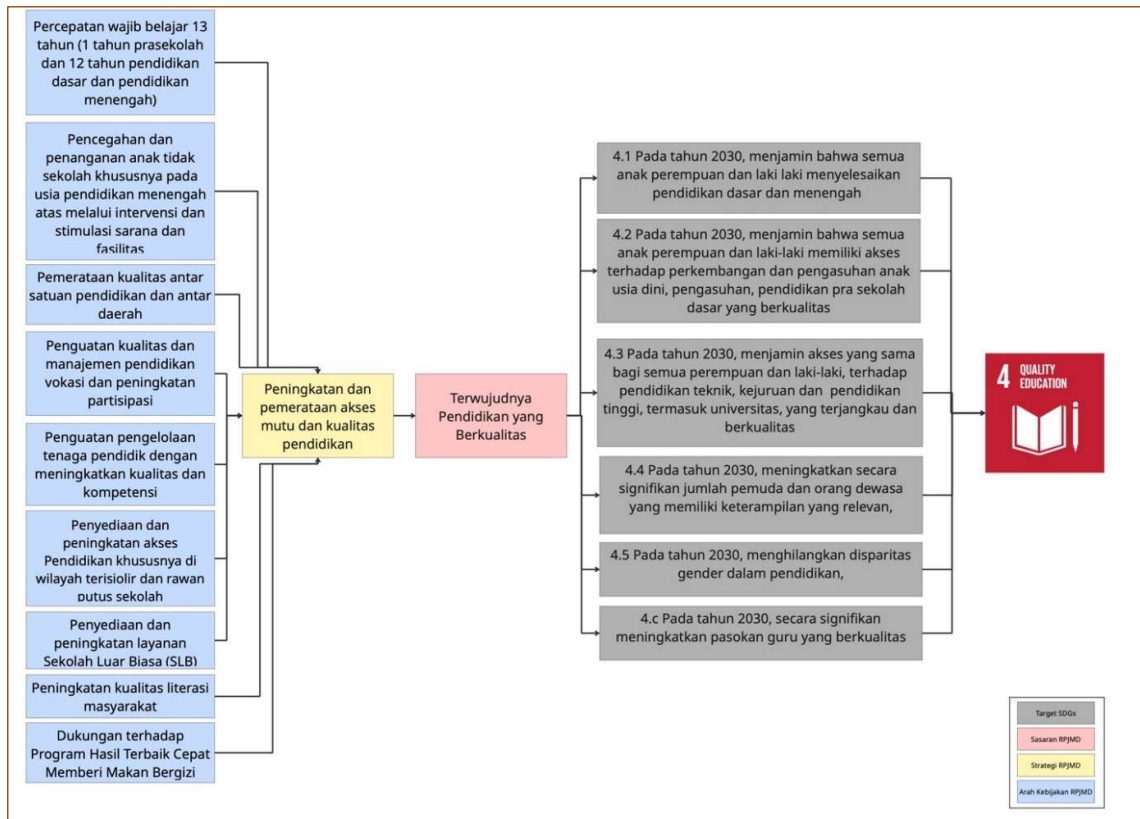
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Page | III - 10

A. Target Dan Keterkaitan

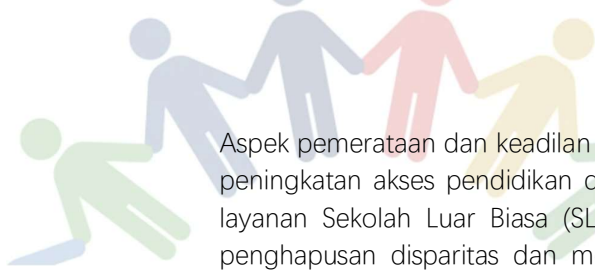
Gambar 3.4

Keterkaitan Tujuan 4 dengan RPJMD 2025 – 2029 Provinsi Gorontalo



Kerangka keterkaitan antara Target SDGs Tujuan 4 dengan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2025-2029 menunjukkan upaya yang konsisten untuk memastikan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Arah kebijakan seperti percepatan wajib belajar 13 tahun, pencegahan anak tidak sekolah, serta pemerataan kualitas antar satuan pendidikan menjadi fondasi utama dalam menjawab Target 4.1 dan 4.2 SDGs, yaitu memastikan seluruh anak baik perempuan maupun laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah serta memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pembangunan manusia yang tidak hanya mengejar angka partisipasi sekolah, tetapi juga menaruh perhatian pada keberlanjutan layanan pendidikan sejak usia dini hingga jenjang menengah.

Strategi peningkatan dan pemerataan akses mutu pendidikan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo menjadi jembatan antara arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Penguatan pendidikan vokasi, peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, serta penguatan manajemen pendidikan selaras dengan Target 4.3 dan 4.4 SDGs. Dalam konteks Gorontalo, strategi ini penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan pemuda dan kebutuhan keterampilan yang relevan dengan potensi daerah, sehingga pendidikan tidak berhenti pada aspek akademik, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat.



Aspek pemerataan dan keadilan pendidikan juga tercermin kuat melalui kebijakan penyediaan dan peningkatan akses pendidikan di wilayah terisolir, daerah rawan putus sekolah, serta penguatan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini sejalan dengan Target 4.5 SDGs yang menekankan penghapusan disparitas dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal. Pendidikan inklusif menjadi prinsip penting, di mana anak penyandang disabilitas, anak dari keluarga miskin, serta anak di wilayah terpencil dipastikan memperoleh layanan pendidikan yang layak, adaptif, dan bermartabat. Pendekatan ini menempatkan pendidikan sebagai hak dasar, bukan privilese.

Page | III - 11

Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan literasi masyarakat menjadi pengungkit utama keberhasilan seluruh target SDGs Tujuan 4. Penguatan kompetensi guru, peningkatan pasokan pendidik berkualitas, serta dukungan program pendukung seperti penyediaan makanan bergizi di sekolah mencerminkan keterkaitan dengan Target 4.c. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang pendidikan secara utuh—tidak hanya soal ruang kelas dan kurikulum, tetapi juga ekosistem belajar yang sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi fondasi pembangunan manusia Gorontalo yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025–2030

Untuk mencapai sasaran Goals 4 Pendidikan Berkualitas dilakukan melalui strategi Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah khususnya pada usia pendidikan menengah atas melalui intervensi dan stimulasi sarana dan fasilitas
3. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah
4. Penguatan kualitas dan manajemen pendidikan vokasi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah
5. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif

[illegible]

[illegible]

		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)								
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)								
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)								
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)								
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)								
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)								
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat (Unit)								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)								
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)								

		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)							
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)							
1.01.02.1.01.0001	Subkegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)							
1.01.02.1.01.02	SUB KEGIATAN: Penambahan Ruang Kelas Baru	INDIKATOR: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							
1.01.02.1.01.0003	Sub kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)							
1.01.02.1.01.04	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.05	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.06	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.07	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.08	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.09	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.0010	Subkegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)							
1.01.02.1.01.0011	Subkegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)							
1.01.02.1.01.0012	Subkegiatan : Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)							
1.01.02.1.01.0013	Subkegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)							
1.01.02.1.01.0014	Subkegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)							
1.01.02.1.01.18	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang/Sudut Baca	INDIKATOR: Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun							
1.01.02.1.01.0019	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)							
1.01.02.1.01.0020	Subkegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)							
1.01.02.1.01.21	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	INDIKATOR: Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.01.02.1.01.22	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	INDIKATOR: Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.01.02.1.01.23	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	INDIKATOR: Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.01.02.1.01.24	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	INDIKATOR: Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.01.02.1.01.25	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	INDIKATOR: Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							

1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)								
1.01.02.1.01.0051	Subkegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)								
1.01.02.1.01.0052	Subkegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)								
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)								
1.01.02.1.01.0054	Subkegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)								
1.01.02.1.01.55	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR: Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan								
1.01.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
1.01.02.1.02.01	SUB KEGIATAN: Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	INDIKATOR: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.02	SUB KEGIATAN: Penambahan Ruang Kelas Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah								
1.01.02.1.02.03	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	INDIKATOR: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.04	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Praktik Siswa	INDIKATOR: Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.05	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Laboratorium	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.06	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.07	SUB KEGIATAN: Pembangunan Perpustakaan Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.08	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	INDIKATOR: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.0009	SUB KEGIATAN: Pembangunan Asrama Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.0010	SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.11	SUB KEGIATAN: Pembangunan Fasilitas Parkir	INDIKATOR: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.12	SUB KEGIATAN: Pembangunan Kantin Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.13	SUB KEGIATAN: Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.14	SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang/Sudut Baca	INDIKATOR: Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun								
1.01.02.1.02.15	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi								
1.01.02.1.02.16	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	INDIKATOR: Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi								
1.01.02.1.02.17	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	INDIKATOR: Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi								
1.01.02.1.02.18	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang Laboratorium	INDIKATOR: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi								
1.01.02.1.02.19	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi								

1.01.02.1.02.20	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.21	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	INDIKATOR: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.22	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Asrama Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.23	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.24	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Fasilitas Parkir	INDIKATOR: Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.25	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Kantin Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.26	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.27	SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	INDIKATOR: Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi
1.01.02.1.02.28	SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
1.01.02.1.02.29	SUB KEGIATAN: Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
1.01.02.1.02.30	SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Sekolah	INDIKATOR: Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia
1.01.02.1.02.31	SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	INDIKATOR: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
1.01.02.1.02.32	SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia
1.01.02.1.02.33	SUB KEGIATAN: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	INDIKATOR: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
1.01.02.1.02.34	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1.01.02.1.02.35	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1.01.02.1.02.36	SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	INDIKATOR: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.37. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.38. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	INDIKATOR: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.39. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	INDIKATOR: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.40. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.41. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	INDIKATOR: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.42. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.43. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.44. Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	INDIKATOR: Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun								
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.45. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.46. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS								
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.47. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	INDIKATOR: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan								
	SUB KEGIATAN: 1.01.02.1.02.48. Pemeliharaan Mebel	INDIKATOR: Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan								



Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 5

Page | III - 12

Gambar 3.5

Keterkaitan Tujuan 2 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



Target 5.1. Target ini adalah bagian dari SDGs Tujuan 5, yaitu "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan". Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target ini adalah ketersediaan kerangka hukum yang mempromosikan dan menegakkan kesetaraan serta non-diskriminasi gender, seperti kesetaraan upah, hak kepemilikan, dan non-diskriminasi dalam perekrutan. Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dianggap penting tidak hanya sebagai hak asasi manusia, tetapi juga untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Target 5.2 bertujuan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Upaya untuk mencapai target ini meliputi penguatan peran lembaga seperti Komnas Perempuan untuk menyelidiki kasus dan memandu kebijakan, penguatan peran pemerintah dalam melindungi perempuan melalui berbagai program dan kampanye, serta komitmen internasional seperti yang tertuang dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan konvensi CEDAW.

Target 5.3 tujuannya adalah menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Pada indikator 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun. Adapun status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat. Indikator ini penting mengapa faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan dan aktivitas seksual. Perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi. Risiko Kematian Ibu dan Bayi pada ibu usia muda, stunting, putus sekolah karena menikah serta kehidupan ekonomi yang terbatas. Olehnya target SDGs terkait indikator ini, merupakan *concern* pemerintah baik nasional maupun daerah. Gorontalo menunjukkan penurunan signifikan di dua tahun terakhir, meskipun masih lebih tinggi dari Capaian nasional namun target untuk menuju nol perkawinan anak di tahun 2030 optimis dapat dimaksimalkan oleh Provinsi Gorontalo dengan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya untuk memenuhi target mendekati nol, yaitu diangka 1,34 di tahun 2030.



Partisipasi perempuan di legislatif dan perempuan di posisi managerial menjadi komponen dalam Indeks Ketimpangan Gender/IKG. Hal ini menjadi *concern* pemerintah Provinsi Gorontalo dalam RPJMD indeks Ketimpangan Gender adalah salah satu indikator utama pembangunan/IUP dengan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Target di 2030 diangka 0,22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam RPJMD menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci dalam sasaran Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah dengan dukungan program prioritas Pemerintah Daerah. Indikator TPAK adalah salah satu komponen pembentuk Indeks Ketimpangan Gender dan pada tahun 2030 ditargetkan dia angka 56,91.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

Memuat arah kebijakan dan strategi sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Dalam Perda No 3 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 Kesetaraan Gender menjadi salah satu sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Dengan strategi Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah. Strategi ini akan dicapai dengan arah kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan peran keluarga untuk mendukung penguatan moral generasi sejak dini.
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
3. Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan
4. kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
5. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi sebagai penopang ketahanan ekonomi skala lingkungan keluarga.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 5

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat peningkatan akses masyarakat terhadap Air Minum Aman dan Sanitasi Aman sebagai wujud nyata dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu "Tanpa Meninggalkan Siapa Pun" (Leave No One Behind). Target Spesifik dan Ambisius Hingga tahun 2029, target spesifik yang harus dicapai Adalah

- 1) Akses Air Minum Aman: Meningkatkan dari 25.00% menjadi 30.00%
- 2) Akses Sanitasi Aman: Meningkatkan secara signifikan dari 2.17% menjadi 10.00%.
- 3) Fokus pada Kelompok Rentan dan Daerah Tertinggal Pencapaian target ini harus bersifat inklusif dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses bagi kelompok yang paling membutuhkan:
 - a) Masyarakat Miskin dan Rentan: Prioritas utama akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan kelompok rentan lainnya, memastikan mereka menjadi penerima manfaat pertama dari program-program pembangunan infrastruktur air dan sanitasi.
 - b) Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T): Alokasi sumber daya dan intervensi akan difokuskan secara proporsional untuk mengatasi kesenjangan layanan di daerah tertinggal, memastikan bahwa kualitas hidup di wilayah-wilayah ini setara dengan daerah lainnya.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2025-2029)

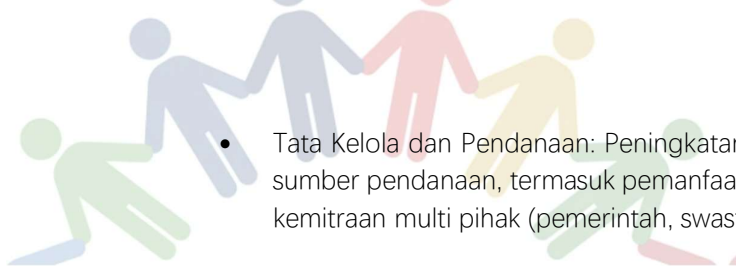
Arah kebijakan dan strategi Sasaran terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air. Strategi yang dilakukan adalah penguatan kemandirian pangan dan ketahanan energi dan air.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air melalui perluasan jaringan primer, sekunder dan tersier.
2. Peningkatan diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan derajat kesehatan.
3. Pengembangan natural based solution seperti hutan bakau, pengembangan dan perluasan ruang terbuka hijau, biopori alami untuk pengendalian banjir.
4. Pemenuhan air baku dalam rangka ketahanan air seperti pembangunan kolam- kolam retensi dan bendung.
5. Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi.
6. Meningkatkan ketersediaan energi baru terbarukan seperti PLTMH, PLTS, Biogas dgn memperhatikan potensi dan daya dukung lingkungan
7. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energy-Water (FEW) Nexus
8. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran kualitas air dan menjaga kelestarian alam beserta ekosistemnya.

Program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

- Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih (SPAM) dan sanitasi (IPAL komunal, *septic tank* komunal/individual).
- Pengelolaan Sumber Daya Air: Perlindungan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mata air.
- Pemberdayaan Masyarakat: Penguatan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan akselerasi STBM/ODF.



- Tata Kelola dan Pendanaan: Peningkatan kapasitas tata kelola air dan sanitasi, serta mobilisasi sumber pendanaan, termasuk pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) melalui kemitraan multi pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

Kerangka Pendanaan dan Kemitraan (Multi-Stakeholder Partnership/MSP)

Kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan (APBD, APBN, Swasta, Donor) untuk program-program yang mendukung Tujuan 6. Pendekatan Multi-Stakeholder Partnership (MSP) ditekankan untuk menciptakan sinergi dalam mencapai target.

[illegible]



Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua

Provinsi Gorontalo masih berada pada tahapan transisi menuju sistem energi yang mandiri dan berkelanjutan. Capaian rasio elektrifikasi yang hampir sempurna menunjukkan kemajuan signifikan, namun kualitas, keandalan, dan pemerataan pasokan masih menjadi tantangan utama. Pada saat yang sama, bauran energi terbarukan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten, menandakan perlunya langkah strategis yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah tahun 2025–2030 difokuskan pada pembangunan sistem energi yang adaptif, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

- a. Arah Kebijakan: Memperluas Akses dan Keandalan Energi yang Merata hingga Wilayah Terpencil, dengan Strategi:
 - Mengutamakan penyediaan energi di daerah terpencil, pedesaan, dan pesisir dengan pendekatan *off-grid* berbasis potensi lokal seperti PLTS komunal, PLTMH, atau biogas rumah tangga.
 - Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan distribusi listrik untuk menjamin kontinuitas pasokan di seluruh kabupaten/kota.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah, CSR, dan skema *blended finance* untuk pembangunan infrastruktur energi perdesaan.
 - Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan swasta lokal dalam memperluas jangkauan layanan listrik dengan biaya efisien dan berkelanjutan.
- b. Arah Kebijakan: Mendorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Skala Lokal, dengan Strategi:
 - Mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan berskala kecil dan menengah yang sesuai dengan karakteristik wilayah, seperti tenaga surya, air, angin, dan biomassa dari limbah pertanian.
 - Menyusun peta potensi EBT di setiap kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan keputusan investasi energi hijau.
 - Menyediakan insentif daerah dan pendampingan teknis bagi inisiatif masyarakat atau koperasi energi dalam pengelolaan EBT.
 - Mengarahkan pembangunan energi terbarukan agar selaras dengan agenda ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan, bukan hanya orientasi komersial.
- c. Arah Kebijakan: Memperkuat Kesadaran, Kapasitas, dan Kelembagaan Energi Daerah, dengan Strategi:
 - Meningkatkan literasi energi di tingkat rumah tangga, sekolah, dan pelaku usaha kecil menengah melalui program edukasi dan kampanye hemat energi.
 - Membangun kapasitas SDM teknis di pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal agar mampu mengelola sistem energi secara mandiri.
 - Mengembangkan unit kerja lintas sektor di tingkat provinsi untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan energi yang terintegrasi.
 - Mengadaptasi tata kelola energi yang sederhana namun transparan, dengan basis data energi daerah yang terbuka untuk publik.
- d. Arah Kebijakan: Memperkuat Ketahanan Energi Daerah Melalui Diversifikasi dan Efisiensi, dengan Strategi:
 - Mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor dengan memperluas pemanfaatan energi domestik dan sumber daya lokal.



- Mendorong diversifikasi sumber energi rumah tangga agar tidak hanya bergantung pada LPG, dengan memperkenalkan teknologi biogas dan kompor hemat energi.
 - Melaksanakan audit energi di fasilitas publik dan mendorong penerapan prinsip efisiensi di gedung pemerintahan dan layanan sosial.
 - Mengembangkan sistem penyimpanan energi sederhana dan terjangkau untuk mendukung kontinuitas pasokan di wilayah rawan gangguan listrik.
- e. Arah Kebijakan: Membangun Sinergitas Lintas Sektor Menuju Transisi Energi Berkelanjutan, dengan Strategi:
- Menyelaraskan kebijakan energi dengan sektor-sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan agar tercipta nilai tambah ekonomi berbasis energi bersih.
 - Mendorong integrasi energi dengan pengembangan kawasan ekonomi pedesaan dan desa wisata hijau (*eco-village*).
 - Mengembangkan kemitraan riset dan inovasi lokal bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam teknologi energi terbarukan skala mikro.
 - Menetapkan energi bersih sebagai salah satu instrumen pendukung pencapaian RPJMD dan SDGs 2030, khususnya dalam konteks ketahanan ekonomi dan lingkungan.

[illegible]

7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga		Jumlah										
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga		%										
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
3.29.06.1.02	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)											
3.29.06.1.02.0001	Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)		2	2	2	2	2	2	350.000.000,00	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
3.29.06.1.05	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)											
3.29.06.1.05.0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri (Dokumen)		0	2	2	2	2	2	300.000.000,00	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)											
3.29.06.1.06.0002	Sub Kegiatan : Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)		60	288	288	288	288	288	4.321.292.000,00	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
						289.292.000,00		964.800.000,00		993.600.000,00		1.022.400.000,00	
						4.321.292.000,00							



Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Layak untuk Semua

A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 8

Dalam rangka mendorong pencapaian Goals 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat ekonomi ditengah upaya pemulihan kondisi perekonomian daerah. Dalam TPB/SDGs Goals 8 terdapat beberapa target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Pencapaian target-target indikator sasaran pada TPB/SDG Goals 8 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga didorong oleh Lembaga Nonpemerintah baik dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi mitra pembangunan dapat berkontribusi aktif dalam pencapaian target-target tersebut sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing institusi. Sehingga terdapat beberapa indikator dan target yang ditetapkan berdasarkan baseline data tahun 2021, yang harapannya selain dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun instansi vertikal sesuai arah kebijakan pembangunan masing-masing, juga diharapkan mendapat dukungan dari lembaga non Pemerintah

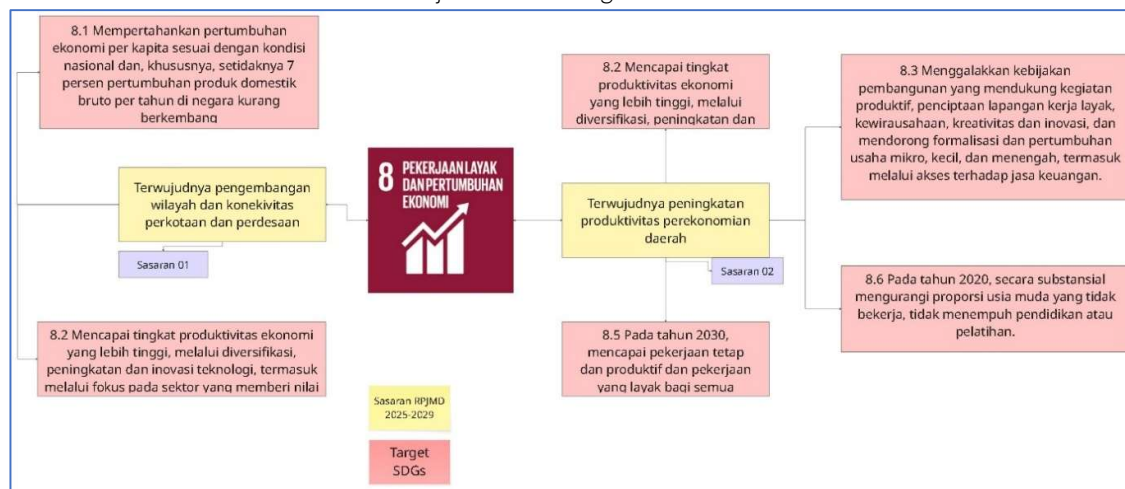
(Matriks 1)

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

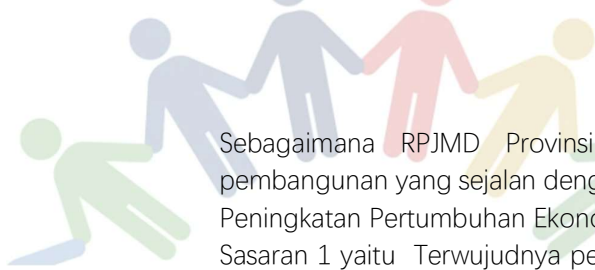
Pencapaian Goal 8 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dapat diwujudkan dengan berbagai sasaran strategi kebijakan pembangunan daerah khususnya disektor perekonomian. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kebijakan pembangunan mendorong peningkatan sektor-sektor perekonomian yang merata dan menyeluruh di berbagai sektor ekonomi serta memastikan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan pertumbuhan sosial ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Gambar 3.8

Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD 2025-2030



Sumber Data : RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 (diolah)



Sebagaimana RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, terdapat beberapa sasaran pembangunan yang sejalan dengan pencapaian target-target SDGs khususnya pada Tujuan 8 yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yaitu di antaranya :

Sasaran 1 yaitu Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan, sejalan dengan upaya pencapaian target

- Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Negara Berkembang,
- Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

Page | III - 19

Pencapaian sasaran pembangunan 1 diukur berdasarkan target kinerja pembangunan berdasarkan indikator peningkatan laju pertumbuhan PDRB Per kapita yang ditargetkan sebesar 3,362 persen tahun 2030, Pertumbuhan Ekonomi tumbuh sebesar 5,92 persen ditahun 2030, serta PDRB per kapita mencapai 55,58 juta ditahun 2030.

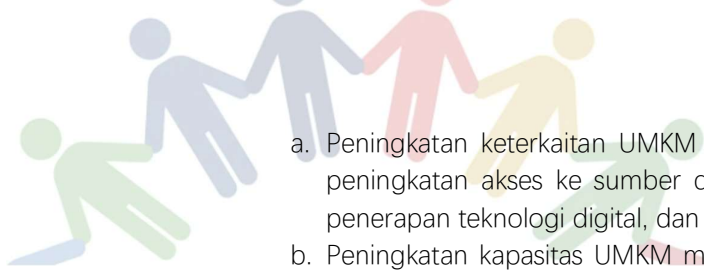
Sasaran 2 yaitu Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah, selaras dalam mendukung pencapaian target target SDG, sebagai berikut :

- Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas,
- Target 8.6 : Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- Target 8.7 : Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
- Target 8.8 : Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
- Target 8.9 : Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB

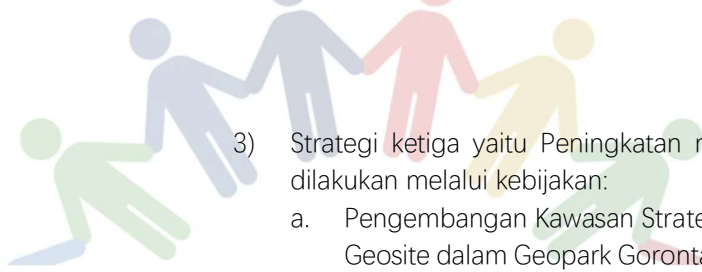
Pencapaian sasaran pembangunan 2 diukur berdasarkan target kinerja pembangunan berdasarkan indikator peningkatan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun hingga mencapai 2,77 – 3,52 persen tahun 2030. laju pertumbuhan PDRB Per kapita yang ditargetkan sebesar 3,362 persen tahun 2030, Pertumbuhan Ekonomi tumbuh sebesar 5,92 persen ditahun 2030, serta PDRB perkapita mencapai 55,58 juta ditahun 2030.

Pencapaian sasaran pembangunan yang mendukung dan selaras dengan pencapaian target SDG akan dicapai melalui berbagai strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun kolaborasi antara berbagai pihak / multi stakeholder pembangunan. Dalam konteks RPJMD 2025-2029, beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan pencapaian target Goals 8 adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi pertama adalah Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja, yang akan dilakukan melalui kebijakan :



- a. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi digital, dan kemitraan usaha.
 - b. Peningkatan kapasitas UMKM melalui pemetaan dan implementasi penanganan UMKM secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kebutuhan pengembangannya sehingga dapat dilakukan intervensi yang efektif dan efisien tepat sasaran.
 - c. Intervensi dini UMKM dan tenaga kerja melalui pengembangan sekolah vokasi baik di tingkatan sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan keunggulan lokal wilayah.
 - d. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
 - e. Pengembangan Koperasi berbasis produksi dan kewirausahaan di tingkatan masyarakat baik kelompok rentan dan kelompok potensial tertentu.
 - f. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
 - g. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
 - h. Fasilitasi pengembangan industri pengolahan melalui perizinan, penyediaan SDM, regulasi dan fasilitas pendukung lainnya.
- 2) Strategi kedua yaitu Peningkatan Produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan :
- a. Penyediaan dan pengelolaan terpadu sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan yang modern dan berkelanjutan
 - b. Peningkatan produksi dan populasi ternak seperti sapi, kambing, unggas
 - c. Peningkatan luasan lahan pertanian (cetak sawah baru) di kawasan potensial
 - d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
 - e. Penguatan dan perlindungan sosial di bidang pertanian khususnya untuk pengendalian ijon serta kelembagaan petani dan nelayan
 - f. Optimalisasi program intervensi manajemen dan pengawasan yang lebih konsisten baik terkait dengan stabilitasi harga, penggunaan peralatan ukur dan pengendalian sarana prasarana pertanian
 - g. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - h. Peningkatan Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang laut dan kawasan konservasi
 - i. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang modern dan berkelanjutan seperti pelabuhan perikanan, balai benih perikanan
 - j. Ekstensifikasi dan Intensifikasi usaha dan industri Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
 - k. Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi kewenangan provinsi untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan
 - l. Peningkatan kelembagaan petani, peternak dan kelompok nelayan dan sistem pengawasan mutu serta perbaikan pola distribusi.
 - m. Peningkatan kualitas produksi pertanian melalui riset dan pengembangan khususnya terkait benih yang bersesuaian dengan iklim lokal



- 3) Strategi ketiga yaitu Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dilakukan melalui kebijakan:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pariwisata seperti Botumoito, Minanga, Geosite dalam Geopark Gorontalo dan kawasan pariwisata prioritas provinsi seperti Olele, Lombongo dan hiu paus Botubarani.
 - b. Peningkatan nilai tambah melalui penerapan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
 - c. Peningkatan kapasitas dan jejaring pengelolaan wisata yang berbasis konsep pemberdayaan masyarakat lokal, baik dari aspek kerja sama prasarana dan sarana pendukung, manajemen dan jejaring kerja sama kelembagaan antar wilayah dan antar daerah
 - d. Pembangunan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis riset dan inovasi untuk pengembangan lapangan kerja yang didukung oleh pendidikan vokasi
 - e. Peningkatan kualitas dan promosi pariwisata, baik melalui pemanfaatan teknologi maupun kolaborasi dan intensitas event kreatif untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal di Gorontalo
- 4) Strategi keempat yaitu Peningkatan perekonomian daerah melalui pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam secara berkelanjutan yang akan dilakukan melalui kebijakan :
 - a. Pemetaan dan identifikasi potensi pertambangan energi dan sumber daya mineral setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo dalam bentuk kajian penelitian dan roadmap pengembangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.
 - c. Perumusan dan arahan kebijakan pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan melalui pembangunan kawasan pengelolaan hilirisasi dan industri pengolahan sehingga dapat berafiliasi untuk mendorong kawasan industri dan hilirisasi produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.
 - d. Pengelolaan pertambangan dan sumber daya alam yang diarahkan untuk mempercepat terbukanya aksesibilitas dan moda transportasi wilayah serta mendorong terbukanya kawasan pusat pertumbuhan baru.

TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
/ Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030				
-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGET SDGs : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Negara Berkembang													
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.													
8.1.1.(a) PDB per kapita.													
TARGET SDGs : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.													
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.													
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.081.618	1.086.900	1.089.547	1.092.201	1.094.863	1.094.863	91.349.450.917			Dinas Pertanian
		Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	68.949	69.615	69.953	69.291	70.629	70.629				
		Produksi Hortikultura	Ton	21.224	21.437	21.544	21.651	21.760	21.760				
3.27.02.1.02	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman									5.061.785.950			
3.27.02.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	Sertifikat	198	160	175	175	175	175	942.752.000			
3.27.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	Batang	0	0	2.900	2.950	3.000	3.000	1.277.093.700			
3.27.02.1.02.0012	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	Batang	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	876.652.000			
3.27.02.1.02.0018	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	545.774.000			
3.27.02.1.02.0019	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	444.972.250			
3.27.02.1.02.0020	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan) 1	Jumlah Benih	1	1	0	0	0	0	149.118.000			
3.27.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi									1.421.536.400			
3.27.02.1.03.0002	Sub Kegiatan : Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	Jumlah	1	2	2	1	1	1	1.421.536.400			
3.27.02.1.01	Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian									22.182.548.210			
3.27.02.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	13.365.194.210			
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	457.354.000			
3.27.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	Jumlah	4	0	4	4	4	4	400.000.000			
3.27.02.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	Jumlah	1	0	0	1	1	1	7.400.000.000			
3.27.02.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	Jumlah	1	0	0	1	1	1	560.000.000			
3.27.02.1.02	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman									21.174.985.153			
3.27.02.1.02.0018	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	15.228.732.153			
3.27.02.1.02.0020	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	3.373.753.000			
3.27.02.1.05	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi									895.096.931			
3.27.02.1.05.0005	Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	Jumlah	1	0	1	1	1	1	895.096.931			
3.27.02.1.07	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain									27.298.013.273			

3.27.02.1.07.0004	Sub Kegiatan : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	400	540	1.000	1.000	1.000	1.000	27.059.541.273		
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Nilai	5.204	5.352	5.428	5.504	5.582	5.582	13.315.485.000		
3.27.02.1.05	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi									13.315.485.000		
	Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	Laporan	2	2	2	2	2	2	13.315.485.000		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	Ha	0	4.757	4.214	13.386	2.296	0	1.472.974.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian									1.472.974.000		
3.27.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Jumlah	1	0	1	1	1	1	300.000.000		
3.27.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	Jumlah	1	0	1	1	1	1	72.974.000		
3.27.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Jumlah	1	0	1	1	1	1	200.000.000		
3.27.03.1.01.0015	Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	1	1	300.000.000		
3.27.03.1.01.0016	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	Jumlah	1	0	1	1	1	1	300.000.000		
3.27.03.1.01.0018	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	Jumlah	1	0	1	1	1	1	300.000.000		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	Nilai	1	1	1	1	1	1	2.559.499.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.01	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									857.064.000		
3.27.04.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	857.064.000		
3.27.04.1.03	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan									800.000.000		
3.27.04.1.03.0006	Sub Kegiatan : Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	Jumlah	0	0	25	30	35	35	400.000.000		
3.27.04.1.03.0007	Sub Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	Jumlah	0	0	140	140	140	140	400.000.000		
3.27.04.1.01	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									400.000.000		
3.27.04.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	Jumlah	6	6	6	6	6	6	200.000.000		
3.27.04.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Jumlah	0	0	3	3	3	3	200.000.000		
3.27.04.1.03	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan									502.435.000		
3.27.04.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	Jumlah	2	2	2	2	2	2	502.435.000		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	%	98	92	94	96	98	98	5.301.228.000		Dinas Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	%	65	71	73	76	79	79			
3.27.05.1.01	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi									5.301.228.000		
3.27.05.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Ha	17.924	14.841,07	13.950,61	13.392,58	13.124,53	13.124,53	3.304.794.000		
3.27.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Ha	3.837	1.853	1.352	1.028	812	812	1.996.434.000		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Naiknaik Jumlah SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	%	0	3	0,26	0,26	0,26	0,26	3.889.200.000		Dinas Pertanian
3.27.07.1.01	Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian									507.354.000		
3.27.07.1.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Jumlah	25	25	150	150	150	150	507.354.000		
3.27.07.1.02	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian									1.218.236.000		

3.27.07.1.02.0001	Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Jumlah	1	1	1	1	1	1	688.236.000		
3.27.07.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	Jumlah	9.468	0	2.000	2.000	2.000	2.000	530.000.000		
3.27.07.1.03	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan									688.236.000		
3.27.07.1.03.0006	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Jumlah	6	1	0	0	0	0	688.236.000		
3.27.07.1.02	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian									1.475.374.000		
3.27.07.1.02.0001	Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Jumlah	2	4	4	4	4	4	1.475.374.000		
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	Ha	76.580	136.746	148.624	159.105	159.105	159.105	585.147.250		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Garam (Ton)	Ton	290	326	400	521	700	750			
3.25.02.1.03	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan, dan Peningkatan Kapasitas serta memperoleh Prasarana Usaha Pergaraman (Orang)	Orang	75	75	95	105	115	125	585.147.250		
3.25.02.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	10	0	30	40	50	60	215.506.250		
3.25.02.1.03.0002	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	Kelompok	2	6	6	6	6	6	107.753.125		
3.25.02.1.03.0004	Sub Kegiatan : Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kelompok	2	6	6	6	6	6	107.753.125		
3.25.02.1.03.0007	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	154.134.750		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	131.784	135.300	139.359	144.306	150.000	156.000	27.512.214.253		
3.25.03.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil									25.834.057.003		
3.25.03.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	Unit	1	0	2	2	2	2	215.506.250		
3.25.03.1.01.0010	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	Unit	5	5	5	5	5	5	25.618.550.753		
3.25.03.1.03	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									158.899.750		
3.25.03.1.03.0004	Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	%		25	27	28	29	30	158.899.750		
3.25.03.1.06	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									1.519.257.500		
3.25.03.1.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	643.765.625		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	243.676.250		Dinas Kelautan dan Perikanan (PPI Gentuma)
3.25.03.1.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	1	243.676.250		Dinas Kelautan dan Perikanan (PPI Tenda)
3.25.03.1.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	Unit	3	3	3	3	3	3	388.139.375		Dinas Kelautan dan Perikanan (PPI Tilamuta)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi benih ikan dan benur udang (Ekor)	Ekor	36.100.000	40.000.000	42.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	5.776.661.129		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.06	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat									776.278.750		
3.25.04.1.06.0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	10	5	5	5	5	5	388.139.375		
3.25.04.1.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	10	5	5	5	5	5	388.139.375		
3.25.04.1.05	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									3.174.135.000		
3.25.04.1.05.0004	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	Unit	5	5	5	5	5	5	3.174.135.000		
3.25.04.1.05	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat									1.826.247.379		
3.25.04.1.06.0003 -	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	2	2	2	2	2	2	1.179.728.629		
3.25.04.1.05.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Unit	2	2	2	2	2	2	646.518.750		
3.25.04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	%	100	100	100	100	100	100	1.937.224.225		Dinas Kelautan dan Perikanan

3.25.05.1.01	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										1.937.224.225			
3.25.05.1.01.0016	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	miah Pelaku Usa	15	15	15	15	15	15	15	1.459.557.072			
3.25.05.1.01.0017	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	miah POKMASW	35	35	35	35	35	35	35	477.667.153			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	(Kg/KAP/TH)	67	38,35	39,13	39,9	40,65	40,7	8.566.523.384			Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.06.1.02	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Kegiatan)	Jumlah	5	5	5	5	5	5	5	841.047.256			
3.25.06.1.02.0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	218.006.250			
3.25.06.1.02.0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau berdasarkan skala usaha dan risiko (Kegiatan)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	625.541.006			
3.25.06.1.03	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										7.725.476.128			
3.25.06.1.03.0002	Sub Kegiatan : Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas (Unit Usaha)	Unit Usaha	69	45	45	45	45	45	45	6.411.520.878			
3.25.06.1.03.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Ton)	Ton	2	2	6	6	6	6	6	1.313.955.250			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	%	0	15	15	15	15	15	15	7.331.819.478			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										2.259.624.100			
3.26.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Lokasi)	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2.259.624.100			
3.25.06.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi										4.677.523.850			
3.26.02.1.03.0004	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2.745.178.950			
3.26.02.1.03.0010	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	Orang	175	180	180	180	180	180	180	1.932.344.900			
3.26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Datar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										394.671.528			
3.26.02.1.04.0010	Sub Kegiatan : Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi (Laporan)	Jumlah Laporan	2	2	2	2	2	2	2	394.671.528			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	%	0	20	20	20	20	20	20	5.282.251.099			Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi										5.282.251.099			
3.26.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	Dokumen	2	4	5	5	6	6	6	1.608.438.750			
3.26.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	Kegiatan	3	4	4	5	6	6	6	3.673.812.349			
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	%	0	15	15	15	15	15	15	2.727.957.601			Dinas Pariwisata
3.26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif										2.281.530.901			
3.26.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	1.835.104.201			
3.26.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	446.426.700			
3.26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif										446.426.700			
3.26.04.1.02.0013	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	Orang	0	15	15	15	15	15	20	446.426.700			

3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariw isata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	%	0	10	10	10	10	10	935.207.467		Dinas Pariwisata
3.26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariw isata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan									935.207.467		
3.26.05.1.01.0017	Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	Orang	175	100	100	100	100	100	935.207.467		
2.17.03	PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	%	16	20	24	28	32	34	1.475.599.770		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03.1.01	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									1.475.599.770		
2.17.03.1.01.0003	Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	Unit Usaha	20	25	30	35	40	45	1.475.599.770		
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	%	16	20	24	28	32	34	2.458.484.673		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05.1.01	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									2.458.484.673		
2.17.05.1.01.0001	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Orang	475	100	120	140	160	180	2.458.484.673		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	%	18	20	21	22	23	24	2.707.460.400		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06.1.01	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									2.707.460.400		
2.17.06.1.01.0002	Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	Unit	20	25	30	35	40	45	2.707.460.400		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	%	0	1,52	1,68	1,83	2	2,1	25.419.922.000		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07.1.01	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									25.419.922.000		
2.17.07.1.01.0001	Sub Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	Unit Usaha	525	500	550	600	650	700	18.546.744.000		
2.17.07.1.01.0002	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	Unit Usaha	525	300	330	360	390	410	6.873.178.000		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM Naik Kelas (%)	%	0	100	100	100	100	100	8.414.207.900		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08.1.01	Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									8.414.207.900		
2.17.08.1.01.0001	Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Unit Usaha	25	25	30	40	50	60	8.414.207.900		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	%	0	95	95	95	95	95	902.805.050		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02.1.04	Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)									902.805.050		
3.30.02.1.04.0001	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	Dokumen	47	20	25	30	25	40	902.805.050		

3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	%	0	95	95	95	95	95	10.896.816.750		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.1.02	Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									10.499.417.500		
3.30.04.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	4	4	4	4	4	4	218.934.350		
3.30.04.1.02.0002	Sub Kegiatan : Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Laporan	4	4	4	4	4	4	10.280.483.150		
3.30.04.1.03 -	Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya									397.399.250		
3.30.04.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	Laporan	4	4	4	4	4	4	397.399.250		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	%	0	95	95	95	95	95	218.934.350		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04.1.02	Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									218.934.350		
3.30.04.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	Laporan	4	4	4	4	4	4	218.934.350		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang di Provinsi (SBM/Milyar Rupiah)	Milyar Rp	847	1.035	1.159	1.310	1.493	1.573	1.323.970.300		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									1.323.970.300		
3.30.05.1.01.0003	Sub Kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	8	5	6	7	8	9	1.323.970.300		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	%	0	95	95	95	95	95	4.922.491.620		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota									4.922.491.620		
3.30.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Produk/ person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	4	5	6	7	8	9	2.461.245.810		
		Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	Laporan	145	215	226	237	248	259			
		Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	Produk	0	3	3	3	3	3			
3.30.06.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	Sertifikat	145	215	226	237	248	259	1.508.776.600		
3.30.06.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	Produk	0	3	3	3	3	3	547.162.950		
3.30.06.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/ person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	4	5	6	7	8	9	405.306.260		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri (%)	%	16	16	16	16	16	16	18.361.419.500		Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02.1.01	Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi									18.361.419.500		
3.31.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Dokumen	12	4	4	4	4	4	9.594.259.000		
3.31.02.1.01.0005	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	12	4	4	4	4	4	7.361.120.000		
3.31.02.1.01.0006	Sub Kegiatan : Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	Dokumen	12	4	4	4	4	4	1.406.040.500		

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	%	0	0	50	55	60	65	510.000.000			Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03.1.01	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi									510.000.000			
3.31.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIInas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)	Dokumen	0	0	4	4	5	5	510.000.000			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	%	0	2	2	2	2	2	850.380.000			Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)									850.380.000			
3.31.04.1.01.0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) (Dokumen)	Dokumen	0	0	4	4	4	4	850.380.000			
TARGET SDGs : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.													
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.													
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Layanan Keuangan													
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	%	0	1,52	1,68	1,83	2	2,1	25.419.922.000			Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07.1.01	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									25.419.922.000			
2.17.07.1.01.0001	Sub Kegiatan : Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Pencapaian Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Pencapaian Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	Unit Usaha	525	500	550	600	650	700	18.546.744.000			
2.17.07.1.01.0002	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	Unit Usaha	525	300	330	360	390	410	6.873.178.000			
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM Naik Kelas (%)	%	0,28	100	100	100	100	100	8.414.207.900			Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08.1.01	Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									8.414.207.900			
2.17.08.1.01.0001	Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Unit Usaha	25	25	30	40	50	60	8.414.207.900			
TARGET SDGs : Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the													
8.4.1 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.													
8.4.1.(a) Rencana dan implementasi strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi Produksi Berkelanjutan													
8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).													
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk													
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.													
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.													
8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.													

02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	16,67	0	33,33	66,66	100	100	1.100.000.000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2.17.07.1.01	Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									1.100.000.000		
2.17.07.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	0	2	4	6	6	1.100.000.000		
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	36,77	50	50	50	50	50	7.892.212.000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2.07.03.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									7.092.212.000		
2.07.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun	Orang	80	155	220	220	220	220	7.092.212.000		
2.07.03.1.03	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah									400.000.000		
2.07.03.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0	5	5	5	5	400.000.000		
2.07.03.1.04	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi									400.000.000		
2.07.03.1.04.0001	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Perusahaan	0	0	1	1	1	1	400.000.000		
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	3.203.558.000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2.07.04.1.01	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota									1.164.000.000		
2.07.04.1.01.0005	Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0	32	32	32	32	600.000.000		
2.07.04.1.01.0006	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Orang	0	300	300	300	300	300	564.000.000		
2.07.04.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									2.039.558.000		
2.07.04.1.03.0002	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KariHub)	Orang	12.903	12.903	12.903	12.903	12.903	12.903	903.842.000		
2.07.04.1.03.0003	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	0	100	100	100	100	1.135.716.000		
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20.969	21.369	21.569	21.769	21.969	22.169	6.246.533.104		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2.07.05.1.03	Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)									6.246.533.104		
2.07.05.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	1	1	1.420.000.000		
2.07.05.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	2.248	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	4.826.533.104		
02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	20.969	21.369	21.569	21.769	21.969	22.169	2.180.000.000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2.07.06.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan									2.180.000.000		
2.07.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	4.405	4.845	5.065	5.285	5.505	5.725	1.780.000.000		
2.07.05.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	0	0	35	40	45	50	400.000.000		
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	0	19	38	61	79	100	700.000.000		Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
3.32.04.1.01	Kegiatan : Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan									700.000.000		
3.32.04.1.01.0002	Sub Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	atuan Permukima	0	1	1	1	1	1	700.000.000		
TARGET SDGs : Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.												
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).												
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	%	73,44	73,98	74,63	75,27	75,91	76,55	522.693.079.155		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									338.799.010.359		
1.01.02.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	0	0	0	1	0	0	1.000.000.000		

1.01.02.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	Ruang	0	0	1	1	1	1	659.178.148			
1.01.02.1.01.0013	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	0	0	0	1	0	0	742.000.000			
1.01.02.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	25	8	9	4	3	2	9.317.078.000			
1.01.02.1.01.0019	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	Unit	7	0	0	1	1	1	518.400.000			
1.01.02.1.01.0039	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	Unit	0	0	0	223	230	237	655.827.162			
1.01.02.1.01.0041	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	Unit	1	0	0	3	3	3	13.446.214.043			
1.01.02.1.01.0045	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	Peserta Didik	0	38	74	110	110	110	5.136.950.000			
1.01.02.1.01.0049	Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	Peserta Didik	628	314	314	314	314	314	3.491.880.906			
1.01.02.1.01.0050	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	Orang	980	346	346	346	346	346	37.575.782.100			
1.01.02.1.01.0053	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	satuan Pendidikan	71	71	71	71	71	71	260.811.300.000			
1.01.02.1.01.0068	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	Unit	0	0	0	1	0	0	200.000.000			
1.01.02.1.01.0069	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)	Unit	0	0	0	2	1	1	3.084.400.000			
1.01.02.1.01.0072	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	Ruang	12	0	0	5	2	3	2.160.000.000			
1.01.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									153.862.771.716			
1.01.02.1.02.0009	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	0	0	1	3	3	2	3.600.000.000			
1.01.02.1.02.0010	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	18	7	19	7	5	6	10.677.150.000			
1.01.02.1.02.0037	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	Peserta Didik	2.096	2.096	2.100	2.100	2.150	2.300	8.942.011.500			
1.01.02.1.02.0041	Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	Peserta Didik	371	400	500	550	600	650	5.401.310.216			
1.01.02.1.02.0046	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	satuan Pendidikan	58	58	59	60	60	60	125.242.300.000			
1.01.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus									30.031.297.080			
1.01.02.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	Unit	0	0	1	0	0	0	2.165.600.000			
1.01.02.1.03.0044	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	Unit	150	150	150	150	150	150	10.140.227.120			
1.01.02.1.03.0049	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)	Orang	175	116	116	116	116	116	17.725.469.960			
04.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	%	73,44	73,98	74,63	75,27	75,91	76,55	25.385.752.390			Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.01.04.1.02	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									25.385.752.390			
4.01.04.1.02.0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	Dokumen	800	600	600	600	600	600	25.385.752.390			
TARGET SDGs : Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.													
8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)													
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur													
TARGET SDGs : Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.													
8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.													
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.													
8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.													
02.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	20.969	21.369	21.569	21.769	21.969	22.169	2.180.000.000			Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
2.07.06.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan									2.180.000.000			

[illegible]



Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Page | III - 22

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

a. Arah Kebijakan 1; Meningkatkan Konektivitas Wilayah dan Akses Transportasi

Strategi:

- Memperbaiki dan memantapkan ruas jalan penghubung antar desa–kecamatan–pusat ekonomi, terutama menuju pelabuhan dan bandara.
- Membuka akses baru secara bertahap ke sentra produksi pertanian, perikanan, dan kawasan terpencil untuk menurunkan biaya distribusi.
- Penyediaan sarana transportasi dasar yang terjangkau (angkutan desa, perahu rakyat, trayek pengumpan) untuk memudahkan mobilitas masyarakat.

b. Arah Kebijakan 2 – Penguatan Sistem Logistik Sederhana untuk Mengurangi Biaya Pengiriman

Strategi:

- Mendorong kerja sama masyarakat, koperasi, nelayan, petani, dan pengusaha lokal untuk pengiriman bersama agar ongkos logistik lebih murah.
- Penerapan pencatatan dan pengaturan pengiriman sederhana berbasis aplikasi atau buku logistik, agar distribusi lebih teratur.

c. Arah Kebijakan 3 – Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Lokal

Strategi:

- Mendorong pengolahan sederhana komoditas unggulan (misalnya kelapa, jagung, rumput laut, ikan, dan hortikultura) dengan peralatan yang terjangkau.
- Penyediaan tempat pengolahan bersama agar UMKM tidak perlu membeli mesin sendiri.
- Membantu UMKM menembus pasar melalui pendampingan pengemasan, perizinan sederhana, dan pemasaran lokal–regional.

d. Arah Kebijakan 4 – Pengembangan SDM dan Keterampilan Produktif

Strategi:

- Pelatihan vokasi jangka pendek di tingkat kecamatan/desa, misalnya: pengolahan hasil pertanian–perikanan, mekanik mesin kecil, atau perbengkelan.
- Model belajar berbasis praktik (*learning by doing*) di unit produksi atau usaha setempat, agar pelatihan langsung berhubungan dengan pekerjaan nyata.
- Peningkatan literasi digital masyarakat untuk pemasaran online, pencatatan usaha, dan pengelolaan pelanggan.

e. Arah Kebijakan 5 – Meningkatkan Akses Permodalan dan Kemudahan Usaha

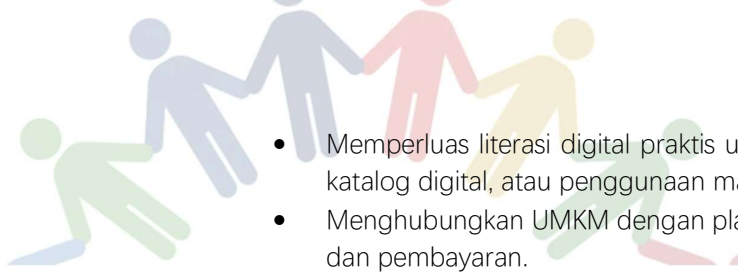
Strategi:

- Memperkuat koperasi, lembaga keuangan desa/BUMDes, atau kelompok usaha sebagai sumber permodalan kecil yang mudah diakses.
- Sederhanakan proses perizinan usaha mikro melalui layanan cepat di tingkat desa/kelurahan/kecamatan.

f. Arah Kebijakan 6 – Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Digitalisasi Dasar

Strategi:

- Mengembangkan penggunaan teknologi sederhana yang mudah dioperasikan masyarakat, seperti alat pengering, pendingin skala kecil, mesin pemotong, dan alat pengemas.



- Memperluas literasi digital praktis untuk UMKM (misalnya belajar foto produk, membuat katalog digital, atau penggunaan marketplace).
- Menghubungkan UMKM dengan platform digital lokal/regional untuk pemasaran, logistik, dan pembayaran.

g. Arah Kebijakan 7 – Penguatan Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat–Pelaku Usaha

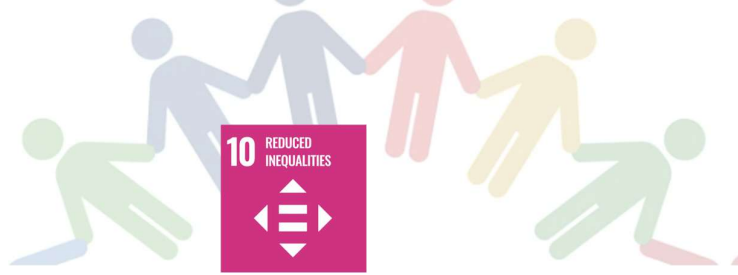
Strategi:

- Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa dan forum komunitas.
- Kemitraan usaha kecil dengan perusahaan besar (off-taker) untuk pemasaran, pasokan bahan baku, atau peningkatan kualitas produk.
- Mengoptimalkan perguruan tinggi dan sekolah vokasi sebagai mitra pendamping inovasi dan pelatihan masyarakat.

TUJUAN 9 :		Industri, Inovasi, dan Infrastruktur											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.													
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.												
01.03.10	PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	Persentase	62,72	63,92	65,12	66,32	67,52	68,72				Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi												Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	KM		5	4	5	5	4	87139987745	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0041	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	18130857875	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0043	Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	KM		643,61	643,61	643,61	643,61	643,61	5049307500	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0044	Sub Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	Dokumen		0	0	1			750000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0045	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin (KM)	KM		75	75	75	75	75	21311645937	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0046	Sub Kegiatan : Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	Meter		0	30	0	30	0	30475440000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0053	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	KM		8	8,06	8	8,03	8	1731293375	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0054	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	Meter			30	0			15000000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0056	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala (KM)	KM		3	4	3	0	4	42375000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0057	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Meter)	Meter		737	600	660	750	600	5601480346	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0058	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	KM				0	30		13500000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
1.03.10.1.01.0059	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	KM			8	8	8	8	230127443	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR-PKP
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.												
	- Jumlah Penumpang dan Barang Pada Transportasi Laut												
	- Jumlah Penumpang dan Barang Pada Transportasi Udara												
	- Jumlah Penumpang dan Barang Pada Transportasi Darat												
2.15.02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (Persentase)	%		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54				Dinas Perhubungan
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)	%		48,59	48,59	48,59	48,59	48,59		APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan)	Perusahaan		3	3	3	3	3		APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
2.15.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi												Dinas Perhubungan
2.15.02.1.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	Unit		50	50	50	50	50	3527422000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
2.15.02.1.02.0004	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Unit		0	50	50	50	50	1900000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
2.15.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B												Dinas Perhubungan
2.15.02.1.03.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1050000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
2.15.02.1.03.0008	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B (Unit)	Unit		1	1	1	1	1	1050000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
2.15.02.1.03.0010	Sub Kegiatan : Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	Unit		1	1	1	1	1	19560000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan
2.15.02.1.03.0011	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Unit		1	1	1	1	1	3050000000	APBD	Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan

[illegible]

[illegible]



Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025-2030

Sasaran Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut
Strategi : Peningkatan konektivitas daerah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan investasi.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan yang mendukung ekonomi kerakyatan, penguatan kearifan lokal serta membuka potensi dan kantong-kantong produksi.
2. Peningkatan kawasan permukiman, penyediaan akses perumahan permukiman layak, terjangkau bagi masyarakat yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sistematis dan terintegrasi dalam kerangka pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan, daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan yang berkelanjutan.
3. Pembukaan dan pengembangan ruas jalan untuk membuka konektivitas darat dari sentra produksi ke sentra distribusi, dari sentra pertumbuhan ke sentra pendukung yang ditunjang oleh fasilitas penunjang dan pendukung keselamatan lalu lintas dan jalan raya.
4. Mendorong pertumbuhan serta pengembangan pelabuhan, bandara, jalur kereta api sebagai pintu masuk-keluar dan jalur distribusi barang & jasa.
5. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis potensi wilayah diantaranya : Kawasan strategis industri terpadu, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis pertanian dan kawasan strategis terintegrasi lainnya secara berkelanjutan. Kawasan prioritas Provinsi Terintegrasi berupa Kawasan Destinasi wisata religi terintegrasi, prioritas pedesaan, perluasan administratif kota, kawasan ekonomi khusus.
6. Mendorong peningkatan kemandirian desa dan kelurahan.
7. Peningkatan investasi melalui roadmap dan pemetaan potensi wilayah setiap kabupaten/kota, perbaikan tata kelola perizinan, promosi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
8. Mendorong percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khususnya untuk kawasan-kawasan prioritas dalam rangka efektivitas, transparansi dan komitmen dalam pemanfaatan ruang yang terkendali dari aspek daya dukung dan daya tampung kelestarian lingkungan hidup.
9. Peningkatan jejaring kelembagaan, penguatan kerja sama antar daerah dan antar Negara melalui pemanfaatan teknologi, mendorong masuknya investasi hilirisasi, penguatan ekspor komoditas unggulan serta membuka aksesibilitas sebagai pintu masuk Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.
10. Fasilitasi Peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis digital dalam rangka mendukung pengembangan wilayah.



Sasaran Menciptakan kondusifitas, stabilitas, kemandirian, ketertiban daerah dan demokrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Penguatan koordinasi dan komitmen kerjasama serta gotong royong melalui kearifan lokal seperti "Mohuyula" dalam menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban daerah.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

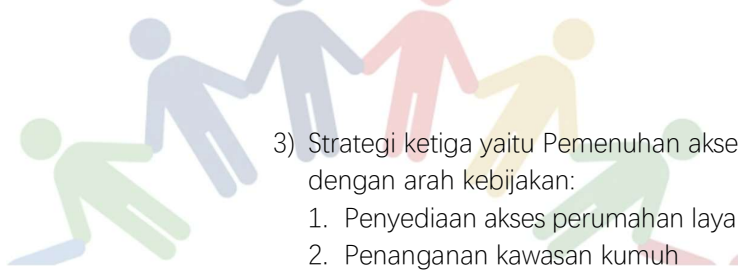
1. Peningkatan Koordinasi dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi, cegah dini pada masyarakat untuk menjamin stabilitas politik.
2. Penguatan pengawasan ketertiban, ketenteraman umum, dan perlindungan masyarakat.
3. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.
5. Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperkuat nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan inklusivitas serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila
6. Penguatan ruang dialog antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik sosial.
7. Mendorong peningkatan pengawasan keamanan di wilayah laut dengan pemanfaatan teknologi.
8. Optimalisasi pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

Page | III - 25

Sasaran Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif

Strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Strategi pertama adalah Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif, dengan kebijakan:
 1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif
 2. Pendekatan pemanfaatan satu data tunggal sosial ekonomi sebagai baseline data sasaran penerima manfaat
 3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas.
 4. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia
 5. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 6. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional yaitu Sekolah Rakyat
- 2) Strategi kedua yaitu kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui perencanaan, pendanaan, dan intervensi yang sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan kebijakan :
 1. Penguatan fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah
 2. Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi melalui penguatan komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pendanaan dan penentuan sasaran intervensi program
 3. Pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah
 4. Memperkuat evaluasi rencana APBD Kabupaten/Kota dalam mendukung sinergi pembangunan



- 3) Strategi ketiga yaitu Pemenuhan akses hunian layak dan penanganan pemukiman kumuh, dengan arah kebijakan:
 1. Penyediaan akses perumahan layak, terjangkau, dan berkualitas untuk masyarakat miskin
 2. Penanganan kawasan kumuh

Sasaran meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif

Page | III - 26

Strategi Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah. Strategi ini akan dicapai dengan kebijakan antara lain :

1. Peningkatan peran keluarga untuk mendukung penguatan moral generasi sejak dini
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
3. Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi sebagai penopang ketahanan ekonomi skala lingkungan keluarga.

TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.													
10.1.1.(a)	Rasio Gini												
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan status disabilitas												
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.													
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.												
2.15.02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat (Persentase)											Dinas Perhubungan
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi (Persentase)											Dinas Perhubungan
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (Perusahaan)											Dinas Perhubungan
2.15.02.1.08	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												Dinas Perhubungan
2.15.02.1.08.0002	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ke Tersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)											Dinas Perhubungan
2.15.02.1.08.0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)											Dinas Perhubungan
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)											Dinas Pangan
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi												Dinas Pangan
2.09.04.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)											Dinas Pangan
2.09.04.1.02.0003	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)											Dinas Pangan
2.09.04.1.02.0004	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)											Dinas Pangan
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik (%)											Dinas Tenaga Kerja PM & ESDM
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembangan, Daerah Terpencil dan Pedesaan												Dinas Tenaga Kerja PM & ESDM
3.29.06.1.06.0002	Sub Kegiatan : Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Keluarga)											Dinas Tenaga Kerja PM & ESDM
3.25.06	PROGRAM : PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)											Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.03	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17.07.1.01.0002	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)											Dinas Koperindag
2.17.08	PROGRAM : PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM Naik Kelas (%)											Dinas Koperindag
2.17.08.1.01	Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah												Dinas Koperindag
2.17.08.1.01.0001	Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)											Dinas Koperindag
01.01.02	PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas												Dinas Koperindag
1.01.02.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)											Dinas Koperindag
1.01.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)											
1.01.02.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)											
1.01.02.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)											
1.01.02.1.01.0012	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0013	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0019	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0020	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0027	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0028	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0029	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0036	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0039	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0041	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0045	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0049	Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.02.1.01.0050	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0051	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0052	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0053	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0054	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0066	Sub Kegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0068	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0069	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0071	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0072	Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.01.0073	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0009	Sub Kegiatan : Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0010	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0033	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0037	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0041	Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0042	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0043	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0045	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0046	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0047	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.02.0060	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.02.1.03.0035	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0038	Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0044	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0048	Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0049	Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0050	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0051	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.1.03.0052	Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.19.02	PROGRAM : PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01	Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi												Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0005	Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0012	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Persentase)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0013	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi (Orang)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.1.01.0015	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)											Dinas Pemuda dan Olah Raga
02.08.06	PROGRAM : PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)											Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.1.01	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi												Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kegiatan : Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
2.10.03	PROGRAM : PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
2.10.03.1.01	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi												Dinas PUPR-PKP
2.10.03.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
2.10.03.1.01.0003	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
2.10.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
2.10.03.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
2.10.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Laporan)											Dinas PUPR-PKP
01.04.02	PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)											Dinas PUPR-PKP
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi												Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01.0008	Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
	Kegiatan : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus												Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi												Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03.0008	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)											Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03.0010	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)											Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03.0012	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)											Dinas PUPR-PKP
01.05.04	PROGRAM : PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)											Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran												Satuan Polisi Pamong Praja

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

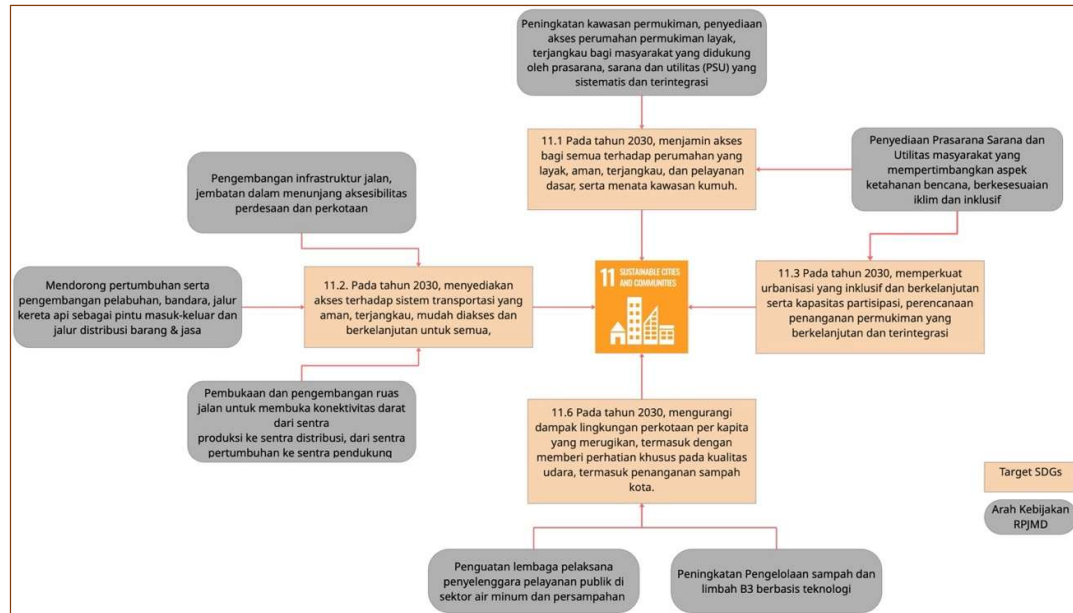
TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13.04.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Orang)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.04.1.01.0012	Sub Kegiatan : Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.04.1.01.0022	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.05	PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota												Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01.0003	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya (Lembaga)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01.0004	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01.0005	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01.0006	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.05.1.01.0009	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.03.1.01	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi												Dinas PMD- DukCapil
2.13.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.03.1.01.0003	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.02	PROGRAM : PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)											Dinas PMD- DukCapil
2.13.02.1.01	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat												Dinas PMD- DukCapil
2.13.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Dokumen)											Dinas PMD- DukCapil
TARGET SDGs : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.													
10.3.2001	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.												

TUJUAN 10 :		Berkurangnya Kesenjangan											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.3.1.(a)	Indeks aspek Kebebasan												
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).												
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.												
04.01.05	PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi (%)											Biro Hukum
4.01.05.1.01	Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan												Biro Hukum
4.01.05.1.01.0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)											Biro Hukum
4.01.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)											Biro Hukum
4.01.05.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya (Dokumen)											Biro Hukum
4.01.05.1.01.0004	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)											Biro Hukum
4.01.05.1.02	Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum												Biro Hukum
4.01.05.1.02.0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)											Biro Hukum
4.01.05.1.02.0002	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)											Biro Hukum
TARGET SDGs : Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.													
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.												
02.07.04	PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)											Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.1.03.0002	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)											Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.1.03.0003	Sub Kegiatan : Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)											Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Gambar 3.11

Keterkaitan Tujuan 11 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 11

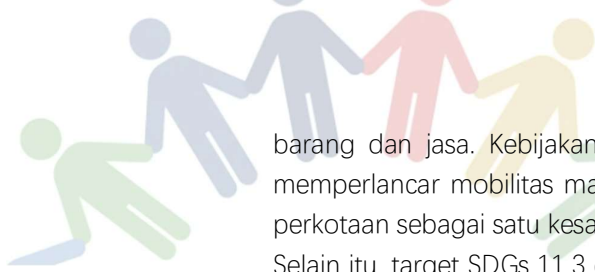
Secara umum, target ini merupakan bagian dari upaya Provinsi Gorontalo mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Berdasarkan prioritas dalam dokumen perencanaan daerah yang sedang disusun dan disetujui, berikut adalah fokus utamanya:

Fokus utama pembangunan Gorontalo dalam periode ini adalah "Penguatan Landasan Transformasi" (sebagai Tahap I dari RPJPD 2025-2045), yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Keterkaitan antara target SDGs, khususnya Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dengan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo tercermin dalam upaya peningkatan kualitas permukiman dan akses terhadap perumahan layak. Target SDGs 11.1 yang menekankan akses perumahan yang aman, layak, dan terjangkau diintegrasikan dalam kebijakan daerah melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang sistematis, terintegrasi, serta memperhatikan aspek ketahanan bencana dan kesesuaian iklim. Pendekatan ini sejalan dengan strategi penataan kawasan permukiman yang inklusif, penanganan kawasan kumuh, serta pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan di Gorontalo.

Selanjutnya, target SDGs 11.2 terkait penyediaan sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan diimplementasikan melalui arah kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan jalan dan jembatan, pembukaan dan peningkatan ruas jalan penghubung sentra produksi dan distribusi, serta penguatan simpul transportasi seperti pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk dan keluar



barang dan jasa. Kebijakan tersebut mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem wilayah Provinsi Gorontalo.

Selain itu, target SDGs 11.3 dan 11.6 yang menekankan urbanisasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas perencanaan, serta pengurangan dampak lingkungan perkotaan, diarusutamakan dalam strategi penguatan tata kelola dan kelembagaan. Hal ini tercermin dalam penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman, peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah B3 berbasis teknologi, serta penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik wilayah, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

1. Kota Gorontalo: Penguatan Kota Jasa

Kota Gorontalo, sebagai ibu kota provinsi, menargetkan penguatan perannya sebagai "Kota Jasa". Hal ini berarti penataan kota akan difokuskan pada:

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan: Pengembangan dan modernisasi fasilitas publik, terutama yang menunjang sektor jasa.

Penyelesaian Infrastruktur Transportasi: Berdasarkan RPJMN, pengembangan fasilitas transportasi seperti Terminal Duingi (Kota Gorontalo) dan Bandar Udara Djalaluddin menjadi prioritas konektivitas.

Ketegasan Tata Kelola Lingkungan: Pemerintah Kota Gorontalo telah menekankan penindakan hukum bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih dan tertata.

2. Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Kewilayahan

Target di seluruh wilayah provinsi, baik perkotaan maupun pedesaan, menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar:

Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDG 6): Peningkatan cakupan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang memadai, terutama di kawasan yang masih mengalami kekurangan (seperti kawasan kumuh).

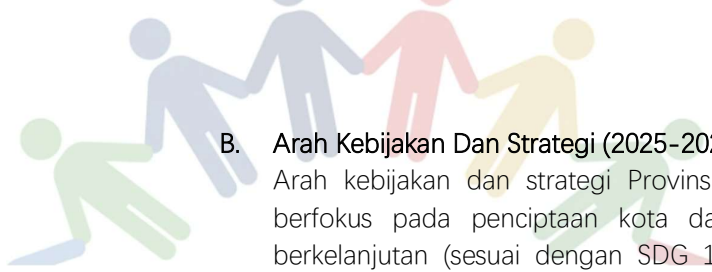
Pengurangan Kawasan Kumuh: Program peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama di kawasan padat penduduk dan pesisir, akan dilanjutkan dengan fokus pada perbaikan kualitas drainase dan perumahan.

Prioritas Jalan Desa dan Listrik: Pembangunan dan perbaikan jalan desa dan penyediaan listrik akan diprioritaskan, khususnya di daerah-daerah yang menjadi kantong produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan konektivitas.

3. Aspek Tata Ruang dan Lingkungan

Pengendalian Urban Sprawl: Penerapan kebijakan tata ruang yang lebih tegas untuk mengendalikan perluasan kota dan mencegah konversi lahan pertanian yang masif.

Peningkatan Kualitas Lingkungan: Melalui sinergi Renstra Dinas PUPR-PKP, akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan di area permukiman.



B. Arah Kebijakan Dan Strategi (2025–2029)

Arah kebijakan dan strategi Provinsi Gorontalo periode 2025–2029 yang secara spesifik berfokus pada penciptaan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (sesuai dengan **SDG 11**) terintegrasi dalam Arah Kebijakan Tahap I RPJPD (Penguatan Landasan Transformasi), khususnya pada pilar Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup.

Page | III - 29

Arah kebijakan yang terkait langsung adalah "Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Penguatan Ketangguhan Lingkungan".

Strategi 1: Penataan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Strategi ini berfokus pada pengendalian perluasan kota dan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan permukiman:

- **Pencegahan *Urban Sprawl*:** Mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara ketat untuk mengendalikan perluasan perkotaan yang tidak terencana (*urban sprawl*) dan mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif.
- **Pengurangan Kawasan Kumuh:** Melanjutkan program penanganan permukiman kumuh, terutama di Kota Gorontalo dan kawasan pesisir, dengan fokus pada:
 - Peningkatan kualitas drainase dan sistem pengelolaan air limbah (untuk aspek *aman* dan *sehat*).
 - Perbaikan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- **Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi:** Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi layak bagi seluruh penduduk (memenuhi aspek *dasar* dan *berkelanjutan*).

Strategi 2: Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Strategi ini bertujuan menjadikan permukiman lebih **tanggap** dan **tangguh** terhadap bencana dan perubahan lingkungan:

- **Ketangguhan Bencana:** Mengintegrasikan mitigasi bencana (termasuk risiko gempa, banjir, dan tanah longsor) ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur permukiman, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam **kesiapsiagaan darurat**.
- **Pengelolaan Sampah Berkelanjutan:** Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan perkotaan, termasuk pembangunan infrastruktur TPA/TPST regional yang terpadu, dan mendorong praktik **3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)** di tingkat rumah tangga.
- **Pengurangan Polusi:** Mengendalikan tingkat pencemaran, terutama pencemaran air dan udara di kawasan perkotaan yang padat, untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih **sehat dan aman**.

Strategi 3: Peningkatan Aksesibilitas dan Ruang Publik Inklusif

Strategi ini berfokus pada aspek inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua warga:

- **Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):** Memperluas dan meningkatkan kualitas RTH dan ruang publik di perkotaan untuk rekreasi dan interaksi sosial.
- **Transportasi Publik dan Aksesibilitas:** Mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih efektif dan terjangkau, serta memastikan infrastruktur perkotaan (trotoar, fasilitas publik, dan permukiman) ramah disabilitas dan ramah pejalan kaki (mewujudkan aspek *inklusif*).
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan (wanita, anak, penyandang disabilitas) dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan permukiman mereka (memenuhi aspek *inklusif*).

[illegible]

[illegible]

01.03.09	PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
1.03.09.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												Dinas PUPR-PKP
1.03.09.1.01.0017	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
1.03.09.1.01.0018	Sub Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (kabupaten/kota)											Dinas PUPR-PKP
1.03.09.1.01.0019	Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)											Dinas PUPR-PKP
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
2.22.02.1.02	Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.1.02.0003	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.1.01	Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.1.02.0004	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Museum Provinsi												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.1.01.0003	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06.1.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (Unit)											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TARGET SDGs : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.													
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.												
01.03.02	PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
		Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota												Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0055	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0075	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0079	Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0097	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0102	Sub Kegiatan : Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0107	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0122	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0124	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)											Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0127	Sub Kegiatan : Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (KM)											Dinas PUPR-PKP
TARGET SDGs : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.													
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya												
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola												
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)											Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional												Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01.0016	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)											Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01.0017	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)											Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01.0018	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)											Dinas PUPR-PKP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)											
2.11.11.1.01	Kegiatan : Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (Ton)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Unit)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.11.1.01.0007	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional (Dokumen)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0012	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0014	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0015	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0016	Sub kegiatan : Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota (Ton)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0017	Sub Kegiatan : Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Ton)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0018	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara													
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya (Lokasi)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup													Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0012	Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan

2.11.03.1.02	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)											Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)											Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.02.0003	Sub Kegiatan : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)											Dinas Lingkuhan Hidup dan Kehutanan
TARGET SDGs : Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional													
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS												
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.01	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi												Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.01.0005	Sub Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.02	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang												Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.02.0006	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.02.0009	Sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.02.0011	Sub Kegiatan : Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota (Berita Acara)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.02.0012	Sub Kegiatan : Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.03	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi												Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.03.0004	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.03.0006	Sub Kegiatan : Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)											Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.04	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi												Dinas PUPR- PKP
1.03.12.1.04.0003	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)											Dinas PUPR- PKP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01.0005	Sub Kegiatan : Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.02.1.01.0006	Sub Kegiatan : Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0008	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0009	Sub Kegiatan : Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA												Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
3.29.03.1.01	Kegiatan : Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil												Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
3.29.03.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)											Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
3.29.03.1.02	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut												Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi

1.04.02.1.02.0008	Sub Kegiatan : Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (orang)											Dinas PUPR- PKP
1.04.02.1.02.0009	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)											Dinas PUPR- PKP
1.04.02.1.03	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi												Dinas PUPR- PKP
1.04.02.1.03.0008	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)											Dinas PUPR- PKP
1.04.02.1.03.0010	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)											Dinas PUPR- PKP
1.04.02.1.03.0012	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)											Dinas PUPR- PKP
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%)											Dinas Sosial
		Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar (%)											Dinas Sosial
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kasiapsiagaannya (%)											Dinas Sosial
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi												Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0011	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0004	Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0015	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0016	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)											Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0018	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)											Dinas Sosial
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)											Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Garam (Ton)											
3.25.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi												Dinas Kelautan dan Perikanan

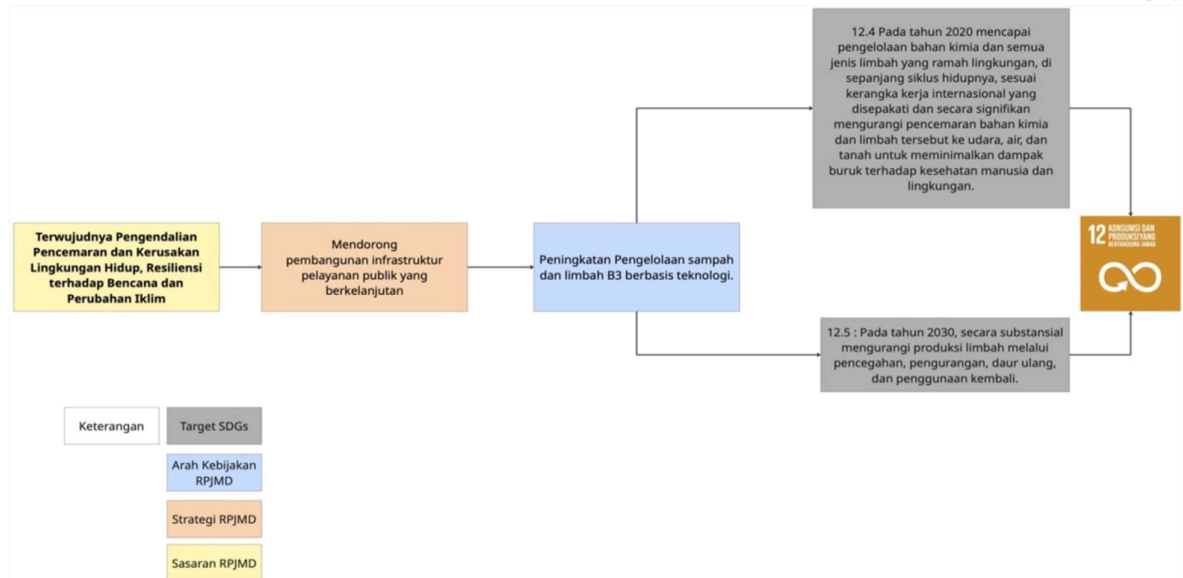
[illegible]



Gambar 3.12

Keterkaitan Tujuan 12 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo

Page | III - 30

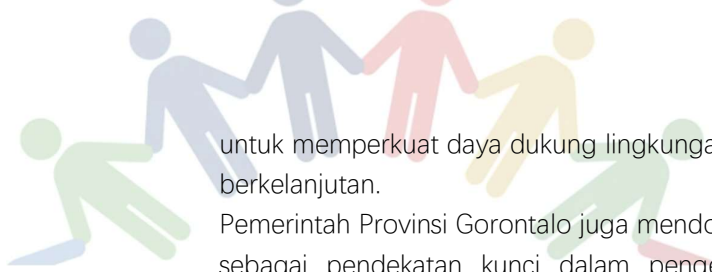


A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 12

Keterkaitan antara sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 dengan Tujuan 12 SDGs tercermin melalui komitmen mewujudkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran ini menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan tekanan lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan rumah tangga, sekaligus melindungi kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi kini dan mendatang.

Strategi pembangunan yang mendorong pengembangan infrastruktur pelayanan publik berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan sasaran tersebut ke dalam aksi nyata. Infrastruktur persampahan, sistem pengelolaan limbah, serta fasilitas pendukung lainnya dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar, tetapi juga untuk membentuk pola konsumsi dan produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Strategi ini memperkuat kontribusi daerah terhadap Target 12.5 SDGs melalui pengurangan timbulan limbah, peningkatan praktik daur ulang, serta pemanfaatan kembali sumber daya secara lebih optimal di tingkat masyarakat dan pelaku usaha.

Arah kebijakan berupa peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3 berbasis teknologi mempertegas keselarasan RPJMD Provinsi Gorontalo dengan Target 12.4 SDGs. Kebijakan ini menekankan pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya secara aman sepanjang siklus hidupnya, guna meminimalkan dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pendekatan berbasis teknologi, tata kelola yang kuat, serta kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk mendorong transformasi menuju ekonomi sirkular di daerah. Melalui kerangka ini, pencapaian Tujuan 12 SDGs tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban global, tetapi juga sebagai jalan strategis



untuk memperkuat daya dukung lingkungan dan kualitas pembangunan Provinsi Gorontalo secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mendorong implementasi model strategi kemitraan multipihak sebagai pendekatan kunci dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota. Pola ini menempatkan pemerintah daerah sebagai orkestrator yang mempertemukan peran pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat dalam satu ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu. Melalui kemitraan ini, penguatan kapasitas teknis, pembiayaan inovatif, transfer teknologi, serta perubahan perilaku masyarakat dapat berjalan secara simultan. Pendekatan kolaboratif tersebut mempercepat penerapan prinsip ekonomi sirkular, memperluas praktik reduce, reuse, dan recycle, serta memastikan pengelolaan sampah dan limbah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian Tujuan 12 SDGs dan karakteristik kewilayahan Provinsi Gorontalo.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

Arah kebijakan dan strategi Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab difokuskan untuk terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini yaitu :

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan kebijakan:

- a) Peningkatan Pengelolaan sampah dan limbah B3 berbasis teknologi.
- b) Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan publik di sektor air minum dan persampahan sebagai salah satu kebutuhan utama dari dampak perkembangan kota

TUJUAN 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab													
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs 12.1 : Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.													
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan												
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	Ton		21.437	21.544	21.651	21.760	21.760	13.822.548.210			
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Ton		1.086.900	1.089.547	1.092.201	1.094.863	1.094.863				
		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Ton		69.615	69.953	69.291	70.629	70.629				
3.27.02.1.01	Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				4.122.548.210	2.300.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	13.822.548.210			
3.27.02.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	13.365.194.210			
3.27.02.1.01.0002	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	457.354.000			
3.27.02.1.02	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				832.072.250	838.018.300	838.209.800	838.416.800	838.416.800	4.185.133.950			
3.27.02.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	Sertifikat		160	175	175	175	175	942.752.000			
3.27.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	Batang		0	2900	2950	3000	3000	1.277.093.700			
3.27.02.1.02.0012	Sub Kegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	Batang		0	2700	2700	2700	2700	825.424.000			
3.27.02.1.02.0013	Sub Kegiatan : Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	Ton		0	8	8	8	8	876.652.000			
3.27.02.1.02.0018	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	545.774.000			
3.27.02.1.02.0019	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	444.972.250			
3.27.02.1.02.0020	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Laporan		1	0	0	0	0	149.118.000			
3.27.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				158.826.000	315.677.600	315.677.600	315.677.600	315.677.600	1.421.536.400			
3.27.02.1.03.0002	Sub Kegiatan : Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	VUB		2	2	1	1	1	1.421.536.400			
3.27.02.1.05	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				0	180.190.625	207.219.220	238.302.102	269.384.984	895.096.931			
3.27.02.1.05.0005	Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	895.096.931			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	Ha		4.757,27	4.213,76	13.386,00	2.296,00	0	1.472.974.000			Dinas Pertanian
3.27.03.1.01	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian				72.974.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.472.974.000			Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000			Dinas Pertanian

3.27.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	Dokumen		1	0	0	0	0	72.974.000			Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Laporan		0	1	1	1	1	200.000.000			Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0015	Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000			Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0016	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000			Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0018	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000			Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.359.499.000			Dinas Pertanian
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	%		53,85	69,23	84,62	100	100				Dinas Pertanian
3.27.04.1.01	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	857.064.000			Dinas Pertanian
3.27.04.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	857.064.000			Dinas Pertanian
3.27.04.1.03	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	502.435.000			Dinas Pertanian
3.27.04.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	502.435.000			Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	%		92	94	96	98	98	4.701.228.000			Dinas Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	%		71	73	76	79	79				Dinas Pertanian
3.27.05.1.01	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				747.986.000	913.310.500	1.013.310.500	1.013.310.500	1.013.310.500	4.701.228.000			Dinas Pertanian
3.27.05.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Ha		14.841,07	13.950,61	13.392,58	13.124,53	13.124,53	3.304.794.000			Dinas Pertanian
3.27.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Ha		1.852,50	1.352,33	1.027,77	811,94	811,94	1.996.434.000			Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenalkan Jumlah SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	%		3	0,26	0,26	0,26	0,26	507.354.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.01	Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				107.354.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	507.354.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Orang		25	150	150	150	150	507.354.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.02	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				88.236.000	270.000.000	280.000.000	290.000.000	290.000.000	1.218.236.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.02.0001	Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	668.236.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	Kelompok		0	2	2	2	2	530.000.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.03	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				276.472.000	0	0	0	0	276.472.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.03.0006	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Unit		1	0	0	0	0	276.472.000			Dinas Pertanian
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	%		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.28.03.1.06	Kegiatan : Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0005	Sub Kegiatan : Fasilitas hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Unit managemen PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen)	Unit Manageme n		10	10	10	10	10	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0006	Sub Kegiatan : Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Unit Managemen)	Unit Manageme n		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0007	Sub Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	Unit Manageme n		2	2	2	2	2	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Managemen)	Unit Manageme n		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07	Kegiatan : Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0004	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0005	Sub Kegiatan : Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanlajutnya berupa pengenaa Sanksi Adminsitratif (Unit Managemen)	Unit Manageme n		3	3	3	3	3	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0006	Sub Kegiatan : Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Managemen)	Unit Manageme n		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	%		95	95	95	95	95	2.461.245.810			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
3.30.06.1.02	Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				97.074.000	509.410.000	560.351.000	616.386.100	678.024.710	2.461.245.810			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
3.30.06.1.02.0005	Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	Laporan		215	226	237	248	259	1.508.776.000			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
3.30.06.1.02.0006	Sub Kegiatan : Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	Produk		3	3	3	3	3	547.162.950			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
3.30.06.1.02.0007	Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat		5	6	7	8	9	405.306.260			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan												
TARGET SDGs 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk memin													
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri												
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya (Lokasi)			2	2	2	2	2	11.325.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				1.975.000.000	2.975.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	11.325.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Paket		5	5	5	5	5	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.03.1.01.0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Lokasi		59	59	59	59	59	2.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.375.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0012	Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	Unit		0	2	0	0	0	1.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	Unit		2	2	3	3	3	1.950.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline												
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2	2	2	2	2	11.325.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.975.000.000	2.975.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	11.325.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Paket		5	5	5	5	5	750.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Lokasi		59	59	59	59	59	2.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.375.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0012	Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	Unit		0	2	0	0	0	1.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	Unit		2	2	3	3	3	1.950.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya.												
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.975.000.000	2.975.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	11.325.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Paket		5	5	5	5	5	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Lokasi		59	59	59	59	59	2.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.375.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0012	Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	Unit		0	2	0	0	0	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	Unit		2	2	3	3	3	1.950.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)			25	25	25	25	25	4.687.500.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.1.01	Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				937.500.000	937.500.000	937.500.000	937.500.000	937.500.000	4.687.500.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	4.437.500.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.1.01.0003	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TARGET SDGs 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.													
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.												
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	%		70	75	80	85	85	15.788.880.750			Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				1.236.381.550	3.638.124.800	3.638.124.800	3.638.124.800	3.638.124.800	15.788.880.750			Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01.0016	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	1.200.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01.0017	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan (Unit)	Unit		1	1	1	1	1	13.125.578.550			Dinas PUPR-PKP
1.03.04.1.01.0018	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota)	Kabupaten/ Kota		150	150	150	150	150	1.463.302.200			Dinas PUPR-PKP

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Poin		27,78	35,40	48,80	60,00	70,00	27.300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01	Kegiatan : Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				2.100.000.000	2.900.000.000	18.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	27.300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (Ton)	Ton		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Unit)	Unit		0	6	0	0	0	800.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0007	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Unit)	Unit		0	0	1	0	0	16.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional (Dokumen)	Dokumen		3	3	3	3	3	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pengelolaan sampah Regional	Jumlah sampah regional yang dikelola (Ton)	Ton		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	1.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0012	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (Unit)	Unit		8	8	8	8	8	4.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0014	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0015	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Ton)	Ton		9	9	9	9	9	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0016	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota (Ton)	Ton		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0017	Sub Kegiatan : Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan (Ton)	Ton		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	1.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.1.01.0018	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TARGET SDGs 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.													
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.												
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	%		77	79	81	83	85	3.920.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				714.000.000	766.000.000,00	790.000.000	814.000.000	836.000.000	3.920.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	Dokumen		15	15	15	15	15	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Orang		2	3	3	3	3	235.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	Orang		2	3	3	3	3	235.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	Usaha/ Kegiatan		27	32	37	42	47	2.700.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	%		77	79	81	83	85	3.920.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				714.000.000	766.000.000,00	790.000.000	814.000.000	836.000.000	3.920.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Dokumen)	Dokumen		15	15	15	15	15	750.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Orang		2	3	3	3	3	235.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	Orang		2	3	3	3	3	235.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	Usaha/Kegiatan		27	32	37	42	47	2.700.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TARGET SDGs 12.7 : Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.												
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan UKPBJ (Level)	Level		5-5	6-6	7-7	7-7	7-7	2.048.939.884		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				271.939.500	310.000.000	395.454.720	496.545.664	575.000.000	2.048.939.884		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		2	2	2	2	2	687.698.384		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		4	4	4	4	4	1.038.343.500		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	322.898.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100.306.000	120.000.000	135.000.000	150.000.000	165.000.000	670.306.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	199.449.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	298.487.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02.0003	Sub Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	172.370.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03	Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				156.563.000	190.000.000	230.000.000,00	260.000.000	280.000.000	1.116.563.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	Orang		30	30	30	30	30	717.937.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03.0002	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	224.613.000		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	174.013.000		Sekretariat Daerah
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.											
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan UKPBJ (Level)										Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				271.939.500	310.000.000	395.454.720	496.545.664	575.000.000	2.048.939.884		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		2	2	2	2	2	687.698.384		Sekretariat Daerah
4.01.07.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		4	4	4	4	4	1.038.343.500		Sekretariat Daerah

4.01.07.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	322.898.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100.306.000	120.000.000	135.000.000	150.000.000	165.000.000	670.306.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	199.449.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	298.487.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.02.0003	Sub Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	172.370.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03	Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				156.563.000	190.000.000	230.000.000,00	260.000.000	280.000.000	1.116.563.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	Orang		30	30	30	30	30	717.937.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03.0002	Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	224.613.000			Sekretariat Daerah
4.01.07.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	174.013.000			Sekretariat Daerah
TARGET SDGs 12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.													
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup													
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	%		20	20	20	20	20	8.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	8.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.1.01.0003	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	Orang		100	100	100	100	100	3.750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.1.01.0005	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Lembaga		5	5	5	5	5	3.750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	%		100	100	100	100	100	3.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09.1.01	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	3.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Entitas		18	18	18	18	18	3.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	%		15	15	15	15	15	7.331.819.478			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				269.900.200	461.639.600	484.721.500	508.957.500	534.405.300	2.259.624.100			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Lokasi)	Lokasi		2	2	2	2	2	2.259.624.100			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				553.969.100	956.713.550	1.004.549.200	1.054.776.600	1.107.515.400,00	4.677.523.850			Dinas Pariwisata

3.26.02.1.03.0004	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Unit		2	2	2	2	2	2.745.178.950			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.03.0010	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	Orang		180	180	180	180	200	1.932.344.900			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				80.000.026	73.007.600	76.657.900	80.490.751	84.515.251	394.671.528			Dinas Pariwisata
3.26.02.1.04.0010	Sub Kegiatan : Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi (Laporan)	Laporan		2	2	2	2	2	394.671.528			Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	%		20	20	20	20	20	5.282.251.099			Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				628.016.500	1.079.837.600	1.133.829.400	1.190.520.800	1.250.046.799	5.282.251.099			Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	Dokumen		4	5	5	6	6	1.608.438.750			Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	Kegiatan		4	4	5	6	6	3.673.812.349			Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	%		15	15	15	15	15	4.100.713.901			Dinas Pariwisata
3.26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				224.660.650	795.714.000	835.499.651	877.274.600	921.138.300	3.654.287.201			Dinas Pariwisata
3.26.04.1.01.0003	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	Laporan		4	4	4	4	4	1.835.104.201			Dinas Pariwisata
3.26.04.1.01.0006	Sub Kegiatan : Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	Dokumen		0	2	2	2	2	1.819.183.000			Dinas Pariwisata
3.26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					103.576.300	108.755.100	114.192.850	119.902.450	446.426.700			Dinas Pariwisata
3.26.04.1.02.0013	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	Orang		15	15	15	15	15	446.426.700			Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	%		10	10	10	10	10	935.207.467			Dinas Pariwisata
3.26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				96.282.150	194.640.600	204.372.630	214.591.262	225.320.825	935.207.467			Dinas Pariwisata
3.26.05.1.01.0017	Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	Orang		100	100	100	100	100	935.207.467			Dinas Pariwisata

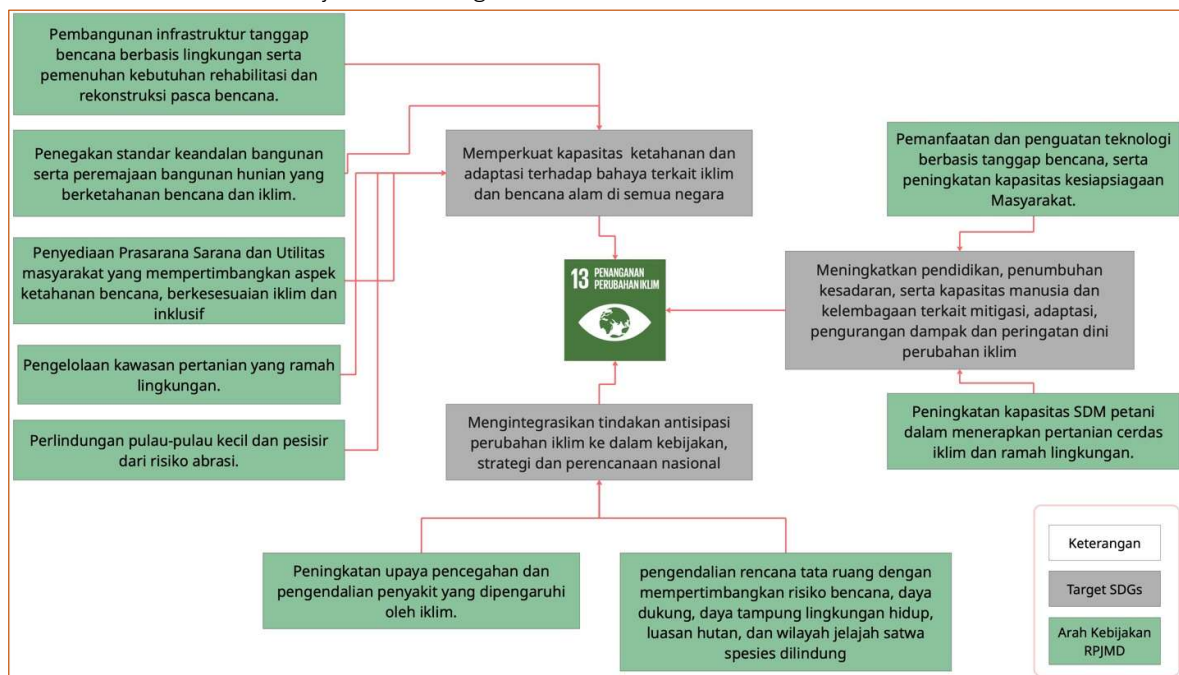


Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 13

Gambar 3.13

Keterkaitan Tujuan 13 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



Keterkaitan antara target SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 tercermin dalam komitmen daerah untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam. Target SDGs yang menekankan peningkatan ketahanan dan pengurangan risiko bencana diurusutamakan dalam sasaran pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran ini mempertegas orientasi pembangunan Gorontalo yang tidak hanya responsif terhadap kejadian bencana, tetapi juga preventif dan adaptif dalam jangka menengah.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam strategi perencanaan yang mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas masyarakat yang mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, kesesuaian iklim, dan prinsip inklusivitas, serta pengendalian rencana tata ruang berbasis risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Strategi ini juga mencakup perlindungan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dari risiko abrasi, serta pengelolaan kawasan pertanian yang ramah lingkungan sebagai upaya adaptasi sektor-sektor strategis terhadap dampak perubahan iklim.

Selanjutnya, sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam kesiapsiagaan bencana, pemanfaatan teknologi tanggap bencana, dan pengembangan sistem



peringatan dini. Pada sektor pertanian dan kesehatan, strategi difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM petani dalam penerapan pertanian cerdas iklim serta peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim. Dengan demikian, keterpaduan antara target SDGs, arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo 2025–2029 membentuk kerangka pembangunan yang berketahanan iklim, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan kesejahteraan Masyarakat

13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emisi. Sasaran tersebut dijabarkan dalam berbagai strategi yang dapat dilakukan selama kurun waktu tahun 2025– 2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi RPJPD Tahun 2025–2045 yaitu “Gorontalo Provinsi Madani, yang Maju dan Berkelanjutan

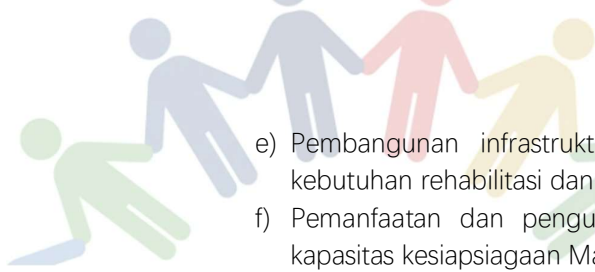
Selama sepuluh tahun terakhir, program-program penanganan perubahan iklim hanya berfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Padahal, Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo dihadapkan pada tantangan nyata selain kerusakan lingkungan, yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) merupakan inisiatif pembangunan yang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan emisi, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. Gas ini yang terdiri dari Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrogen Mono Oksida (N₂O), Hidro Fluorocarbon (HFCs), Sulfur Hexafluorida (SF₆), Perfluoro Karbon (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya.

Secara agregat, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif di Provinsi Gorontalo selang tahun 2020 s/d 2024 adalah sebagai berikut : 2020 : 25.64%, 2021 : 36.69%, 2022 : 42.68%, 2023 : 48.86% dan 2024 : 51.03% dengan urutan sektor penyumbang emisi GRK kumulatif adalah sektor FOLU, pertanian, persampahan, limbah dan energi sektor energi.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025–2030

Arah kebijakan dan strategi penanganan perubahan iklim difokuskan untuk terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini dibagi atas 2 strategi yaitu :

1. Strategi pertama yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan kebijakan:
 - a) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
2. Strategi kedua untuk pencapaian sasaran ini, yakni peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan serta Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:
 - a) Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas masyarakat yang mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, berkesesuaian iklim dan inklusif
 - b) Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim dan ramah lingkungan.
 - c) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
 - d) Pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi



- e) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- f) Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan Masyarakat.
- g) Pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kehutanan.

TUJUAN 13 :		Penanganan Perubahan Iklim:											
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.													
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang													
13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030													
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana													
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	%		83	86	89	92	95	91.696.437.000			Dinas PUPR-PKP
		Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	%		5	7	9	11	13				Dinas PUPR-PKP
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	%		15	20	25	30	35				Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.496.437.000	22.050.000.000	22.050.000.000	22.050.000.000	22.050.000.000	91.696.437.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0122	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	3	5	5	5	5	5	3.051.618.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0124	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	Km		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	15.800.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0127	Sub Kegiatan : Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara (KM)	Km		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	16.000.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0055	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	unit		1	1	1	1	1	2.784.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0075	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	Lembaga		3	3	3	3	3	830.824.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0079	Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	Km		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	26.400.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0097	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	Km		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	800.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0102	Sub Kegiatan : Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun (Unit)	Unit		4	4	4	4	4	4.000.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.03.02.1.01.0107	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	Km		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	22.029.995.000			Dinas PUPR-PKP
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)			900.000.000	2.955.040.000	2.645.040.000	4.495.040.000	10.995.120.000				Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.01	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		%		100	100	100	100	100	720.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.01.0003	Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0	0	500.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota (Orang)	Orang		100	100	20	20	20	220.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.02	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				380.000.000	240.000.000	780.000.000	630.000.000	780.000.000	2.810.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.02.0022	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan (Dokumen)	Dokumen		0	0	1	0	0	600.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.02.0023	Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	Orang	0	100	100	100	100	100	600.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.02.0024	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	0	0	0	280.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.02.0025	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	Dokumen	0	0	0	0	1	0	300.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.02.0027	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	Orang	0	0	0	50	0	50	300.000.000			Dinas PUPR-PKP

1.05.03.1.02.0030	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	Orang	0	50	50	100	100	100	730.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03	Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									3.860.160.000,00			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0001	Sub Kegiatan : Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	-			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0025	Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	-			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0026	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	Orang		100	100	100	100	100	600.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0027	Sub Kegiatan : Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit (Laporan)	Laporan	-	1	1	1	1	1	-			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0028	Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	Orang	-	100	100	100	100	100	912.800.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0029	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	660.000.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0030	Sub Kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	Laporan	-	2	2	2	2	2	786.880.000			Dinas PUPR-PKP
1.05.03.1.03.0031	Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	Laporan	-	10	10	10	10	10	900.480.000			Dinas PUPR-PKP
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat (%)		-	1.171.101.183	1.270.086.550	1.390.086.550	1.490.086.550	1.590.086.550	6.911.447.383			Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Orang		24.712	24.772	24832	24.892	24.952				Dinas Kesehatan
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	Orang		45.585	45.585	45.585	45.585	45.585				Dinas Kesehatan
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis (Orang)	Orang		10	10	10	10	10				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Kesehatan

		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Kesehatan
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Kesehatan
		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	Paket		50	50	50	50	50			Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (Orang)	Orang		45.585	45.585	45.585	45.585	45.585	3.712.130.000		Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	Orang		24.712	24.772	24.832	24.892	24.952	3.199.317.383		Dinas Kesehatan
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	%		100	100	100	100	100	10.040.770.498		Dinas PUPR-PKP
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	%		100	100	100	100	100			Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				60.249.000	354.453.300	389.896.630	428.888.493	471.777.342	1.705.266.765		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	632.791.650		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01.0008	Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	715.719.525		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.01.0010	Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	356.755.590		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.02	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				157.430.000	447.284.500	492.012.950	541.214.245	595.335.670	2.233.277.365		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.02.0001	Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	Orang		50	100	100	100	100	2.233.277.365		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.02.0004	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	Orang		20	50	50	50	50	565.736.204		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.02.0008	Sub Kegiatan : Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi (orang)	Orang		50	50	50	50	50	434.999.972		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.02.0009	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	Orang		50	50	50	50	50	496.341.027		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				874.597.000	1.213.755.400	1.285.410.740	1.364.231.614	1.364.231.614	6.102.226.368		Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03.0008	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	Unit Rumah		5	5	5	5	5	2.345.203.000		Dinas PUPR-PKP

1.04.02.1.03.0010	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	Rumah Tangga		8	5	5	5	5	396.531.337			Dinas PUPR-PKP
1.04.02.1.03.0012	Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)	Unit Rumah		7	7	7	7	7	3.447.194.992			Dinas PUPR-PKP
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi (%)	%		100	100	100	100	100	7.814.130.260			Dinas Sosial
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	%		20	22	24	26	28				Dinas Sosial
		Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar (%)	%		100	100	100	100	100				Dinas Sosial
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	%		100	100	100	100	100				Dinas Sosial
1.06.06.1.01	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1.431.777.176	1.571.852.900	1.587.571.429	1.603.447.143	1.619.481.612	7.814.130.260			Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi (Orang)	Orang		2.200	2.300	2.500	2.700	3.000	354.773.365			Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0004	Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	Orang		100	100	100	100	100	354.773.365			Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	Orang		100	100	100	100	100	77.704.366			Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0011	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	Orang		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.067.246.227			Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	Orang		1	1	1	1	1	636.696.701			Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0015	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang		829	829	829	829	829	82.020.100			Dinas Sosial
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	Ha		136.745,83	148.624,39	159104,89	159104,89	159.104,89	1.090.615.753			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Garam (Ton)	Ton		326	400	521	700	750				Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				151.408.503	218.000.000	228.500.000	240.345.000	252.362.250	1.090.615.753			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	Ha	3	136.745,83	148.624,39	159.104,89	159.104,89	159.104,89	679.333.503			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		1	1	1	1	1	107.753.125			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0005	Sub Kegiatan : Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	131.524.125			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0013	Sub Kegiatan : Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	172.405.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
TARGET SDGs : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.													
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications													
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun													
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)													
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)													
13.3.1 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.													
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya (Lokasi)			1.975.000.000	2.975.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	11.325.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.975.000.000	2.975.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	2.125.000.000	11.325.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan

2.11.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	Paket		5	5	5	5	5	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0006	Sub Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	Laporan		59	59	59	59	59	2.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0011	Sub Kegiatan : Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.375.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0012	Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	1.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	Unit		0	2	0	0	0	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.1.01.0014	Sub Kegiatan : Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	Unit		2	2	3	3	3	1.950.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	Ton		1.086.900	1.089.547	1.092.201	1.094.863	1.094.863	47.322.328.764			Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	Ton		69.615	69.953	69.291	70.629	70.629				Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	Ton		21.437	21.544	21.651	21.760	21.760				Dinas Pertanian
3.27.02.1.01	Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				4.122.548.210	2.300.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	13.522.548.210			Dinas Pertanian
3.27.02.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	13.365.194.210			Dinas Pertanian
3.27.02.1.01.0002	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	457.354.000			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02	Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				832.072.250	838.018.300	838.209.800	838.416.800	838.416.800	4.185.133.950			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	Sertifikat		160	175	175	175	175	942.752.000			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	Batang		0	2900	2950	3000	3000	1.277.093.700			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0012	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	Batang		0	2700	2700	2700	2700	825.424.000			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0013	Sub Kegiatan : Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	Ton		0	8	8	8	8	876.652.000			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0018	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	545.774.000			Dinas Pertanian
3.27.02.1.02.0019	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	444.972.250			Dinas Pertanian

3.27.02.1.02.0020	Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Laporan		1	0	0	0	0	149.118.000		Dinas Pertanian
3.27.02.1.03	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				158.826.000	315.677.600	315.677.600	315.677.600	315.677.600	1.421.536.400		Dinas Pertanian
3.27.02.1.03.0002	Sub Kegiatan : Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	VUB		2	2	1	1	1	1.421.536.400		Dinas Pertanian
3.27.02.1.05	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				0	180.190.625	207.219.220	238.302.102	269.384.984	895.096.931		Dinas Pertanian
3.27.02.1.05.0005	Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	895.096.931		Dinas Pertanian
3.27.02.1.07	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				4.607.802.000	5.531.415.157	5.607.932.272	5.775.431.922	5.775.431.922	27.298.013.273		Dinas Pertanian
3.27.02.1.07.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	Ton		4	0	0	0	0	238.472.000		Dinas Pertanian
3.27.02.1.07.0004	Sub Kegiatan : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	Ekor		540	1000	1000	1000	1000	27.059.541.273		Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)			72.974.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	1.172.974.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01	Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian				72.974.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	1.172.974.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0004	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	Dokumen		1	0	0	0	0	72.974.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0009	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Laporan		0	1	1	1	1	200.000.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0015	Sub Kegiatan : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0016	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000		Dinas Pertanian
3.27.03.1.01.0018	Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	Dokumen		0	1	1	1	1	300.000.000		Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	2.431.052.000		Dinas Pertanian
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	%		53,85	69,23	84,62	100	100			Dinas Pertanian
3.27.04.1.01	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				608.617.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	1.528.617.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.01.0004	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	Wilayah		6	6	6	6	6	471.553.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.01.0005	Sub Kegiatan : Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	Laporan		0	3		3	3	200.000.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	857.064.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.03	Kegiatan : Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				182.435.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	902.435.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.03.0003	Sub Kegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	502.435.000		Dinas Pertanian
3.27.04.1.03.0006	Sub Kegiatan : Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	Unit Usaha		0	25	30	35	35	200.000.000		Dinas Pertanian

3.27.04.1.03.0007	Sub Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Orang)	Orang		0	140	140	140	140	200.000.000			Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	%		92	94	96	98	98	4.389.248.500			Dinas Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	%		71	73	76	79	79				Dinas Pertanian
3.27.05.1.01	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				747.986.000	913.310.500	101.331.000	1.313.310.500	1.313.310.500	4.389.248.500			Dinas Pertanian
3.27.05.1.01.0001	Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Ha		14.841,07	13.950,61	13.392,58	13.124,53	13.124,53	3.304.794.000			Dinas Pertanian
3.27.05.1.01.0002	Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Ha		1.852,50	1.352,33	1.027,77	811,94	811,94	1.996.434.000			Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Jumlah SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)			472.062.000	370.000.000	380.000.000	390.000.000	390.000.000	2.002.062.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.01	Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				107.354.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	507.354.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	Orang		25	150	150	150	150	507.354.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.02	Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				88.236.000	270.000.000	280.000.000	290.000.000	290.000.000	1.218.236.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.02.0001	Sub Kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	688.236.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	Kelompok		0	2	2	2	2	530.000.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.03	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				276.472.000	0	0	0	0	276.472.000			Dinas Pertanian
3.27.07.1.03.0006	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Unit		1	0	0	0	0	276.472.000			Dinas Pertanian

TARGET SDGs : Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup													
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	%		20	20	20	20	20	8.000.000.000			Dinas Pertanian
2.11.08.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi				1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	8.000.000.000			Dinas Pertanian
2.11.08.1.01.0003	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Orang)	Orang		100	100	100	100	100	3.750.000.000			Dinas Pertanian
2.11.08.1.01.0005	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	Lembaga		5	5	5	5	5	3.750.000.000			Dinas Pertanian
2.11.08.1.01.0007	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Pertanian
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	%		100	100	100	100	100	3.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09.1.01	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	3.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09.1.01.0001	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Entitas		18	18	18	18	18	3.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TARGET SDGs : Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparan

13.a.1 Jumlah dana yang disediakan dan mobilisasinya dalam USD per tahun terkait dengan keberlanjutan mobilisasi dana untuk mencapai komitmen 100 milyar USD sampai tahun 2025

13.a.1.(a) Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim

TARGET SDGs : Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.



A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 14

Gambar 3.14

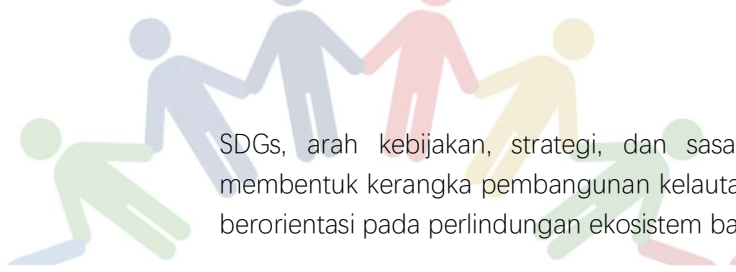
Keterkaitan Tujuan 14 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



Keterkaitan antara SDGs Tujuan 14 *Ekosistem Laut* dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 tercermin dalam komitmen daerah untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan. Target SDGs 14.2 yang menekankan pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut guna menghindari dampak buruk yang signifikan diarusutamakan dalam arah kebijakan daerah melalui peningkatan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang laut serta kawasan konservasi. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan perairan, meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir, serta mencegah degradasi sumber daya laut yang berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir Gorontalo.

Selanjutnya, arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam strategi pembangunan yang berfokus pada pengendalian pencemaran kualitas air laut dan perlindungan keanekaragaman hayati pesisir. Strategi ini mencakup penguatan sistem pengawasan, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta perlindungan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dari risiko abrasi dan tekanan aktivitas manusia. Melalui pendekatan berbasis ekosistem dan kehati-hatian dalam pemanfaatan ruang laut, pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keterkaitan dengan target SDGs 14.5 diwujudkan melalui sasaran pembangunan daerah yang mendorong pelestarian wilayah pesisir dan laut sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sasaran ini diimplementasikan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya pesisir melalui pengembangan pariwisata bahari dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga fungsi konservasi alam. Dengan demikian, sinergi antara



SDGs, arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo 2025–2029 membentuk kerangka pembangunan kelautan dan pesisir yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem bagi generasi mendatang.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025–2030

Page | III - 36

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan lautan difokuskan untuk terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah. Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini dibagi atas 2 strategi yaitu :

1. Strategi pertama adalah Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja, yang akan dilakukan melalui kebijakan :
 - a. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan
2. Strategi kedua yaitu Peningkatan Produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan :
 - a. Penguatan dan perlindungan sosial di bidang pertanian khususnya untuk pengendalian ijon serta kelembagaan petani dan nelayan
 - b. Peningkatan Pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang laut dan kawasan konservasi
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang modern dan berkelanjutan seperti pelabuhan perikanan, balai benih perikanan
 - d. Ekstensifikasi dan Intensifikasi usaha dan industri Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
 - e. Peningkatan kelembagaan petani, peternak dan kelompok nelayan dan sistem pengawasan mutu serta perbaikan pola distribusi.
3. Strategi ketiga yaitu Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dilakukan melalui kebijakan:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pariwisata seperti Botumoito, Minanga, Geosite dalam Geopark Gorontalo dan kawasan pariwisata prioritas provinsi seperti Olele, Lombongo dan hiu paus Botubarani.
 - b. Peningkatan nilai tambah melalui penerapan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Ekosistem Laut													
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs : Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.													
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan												
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan												
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	%		100	100	100	100	100	4.550.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	Dokumen		0	1	0	0	0	2.300.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
		Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	Dokumen		0	1	0	2	0				Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	850.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01.0005	Sub Kegiatan : Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	Dokumen		0	1	0	0	0	150.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.01.0006	Sub Kegiatan : Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	Dokumen		0	1	0	1	0	1.300.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	2	0	2.250.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	0	0				Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	1	0				Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
		Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	Dokumen		3	3	3	21	3				Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0002	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	2	0	650.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0007	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	1	0	350.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0008	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	Dokumen		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
2.11.02.1.02.0009	Sub Kegiatan : Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota (Dokumen)	Dokumen		3	3	3	21	3	1.250.000.000			Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
TARGET SDGs : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.													
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.												
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	Ha		136.745,83	148.624,39	159.104,89	159.104,89	159.104,89	1.676.163.003			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Garam (Ton)	Ton		326	400	521	700	750				Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	Ha		136.745,83	148.624,39	159.104,89	159.104,89	159.104,89				Dinas Kelautan dan Perikanan
		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		1	1	1	1	1				Dinas Kelautan dan Perikanan

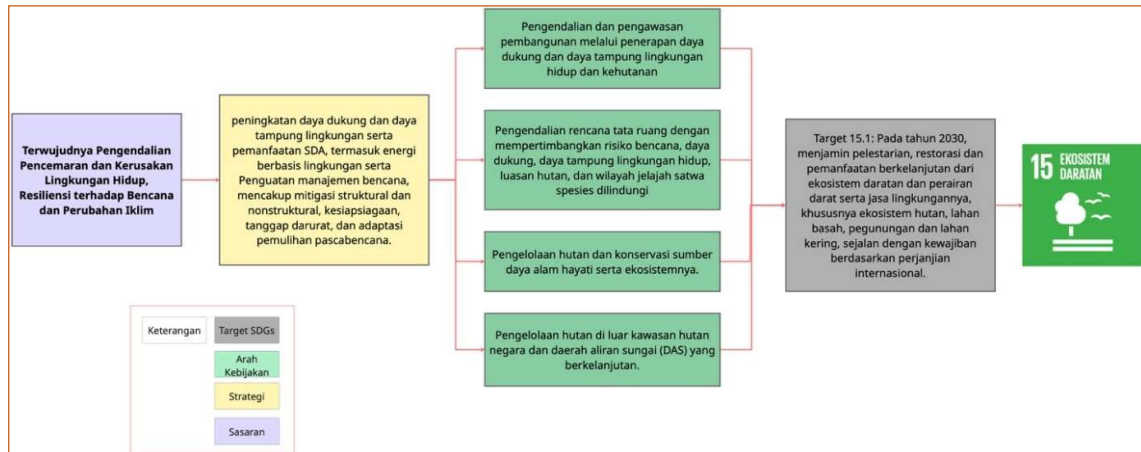
		Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1.091.015.753			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1				Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0002	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	Ha	136.745,83	148.624,39	159.104,89	159.104,89	159.104,89	679.333.503			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0003	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	Ha	1	1	1	1	1	107.753.125			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0005	Sub Kegiatan : Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	131.524.125			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.0013	Sub Kegiatan : Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	172.405.000			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	585.147.250			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	Kelompok	6	6	6	6	6				Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kelompok	6	6	6	6	6				Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	10	30	40	50	60				Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03.0001	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Orang	10	30	40	50	60	215.506.250			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03.0002	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	Kelompok	6	6	6	6	6	107.753.125			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03.0004	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Kelompok	6	6	6	6	6	107.753.125			Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03.0007	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	Unit	1	1	1	1	1	154.134.750			Dinas Kelautan dan Perikanan



A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 15

Gambar 3.15

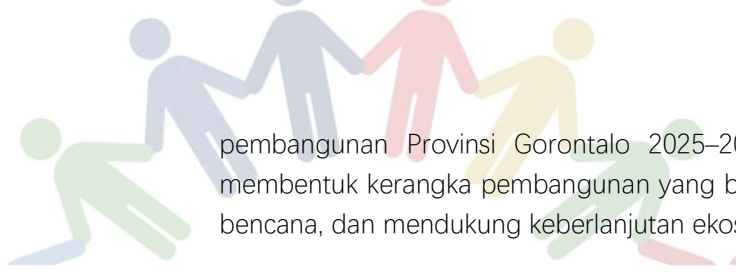
Keterkaitan Tujuan 13 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



Keterkaitan antara SDGs Tujuan 15 *Ekosistem Daratan* dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 tercermin dalam sasaran daerah untuk mewujudkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Target SDGs 15.1 yang menekankan pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, khususnya hutan dan keanekaragaman hayati, diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sasaran ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan dan fondasi pembangunan jangka menengah.

Arah kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui strategi pembangunan yang berfokus pada peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta penguatan manajemen bencana yang mencakup mitigasi struktural dan non struktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Strategi ini diwujudkan melalui pengendalian dan pengawasan pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, luasan kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), serta wilayah jelajah satwa dan spesies dilindungi. Pendekatan ini memastikan bahwa aktivitas pembangunan tidak melampaui kapasitas lingkungan dan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian ekologis.

Keterkaitan dengan target SDGs 15.1 diperkuat melalui sasaran dan program pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk pengelolaan DAS secara berkelanjutan. Sasaran ini diarahkan untuk menjaga keutuhan bentang alam, menekan laju degradasi dan deforestasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi SDGs ke dalam arah kebijakan, strategi, dan sasaran



pembangunan Provinsi Gorontalo 2025–2029 dalam dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs membentuk kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan terhadap risiko bencana, dan mendukung keberlanjutan ekosistem daratan bagi generasi kini dan mendatang.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

Page | III - 38

Arah kebijakan dan strategi Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan difokuskan untuk Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini yaitu :

1. Strategi untuk pencapaian sasaran ini, yakni peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan serta Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:
 - a. Pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi
 - b. Pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya
 - c. Pengelolaan hutan di luar kawasan hutan negara dan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan.
 - d. Pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kehutanan.

TUJUAN 15 :	Ekosistem Daratan												
Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.													
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan												
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	Ha							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Orang		10	10	10	10	10	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Unit							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	%		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				1.120.000.000	1.520.000.000	420.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	5.100.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	Unit		60	60	60	60	60	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH (Dokumen)	Dokumen		1	2	0	0	0	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan (Dokumen)	Dokumen		26	26	26	26	26	3.150.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah laporan nilai PNPB dari pemanfaatan hutan di KPHL/P (Laporan)	Laporan		9	9	9	9	9				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	Dokumen		8	8	8	8	8				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		0	2	2	2	2				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	7.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	3.200.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	1.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	Dokumen		8	8	8	8	8	2.250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNPB dari pemanfaatan hutan di KPHL/P (Laporan)	Laporan		9	9	9	9	9	1.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	1.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	93.532.500.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dam Penahan yang terbangun (Unit)	Unit		22	23	21	21	21			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Gully Plug yang Terbangun (Unit)	Unit									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan		0	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Sumur Resapan yang terbangun (Unit)	Unit		5	5	5	5	5			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	Ha		175	175	175	175	175			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		31	31	31	31	31			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	Ha		0	30	30	30	30			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		25	25	25	25	25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	63.750.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		25	25	25	25	25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	Ha		0	30	30	30	30	7.800.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan		0	6	6	6	6	1.200.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		31	31	31	31	31	1.937.500.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun (Unit)	Unit		5	5	5	5	5	387.500.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	Ha		175	175	175	175	175	8.750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun (Unit)	Unit		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun (Unit)	Unit		22	23	21	21	21	7.020.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	32.342.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	v	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	Unit Managemen		2	2	2	2	2	2.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen)	Unit Managemen		10	10	10	10	10				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Unit Managemen)	Unit Managemen		0	0	0	0	0				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen)	Unit Managemen		10	10	10	10	10	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Unit Managemen)	Unit Managemen		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	Unit Managemen		2	2	2	2	2	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	2.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Administratif (Unit Managemen)	Unit Managemen		3	3	3	3	3				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Administratif (Unit Managemen)	Unit Managemen		3	3	3	3	3	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	%		20	20	20	20	20				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05.1.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	Kelompok		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)												
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju												
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	%		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				1.120.000.000	1.520.000.000	420.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	5.100.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara (Unit)	Unit		60	60	60	60	60	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH (Dokumen)	Dokumen		1	2	0	0	0	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.01.0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan (Dokumen)	Dokumen		26	26	26	26	26	3.150.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah laporan nilai PNB dari pemanfaatan hutan di KPHL/P (Laporan)	Laporan		9	9	9	9	9				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	Dokumen		8	8	8	8	8			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		0	2	2	2	2			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	7.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	3.200.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	1.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Dokumen)	Dokumen		8	8	8	8	8	2.250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNPB dari pemanfaatan hutan di KPHL/P (Laporan)	Laporan		9	9	9	9	9	1.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	1.500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	93.532.500.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dam Penahan yang terbangun (Unit)	Unit		22	23	21	21	21			Dinas Lingkungan
		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Gully Plug yang Terbangun (Unit)	Unit									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan		0	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Sumur Resapan yang terbangun (Unit)	Unit		5	5	5	5	5			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	Ha		175	175	175	175	175			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		31	31	31	31	31			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	Ha		0	30	30	30	30			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		25	25	25	25	25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	63.750.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		25	25	25	25	25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	Ha		0	30	30	30	30	7.800.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan		0	6	6	6	6	1.200.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		31	31	31	31	31	1.937.500.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun (Unit)	Unit		5	5	5	5	5	387.500.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	Ha		175	175	175	175	175	8.750.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun (Unit)	Unit		0	0	0	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun (Unit)	Unit		22	23	21	21	21	7.020.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	32.342.419.500		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		2	2	2	2	2	2.250.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		10	10	10	10	10			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah beroperasi (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		0	0	0	0	0	2.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		27	27	27	27	27				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBPHH (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		10	10	10	10	10	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah beroperasi (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		2	2	2	2	2	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	2.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan lanjutnya berupa peneanaan Sanksi Administratif (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		3	3	3	3	3				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		27	27	27	27	27				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan lanjutnya berupa peneanaan Sanksi Administratif (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		3	3	3	3	3	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Manajemen)	Unit Manajemen		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan													
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	%		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	93.532.500.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Dam Penahan yang terbangun (Unit)	Unit		22	23	21	21	21				Dinas Lingkungan
		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Gully Plug yang Terbangun (Unit)	Unit										Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan		0	6	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Sumur Resapan yang terbangun (Unit)	Unit		5	5	5	5	5				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara (Ha)	Ha		175	175	175	175	175				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		31	31	31	31	31				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	Ha		0	30	30	30	30			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		25	25	25	25	25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	63.750.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)	Ha		25	25	25	25	25			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	Ha		0	30	30	30	30	7.800.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Laporan)	Laporan		0	6	6	6	6	1.200.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)	Ha		31	31	31	31	31	1.937.500.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	%		20	20	20	20	20			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05.1.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Kelompok)	Kelompok		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase DAS yang dikelola (%)	%		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06.1.01.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	125.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06.1.01.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Orang)	Orang		30	30	30	30	30	125.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi												
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	Ha							0		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Orang		10	10	10	10	10	0		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Unit							0		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	v	6	6	6	32.342.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.5.1* Indeks Daftar Merah (Red-list index)													
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.6.1* Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata													
3.28.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	Unit Managemen		2	2	2	2	2	2.250.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen)	Unit Managemen		10	10	10	10	10				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Unit Managemen)	Unit Managemen		0	0	0	0	0				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH (Unit Managemen)	Unit Managemen		10	10	10	10	10	750.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi (Unit Managemen)	Unit Managemen		0	0	0	0	0	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani (Unit Managemen)	Unit Managemen		2	2	2	2	2	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.06.0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Adminsitratif (Unit Managemen)	Unit Managemen		3	3	3	3	3	2.500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Adminsitratif (Unit Managemen)	Unit Managemen		3	3	3	3	3	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Unit Managemen)	Unit Managemen		27	27	27	27	27	1.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)													
15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)													
3.28.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	32.342.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	v	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis													
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	Ha							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Orang		10	10	10	10	10	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Unit							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.28.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	32.342.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	v	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan													
3.28.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	32.342.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	v	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.04.1.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	Ha							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Orang		10	10	10	10	10	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Unit							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.b.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan													
3.28.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	32.342.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	v	6	6	6				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Dokumen)	Dokumen		12	12	12	12	12	600.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	Laporan		12	12	12	12	12	6.000.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Operasi)	Operasi		6	6	6	6	6	300.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Ha)	Ha		151.856	151.856	151.856	151.856	151.856	22.778.419.500			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL) (Operasi)	Operasi		144	144	144	144	144	2.664.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	Ha							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Orang		10	10	10	10	10	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Unit							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)													
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	%		10	10	10	10	10	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	500.000.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	Ha							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.04.1.01.06.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	Orang		10	10	10	10	10	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.1.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	Unit							0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya													
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												Badan Keuangan
5.02.04.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.814.281.100	1.991.047.000	1.991.047.000	1.991.047.000	1.991.047.000	9.778.469.100			Badan Keuangan
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)	Sarana dan Prasarana		1	1	1	1	1	5.964.055.000			Badan Keuangan
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	%		27	27	27	27	27	3.064.347.000			Badan Keuangan
5.02.04.1.02.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				0	0	0	0	0	0			Badan Keuangan
5.02.04.1.02.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Laporan		0	0	0	0	0	0			Badan Keuangan



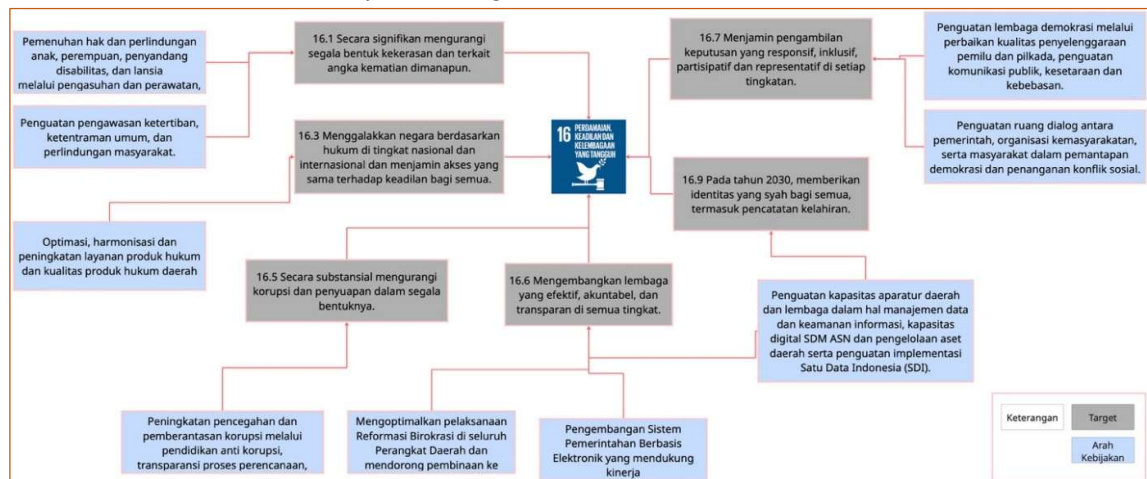
Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Page | III - 39

A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 16

Gambar 3.16

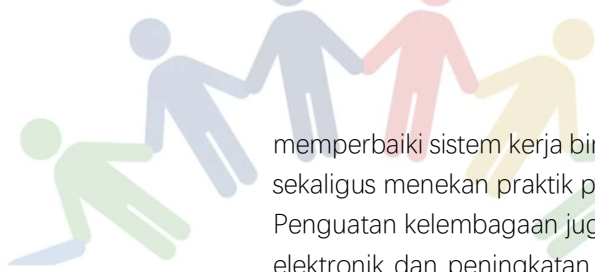
Keterkaitan Tujuan 2 dengan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo



Pada periode 2025–2029, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan perdamaian sosial, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sebagai prasyarat utama pembangunan daerah. Fokus diarahkan pada pemenuhan hak dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, melalui pengasuhan, perawatan, serta penguatan sistem perlindungan sosial dan hukum. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan berbagai bentuk kekerasan, meningkatkan rasa aman di ruang publik, serta memperkuat ketertiban dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya membangun kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan negara hukum dan perluasan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi, harmonisasi, dan peningkatan kualitas layanan produk hukum daerah, baik dari sisi substansi regulasi maupun kemudahan akses layanan. Pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum diperkuat agar penegakan aturan berjalan konsisten dan berorientasi pada perlindungan warga. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum serta mendorong penyelesaian persoalan sosial secara adil dan bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah provinsi menempatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas. Strategi yang ditempuh mencakup penguatan pendidikan antikorupsi, peningkatan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah. Langkah-langkah ini diarahkan untuk



memperbaiki sistem kerja birokrasi agar lebih sederhana, responsif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus menekan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam berbagai bentuknya. Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Perhatian diberikan pada manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kompetensi digital sumber daya manusia aparatur, serta pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan transparan. Upaya ini diperkuat dengan implementasi Satu Data Indonesia dan peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi, termasuk pemilu dan pilkada, komunikasi publik, serta ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk pengambilan keputusan yang lebih responsif, partisipatif, dan representatif, sehingga institusi pemerintahan semakin dipercaya dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

Pencapaian Tujuan 16 SDGs Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan dengan dua strategi yaitu

1. Penguatan koordinasi dan komitmen kerjasama serta gotong royong melalui kearifan lokal seperti "Mohuyula" dalam menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban daerah,
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan APIP serta peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

- Peningkatan Koordinasi dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi, cegah dini pada masyarakat untuk menjamin stabilitas politik
- Penguatan pengawasan ketertiban, ketenteraman umum, dan perlindungan masyarakat.
- Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.
- Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperkuat nilai-nilai lokal,
- Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan inklusivitas serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila
- Penguatan ruang dialog antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik sosial.
- Mendorong peningkatan pengawasan keamanan di wilayah laut dengan pemanfaatan teknologi.
- Optimalisasi pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.
- Optimasi, harmonisasi dan peningkatan layanan produk hukum dan kualitas produk hukum daerah.
- Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan Pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah serta pengawasan pembangunan daerah.
- Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah serta penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI).
- Penguatan kelembagaan dan pengembangan kompetensi SDM.
- Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung kinerja kualitas pelayanan publik.



- Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
- Peningkatan kualitas dan manajemen ASN berbasis sistem merit.
- Peningkatan kepatuhan penyelenggaraan manajemen kearsipan
- Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah dan mendorong pembinaan ke pemerintah kabupaten dan kota. melalui Penerapan model pendekatan koersif atau model normatif - reedukatif
- Penguatan kajian kebijakan, riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah.
- Peningkatan kualitas pengendalian ekonomi dan pembangunan
- Penguatan kerja sama pembangunan nasional dan internasional.

Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya													
01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	persen	100	100	100	100	100	100				
1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	166,408,000.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	178,598,400.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	Laporan	100	100	100	100	100	100	148,832,000.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	Laporan	100	100	100	100	100	100	1,159,969,000.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	Orang	50	50	50	50	50	50	343,611,000.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	Unit	1						150,000,000.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	407,290,400.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	213,678,500.00	APBD	GORONTALO	SATPOL PP DAN LINMAS
16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)													
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B													
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B													

[illegible]

6.01.02.1.02.02.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan		17	17	17	17	17	3,056,374,124.00	APBD	GORONTALO	INSPEKTORAT
40102	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB > Baik (%)	persen	88	88,5	89,2	90,01	92,2	93,01			GORONTALO	BIRO ORGANISASI
		Persentase PD dengan tingkat nilai AKIP sangat baik (nilai >70-80) (%)	persen	71	72,74	74,62	76,52	80,01	82,25				
		Persentase PD menerapkan Aspek Pelayanan Publik dengan Predikat Baik (%)	persen	17,24	24,14	34,48	51,72	68,97	86,21				
40102102	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja												
401021020001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	Dokumen	29	29	29	29	29	29	1,220,920,979.00	APBD	GORONTALO	BIRO ORGANISASI
401021020002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	Dokumen	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda 1 Dokumen LKIP Pemda 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda 1 Dokumen LKIP Pemda 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda 1 Dokumen LKIP Pemda 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda 1 Dokumen LKIP Pemda 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda 1 Dokumen LKIP Pemda 29 Dokumen SAKIP OPD)	32 Dok (1 Dokumen PK Pemda 1 Dokumen LKIP Pemda 29 Dokumen SAKIP OPD)	1,296,721,028.00	APBD	GORONTALO	BIRO ORGANISASI
401021020003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	Laporan	2	2	2	2	2	2	598,012,964.00	APBD	GORONTALO	BIRO ORGANISASI
401021020004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	Dokumen	3	3	3	3	3	3	1,117,567,517.00	APBD	GORONTALO	BIRO ORGANISASI
401021020005 -	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	Dokumen	6	6	6	6	6	6	1,412,332,126.00	APBD	GORONTALO	BIRO ORGANISASI
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B													
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	Nilai	3,15	3,17	3,19	3,21	3,25	3,5				
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												
6.01.03.1.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	2,738,572,520.00	APBD	GORONTALO	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi												
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	15	15	15	15	15	15	2,344,652,763.00	APBD	GORONTALO	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	33	33	33	33	33	33	2,377,340,517.00	APBD	GORONTALO	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	33	33	33	33	33	33	2,708,346,623.00	APBD	GORONTALO	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	33	33	33	33	33	33	2,648,644,503.00	APBD	GORONTALO	INSPEKTORAT
8.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi	persen	100	100	100	100	100	100		APBD	GORONTALO	KESBANGPOL
8.01.05.1.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												
8.01.05.1.01.05. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.1.01.05. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	1,750,761,581.00	APBD	GORONTALO	KESBANGPOL

8.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik yang Terdeteksi (%)	persen	100	100	100	100	100	100				
8.01.06.1.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
8.01.06.1.01.05. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.1.01.05. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	5	5	5	5	5	5	5,410,362,855.00	APBD	GORONTALO	KESBANGPOL
16.6.1(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B													
05.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	persen	68,24	69,24	70,24	71,24	72,24	73,24				
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen										
5.03.02.1.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		1	1	1	1	1	993,124,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.01.03.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan		1	1	1	1	1	2,147,567,500.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan		1	1	1	1	1	393,457,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen		1	1	1	1	1	1,378,087,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		1	1	1	1	1	772,435,400.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan		5400	5400	5400	5400	5400	576,222,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN												
5.03.02.1.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen		5	5	5	5	5	1,038,495,400.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		7	7	7	7	7	582,521,300.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		2	2	2	2	2	1,219,111,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.03.	Pengembangan Kompetensi ASN												
5.03.02.1.03.02.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		1	1	1	1	1	2,904,960,800.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		17	18	36	19	19	1,311,214,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.03.09.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen		1	1	1	1	1	404,481,000.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang		200	200	200	200	200	501,229,200.00	APBD	GORONTALO	BADAN KEPEGAWAIA N

05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	persen		87.5	87,5	88	88,5	89				
5.04.02.1.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis												
5.04.02.1.01.02.	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen			1	1	1	1	316,500,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.01.04.	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen			1	1	1	1	105,500,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												
5.04.02.1.02.01.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen			1	1	1	1	529,122,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.02.02.	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen			1	1	1	1	211,000,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.02.04.	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan		4	3	3	3	3	1,266,000,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.02.05.	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen		6	7	7	7	7	253,200,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.02.06.	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen		1	1	1	1	1	31,650,000,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
5.04.02.1.02.08.	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen		1	1	1	1	1	105,500,000.00	APBD	GORONTALO	BPSDM
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B													
16.7.2.(a)Indeks Lembaga Demokrasi.													
16.7.2.(b)Indeks Aspek Kebebasan													
16.7.2.(c)Indeks Kesetaraan													
08.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
8.01.02.1.01	. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
8.01.02.1.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	Orang	100	100	100	100	150	100	835,000,000.00	APBD	GORONTALO	KESBANGPOL

2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	persen	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6				
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
2.12.031.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi												
2120310200011	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	476,264,000.00	APBD	GORONTALO	BPMD-DUKCAPIL
212031020002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	Laporan										
21203103	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil												
212031030002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	200,000,000.00	APBD	GORONTALO	BPMD-DUKCAPIL
16.5.1(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)													
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan UKPBJ (Level)	Level	5-5	5-5	6-6.	7-7.	7-7.	7-7.				
4.01.07.1.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
4.01.07.1.01.01.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	2	2	2	2	2	687,698,384.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.01.02.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	4	4	4	4	4	1,038,343,500.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.01.03.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	12	12	12	12	322,898,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.02.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
4.01.07.1.02.03.	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	174,013,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
4.01.07.1.02.01.	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1	1	1	1	1	1	199,449,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.02.02.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	1	1	298,487,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.02.03.	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	1	1	172,370,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
4.01.07.1.03.01.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	30	30	30	30	30	30	717,937,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
4.01.07.1.03.02.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	224,613,000.00	APBD	GORONTALO	BIRO PENGADAAN
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
5.01.02.1.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												
5.01.02.1.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	berita acara			1	1	1	1	830,503,125.00			

5.01.02.1.01.06.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	2,233,939,649.00			
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
5.01.02.1.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	919,843,314.00			
5.01.02.1.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
5.01.02.1.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	Laporan		2	2	2	2	2	788,446,666.00			
5.01.02.1.03.02.	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	kerja sama			1	1	1	1	83,050,313.00			
5.01.02.1.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	Laporan		3	3	3	3	3	525,170,295.00			
5.01.02.1.03.04.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	Dokumen			1	1	1	1	207,625,781.00			
05.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	persen	100	100	100	100	100	100				
5.01.03.1.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
5.01.03.1.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	876,054,418.00			
5.01.03.1.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	207,625,781.00			
5.01.03.1.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	Laporan			3	3	3	3	207,625,781.00			
5.01.03.1.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	207,625,781.00			
5.01.03.1.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	207,625,781.00			
5.01.03.1.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Laporan		2	2	2	2	2	87605389300			
5.01.03.1.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Laporan		14	14	14	14	14	876,053,893.00			

5.01.03.1.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	20,762,578,000.00			
5.01.03.1.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)												
5.01.03.1.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Dokumen		2	2	2	2	2	712,074,840.00			
5.01.03.1.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	311,438,672.00			
5.01.03.1.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	207,625,781.00			
5.01.03.1.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	712,077,469.00			
5.01.03.1.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	712,082,725.00			
5.01.03.1.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	311,438,672.00			
5.01.03.1.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	207,625,781.00			
5.01.03.1.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	Laporan		1	1	1	1	1	491,924,015.00			
5.01.03.1.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Dokumen		3	3	3	3	3	1,374,511,526.00			
5.01.03.1.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	Laporan			2	2	2	2	207,625,781.00			
5.01.03.1.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	Laporan		7	7	7	7	7	372,718,387.00			
5.01.03.1.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	Laporan			1	1	1	1	207,625,781.00			
5.01.03.1.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Dokumen		1	1	1	1	1	875,985,561.00			

[illegible]

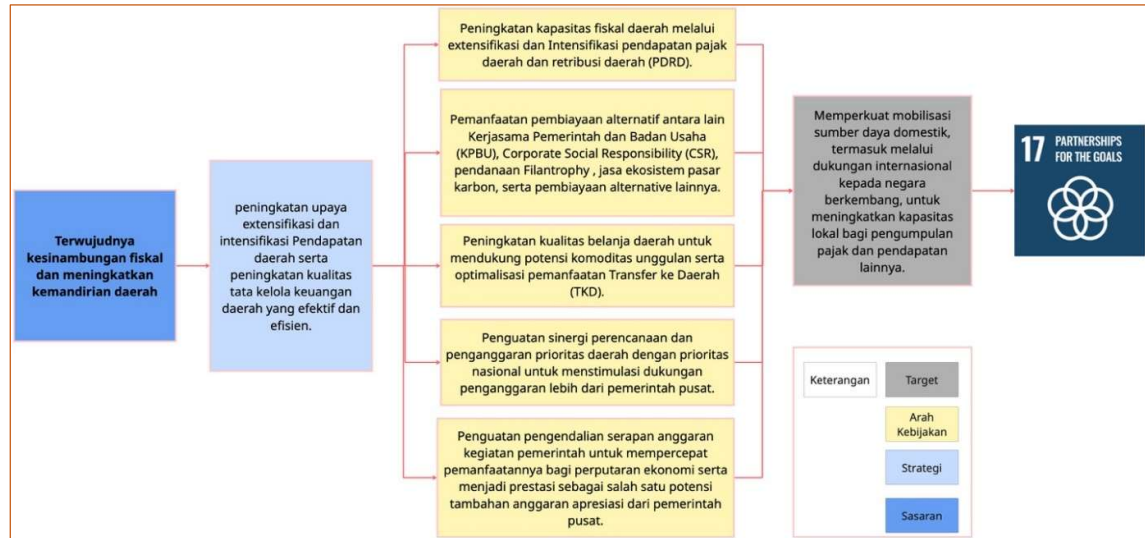
5.02.02.1.04.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1,420,602,332.00			
5.02.02.1.04.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,700,977,440.00			
5.02.02.1.04.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	93879017200			
5.02.02.1.05.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
5.02.02.1.05.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	Laporan	1	1	1	1	1	1	70,959,105,663.00			
5.02.02.1.05.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	Laporan	6	6	6	6	6	6	803,454,845,284.00			
5.02.02.1.06.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah												
5.02.02.1.06.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	2,396,836,342.00			
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi													
04.01.05.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Hukum Yang Difasilitasi (%)	persen	100	100	100	100	100	100				
4.01.05.1.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum												
4.01.05.1.02.01.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	Kasus	6	6	6	6	6	6	3,068,998,000.00			
4.01.05.1.02.02.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	Kasus	6	6	6	6	6	6	1,848,973,350.00			



Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Page | III - 42

A. TARGET DAN KETERKAITAN TUJUAN 16



Pada periode 2025–2029, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan kemitraan sebagai fondasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan difokuskan pada terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatnya kemandirian daerah melalui penguatan kapasitas fiskal yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini dipahami sebagai upaya memperluas ruang fiskal daerah agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan prioritas, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan konvensional. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Tujuan 17 SDGs yang menempatkan kolaborasi dan mobilisasi sumber daya sebagai kunci pencapaian target pembangunan.

Dalam kerangka strategi, pemerintah provinsi mendorong peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah yang dibarengi dengan perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien. Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih fokus pada penguatan potensi komoditas unggulan, serta pemanfaatan transfer ke daerah secara lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperluas untuk membuka peluang dukungan pendanaan yang lebih besar bagi program prioritas daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mendorong pemanfaatan pembiayaan alternatif sebagai bagian dari strategi kemitraan pembangunan. Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pendanaan filantropi, jasa ekosistem, serta peluang pasar karbon mulai difasilitasi sebagai sumber pembiayaan pelengkap. Upaya ini dilakukan dengan membangun kerangka regulasi yang jelas, meningkatkan kapasitas perangkat daerah, serta menciptakan iklim kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dan komunitas lokal.

Dalam mendukung efektivitas kolaborasi tersebut, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo bersama perangkat daerah dan dengan dukungan mitra Pembangunan antara lain GIZ melalui program



SDGs SSTC, Program SKALA oleh Pemerintah Australia melalui DFAT berperan sebagai penghubung dan fasilitator kemitraan berbagai pihak yang ada di daerah. Melalui pendekatan ini, inisiatif pembangunan dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan diselaraskan dengan prioritas RPJMD dan target SDGs. Pendekatan ini memungkinkan pertemuan kepentingan, berbagi sumber daya, serta penguatan peran masing-masing pihak dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, pencapaian Tujuan 17 SDGs tidak hanya dipahami sebagai agenda global, tetapi juga menjadi praktik nyata pembangunan kolaboratif yang memperkuat ketahanan fiskal dan keberlanjutan pembangunan Provinsi Gorontalo.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2025-2030

Sasaran terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien. Kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui ekstensifikasi dan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
2. Pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), pendanaan Filantrophy, jasa ekosistem pasar karbon, serta pembiayaan alternative lainnya.
3. Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan serta optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).
4. Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional untuk menstimulasi dukungan penganggaran lebih dari pemerintah pusat.
5. Penguatan pengendalian serapan anggaran kegiatan pemerintah untuk mempercepat pemanfaatannya bagi perputaran ekonomi serta menjadi prestasi sebagai salah satu potensi tambahan anggaran apresiasi dari pemerintah pusat.
6. Penguatan potensi PAD melalui optimalisasi sumber- sumber pendapatan baru, baik Labkesda, Insenerator serta beberapa fasilitas potensi PAD lainnya
7. Pengendalian Inflasi dengan melakukan sinergi antara pusat dan daerah serta koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat

TUJUAN 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator / Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator	Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TARGET SDGs : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.													
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.												
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.												
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.												
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2.140.162.000	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Laporan	1	0	0	0	0	0	-	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Laporan							-	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Sarana dan Prasarana)		1	1	1	1	1	1	5.964.055.000	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Laporan	7	7	7	7	7	7	924.185.000	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Laporan							-	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen Ketetapan)	Dokumen	500000	550000	570000	590000	610000	650000	2.165.397.948	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti (Laporan)	Laporan								APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)	Dokumen								APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak (Dokumen SSPD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	484.956.000	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan)	Dokumen								APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Laporan)	Laporan							-	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Laporan	2	2	2	2	2	2	750.067.100	APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan								APBD		Badan Keuangan Provinsi Gorontalo



BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

Hiu Paus Botubarani, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango
credit : campatour.com



BAB IV

KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG.

4.1 Partisipasi Non State Actor (NSA).

Pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2025-2029 Provinsi Gorontalo menekankan prinsip no one left behind, sehingga kemitraan multi pihak (multi-stakeholder partnerships) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Sesuai Kepmen 69/M.PPN/HK/08/2024, posisi Non-State Actor (NSA) akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian indikator dan target SDGs melalui kontribusi program, sumber daya, inovasi, serta keahlian teknis. NSA yang dimaksud mencakup dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga filantropi, perguruan tinggi, media, serta mitra pembangunan internasional.

Partisipasi NSA dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs2025-2029 Provinsi Gorontalo bersifat terbuka dan kolaboratif. Setiap NSA diberikan keleluasaan untuk memilih tujuan (Goals) SDGs yang ingin didukung sesuai mandat organisasi, kapasitas, dan ruang lingkup kegiatan. Pemilihan Goals ini dilakukan untuk memastikan bahwa kontribusi NSA tetap relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target indikator. Pemerintah Provinsi Gorontalo bertugas memfasilitasi keterlibatan NSA secara terstruktur melalui koordinasi lintas sektor, penyediaan informasi kebutuhan pembangunan, serta penyelarasan rencana kerja NSA dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025-2029 Provinsi Gorontalo.

Dalam implementasinya, kontribusi NSA in dapat berbentuk :

a. Pendanaan program, penyediaan layanan dan inovasi teknologi.

Kontribusi NSA dalam bentuk pendanaan program, penyediaan layanan, dan inovasi teknologi merupakan dukungan strategis yang mampu memperkuat implementasi TPB/SDGs. Dunia usaha, lembaga filantropi, dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan sumber pembiayaan alternatif, layanan sosial, maupun solusi teknologi yang mempercepat pencapaian indikator pembangunan. Dukungan ini tidak hanya mengisi kesenjangan pendanaan pemerintah, tetapi juga menghadirkan pendekatan inovatif yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah.

b. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

NSA berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelompok rentan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar, berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha mendorong kemandirian komunitas, memperluas literasi sosial dan ekonomi, serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif sesuai prinsip no one left behind.

c. Pengembangan riset dan kajian.

Peran akademisi dan lembaga penelitian dalam pengembangan riset dan kajian mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui analisis data, kajian tematik, evaluasi program, serta identifikasi isu strategis, NSA membantu pemerintah daerah memahami akar permasalahan dan merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran. Riset juga memperkaya indikator, inovasi kebijakan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi, sehingga implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs ini menjadi lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan.

d. Dukungan kemitraan di tingkat lokal hingga internasional.



NSA berperan dalam membangun kemitraan yang memperkuat jejaring kolaboratif di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan global dapat membuka akses terhadap sumber daya, teknologi, pengalaman, dan peluang kerja sama lintas negara. Kemitraan ini mendorong pertukaran pengetahuan, standarisasi praktik baik, serta mobilisasi dukungan teknis yang mempercepat pencapaian target SDGs. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator agar kemitraan tersebut tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Page IIV- 2

Seluruh kontribusi tersebut didorong untuk bersifat inklusif, terukur, serta selaras dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Untuk menjamin akuntabilitas, NSA juga didorong untuk menyampaikan pelaporan capaian melalui mekanisme yang difasilitasi pemerintah daerah, sehingga kontribusi multi pihak dapat terintegrasi ke dalam laporan pemantauan dan evaluasi daerah serta laporan nasional SDGs.

Melalui penguatan partisipasi NSA sebagaimana diatur dalam pedoman teknis Kepmen 69/2024, pemerintah daerah dapat memperluas sumber daya pembangunan, mempercepat pencapaian target SDGs, serta menciptakan ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan mitra internasional.

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025-2029 Provinsi Gorontalo merupakan bagian penting dari pengendalian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Proses ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap tujuan, target, dan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana aksi terlaksana secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai arah kebijakan nasional maupun daerah. Berpedoman pada Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TPB/SDGs (KEP.69/M.PPN/HK/08/2024), mekanisme monev dilakukan agar mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan implementasi program, mengidentifikasi hambatan, serta menyediakan dasar bagi penyempurnaan kebijakan.

A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara berkala oleh perangkat daerah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana aksi. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis perkembangan indikator, dan identifikasi potensi hambatan. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi tindakan korektif sehingga pelaksanaan rencana aksi tetap berada dalam jalur pencapaian. Secara operasional, pemantauan meliputi:

- 1) Pengumpulan data pelaksanaan program termasuk progres kegiatan, penggunaan anggaran dan capaian output.

Pengumpulan data pelaksanaan program merupakan tahap awal dalam pemantauan rencana aksi TPB/SDGs yang bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai perkembangan implementasi kegiatan di lapangan. Pada tahap ini, perangkat daerah mengumpulkan informasi terkait progres pelaksanaan kegiatan, tingkat realisasi fisik, serta ketercapaian output yang telah direncanakan. Selain itu, data penggunaan anggaran juga dicatat untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya telah dimanfaatkan secara tepat dan proporsional terhadap kebutuhan program. Melalui proses pengumpulan data yang sistematis ini, pemerintah daerah dapat memantau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana aksi dan mengidentifikasi setiap indikasi deviasi

- 2) Validasi capaian indikator berdasarkan instrumen dan meta data yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Validasi capaian indikator dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi pelaksanaan rencana aksi TPB/SDGs sesuai standar yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengecekan kesesuaian data dengan instrumen pengukuran,



definisi operasional, serta meta data indikator yang tercantum dalam rencana aksi, sehingga setiap nilai capaian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

- 3) Identifikasi kendala dan risiko, baik pada aspek teknis, kelembagaan, maupun pendanaan. Identifikasi kendala dan risiko dilakukan untuk memahami berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian target rencana aksi TPB/SDGs, baik yang muncul selama proses pelaksanaan maupun yang berpotensi terjadi di tahap berikutnya. Melalui identifikasi yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat memahami akar permasalahan secara lebih jelas dan menyiapkan langkah antisipatif maupun korektif yang tepat.
- 4) Rekomendasi tindakan korektif yang dapat langsung diimplementasikan. Rekomendasi tindakan korektif disusun sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan dan identifikasi kendala agar pelaksanaan rencana aksi TPB/SDGs tetap berada pada jalur pencapaian target. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah perbaikan yang dapat segera diimplementasikan oleh perangkat daerah, seperti penyesuaian proses kerja, percepatan kegiatan, penguatan koordinasi, atau optimalisasi penggunaan anggaran.

Page IIV- 3

Evaluasi bersifat periodik dan memberikan penilaian yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan Renaksi. Evaluasi menilai apakah output kegiatan telah menghasilkan outcome yang diharapkan dan apakah faktor pendukung maupun penghambat telah ditangani dengan tepat.

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Menilai ketercapaian tujuan dan target rencana aksi, baik capaian tahunan maupun capaian kumulatif.
2. Menganalisis hubungan logis antara input–output–outcome, untuk melihat efektivitas strategi intervensi.
3. Mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi capaian.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan dan perbaikan desain program untuk siklus perencanaan berikutnya.

Dari sisi kelembagaan, mekanisme pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam 3 tingkatan, yakni:

- 1) Tingkat perangkat Daerah : Perangkat daerah bertanggung jawab melakukan pengumpulan data, verifikasi awal, dan penyusunan laporan capaian rencana aksi sesuai kewenangan.
- 2) Tingkat Pemerintah Daerah: konsolidasi lintas sektor, analisis capaian Renaksi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan daerah.
- 3) Tingkat Nasional (Bappenas): integrasi laporan daerah sebagai dasar penyusunan laporan Nasional.

A. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian integral dari pengendalian Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025–2029 Provinsi Gorontalo dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis tahun 2024 (KEP.69/M.PPN/HK/08/2024). Setiap perangkat daerah diharapkan menyampaikan laporan capaian indikator yang menjadi kewenangannya secara berkala.

Secara operasional, mekanisme pelaporan mencakup:

1. Penyusunan laporan perangkat daerah, yang berisi capaian indikator, progres kegiatan, kendala, dan rencana tindak lanjut.
2. Konsolidasi laporan oleh Sekretariat TPB/SDGs daerah, untuk memastikan konsistensi data dan kesesuaian dengan meta data yang menjadi rujukan.
3. Analisis gap capaian, antara target tahunan dan realisasi indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan.



4. Input laporan ke dalam sistem pelaporan nasional Bappenas, sebagai bagian dari pelaporan nasional dan global SDGs.
5. Pemanfaatan laporan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, baik dalam penyusunan RKPD, RPJMD maupun pembaruan rencana aksi.

Dengan struktur pelaporan tersebut, informasi capaian tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy).

Page IIV- 4

B. Waktu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya penjadwalan monev dilakukan secara berjenjang. Pengaturan waktu tersebut meliputi:

1. Konsolidasi Semester : menghasilkan potret lintas sektor serta mengidentifikasi isu strategis oleh pemerintah daerah.
2. Evaluasi Tahunan: menilai efektivitas pelaksanaan rencana aksi selama satu tahun anggaran.
3. Evaluasi Akhir Periode : menilai keberhasilan pelaksanaan dalam satu periode kebijakan.

Seluruh jadwal tersebut agar sinkron dengan siklus perencanaan dan penganggaran, sehingga hasil monitoring–evaluasi dapat langsung digunakan untuk memperbaiki perencanaan pada tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Gorontalo Karnaval Karawo 2025

Credit : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai dokumen strategis yang menjembatani komitmen global, kebijakan nasional, dan kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen ini menegaskan bahwa pencapaian SDGs di tingkat daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

RAD TPB/SDGs ini menjadi acuan operasional bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi pembangunan daerah agar selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Integrasi RAD SDGs dengan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat memastikan konsistensi arah kebijakan, keterpaduan program lintas sektor, serta kejelasan kontribusi setiap perangkat daerah dan aktor pembangunan terhadap pencapaian target SDGs.

Pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo 2025 – 2029S menuntut penguatan tata kelola pembangunan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis data. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks mulai dari kemiskinan, ketimpangan wilayah, kerentanan sosial, hingga perubahan iklim memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi SDGs di daerah.

Prinsip inklusivitas menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan RAD TPB/SDGs ini. Pembangunan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses yang setara terhadap layanan dasar, kesempatan ekonomi, serta ruang partisipasi dalam proses pembangunan. Dengan menempatkan prinsip *no one left behind* sebagai pijakan, pembangunan di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak yang bermakna dan berkeadilan.

Ke depan, RAD TPB/SDGs Provinsi Gorontalo 2025–2029 diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan berbasis bukti, peningkatan kualitas data dan sistem pemantauan, serta evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan kebijakan. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pembangunan juga menjadi kunci agar dokumen ini tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Akhirnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo optimis bahwa dengan komitmen yang kuat, tata kelola yang baik, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan RAD TPB/SDGs ini akan berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan Provinsi Gorontalo demi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

GUBERNUR GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

GUSNAR ISMAIL